



**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA TERNATE  
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI  
BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA**

**Nomor : 12.A/LHP/XIX.TER/5/2024  
Tanggal : 27 Mei 2024**

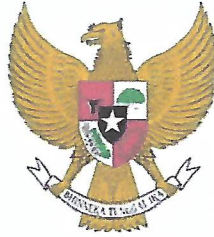
## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 .....</b>	<b>ii</b>
<b>LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b>	
<b>LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE TAHUN 2023</b>	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	
3. NERACA	
4. LAPORAN OPERASIONAL	
5. LAPORAN ARUS KAS	
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I    PENDAHULUAN	
BAB II   EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	
BAB III  IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
BAB IV  KEBIJAKAN AKUNTANSI	
BAB V   PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
BAB VI  INFORMASI NONKEUANGAN	
BAB VII  PENUTUP	
LAMPIRAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA TERNATE  
TAHUN 2023**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
  - a. Hasil Pemeriksaan yang memuat opini BPK;
  - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
  - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah dilengkapi dengan tanggal dan tempat; dan
  - d. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2023. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Buku I) wajib ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk seluruh komponen Laporan Keuangan tanpa tanggal dan tempat
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
  - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kota Ternate bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Ternate. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas

ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Ternate, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

### Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Ternate tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 12.B/LHP/XIX.TER/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Ternate, 27 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Maluku Utara  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



*Sh* **Marinus Sirumapea, S.E., M. Si., Ak., CA., CSFA**  
Register Negara Akuntan Nomor 4786

## GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

### 1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

### 2. Standar Pemeriksaan

Dalam rangka pencapaian tujuan pemeriksaan, pemeriksaan LK PD dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017. Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 100 mengenai Standar Umum pada Paragraf 32 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan keuangan, SPKN memberlakukan standar audit yang dimuat dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik, sepanjang tidak diatur lain dalam SPKN.

### 3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK dilakukan dengan tujuan untuk memberikan Opini atas kewajaran LKPD, dengan mempertimbangkan:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern pada kriteria:

### 4. Entitas yang Diperiksa

Entitas yang diperiksa adalah Pemerintah Kota Ternate.

### 5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).Neraca per 31 Desember 2023;

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;

- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## 6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2023 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

## 7. Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari kerja untuk pemeriksaan pendahuluan mulai 22 Januari s.d. 24 Februari 2024 sesuai Surat Tugas Nomor 9/ST/XIX.TER/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan selama 35 hari kerja untuk pemeriksaan terinci mulai 01 April s.d. 18 Mei 2023 sesuai Surat Tugas Nomor 70/ST/XIX.TER/3/2024 tanggal 28 Maret 2024.

## 8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**





## WALIKOTA TERNATE

---

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate, yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (c) Neraca, (d) Laporan Operasional (e) Laporan Arus Kas, (f) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ternate, 27 Mei 2024

Walikota Ternate



**DR. M. TAUHID SOLEMAN, M.Si**



**PEMERINTAH KOTA TERNATE  
NERACA**

PER 31 DESEMBER 2023 DAN TAHUN 2022

Dalam Rupiah

Uraian	Reff	Jumlah	
		Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
<b>ASET</b>	<b>VI.3.1</b>		
<b>ASET LANCAR</b>	<b>VI.3.1.1</b>		
Kas di Kas Daerah	VI.3.1.1.1.1	Rp 282.755.275,52	Rp 10.581.770.246,96
Kas di Bendahara Pengeluaran	VI.3.1.1.1.2	Rp 181.743.664,20	Rp 53.840.164,00
Kas di Bendahara Penerimaan	VI.3.1.1.1.3	Rp 13.403.125,35	Rp 16.082.800,00
Kas di BLUD	VI.3.1.1.1.4	Rp 222.066.112,43	Rp 106.356.475,56
Kas di FKTP	VI.3.1.1.1.5	Rp 259.104,80	Rp -
Kas Bendahara Bos	VI.3.1.1.1.6	Rp 5.530.101,00	Rp 5.684.010,00
Kas Lainnya	VI.3.1.1.1.7	Rp 574.086.772,00	Rp 129.128.135,00
Kas BOK Puskesmas	VI.3.1.1.1.8	Rp 1.810.473.069,00	Rp -
Setara Kas	VI.3.1.1.1.9	Rp -	Rp 30.000.000.000,00
<b>Total Kas</b>		Rp 3.090.317.224,30	Rp 40.892.861.831,52
Piutang Pajak	VI.3.1.1.2.1	Rp 36.187.717.617,00	Rp 26.556.630.949,00
Penyisihan Piutang	VI.3.1.1.2.1	Rp (20.532.707.214,30)	Rp (14.376.984.242,30)
Piutang Pajak Netto		Rp 15.655.010.402,70	Rp 12.179.646.706,70
Piutang Retribusi	VI.3.1.1.2.2	Rp 5.968.516.125,00	Rp 5.273.074.875,00
Penyisihan Piutang Retribusi	VI.3.1.1.2.2	Rp (2.522.788.685,30)	Rp (4.183.861.216,00)
Piutang Retribusi Netto		Rp 3.445.727.439,70	Rp 1.089.213.659,00
Piutang Lain2 PAD	VI.3.1.1.2.3	Rp -	Rp -
Piutang Dana Bagi Hasil propinsi	VI.3.1.1.2.4	Rp 74.556.294.939,06	Rp 37.056.934.354,06
Penyisihan Piutang		Rp -	Rp -
Piutang Dana Bagi hasil propinsi netto		Rp 74.556.294.939,06	Rp 37.056.934.354,06
Bagian Lancar Tagihan Penjualan		Rp -	Rp -
Angsuran		Rp -	Rp -
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan		Rp -	Rp -
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		Rp -	Rp -
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	VI.3.1.1.2.5	Rp 2.793.948.674,22	Rp 1.275.571.310,44
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		Rp (644.200.204,67)	Rp (283.829.003,80)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		Rp 2.149.748.469,55	Rp 991.742.306,64
Beban dibayar dimuka	VI.3.1.1.3	Rp 106.589.041,09	Rp 319.659.566,47
Persediaan	VI.3.1.1.4	Rp 11.308.253.311,62	Rp 8.762.848.405,37
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>Rp 110.311.940.828,02</b>	<b>Rp 101.292.906.829,76</b>



## PEMERINTAH KOTA TERNATE NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN TAHUN 2022

Dalam Rupiah

Uraian	Reff	Jumlah	
		Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>VI.3.1.2</b>		
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	VI.3.1.2	Rp 57.578.134.849,74	Rp 60.358.640.232,40
Investasi Permanen Lainnya		Rp -	Rp -
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>Rp 57.578.134.849,74</b>	<b>Rp 60.358.640.232,40</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>Rp 57.578.134.849,74</b>	<b>Rp 60.358.640.232,40</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>VI.3.3</b>		
Tanah	VI.3.3.1	Rp 1.091.024.198.265,00	Rp 1.094.004.650.987,00
Peralatan dan Mesin	VI.3.3.2	Rp 356.813.521.409,75	Rp 324.772.051.532,75
Gedung dan Bangunan	VI.3.3.3	Rp 1.120.587.803.100,93	Rp 1.094.620.257.744,64
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	VI.3.3.4	Rp 1.425.984.117.125,05	Rp 1.163.757.487.271,62
Aset Tetap Lainnya	VI.3.3.5	Rp 59.139.628.035,47	Rp 54.050.692.645,87
Konstruksi dalam Pengerjaan	VI.3.3.6	Rp 23.763.108.163,39	Rp 201.036.665.349,17
Akumulasi Penyusutan	VI.3.3.7	Rp (1.515.142.556.147,00)	Rp (1.403.657.897.550,76)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>Rp 2.562.169.819.952,59</b>	<b>Rp 2.528.583.907.980,29</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		Rp -	Rp -
Dana Cadangan		Rp -	Rp -
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>VI.3.4</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran			
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		Rp -	Rp -
Tagihan Penjualan Angsuran Netto			
Tagihan Jangka Panjang / TP TGR	VI.3.4.1	Rp 1.491.788.290,00	Rp 1.491.788.290,00
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		Rp -	Rp -
Tuntutan Ganti Rugi Netto		Rp -	Rp -
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	VI.3.4.2	Rp 33.356.080.000,00	Rp 33.356.080.000,00
Aset Tak Berwujud	VI.3.4.3	Rp 5.007.729.970,00	Rp 4.386.004.070,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud		Rp (2.823.244.179,00)	Rp (2.455.516.462,00)
Aset Tak Berwujud Netto		Rp 2.184.485.791,00	Rp 1.930.487.608,00
Aset Lain-Lain	VI.3.4.4	Rp 28.521.728.726,42	Rp 35.579.332.649,92
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	VI.3.4.4	Rp 67.704.456.000,00	Rp -
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>Rp 133.258.538.807,42</b>	<b>Rp 72.357.688.547,92</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>Rp 2.863.318.434.437,77</b>	<b>Rp 2.762.593.143.590,37</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>VI.3.5</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>VI.3.5.1</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	VI.3.5.1.1	Rp 579.558.220,00	Rp 143.664.653,00
Utang Bunga		Rp -	Rp -
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		Rp -	Rp -
Pendapatan Diterima Dimuka	VI.3.5.1.2	Rp -	Rp -
Utang Belanja	VI.3.5.1.3	Rp 33.328.879.407,71	Rp 1.842.907.846,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	VI.3.5.1.4	Rp 33.058.627.757,28	Rp 4.092.008.818,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>Rp 66.967.065.384,99</b>	<b>Rp 6.078.581.317,00</b>



**PEMERINTAH KOTA TERNATE  
NERACA**

PER 31 DESEMBER 2023 DAN TAHUN 2022

Dalam Rupiah

Uraian	Reff	Jumlah	
		Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan			Rp -
Utang Dalam Negeri - Obligasi	Rp	-	Rp -
Premium (Diskonto) - Obligasi	Rp	-	Rp -
Utang Jangka Panjang Lainnya	Rp	-	Rp -
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>Rp 66.967.065.384,99</b>	<b>Rp 6.078.581.317,00</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	VI.3.6	<b>Rp 2.796.351.369.052,78</b>	<b>Rp 2.756.514.562.273,37</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA DAN KEWAJIBAN</b>	-	<b>Rp 2.863.318.434.437,77</b>	<b>Rp 2.762.593.143.590,37</b>

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



WALIKOTA TERNATE

Dr. M. TAUHID SOLEMAN, M.Si



**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN PENDAPATAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No. Urut	Uraian	Reff	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023 (Audited)	%	Realisasi 2022 (Audited)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>VI.1.1</b>	<b>1.100.703.916.712,00</b>	<b>959.021.302.220,88</b>	<b>87,13</b>	<b>972.417.231.001,83</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>VI.1.1.1</b>	<b>154.057.010.943,00</b>	<b>103.554.807.738,51</b>	<b>67,22</b>	<b>94.530.587.941,84</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	VI.1.1.1.1	71.502.853.083,00	74.699.927.100,00	104,47	66.655.543.333,50
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	VI.1.1.1.2	32.300.000.000,00	19.870.715.616,00	61,52	18.684.010.470,00
1.1.3	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.1.1.1.3	5.000.000.000,00	3.747.741.808,05	74,95	2.877.193.432,16
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	VI.1.1.1.4	45.254.157.860,00	5.236.423.214,46	11,57	6.313.840.706,18
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>VI.1.1.2</b>	<b>940.387.603.169,00</b>	<b>848.357.925.005,00</b>	<b>90,21</b>	<b>847.110.321.079,00</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	VI.1.1.2.1	14.344.151.000,00	17.647.273.799,00	123,03	28.472.353.767,00
1.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	VI.1.1.2.1	29.677.532.000,00	33.443.571.850,00	112,89	80.060.622.006,00
1.2.3	Dana Alokasi Umum	VI.1.1.2.2	609.216.898.000,00	609.216.898.000,00	100,00	585.402.476.250,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	VI.1.1.2.3	159.529.928.000,00	143.945.616.097,00	90,23	122.939.446.642,00
1.2.5	Dana Penyesuaian	VI.1.1.2.4	30.386.501.000,00	30.386.501.000,00	100,00	11.789.245.000,00
1.2.6	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
1.2.7	Transfer Pemerintah Propinsi	VI.1.1.2.5	97.232.593.169,00	13.718.064.259,00	14,11	18.446.177.414,00
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>VI.1.1.3</b>	<b>6.259.302.600,00</b>	<b>7.108.569.477,37</b>	<b>113,57</b>	<b>30.776.321.980,99</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	4.973.313.000,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	VI.1.1.3	6.259.302.600,00	7.108.569.477,37	113,57	25.803.008.980,99
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>VI.1.2</b>	<b>1.142.824.415.701,73</b>	<b>997.232.861.242,65</b>	<b>87,25</b>	<b>944.244.475.383,44</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>VI.1.2.1</b>	<b>941.492.189.010,00</b>	<b>845.299.917.881,06</b>	<b>89,78</b>	<b>753.025.207.943,12</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	VI.1.2.1.1	503.505.508.562,00	451.162.028.029,87	89,60	447.014.483.809,89
2.1.2	Belanja Barang	VI.1.2.1.2	427.587.880.448,00	384.990.027.073,19	90,04	289.109.992.093,23
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	VI.1.2.1.3	6.630.000.000,00	7.378.862.770,00	85,50	14.552.134.040,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	VI.1.2.1.4	1.769.000.000,00	1.769.000.000,00	100,00	2.348.598.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>VI.1.2.2</b>	<b>199.932.226.691,73</b>	<b>150.560.092.761,59</b>	<b>75,31</b>	<b>171.446.515.540,32</b>
2.2.1	Belanja Tanah	VI.1.2.2.1	805.678.000,00	251.278.000,00	31,19	19.712.728.081,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	VI.1.2.2.2	34.567.897.109,00	29.241.515.278,85	84,62	28.627.036.244,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	VI.1.2.2.3	66.567.300.135,00	43.223.513.732,21	64,93	60.946.119.880,32
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	VI.1.2.2.4	97.114.792.847,73	77.007.313.350,53	79,30	70.605.329.536,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	VI.1.2.2.5	103.758.600,00	103.746.500,00	99,99	1.556.301.799,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	VI.1.2.2.6	782.800.000,00	732.725.900,00	93,60	-
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>VI.1.2.3</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.372.850.600,00</b>	<b>91,52</b>	<b>19.772.751.900,00</b>
	Belanja Tidak Terduga	VI.1.2.3	1.500.000.000,00	1.372.850.600,00	91,52	19.772.751.900,00
<b>2.4</b>	<b>TRANSFER</b>		-	-	-	-
2.4	Transfer bantuan keuangan lainnya	-	-	-	-	-
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(42.220.498.989,73)</b>	<b>(38.211.559.021,77)</b>	<b>90,50</b>	<b>28.172.755.618,39</b>



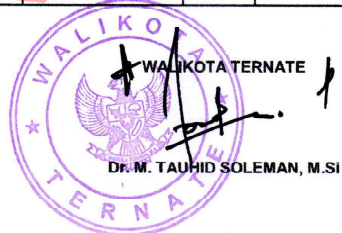
**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN PENDAPATAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No. Urut	Uraian	Reff	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023 (Audited)	%	Realisasi 2022 (Audited)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>VI.1.3</b>	<b>42.220.498.989,73</b>	<b>42.220.498.989,73</b>	<b>-</b>	<b>14.047.743.371,34</b>
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>VI.1.3.1</b>	<b>42.220.498.989,73</b>	<b>42.220.498.989,73</b>	<b>-</b>	<b>14.047.743.371,34</b>
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SIL-PA)	VI.1.3.1	42.220.498.989,73	42.220.498.989,73		14.047.743.371,34
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		-	-		
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-		-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-		-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-		-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah		-	-		-
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>VI.1.3.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		-	-		-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-		-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang		-	-		-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-		-
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN Netto</b>		<b>42.220.498.989,73</b>	<b>42.220.498.989,73</b>	<b>-</b>	<b>14.047.743.371,34</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>VI.1.3.3</b>	<b>-</b>	<b>4.008.939.967,96</b>		<b>42.220.498.989,73</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH KOTA TERNATE**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022  
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>VI.5.1</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>VI.5.1.1</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah	VI.5.1.1.1	74.699.927.100,00	66.655.543.333,50
4	Penerimaan Retribusi Daerah	VI.5.1.1.2	19.870.715.516,00	18.669.547.670,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.5.1.1.3	3.747.741.808,05	2.877.193.432,16
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	VI.5.1.1.4	5.236.423.214,46	3.497.322.238,18
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	VI.5.1.1.5	17.647.273.799,00	28.472.353.767,00
8	Penerimaan Dagi Hasil Sumber Dana Alam	VI.5.1.1.6	33.443.571.850,00	80.060.622.006,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	VI.5.1.1.7	609.216.898.000,00	585.402.476.250,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	VI.5.1.1.8	143.945.616.091,00	122.939.448.642,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	VI.5.1.1.9	30.386.501.000,00	11.789.245.000,00
12	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	VI.5.1.1.10	13.718.064.259,00	18.446.177.414,00
13	Penerimaan lainnya	VI.5.1.1.11	7.109.569.477,37	4.629.577.000,00
14	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>959.021.302.220,88</b>	<b>943.439.504.753,84</b>
15	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>VI.5.1.2</b>		
16	Pembayaran Pegawai	VI.5.1.2.1	451.162.026.029,97	436.579.362.476,00
17	Pembayaran Barang	VI.5.1.2.2	384.590.027.073,19	274.871.746.666,71
18	Pembayaran Subsidi	VI.5.1.2.3	-	-
19	Pembayaran Hibah	VI.5.1.2.4	7.379.862.778,00	14.552.134.040,00
20	Pembayaran Bantuan Sosial	VI.5.1.2.5	1.789.000.000,00	2.348.598.000,00
21	Pembayaran Bantuan Keuangan	VI.5.1.2.6	-	-
22	Pembayaran Tak Terduga	VI.5.1.2.7	1.372.650.600,00	19.772.751.800,00
23	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>846.672.768.481,06</b>	<b>748.124.613.082,71</b>
24	<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi</b>		<b>112.348.533.739,82</b>	<b>195.314.891.671,13</b>
25	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Nonkeuangan</b>	<b>VI.5.2</b>		
26	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>VI.5.2.1</b>		
27	Pencairan Dana Cadangan		-	-
28	Penjualan atas Tanah		-	-
29	Penjualan atas Peralatan dan mesin		-	-
30	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
31	Penerimaan Penjualan Investasi non permanen		-	-
32	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
33	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>VI.5.2.2</b>		
34	Perolehan Tanah	VI.5.2.2.1	251.278.000,00	19.712.728.081,00
35	Perolehan Peralatan dan Mesin	VI.5.2.2.2	29.241.515.278,85	25.835.891.079,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan	VI.5.2.2.3	43.223.513.732,21	50.945.119.880,32
37	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	VI.5.2.2.4	77.007.313.350,53	70.605.329.536,00
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya	VI.5.2.2.5	103.746.500,00	-
39	Perolehan Aset Lainnya	VI.5.2.2.6	732.725.900,00	-
40	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>150.560.092.761,59</b>	<b>167.199.068.576,32</b>
41	<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		<b>(150.560.092.761,59)</b>	<b>(167.199.068.576,32)</b>



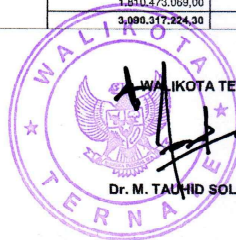
PEMERINTAH KOTA TERNATE  
LAPORAN ARUS KAS  
PEMERINTAH KOTA TERNATE

LINTIK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022  
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
42	<b>ArusKas dari aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>	VI.5.3		
43	<b>Arus Masuk Kas</b>			
44	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah		-	-
45	Pengembalian Pajak yang belum di setor		-	-
46	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
47	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		-	-
48	<b>Arus Keluar Kas</b>			
49	Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		-	-
50	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
51	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
52	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		-	-
53	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>		-	-
54	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggran</b>	VI.5.4		
55	<b>Arus Masuk Kas</b>	VI.5.4.1		
56	Penerimaan Perhitungan Ketiga	VI.5.4.1.1	67.352.650.858,23	30.038.850.698,00
57	Koreksi Saldo Kas Tahun Berjalan	VI.5.4.1.2	13.556.816,20	7.829.615,00
58	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	VI.5.4.1.3	13.403.125,35	-
57	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>67.379.610.799,78</b>	<b>30.046.680.313,00</b>
59	<b>Arus Keluar Kas</b>	VI.5.4.2		
60	Pengeluaran Perhitungan Ketiga	VI.5.4.2.1	66.916.757.291,23	31.010.316.504,00
61	Koreksi saldo kas tahun lalu	VI.5.4.2.2	63.839.094,00	53.840.164,00
			-	-
			-	-
62	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>66.970.596.385,23</b>	<b>31.064.156.668,00</b>
63	<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Nonanggran</b>		<b>409.014.414,55</b>	<b>(1.017.476.355,00)</b>
64	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	VI.5.5	<b>(37.802.544.607,22)</b>	<b>27.098.346.739,81</b>
65	Saldo Awal Kas		40.892.861.831,52	13.483.423.507,15
66	Saldo Akhir Kas		3.090.317.224,30	40.581.770.246,96
67	Terdiri dari :			
67	a. Saldo Akhir Kas BUD		282.755.275,52	40.581.770.246,96
68	b. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		181.743.664,20	53.840.164,00
69	c. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		13.403.125,35	18.082.800,00
70	d. Kas di FKTP		258.104,80	-
71	e. Kas di Bendahara Bos		5.538.101,00	5.684.010,00
72	f. Kas Di BLUD		222.066.112,43	106.356.475,56
73	g. Kas Lainnya		574.086.772,00	129.128.135,00
74	h. BOK		1.610.473.069,00	-
	<b>Total Kas = a+b+c+d+e+f+g+h</b>		<b>3.090.317.224,30</b>	<b>40.692.861.831,52</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Dr. M. TAUHQID SOLEMAN, M.Si





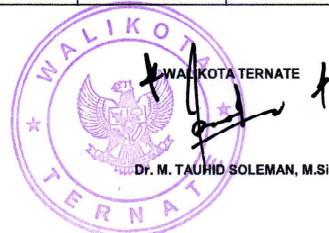
**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff	Realisasi 2023 (Audited)	Realisasi 2022 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	%
<b>PENDAPATAN - LO</b>		<b>1.062.083.725.079,23</b>	<b>1.005.505.660.385,38</b>	<b>56.578.064.773,85</b>	<b>5,63</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>108.520.726.160,86</b>	<b>96.998.960.515,84</b>	<b>11.521.765.645,02</b>	<b>11,88</b>
Pendapatan Pajak Daerah	VI.4.1.1	70.653.974.587,00	69.180.927.100,50	9.473.047.486,50	13,69
Pendapatan Retribusi Daerah	VI.4.1.1.2	20.882.568.416,00	18.734.412.227,00	2.148.146.189,00	11,47
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	VI.4.1.1.3	3.747.741.808,05	2.877.193.432,16	870.548.375,89	30,26
Lain-Lain PAD yang sah	VI.4.1.1.4	5.236.451.339,81	6.206.427.756,18	(969.976.416,37)	(15,63)
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>946.454.429.441,00</b>	<b>877.512.656.729,55</b>	<b>68.941.772.711,45</b>	<b>7,86</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>		<b>864.850.503.597,00</b>	<b>824.304.751.814,00</b>	<b>40.545.751.783,00</b>	<b>4,92</b>
Dana Bagi Hasil Pajak	VI.4.1.2.1	16.980.184.000,00	31.663.744.741,00	(14.683.560.741,00)	(46,37)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	VI.4.1.2.1.2	84.707.805.500,00	84.299.084.181,00	10.408.721.319,00	12,35
Dana Alokasi Umum	VI.4.1.2.1.3	609.216.898.000,00	585.402.476.250,00	23.814.421.750,00	4,07
Dana Alokasi Khusus	VI.4.1.2.1.4	143.945.616.097,00	122.939.446.642,00	21.006.169.455,00	17,09
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>		<b>30.386.501.000,00</b>	<b>11.789.245.000,00</b>	<b>18.597.256.000,00</b>	<b>157,75</b>
Dana Otonomi Khusus	VI.4.1.2.2	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	VI.4.1.2.2.1	30.386.501.000,00	11.789.245.000,00	18.597.256.000,00	157,75
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya</b>		<b>51.217.424.844,00</b>	<b>41.418.659.915,55</b>	<b>9.798.764.928,45</b>	<b>23,66</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	VI.4.1.2.3.1	51.217.424.844,00	41.418.659.915,55	9.798.764.928,45	23,66
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	VI.4.1.2.3	-	-	-	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>7.108.569.477,37</b>	<b>30.994.043.059,99</b>	<b>(23.885.473.582,62)</b>	<b>(77,06)</b>
Pendapatan hibah	VI.4.1.3	7.108.569.477,37	5.191.034.079,00	(5.191.034.079,00)	(100,00)
Pendapatan lainnya	VI.4.1.3	7.108.569.477,37	25.803.008.980,99	(18.694.430.503,62)	(72,45)
<b>BEBAN</b>		<b>988.537.952.443,60</b>	<b>914.719.916.137,80</b>	<b>73.818.034.305,80</b>	<b>8,07</b>
<b>BEBAN OPERASI</b>		<b>988.537.952.443,60</b>	<b>914.719.916.137,80</b>	<b>73.818.034.305,80</b>	<b>8,07</b>
Beban Pegawai - LO	VI.4.2.1.1	470.056.726.300,87	447.014.483.809,89	23.042.242.490,98	5,15
Beban Persediaan	VI.4.2.1.2	108.980.748.842,56	84.796.164.957,08	14.182.583.885,48	14,96
Beban Barang dan Jasa	VI.4.2.1.3	202.040.624.285,63	165.213.992.281,01	36.826.632.004,62	22,29
Beban Pemeliharaan	VI.4.2.1.4	10.942.437.022,82	7.452.855.886,00	3.489.581.136,82	46,82
Beban Perjalanan Dinas	VI.4.2.1.5	64.635.964.467,00	58.278.653.872,00	6.357.310.595,00	10,91
Beban Bunga	VI.4.2.1.6	-	-	-	-
Beban Subsidi	VI.4.2.1.7	-	-	-	-
Beban Hibah	VI.4.2.1.8	8.628.862.778,00	14.552.134.040,00	(5.923.271.262,00)	(40,70)
Beban Bantuan Sosial	VI.4.2.1.9	1.769.000.000,00	5.965.261.000,00	(4.196.261.000,00)	(70,34)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	VI.4.2.1.10	114.967.494.673,66	116.387.566.264,03	(1.420.061.690,38)	(1,22)
Beban Penyisihan Piutang	VI.4.2.1.11	6.516.094.172,87	3.895.356.192,70	2.620.737.980,17	67,28
Beban Lain-Lain	VI.4.2.1.12	-	1.161.459.835,09	(1.161.459.835,09)	100,00
Beban Transfer	VI.4.2.1.13	-	-	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	VI.4.2.1.14	<b>73.545.772.635,63</b>	<b>90.785.742.167,58</b>	<b>(17.239.969.531,95)</b>	<b>(18,99)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	VI.4.2.2	-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	VI.4.2.2.1	-	-	-	-
Defisit Penghapusan Aset LO	VI.4.2.2.2	5.187.124.786,00	1.332.095.504,00	3.855.029.192,00	280,40
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	VI.4.2.2.3	2.780.505.382,66	-	2.780.505.382,66	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>7.967.630.168,66</b>	<b>1.332.095.594,00</b>	<b>6.635.534.574,66</b>	<b>496,13</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>65.578.142.466,97</b>	<b>89.453.646.573,58</b>	<b>(23.875.504.106,61)</b>	<b>(26,69)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	VI.4.2.3	-	-	-	-
Defisit Penyelesaiannya Kewajiban Jangka Panjang LO	VI.4.2.3.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	VI.4.2.3.2	573.012.600,00	282.479.700,00	290.532.900,00	102,65
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>573.012.600,00</b>	<b>282.479.700,00</b>	<b>290.532.900,00</b>	<b>102,65</b>
<b>SURPLUS / DEFISIT - LO</b>	VI.4.2.4	<b>65.005.129.866,97</b>	<b>89.171.166.873,58</b>	<b>(24.166.037.006,61)</b>	<b>(27,10)</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

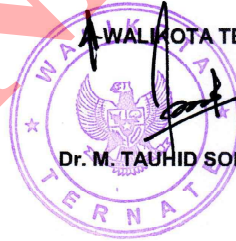
(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>VI.6.1</b>	<b>2.756.514.562.273,37</b>	<b>2.674.279.382.210,48</b>
SURPLUS / DEFISIT -LO	VI.6.2	65.005.129.866,97	89.171.166.873,58
RK PUSAT		-	-
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN</b>	<b>VI.6.3</b>		
<b>KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR</b>			
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi ekuitas lainnya		(25.168.323.087,56)	(6.935.986.810,69)
Koreksi Nilai Piutang		-	-
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang		-	-
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>VI.6.4</b>	<b>2.796.351.369.052,78</b>	<b>2.756.514.562.273,37</b>

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

WALIKOTA TERNATE

Dr. M. TAUHID SOLEMAN, M.Si





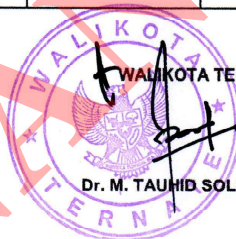
**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>VI.2.1</b>	<b>42.220.498.989,73</b>	<b>14.047.743.371,34</b>
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	VI.2.2	42.220.498.989,73	14.047.743.371,34
Sub Total		-	-
Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran ( SILPA/SIKPA)		4.008.939.967,96	42.220.498.989,73
Sub Total		4.008.939.967,96	42.220.498.989,73
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya		-	-
Lain - lain		-	-
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>VI.2.3</b>	<b>4.008.939.967,96</b>	<b>42.220.498.989,73</b>

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



Dr. M. TAUHID SOLEMAN, M.Si

**BAB I PENDAHULUAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN**  
**KEUANGAN**  
**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**I.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Ternate menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate selama Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Ternate serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Ternate berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Ternate sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023.

## **I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 18);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 42 );

15. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 196); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2015 ( Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 242 A )
16. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 195).

### 1.3 Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan Atau Entitas Akuntansi

Kota Ternate adalah salah satu kota yang terletak di sebelah barat Halmahera, Kota ini memiliki sejarah masa lalu karena terkenal dengan rempah-rempah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Ternate pada tanggal 27 April 1999, maka Kota Ternate telah mengalami peningkatan status yang dulunya Kota Administratif menjadi Kotamadya. Sejak berdiri dari Kota Administratif hingga meningkat status menjadi Kotamadya, secara administratif Kota Ternate terdiri dari 3 Kecamatan dan 58 Kelurahan. Pada tahun 2001 dimekarkan menjadi 4 kecamatan selanjutnya tahun 2009 dimekarkan kembali menjadi 7 kecamatan antara lain Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Pulau Moti, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Utara. Pada tahun 2018 melalui Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2018, Kota Ternate berkembang menjadi 8 kecamatan dengan kecamatan Ternate Barat sebagai kecamatan baru pemekaran dari Kecamatan Pulau Ternate.

Secara astronomis, Kota Ternate terletak pada posisi 02°28'54,51" Lintang Selatan, 02°39'28,76" Lintang Utara, dan berada diantara 124°16'58,62" - 129°40'57,62" Bujur Timur. Secara geografis Kota Ternate dibatasi oleh:

- Utara : Samudra Pasifik
- Selatan : Laut Seram dan Propinsi Maluku Utara
- Timur : Samudra Pasifik dan Propinsi Papua
- Barat : Laut Maluku dan Pulau Sulawesi

Luas Kota Ternate adalah 5.709,72 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari daratan 162,20 Km<sup>2</sup> dan lautan 5.547,55 Km<sup>2</sup>.

Seperti umumnya daerah kepulauan yang memiliki ciri yaitu Desa/Kelurahannya merupakan wilayah pesisir, begitu pula dengan Kota Ternate. Kota Ternate merupakan kota kepulauan yang terdiri dari 3 pulau besar dan 6 pulau kecil. Ibukota Kota Ternate adalah Ternate Tengah dengan wilayah administratif terdiri dari 8 kecamatan dan 78 kelurahan. Pusat Pemerintahan berada di pulau terbesarnya yakni Pulau Ternate. Pada Pulau Ternate terdapat 5 kecamatan yang berada di sana yakni Pulau Ternate, Ternate Selatan, Ternate Tengah, Ternate Utara, dan Ternate Barat. Dari 78 Kelurahan yang ada di wilayah Kota Ternate, 57 Kelurahan berklasifikasi Kelurahan Pantai sedangkan 21 Kelurahan lainnya berklasifikasi kelurahan bukan pantai.

Penduduk Kota Ternate berdasarkan Sensus penduduk tahun 2023 sebanyak 204.920 jiwa. Jumlah rasio jenis kelamin penduduk Kota Ternate pada tahun 2023 adalah 103. Artinya pada tiap 100 penduduk wanita, terdapat 103 penduduk laki-laki. (Sumber *Badan Pusat Statistik Kota Ternate 2023*)

## **VISI DAN MISI**

### **Visi**

Dengan mempertimbangkan keinginan luhur dari para pendiri bangsa dan cerminan hati sanubari rakyat Kota Ternate untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin, memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pembangunan Kota Ternate Tahun 2021-2026 adalah :

**“ MEWUJUDKAN KOTA TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN “  
- TERNATE ANDALAN -**

### **1. Ternate Mandiri**

Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, hukum, politik, maupun sosial budaya. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif yang tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerah; untuk membangun Pemerintah Daerah yang mandiri mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui peningkatan daya saing; kemandirian aparatur Pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh; serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat kota Ternate yang menunjang proses pelayanan dan pembangunan infrastruktur fisik dan digital Kota Ternate, dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang ekstraktif dan responsif, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan layanan public yang berkesinambungan, dengan menumbuh-kembangkan lembaga social dalam bingkai 7 nilai dasar kebudayaan Ternate.

### **2. Ternate Berkeadilan**

Berkeadilan dapat diartikan tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak kepada kebenaran dan sepatutnya tidak sewenang-wenang atau dengan definisi lain terkait dengan keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya tanpa dikurangi dan dilebihkan. Prinsip-prinsip keadilan berkaitan dengan akses kepada pengambilan keputusan dan *'basis necessities'* (kebutuhan dasar) kehidupan.

Pria dan wanita memiliki akses yang sama dalam perlindungan dan konsistensi perlindungan hukum, partisipasi pengambilan keputusan, penetapan prioritas dan proses alokasi sumber daya. Supaya tercipta keadilan bagi masyarakat Kota Ternate, diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada semua baik yang miskin atau kaya, remaja atau lanjut usia (lansia), kelompok minoritas, cacat, dengan akses yang sama terhadap penyediaan nutrisi, pendidikan, kesempatan kerja, perawatan kesehatan, perumahan, penyediaan air bersih, sanitasi dan lainlain pelayanan dasar. Gambaran ini merangkum sebuah upaya membangun tanpa diskriminasi, setiap masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berekonomi, mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan hukum, serta mampu memberikan perlindungan masyarakat yang kurang mampu dan memberikan ruang tumbuh kembangnya budaya masyarakat dengan memperhatikan sistem nilai dan norma sosial.

## Misi

Berdasarkan rumusan visi pembangunan Kota Ternate sebagaimana telah diuraikan diatas, maka rumusan Misi pembangunan daerah jangka menengah Kota Ternate dalam tahun 2021-2026 ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional.
2. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif.
3. Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik yang Berkualitas.
4. Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (*Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi*).
5. Setiap Warga Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Berekonomi.
6. Setiap Warga Masyarakat Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan.
7. Daerah Melindungi Masyarakat yang Kurang Mampu.
8. Daerah Memberikan Ruang untuk Tumbuh dan Berkembangnya Budaya Masyarakat dengan Memperhatikan Sistem Nilai dan Norma Sosial.

## Organisasi dan Kelembagaan

Untuk mencapai Visi dan Misi Kota Ternate, Pemerintahan dibawah kepemimpinan:

Wali Kota : **Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si**

Wakil Wali Kota : -

Plt.Sekretaris Daerah : **Abdullah H. M. Saleh, S.STP.,M.Si**



Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Penataan kelembagaan yang telah dilakukan dan perangkat daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kota Ternate membawahi 25 Instutisi Dinas, 6 Institusi Badan Daerah dan 3 Sekretariat, dan perangkat pemerintahan lainnya. Didalamnya terdapat 4.510 Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari 2.924 perempuan dan 1.586 laki-laki. Lebih dari separuh jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Ternate (62,88%) merupakan lulusan sarjana keatas dan masih terdapat 11 orang PNS yang hanya berpendidikan SMP ataupun dibawahnya.

### **Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kota Ternate yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam menyusun Kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Sekretaris Daerah membawahi tiga orang Asisten, yaitu : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Asisten Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Masing-masing Asisten membawahi sejumlah bagian dalam Sekretariat Daerah dan melakukan koordinasi kegiatan di bidangnya masing-masing.

### **Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### **Inspektorat Daerah**

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kota Ternate berjumlah 1 (satu).

### **Dinas**

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Jumlah dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Ternate 25 Dinas.

### **Lembaga Teknis Daerah**

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan berbentuk Badan, Kantor, dan Satpol PP.

## **Kecamatan**

Kecamatan adalah wilayah kerja Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kepala Kecamatan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Ternate berjumlah 8 (Delapan) kecamatan.

### **I.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

#### **I.3.1 Unsur Laporan Keuangan**

LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kota Ternate, yang terdiri dari PPKD (BUD) dan SKPD. LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

##### **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

##### **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

##### **3. Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

##### **4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

##### **5. Neraca**

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

## **6. Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2023.

## **7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD, dengan Laporan keuangan BUD. Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan Laporan keuangan BUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## **I.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate disajikan dengan urutan sebagai berikut:

### **Bab I      Pendahuluan**

- I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- I.3. Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi
- I.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.5. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

### **Bab II     Ekonomi Makro**

- II. 1   Ekonomi Makro
- II. 2   Tingkat Kemiskinan
- II. 3   Tingkat Pengangguran Terbuka
- II. 4   Indeks Gini (Gini Ratio)
- II. 5   Indeks Pembangunan Manusia
- II. 6   Laju Pertumbuhan Ekonomi (IPM)
- II. 7   Inflasi
- II. 8   Struktur Perekonomian Kota Ternate

### **Bab III    Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal**

- III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal

- III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat pencapaian kinerja
- Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Ternate
  - IV.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program Pemerintah Kota Ternate
  - IV.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja
- Bab V Kebijakan Akuntansi
  - V.1. Entitas Pelaporan
  - V.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - V.3. Kebijakan Akuntansi
- Bab VI Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
  - VI.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - VI.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
  - VI.3. Neraca
  - VI.4. Laporan Opeasional (LO)
  - VI.5. Laporan Arus Kas
  - VI.6. Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VII Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
- Bab VIII Penutup

SALINAN

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### II.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Ternate yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,46%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,31%
- c. Gini Ratio sebesar 0,300%
- d. Indeks Pembangunan Manusia 70,21
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2021 sebesar 20,49%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,71%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) sebesar Rp 85.145,4 Miliar

#### II.2 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 2.1 Persentasi Penduduk Miskin Kota Ternate**

No	Tingkat Kemiskinan*	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	3.11	3.39	Naik 0,28%
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	7.54	8.36	Naik 0,82%
3	Provinsi (%)	6.23	6.46	Naik 0,23%
4	Nasional (%)	9.54	9.36	Turun 0,18%
5	Peringkat Provinsi**	5	1	-
6	Peringkat Nasional	-	-	-

Catatan : \* Angka kemiskinan tahunan yang digunakan merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Bulan Maret.

\*\* Peringkat diurutkan dari terkecil ke terbesar.

*Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate*

Persentase penduduk miskin Kota Ternate pada Tahun 2022 sebesar 3,11% mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin menjadi 0,28%. Persentase penduduk miskin Kota Ternate masih di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

**Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Ternate**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (poin)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0.41	0.56	Naik 0,15 poin
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0.91	1.08	Naik 0,17 poin
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1.59	1.53	Turun 0,06 poin
4	Peringkat Provinsi	1	2	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Catatan : \* Angka tingkat kedalaman kemiskinan yang digunakan merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Bulan Maret.

\*\* Peringkat diurutkan dari terkecil ke terbesar.

*Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate*

**Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Ternate**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (poin)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0.10	0.13	Naik 0,03 poin
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0.20	0.23	Naik 0,03 Poin
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0.39	0.38	Turun 0,01 poin
4	Peringkat Provinsi	1	6	Turun 5 peringkat
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Angka tingkat keparahan kemiskinan yang digunakan merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Bulan Maret.

\*\* Peringkat diurutkan dari terkecil ke terbesar.

Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate

### II.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

**TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Penganggur terbuka**, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Ternate Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Ternate Tahun 2023 adalah sebesar 6,62%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Ternate**

No	Uraian*	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	5.77	6.62	Naik 0,857%
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3.98	4.31	Naik 0,33 %
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5.86	5.32	Turun 0,54%
4	Peringkat Provinsi**	9	1	Naik 8 peringkat
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Catatan : \* Angka TPT tahunan yang digunakan merupakan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Bulan Maret.

\*\* Peringkat diurutkan dari terkecil ke terbesar.

Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Prov/Kab/Kota Ternate Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,62% sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 5,77 % atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022.

Namun dengan demikian TPT Kota Ternate masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Maluku Utara yang sebesar 4,31%, dan lebih besar dari angka Nasional sebesar 5,32%.

#### II.4. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Ternate. Realisasi pencapaian Gini Ratio Kota Ternate Tahun 2023 adalah sebesar 0,294 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.5 Gini Ratio Kota Ternate**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (poin)
1	Tingkat Kab/Kota	0.31	0.294	Turun 0,16 poin
2	Tingkat Provinsi	0.300	0.300	Tetap
3	Tingkat Nasional	0.384	0.388	Naik 0,004 poin
3	Peringkat Provinsi	10	2	Naik 8 peringkat
4	Peringkat Nasional	-	-	-

*Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate*

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Ternate yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,294 Angka ini turun 0,16 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 yang sebesar 0,31 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.



## II.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu ;

- a. Rendah ( $<60$ )
- b. Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
- c. Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
- d. Sangat Tinggi ( $>80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Ternate Realisasi pencapaian IPM Kota Ternate Tahun 2023 adalah sebesar 81,35 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia**

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (poin)
1	Kabupaten/Kota	80.81	81.35	Naik 0,54 poin
2	Provinsi	69.47	70.21	Naik 0,74 poin
3	Indonesia/Nasional	72.91	74.39	Naik 1,48 poin
4	Peringkat Provinsi	1	1	Tetap
5	Peringkat Nasional	-	-	-

*Sumber Dokumen BPS Kota Ternate*

Realisasi pencapaian IPM Kota Ternate adalah sebesar 81,35 dibandingkan Tahun 2022 sebesar 80,81 poin mengalami naik sebesar 0,54 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/menurunnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standard hidup, berkaitan dengan PNB per kapita IPM di Kota Ternate pada saat ini berada pada urutan 2 dari 10 Kab/Kota yang ada di propinsi Maluku Utara dan berada pada urutan 27 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 534 Kab/Kota yang ada di Indonesia.

## II.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*.

Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

**Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi**

No	Uraian	Kota Ternate			Provinsi	Nasional
		Tahun 2021**	Tahun 2022**	Tahun 2023**	Tahun 2022**	Tahun 2023**
1	PDRB (harga konstan 2010) (Milyar Rp)	7,341.64	7,733.48	88.117.60	40,248,38	-
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2.58	5.32	5.00	22.94	5,04
3	Peringkat Provinsi	5	8	4	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate.

Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kota Ternate menempati urutan 1 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.

## II.7. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Prov/Kab/Kota Ternate dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30 – 100 % setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Prov/Kab/Kota Ternate Tingkat Inflasi Prov/Kab/Kota Ternate Tahun 2023 adalah sebesar 2.29% dengan kategori ringan/sedang/berat/sangat berat sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kota Ternate**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	3.37	2.29	Turun 1,08%
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	3.37	2.71	Turun 0,66%
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	5.51	0.37	Turun 5.14%
4	Peringkat Provinsi*	-	-	-
5	Peringkat Nasional**	2	-	-

Catatan : \* Di Provinsi Maluku Utara hanya Kota Ternate yang merupakan kota IHK/ Inflasi, wilayah lain selain Kota Ternate tidak dihitung angka IHK/ Inflasi

\*\* Peringkat diurutkan dari inflasi terkecil ke terbesar. Peringkat 2022 merupakan peringkat dari 82 kota IHK/ Inflasi, peringkat 2023 merupakan peringkat dari 90 Kota IHK/ Inflasi, pada 2023 BPS menambahkan cakupan perhitungan ke 8 kota yakni Gunungsitoli, Waingapu, Sintang, Kotabaru, Tanjung Selor, Kotamobagu, Luwuk, dan Timika.

*Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate.*

Tingkat inflasi di Kota Ternate Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,37 %, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 2,29 % atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022. Namun dengan demikian inflasi Kota Ternate masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 5,51% dan sebesar 0,37%.

## 11.8 Struktur Perekonomian Kota Ternate

Struktur perekonomian Kota Ternate dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Dalam Milyar Rupiah)**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	430,48	471,86	524,06
2	Pertambangan dan Penggalian	7,97	8,13	9,32
3	Industri Pengolahan	283,07	256,04	281,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,54	16,75	18,90
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang	7,84	8,29	8,90
6	Konstruksi	759,13	821,10	905,21
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	2.640,54	2.737,02	3.068,41
8	Transportasi dan Pergudangan	1.383,63	1.413,41	1.822,84
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	108,64	116,64	124,36
10	Informasi dan Komunikasi	864,72	939,40	1.021,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	770,64	888,90	996,77
12	Real Estate	23,59	24,23	25,30
13	Jasa Perusahaan	78,75	87,26	99,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.997,04	2.023,33	2.135,53
15	Jasa Pendidikan	561,52	580,23	599,52
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	393,13	415,71	433,20
17	Jasa lainnya	208,97	219,23	231,20
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	10.535,20	11.027,54	12.305,48
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	10.535,20	11.027,54	12.305,48
20	PDRB Provinsi	42.319,47	52.359,85	70.902,60
21	PDRB Nasional	15.438.017,50	16.970.789,20	19.588.445,60
22	Peringkat Provinsi	1	1	3

Sumber Dokumen: BPS Kota Ternate

## II. 9 Mandatory Spending

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran Negara yang diatur oleh Undang-undang yang bertujuan mengurangi ketimpangan social dan ekonomi daerah. Kebijakan Mandatory Spending adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai amanat dari pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mandatory Spending dalam perencanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah adalah suatu kewajiban bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan setiap anggaran untuk memenuhi aspek pelayanan dasar yang meliputi:

- a. Pendidikan sebesar 20%
- b. Kesehatan minimal 10%
- c. Infrastruktur minimal 25% dari APBD

### a. Belanja Fungsi Pendidikan sebesar 20%

Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dihitung sesuai dengan tabel format perhitungan alokasi Fungsi Pendidikan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan tabel dibawah ini, jumlah alokasi anggaran Fungsi Pendidikan adalah **Rp. 247.018.742.594,00** atau 21,61% dan realisasi sebesar **Rp.200.213.916.717,00** atau 20.08% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa *dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.* Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang Pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel Perhitungan Belanja Fungsi Pendidikan**

No.	Komponen Perhitunagn	Anggaran	Realisasi
1	a) Belanja Pada Dinas Pendidikan :	246.954.492.594,00	210.701.995.105,00
	1. Belanja Operasi	231.315.674.526,00	200.149.666.717,00
	1. Belanja Pegawai	178.324.985.566,00	153.431.050.920,00
	2. Belanja Barang Jasa	52.990.688.960,00	46.718.615.797,00

No.	Komponen Perhitunagn	Anggaran	Realisasi
	3. Belanja Hibah	0,00	0,00
	4. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
	<b>1. Belanja Modal</b>	<b>15.638.818.068,00</b>	<b>10.552.328.388,00</b>
	<b>b. Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan antara lain</b>	<b>64.250.000,00</b>	<b>64.250.000,00</b>
	1. Belanja Transfer		
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
	2. Sub. Keg...Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN pd SKPD BKPSDMD	64.250.000,00	64.250.000,00
<b>2</b>	<b>Anggaran Fungsi Pendidikan ( a+b )</b>	<b>247.018.742.594,00</b>	<b>200.213.916.717,00</b>
<b>3</b>	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>1.142.924.415.701,73</b>	<b>997.232.861.242,65</b>
<b>4</b>	<b>Rasio Anggaran Pendidikan ( 2 : 3 ) x 100%</b>	<b>21,61</b>	<b>20,08</b>

#### **b. Belanja Fungsi Kesehatan Minimal 10 %**

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dihitung sesuai dengan tabel format perhitungan alokasi Anggaran untuk Kesehatan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan tabel yang ada, jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan Rp.183.129.575.712. atau 20,34 % dan realisasi Rp.175.489.616.291,83 atau 23,64% dari total belanja daerah di luar gaji Rp900.347.151.605,00 yang terdiri dari:

- a. Belanja pada Dinas Kesehatan Rp.127.027.382.694; dan
- b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan Rp56.102.193.018,00.

Alokasi anggaran untuk kesehatan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 Rp183.129.575.712,00 sesuai dengan amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa besaran anggaran yang harus dialokasikan minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji dan juga amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. Secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Perhitungan Belanja Fungsi Kesehatan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	<b>a Belanja pada Dinas Kesehatan</b>	<b>127,027,382,694.00</b>	<b>115,435,728,178.70</b>
	1 Belanja Operasi	115,083,301,264.00	106,691,036,811.85
	a Belanja Pegawai	63,247,463,904.00	60,724,830,972.87
	b Belanja Barang Jasa	51,035,837,360.00	45,166,205,838.98
	c Belanja Hibah	800,000,000.00	800,000,000.00
	d Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2 Belanja Modal	11,944,081,430.00	8,744,691,366.85
	<b>b Belanja Diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan</b>	<b>56,102,193,018.00</b>	<b>60,053,888,113.13</b>
	antara lain :		
	1 Belanja transfer	-	-
	Belanja bantuan Keuangan,	-	-
	2 Belanja Puskesmas Kalumpang	909,493,200.00	2,053,643,867.44
	3 Belanja Puskesmas kota	821,169,000.00	2,141,483,728.00
	4 Belanja Puskesmas Siko	1,128,709,200.00	2,701,176,947.00
	5 Belanja Puskesmas Kalumata	1,549,921,600.00	3,736,552,569.93
	6 Belanja Puskesmas Gambesi	272,000,000.00	1,154,299,916.00
	7 Belanja Puskesmas Jambula	378,000,000.00	1,371,756,266.00
	8 Belanja Puskesmas Sulamadaha	244,800,000.00	1,512,905,526.00
	9 Belanja Puskesmas Bahari Berkesan	302,605,200.00	1,111,944,851.00
	10 Belanja Puskesmas Hiri	178,225,200.00	1,267,840,222.00
	11 Belanja Puskesmas Moti	294,379,200.00	1,404,277,757.00
	12 Belanja Puskesmas Mayau	180,000,000.00	1,258,074,931.00
	13 Sub keg. Pembangunan sarana dan prasarana dan utilitas (pemb.jamban sanitari SMP)Pada SKPD Dinas Pendidikan	784,332,000.00	231,696,478.00
	14 Sub keg. Penyusunan rencana kebijakan, strategi dan teknis SPAM pada pada SKPD pekerjaan Umum	428,240,000.00	132,700,500.00
	15 Sub Keg. Supervisi pembangunan/peningkatan/Perluasan/perbaikan SPAM pada SKPD pekerjaan umum	188,685,000.00	88,685,000.00
	16 Sub Keg. Supervisi Pembangunan/peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan SPAM pada SKPD Pekerjaan umum	200,000,000.00	-
	17 Sub Keg. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan pada SKPD pekerjaan umum	915,000,000.00	315,452,584.91
	18 Sub Keg. Pembangun TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS pada skpd pekerjaan umum	759,940,000.00	220,500,858.95
	19 Sub Keg. Penyediaan sarana persampahan pada skpd pekerjaan umum	10,120,500,000.00	7,965,000,000.00
	20 Sub Keg. Operasi pemeliharaan sistem pemeliharaan air limbah domestik pada skpd pekerjaan umum	282,179,130.00	159,349,523.00

		21	Sub Keg. Pembangunan/Penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman pemukiman pada skpd pekerjaan umum	1,040,000,000.00	1,039,980,000.00
		22	Sub keg. Pembangunan sistem Drainase perkotaan pada skpd pekerjaan umum	6,643,242,998.00	4,812,331,697.64
		23	Sub keg. Rehabilitasi Saluran Drainase perkotaan pada skpd pekerjaan umum	6,218,335,809.00	3,488,090,875.87
		24	Sub keg. Penyusunan Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten kota pada skpd DLH	119,411,930.00	117,213,860.00
		25	Sub Keg. Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulangan dan pemanfaatan kembali pada skpd DLH	124,995,000.00	124,976,775.00
		26	Sub keg. Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pada skpd DLH	19,647,387,040.00	19,616,400,165.39
		27	Sub Keg. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota pada skpd DLH	144,966,490.00	143,927,171.00
		28	Sub Keg. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus pada skpd DP3A	346,840,000.00	126,016,000.00
		29	Sub Keg. Pelaksanaan Medical Cek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada skpd Sekretariat Daerah	69,999,999.00	-
		30	Sub Keg. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Dishabilitas Terlantar Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat pada Dinas Sosial	180,265,730.00	146,203,590.00
		31	Sub keg. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan sosial pada skpd dinas Sosial	21,300,000.00	21,300,000.00
		32	Sub keg. Pemberian layanan Rujukan pada skpd dinas sosial	54,011,740.00	44,127,000.00
		33	Sub keg. Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder pada Mitra Kerja pada skpd kantor KB	80,352,000.00	80,352,000.00
		34	Sub keg. Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK pada skpd Kantor KB	386,004,452.00	386,004,452.00
		35	Sub keg. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pd skpd Kantor KB	18,901,100.00	18,823,000.00
		36	Sub keg. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jasa Tenaga Kesehatan Insentif Kader Posyandu pd Skpd Ternate Tengah	264,000,000.00	262,800,000.00
		37	Sub keg. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jasa Tenaga Kesehatan Insentif Kader Posyandu pd Skpd Ternate Utara	270,000,000.00	270,000,000.00
		38	Sub keg. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jasa Tenaga Kesehatan Insentif Kader Posyandu pd Skpd Ternate	324,000,000.00	324,000,000.00
		39	Sub keg. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jasa Tenaga Kesehatan Insentif Kader Posyandu pd Skpd Pulau Ternate	60,000,000.00	60,000,000.00
		40	Sub keg. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jasa Tenaga Kesehatan Insentif Kader Posyandu pd Skpd Ternate Barat	78,000,000.00	78,000,000.00
		41	Sub keg. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jasa Tenaga Kesehatan Insentif Kader Posyandu pd Skpd Pulau Hiri	36,000,000.00	36,000,000.00
		42	Sub keg. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jasa Tenaga Kesehatan Insentif Kader Posyandu pd Skpd Pulau Batang Dua	36,000,000.00	30,000,000.00
<b>2</b>	<b>Total Anggaran Fungsi Kesehatan</b>			<b>183,129,575,712.00</b>	<b>175,489,616,291.83</b>
<b>3</b>	<b>Total APBD Perubahan</b>			<b>1,142,924,415,701.00</b>	<b>997,232,861,242.65</b>
<b>4</b>	<b>Total Gaji dan Tunjangan</b>			<b>242,577,264,096.00</b>	<b>254,898,113,761.00</b>
<b>5</b>	<b>5 = ( 3 - 4 )</b>			<b>900,347,151,605.00</b>	<b>742,334,747,481.65</b>
	<b>Rasio Anggaran Fungsi Kesehatan</b>			<b>20.34</b>	<b>23.64</b>



**c. Belanja Infrakstruktur 25%**

Pemerintah Kota Ternate mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023.

Berdasarkan tabel di bawah ini, alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik **Rp223,633,327,680,00** atau 19,57% dari total belanja APBD dan realisasi **Rp.169.181.065.763,05** atau 16,97% di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Hal ini belum memenuhi alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik minimal sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa *Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 25% (dua puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.* Pemerintah Kota Ternate tetap berupaya keras untuk memenuhi kewajiban mandatory spending belanja Infrastruktur minimal 25% dari APBD sesuai amanat Undang-Undang. Harapan Pemerintah Kota Ternate dengan masa transisi 5 tahun yang diberikan oleh undang-undang akan dipenuhi secara bertahap dan ditargetkan pada tahun 2027 batas minimal belanja infrastruktur bisa terpenuhi. Secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel Perhitungan Belanja Infrakstruktur Daerah**

No.	Komponen Perhitunagn	Anggaran	Realisasi
	<b>a) Belanja Modal :</b>	<b>199.932.226.691,73</b>	<b>150.560.092.761,59</b>
1	1. Tanah	805.678.000,00	251.278.000,00
	2. Peralatan & Mesin	34.557.897.109,00	29.241.515.278,85
	3. Bangunan & Gedung	66.567.300.135,00	43.223.513.732,21
	4. Jalan Jaringan & Irigasi	97.114.792.847,73	77.007.313.350,53
	5. Aset Tetap Lainnya	103.758.600,00	103.746.500,00
	6. Aset lainnya	782.800.000,00	732.725.900,00
	<b>b) Belanja Pemeliharaan :</b>	<b>11.854.100.989,00</b>	<b>9.473.110.223,46</b>
	<b>Jumlah a + b = (1)</b>	<b>211.786.327.680,73</b>	<b>160.033.202.985,05</b>
2	a) Belanja Hibah	10.078.000.000,00	7.378.862.778,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	1.769.000.000,00	1.769.000.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
	<b>Jumlah = (2)</b>	<b>11.847.000.000,00</b>	<b>9.147.862.778,00</b>
3	<b>Jumlah Belanja Infrakstruktur Daerah (1 + 2)</b>	<b>223.633.327.680,73</b>	<b>169.181.065.763,05</b>
4	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>1.142.924.415.701,73</b>	<b>997.232.861.242,65</b>
5	<b>Persentase Belanja Infrakstruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum</b>	<b>19,57</b>	<b>16,97</b>

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA**  
**FISKAL PEMERINTAH KOTA**  
**TERNATE**

**III.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA FISKAL**

Anggaran Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2023 anggaran Belanja Daerah Kota Ternate ditetapkan sebesar Rp1.142.924.415.701,73 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp154.057.010.943,00, Pendapatan Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebesar Rp940.387.603.169,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp6.259.302.600,00 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp(42.220.498.989,00) yang ditutup melalui SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya dan rencana pinjaman daerah.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kota Ternate selama Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

**Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2023**

URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI AUDITED	%	LEBIH/KURANG
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.100.703.916.712,00</b>	<b>959.021.302.220,88</b>	<b>87,13</b>	<b>(141.682.614.491,12)</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH	154.057.010.943,00	103.554.807.738,51	67,22	(50.502.203.204,49)
PENDAPATAN TRANSFER	940.387.603.169,00	848.357.925.005,00	90,21	(92.029.678.164,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.259.302.600,00	7.108.569.477,37	113,57	849.266.877,37
<b>BELANJA</b>	<b>1.142.924.415.701,73</b>	<b>997.232.861.242,65</b>	<b>87,25</b>	<b>(145.691.554.459,08)</b>
BELANJA OPERASI	941.492.189.010,00	845.299.917.881,06	89,78	(96.192.271.128,94)
BELANJA MODAL	199.932.226.691,73	150.560.092.761,59	75,31	(49.372.133.930,14)
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	1.372.850.600,00	91,52	(127.149.400,00)
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>42.220.498.989,73</b>	<b>42.220.498.989,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
PENERIMAAN DAERAH	42.220.498.989,73	42.220.498.989,73	100,00	0,00
PENGELUARAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN Netto</b>	<b>42.220.498.989,73</b>	<b>42.220.498.989,73</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN</b>	<b>-</b>	<b>4.008.939.967,96</b>		<b>4.008.939.967,96</b>

Tabel di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp959.021.302.220,88 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dari anggaran sebesar Rp1.100.703.916.712,00 atau 87,13%. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2019 sampai dengan 2023 secara jelas dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut ini:

### Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2019 – 2023

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	% Perkembang	
			Target	Realisasi
2019	108,316,480,000.00	96,425,003,776.58	-	-
2020	82,548,422,000.00	105,903,491,250.12	(23.79)	9.83
2021	123,097,508,130.00	87,015,172,298.96	49.12	(17.84)
2022	154,057,010,943.00	91,699,606,674.84	25.15	5.38
2023	154,057,010,943.00	103,554,807,738.51	-	12.93

Secara Keseluruhan dari Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 baik target maupun realisasi PAD Kota Ternate terus menerus mengalami kenaikan.

Dilihat dari sisi target anggaran, dari Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp25.768.058.000,00 atau 23,79%, dari Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan Rp40.549.086.130,58 atau 49,12%, dan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 anggarannya tetap atau tidak mengalami penambahan yaitu Rp.154.057.010.943 atau 0%

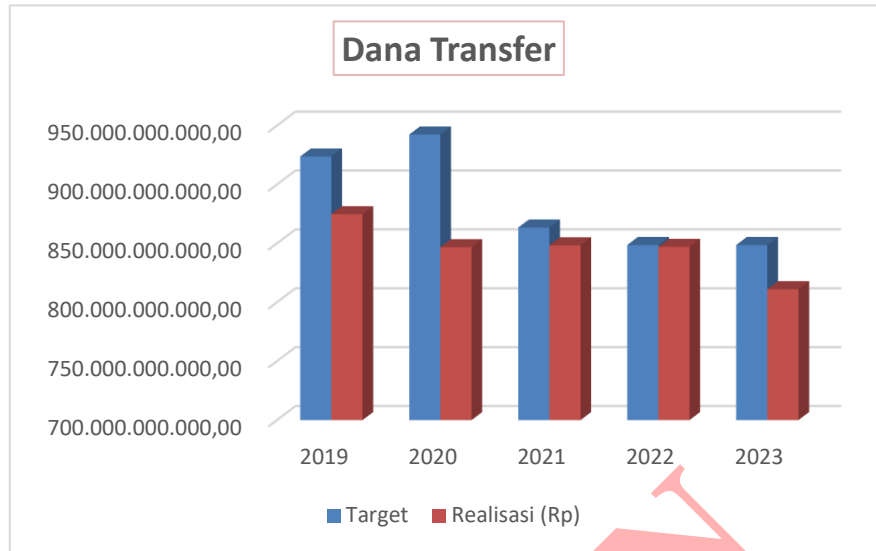
Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, dari Tahun Anggaran 2019 sampai Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp9.478.487.473,54 atau 9,83%, kemudian Tahun Anggaran 2020 sampai Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp18.888.318.951,16 atau 17,84%, Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.684.434.375,88 atau 5,38% dan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.855.201.063,67 atau 12,93%

Untuk Dana Perimbangan, realisasi penerimaan adalah sebesar Rp848.357.925.005,00 atau 90,21% dari target yang ditetapkan sebesar Rp940.387.603.169,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer dari tahun 2019 sampai dengan 2023 secara jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel Perkembangan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019-2023**

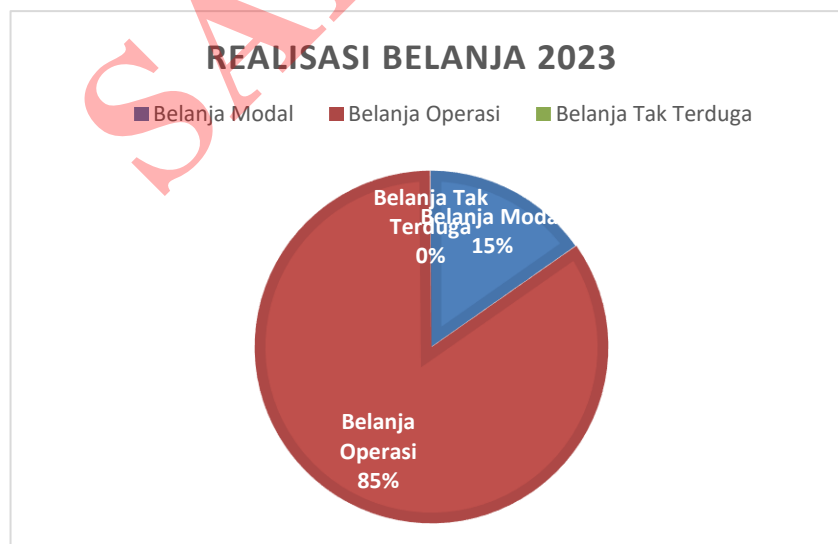
Tahun Anggaran	Target	Realisasi (Rp)	% Perkembangan	
			Target	Realisasi
2019	923,812,131,000.00	874,822,346,811.00	-	-
2020	942,468,720,281.00	846,824,505,760.00	2.20	(2.97)
2021	863,492,082,000.00	848,383,083,039.00	(9.31)	0.18
2022	848,676,176,011.00	847,110,321,079.00	(1.75)	(0.15)
2023	940,387,603,169.00	848,357,925,005.00	10.81	0.13

### Grafik Perkembangan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 – 2023



Untuk belanja daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.142.924.415.701,73 dan realisasikan sebesar Rp997.232.861.242,65 atau 87,25% sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp145.691.554.459,08 atau 12,75%.

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp941.492.189.010,00 dan direalisasikan sebesar Rp845.299.917.881,06 atau sebesar 89,78%. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp199.932.226.691,73 dan Realisasi Rp150.560.092.761,59 atau 75,31%, sedangkan Belanja Tak Terduga dianggarkan Rp1.500.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp1.372.850.600,00 atau 91,52%.



### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	503.505.508.562,00	451.162.028.029,87	89,60
2	Belanja Barang dan Jasa	427.587.680.448,00	384.990.027.073,19	90,04
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	8.630.000.000,00	7.378.862.778,00	85,50
5	Belanja Bantuan Sosial	1.769.000.000,00	1.769.000.000,00	100,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>941.492.189.010,00</b>	<b>845.299.917.881,06</b>	<b>89,78</b>

Belanja Modal diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan- kegiatan dan program. Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp199.932.226.691,73 dan terealisasi sebesar Rp150.560.092.761,59 atau 75,31%.

Adapun belanja Tak Terduga untuk Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.372.850.600,00 atau 91,52%.

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran dari target Penerimaan Pembiayaan netto sebesar Rp42.220.498.989,73 dapat direalisasikan sebesar Rp. Rp40.749.197.178,52, realisasi penerimaan ini seluruhnya berasal dari SIKPA Tahun Anggaran sebelumnya.

### III.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2023, yaitu:

1. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerja dan target SKPD;
2. Belum optimalnya kinerja Kerjasama Informasi dan Media Massa dalam jumlah kerjasama bidang informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media cetak dengan kecenderungan masyarakat lebih menyukai informasi yang berasal dari media elektronik dibandingkan dengan media cetak;
3. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
4. Kelembagaan perangkat daerah yang belum ramping struktur dan kaya fungsi;
5. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal;
6. Belum optimalnya pengelolaan aset;
7. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah;
8. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;

2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara
4. dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan instansi vertikal lainnya dan
6. Dengan meningkatnya penyebarluasan informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

SALINAN

**BAB IV**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA**  
**PROGRAM PEMERINTAH KOTA**  
**TERNATE**

**VI.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA TERNATE**

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2023, alokasi Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp246.954.492.594,00 atau 21,61% dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan 3 program dengan 11 kegiatan dan 56 sub kegiatan. Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan.

**Alokasi Belanja Daerah Per Urusan Tahun Anggaran 2023**

No	Nama SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023
<b>A</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>598.739.123.595,73</b>	<b>497.951.758.567,31</b>
1	DINAS PENDIDIKAN	246.954.492.594,00	210.701.995.105,00
2	DINAS KESEHATAN	133.286.685.294,00	115.435.728.178,70
3	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	147.016.895.692,73	106.940.859.134,61
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN & PERTANAHAN	29.794.084.526,00	27.565.788.957,00
5	DINAS KEBAKARAN	7.895.947.348,00	7.158.264.517,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.758.237.919,00	10.096.346.026,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.498.371.401,00	9.098.038.265,00
8	DINAS SOSIAL	12.534.408.821,00	10.954.738.384,00
<b>B</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>142.028.366.142,00</b>	<b>131.874.715.524,34</b>
8	DINAS TENAGA KERJA	5.979.741.779,00	5.549.578.913,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	9.147.562.775,00	8.173.109.959,16
10	DINAS KETAHAHAN PANGAN	6.163.974.403,00	5.798.396.508,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	39.390.067.976,00	37.190.099.408,18
12	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	7.220.243.691,00	6.682.974.507,00
13	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN & KELUARGA BERENCANA	9.873.515.863,00	9.292.451.869,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	13.666.302.264,00	12.806.280.549,00
15	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA & PERSANDIAN	7.928.794.696,00	7.669.990.160,00

No	Nama SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023
16	DINAS KOPERASI USAHA KECIL & MENENGAH	10.491.905.501,00	10.120.579.994,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	6.785.161.587,00	6.297.555.391,00
18	DINAS PEMUDA & OLAH RAGA	9.109.775.534,00	8.254.429.238,00
19	DINAS KEBUDAYAAN	9.270.775.349,00	8.730.185.529,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH	7.000.544.724,00	5.309.083.499,00
<b>C</b>	<b>Urusan Pilihan</b>	<b>71.117.299.728,00</b>	<b>64.347.228.088,00</b>
21	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	21.250.534.194,00	20.576.936.658,00
22	DINAS PARIWISATA	14.356.571.613,00	12.420.817.866,00
23	DINAS PERTANIAN	17.761.014.887,00	15.549.775.379,00
24	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	17.749.179.034,00	15.799.698.185,00
<b>D</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	<b>331.039.626.236,00</b>	<b>303.059.159.063,00</b>
25	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	0,00	0,00
26	WALIKOTAWAKIL WALIKOTA	0,00	0,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	54.282.288.844,00	50.278.266.708,00
28	SEKRETARIAT DPRD	57.902.393.415,00	54.959.366.011,00
29	KECAMATAN TERNATE UTARA	21.076.615.125,00	19.585.404.762,00
30	KECAMATAN TERNATE TENGAH	22.363.717.546,00	21.287.565.468,00
31	KECAMATAN TERNATE SELATAN	22.841.702.444,00	21.920.914.397,00
32	KECAMATAN PULAU TERNATE	8.568.900.599,00	8.249.951.373,00
33	KECAMATAN MOTI	7.784.828.276,00	6.182.712.210,00
34	KECAMATAN PULAU HIRI	6.359.543.423,00	5.915.946.046,00
35	KECAMATAN PULAU BATANG DUA	7.023.685.150,00	6.265.667.580,00
36	KECAMATAN TERNATE BARAT	9.966.307.544,00	9.327.239.288,00
37	INSPEKTORAT DAERAH	9.280.398.680,00	8.405.995.126,00
38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH	20.555.464.671,00	20.145.185.568,00
39	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH	18.214.440.121,00	14.619.544.147,00
40	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH (PPKD)	0,00	0,00
41	BADAN PENGELOLAAN PAJAK & RETRIBUSI DAERAH	30.299.578.301,00	27.188.473.062,00
42	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH	19.851.531.986,00	16.952.305.063,00
43	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	14.668.230.111,00	11.774.622.254,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.142.924.415.701,73</b>	<b>1.142.924.415.701,73</b>

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor, gedung sekolah, puskesmas, posyandu, pengadaan buku dan alat tulis sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PJU dan rehabilitasi taman.



Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun Anggaran 2023.

## **VI.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
2. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali;
3. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedia media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat SKPD; dan
4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **V.1. ENTITAS PELAPORAN**

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 adalah Pemerintah Kota Ternate. Selain itu Pemerintah Kota Ternate memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD) yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya. Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Ternate Terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman & Pertanahan
5. Dinas Kebakaran
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Sosial
8. Dinas Tenaga Kerja
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
13. Dinas Pengendalian Kependudukan & Keluarga Berencana
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi Informatika & Persandian
16. Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah
17. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Pemuda & Olah Raga
19. Dinas Kebudayaan
20. Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
21. Dinas Kelautan & Perikanan
22. Dinas Pariwisata
23. Dinas Pertanian
24. Dinas Perindustrian & Perdagangan
25. Sekretariat Daerah
26. Sekretariat DPRD
27. Kecamatan Ternate Utara
28. Kecamatan Ternate Tengah
29. Kecamatan Ternate Selatan
30. Kecamatan Pulau Ternate
31. Kecamatan Moti
32. Kecamatan Pulau Hiri
33. Kecamatan Pulau Batang Dua
34. Kecamatan Ternate Barat

35. Inspektorat Daerah
36. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian & Pengembangan Daerah
37. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
38. Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah
39. Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah
40. Badan Kesatuan Bangsa & Politik
41. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

LKPD Kota Ternate TA 2023 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaan APBD pada seluruh SKPD dan PPKD (BUD) dalam lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

### **I.3.2 Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, dimana pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014.

#### **1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

LP SAL disajikan berdasarkan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran. LP SAL disajikan pada entitas akuntansi PPKD (BUD) dan entitas pelaporan. Penyajian LP SAL mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014.

#### **2. Laporan Operasional**

Laporan Operasional disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama Tahun Anggaran 2023 dengan menelusuri baik transaksi kas dan transaksi non kas. Penyajian Laporan Operasional mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014. Laporan operasional yang disajikan tidak melulu terpaku pada struktur APBD Pemerintah Kota Ternate, sehingga bisa saja terdapat perbedaan penyajian satu transaksi pada LRA dan LO, contohnya adalah penyajian penerimaan hasil lelang dari aset daerah yang sudah dihapuskan, penyajian penerimaan dan pengeluaran hibah, dan sebagainya.

#### **3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Perubahan ekuitas disusun dan disajikan berdasarkan transaksi selama Tahun Anggaran 2022. Penyajian LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014.

#### 4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

#### V.2. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 adalah basis akrual. Dalam basis akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

#### V.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi adalah:

##### 1. Pendapatan

- a. **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kota Ternate yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non-exchange transactions). Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Ternate untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Kota Ternate menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran.

Pendapatan Pemerintah Kota Ternate dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi SKPD adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran. Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya badan layanan umum daerah. Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran timbul dari:

- 1) Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda dan sanksi);
- 2) Perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) untuk Pemerintah Daerah;
- 3) Hibah yang diterima dari pemerintah asing dan atau lembaga internasional;
- 4) Penghapusan hutang;
- 5) Sumbangan dari masyarakat dan/atau lembaga masyarakat;
- 6) Dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran untuk entitas akuntansi.

Pendapatan-LO dari jenis transaksi pertukaran tertentu harus diakui sebagai berikut:

- 1) Bila barang ataupun jasa tertentu yang dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi kontrak (jangka pendek ataupun jangka panjang), pendapatan harus diakui secara proporsional dengan total biaya yang diperkirakan dapat menghasilkan/menyelesaikan barang atau jasa tersebut guna memenuhi kontrak yang ada. Jika diperkirakan adanya kerugian, pendapatan harus tetap diakui mengikuti proporsi dengan perkiraan total biaya dan biaya harus tetap diakui sampai dengan barang ataupun jasa tersebut dapat memenuhi kontrak yang ada.
- 2) Bila uang muka diterima, seperti pada kegiatan yang berskala besar dan berjangka panjang, pendapatan tidak boleh diakui sampai biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut telah terjadi (tanpa memperhatikan apakah uang muka tersebut dapat dikembalikan/refundable). Kenaikan kas dan kenaikan pada kewajiban, seperti "pendapatan yang diterima di muka" harus dicatat pada saat kas diterima.

### **Sentralisasi Pendapatan**

Pendapatan Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan

tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain.

**b. Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Ternate. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD;
- 2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD;

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek, Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak

berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

## 2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah;
- b. terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

### 3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja **operasi** antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja **Barang** adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanjaperjalanan.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset takberwujud.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
  - (1) bertambah ekonomis/efisien,dan/atau
  - (2) bertambah umur ekonomis,dan/atau
  - (3) bertambah volume,dan/atau
  - (4) bertambah kapasitas produksi,dan/atau
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang

atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Belanja takterduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

#### **4. Transfer**

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

#### **5. Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah.

#### **6. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset nonlancar yaitu:

##### **a. Aset Lancar**

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas



kriteria sebagai berikut:

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0% (nol persen).
- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal di tetapkan penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 5 ( lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen)

Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- 1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0% (nol persen)
- 2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- 3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
- 4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (serratus persen).

Untuk Piutang dari Dana Bagi Hasil tidak dilakukan penyisihan, karena pencatatan piutang berdasarkan SK Gubernur dan pada tahun berikutnya piutang tersebut pasti dibayarkan berdasarkan SK yang sudah terbit.

Persediaan mencakup (1) barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, (2) barang dan jasa yang akan diserahkan/dijual ke Masyarakat/Pihak lain.

#### **b. Aset Non lancar**

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kota Ternate atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi:

- 1) investasi jangka panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan

investasi permanen.

- 2) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2023 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

- a) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidakberkelanjutan;

- b) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. investasi yang tidak dimaksudkan dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

- 3) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari:

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan mesin;
- c) Gedung dan bangunan;
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan;
- e) Aset tetap lainnya; dan
- f) Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Menurut Lampiran, tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya

sebagai berikut:

- a) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000 ke atas.
- b) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan dan aset tetap lainnya tanpa batasan nilai tertentu.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Sedangkan pengeluaran setelah perolehan awal untuk aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud diatas diperlakukan sebagai berikut:

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal

sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya. Penyusutan masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Keputusan Wali Kota Nomor 030/Kep.452 – DPKD/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Umur Ekonomis Barang Milik Daerah.

- 4) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- 5) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Asetlain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method).

Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang

diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun bukuberikutnya.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Kota Ternate yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Ternate.

## 7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Ternate. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggalpelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*), Utang Bunga (*Accrued Interest*), Utang Perhitungan pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang bunga atas utang Pemerintah Kota Ternate dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah Kota Ternate dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saat ini Pemerintah Kota Ternate tidak memiliki Kewajiban jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

Pemerintah Kota Ternate pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Kewajiban Pemerintah Kota Ternate dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Ternate pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

**c. Kewajiban Kontijensi**

Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah Kota Ternate, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan handal.

**8. Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Ternate, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Ternate.

## BAB VI

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2023. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2023.

#### VI.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN – LRA

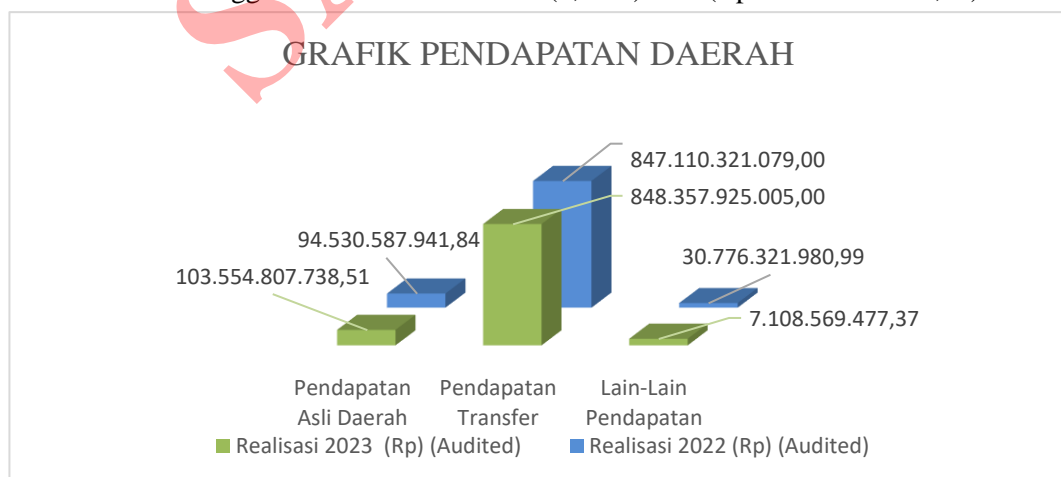
##### VI.1.1. PENDAPATAN –LRA

Pada Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp1.100.703.916.712,00 dan direalisasikan sebesar Rp959.021.302.220,88 atau 87,13% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari:

**Tabel Rincian Pendapatan LRA**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
1	Pendapatan Asli Daerah	154.057.010.943,00	103.554.807.738,51	67,22	94.530.587.941,84
2	Pendapatan Transfer	940.387.603.169,00	848.357.925.005,00	90,21	847.110.321.079,00
3	Lain-Lain Pendapatan	6.259.302.600,00	7.108.569.477,37	113,57	30.776.321.980,99
<b>Jumlah</b>		<b>1.100.703.916.712,00</b>	<b>959.021.302.220,88</b>	<b>87,13</b>	<b>972.417.231.001,83</b>

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022, maka realisasi Tahun Anggaran 2023 turun sebesar (1,38%) atau (Rp13.395.928.780,95).



**Grafik 6.1.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah  
Tahun Anggaran 2023**

Berdasarkan grafik di atas, jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota Ternate masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, dimana Pendapatan Transfer mencapai 90,21% dari total penerimaan Pendapatan Daerah.

#### VI.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 yang telah diterima oleh Kas Daerah terdiri dari:

**Tabel Pendapatan Asli Daerah**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
1	Pajak Daerah	71.502.853.083,00	74.699.927.100,00	104,74	66.655.543.333,50
2	Retribusi Daerah	32.300.000.000,00	19.870.715.616,00	61,52	18.684.010.470,00
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.000.000.000,00	3.747.741.808,05	74,95	2.877.193.432,16
4	Lain-lain PAD yang Sah	45.254.157.860,00	5.236.423.214,46	11,57	6.313.840.706,18
<b>Jumlah</b>		<b>154.057.010.943,00</b>	<b>103.554.807.738,51</b>	<b>67,22</b>	<b>94.530.587.941,84</b>

Berdasarkan rincian PAD di atas terlihat bahwa total target dari Pendapatan Asli Daerah belum mencapai target dari total Pendapatan Asli Daerah yang telah di anggarkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun Anggaran 2022, maka terjadi peningkatan sebesar Rp9.024.219.796,67 atau 9,55%. Adapun penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Daerah dengan kontribusi sebesar 104,47%.

##### VI.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Adapun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemungutan pajak daerah dibagi berdasarkan kategori pajaknya seperti:

**Tabel PERDA Tentang Pendapatan Pajak Daerah**

No.	PERDA	Tentang	Organisasi SKPD
1	14 Tahun 2014	Pajak Hotel	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
2	15 Tahun 2014	Pajak Restoran	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
3	16 Tahun 2014	Pajak Hiburan	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
4	17 Tahun 2014	Pajak Reklame	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5	18 Tahun 2014	Pajak Penerangan Jalan	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
6	19 Tahun 2014	Pajak Mineral Bukan Logam	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
7	20 Tahun 2014	Pajak Parkir	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



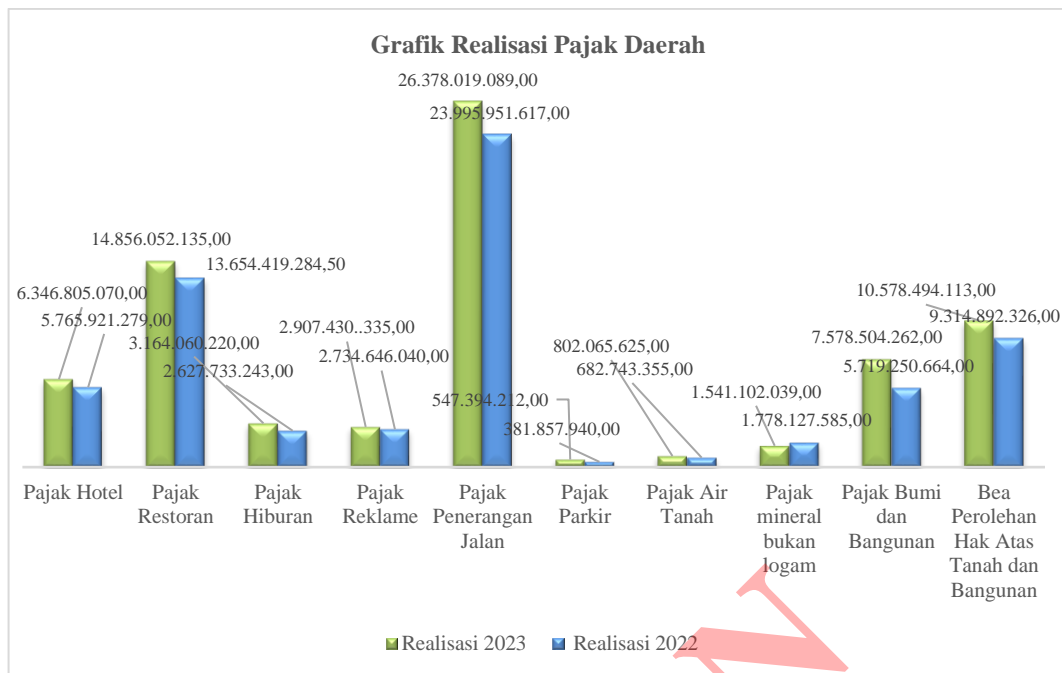
No.	PERDA	Tentang	Organisasi SKPD
8	21 Tahun 2014	Pajak Air Tanah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
9	22 Tahun 2014	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
10	5 Tahun 2013	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

**Tabel Rincian Pendapatan Pajak Daerah**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) ( <i>Audited</i> )	%	(Rp) ( <i>Audited</i> )
1	Pajak Hotel	6.000.000.000,00	6.346.805.070,00	105,78	5.765.921.279,00
2	Pajak Restoran	13.200.000.000,00	14.856.052.135,00	112,55	13.654.419.284,50
3	Pajak Hiburan	2.600.000.000,00	3.164.060.220,00	121,69	2.627.733.243,00
4	Pajak Reklame	2.750.000.000,00	2.907.430.335,00	105,72	2.734.646.040,00
5	Pajak Penerangan Jalan	24.652.853.083,00	26.378.019.089,00	107,00	23.995.951.617,00
6	Pajak Parkir	500.000.000,00	547.394.212,00	109,48	381.857.940,00
7	Pajak Air Tanah	600.000.000,00	802.065.625,00	133,68	682.743.355,00
8	Pajak mineral bukan logam	2.200.000.000,00	1.541.102.039,00	70,05	1.778.127.585,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	8.500.000.000,00	7.578.504.262,00	89,16	5.719.250.664,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.500.000.000,00	10.578.494.113,00	100,75	9.314.892.326,00
<b>Jumlah</b>		<b>71.502.853.083,00</b>	<b>74.699.927.100,00</b>	<b>104,47</b>	<b>66.655.543.333,50</b>

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa tidak seluruh akun Pajak melampaui target penerimaan yang ditetapkan. Persentase pelampauan target tertinggi yaitu pada realisasi penerimaan Pajak Air Bawah Tanah sebesar 133,68% atau melebihi target sebesar Rp202.065.625,00.



**Grafik Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022– 2023**

*(Dalam Jutaan Rupiah)*

Berdasarkan grafik realisasi di atas terlihat bahwa, sebagian besar komponen Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2023 memiliki realisasi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022.

#### VI.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Adapun Peraturan Daerah serta Organisasi SKPD Penanggung Jawab Retribusi Daerah tersebut adalah:

**Tabel Jenis dan Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah**

No.	PERDA	Tentang	Uraian	Organisasi SKPD
I	<b>Retribusi Jasa Umum</b>			
1.	11 Tahun 2011	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Pengambilan / Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara	Dinas Lingkungan Hidup
2.	3 Tahun 2011	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan
3.	10 Tahun 2010	Retribusi Pelayanan Pasar	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.	14 tahun 2011	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Retribusi PKB Mobil Bus Bus	Dinas Perhubungan
5	24 Tahun 2014	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Dinas Kebakaran

No.	PERDA	Tentang	Uraian	Organisasi SKPD
6	11 Tahun 2010	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	23 Tahun 2018	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>II</b> <b>Retribusi Jasa Usaha</b>				
1	22 Tahun 2018	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3. Dinas Pemuda dan Olahraga 4. Dinas Kelautan dan Perikanan 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	6 Tahun 2016	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	Pelelangan Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	9 Tahun 2010	Retribusi Terminal	Tempat Kegiatan Usaha	Dinas Perhubungan
4	7 Tahun 2016	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan
5	4 Tahun 2018	Retribusi Rumah Potong Hewan	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	Dinas Pertanian
6	13 Tahun 2011	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan	Dinas Perhubungan
7	26 Tahun 2014	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Pelayanan Tempat Rekreasi	Dinas Pariwisata
<b>III</b> <b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>				
1	2 Tahun 2018	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	14 Tahun 2011	Retribusi Izin Trayek		Dinas Perhubungan
3	25 tahun 2014	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Dinas Tenaga Kerja

Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 terdiri dari:

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
<b>I</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>13.850.000.000,00</b>	<b>7.096.088.550,00</b>	<b>51,24</b>	<b>5.292.946.300,00</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	180.000.000,00	183.663.950,00	102,04	98.302.300,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	6.000.000.000,00	5.031.184.000,00	83,85	3.759.583.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.000.000.000,00	1.116.253.600,00	18,60	751.174.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	25.000.000,00	41.946.000,00	167,78	23.268.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	215.000.000,00	100.920.000,00	46,94	0,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	980.000.000,00	377.700.000,00	38,54	506.460.000,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	75.000.000,00	50.210.000,00	66,95	57.520.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	375.000.000,00	194.211.000,00	51,79	96.639.000,00
<b>II</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>16.875.000.000,00</b>	<b>11.291.284.860,00</b>	<b>66,91</b>	<b>12.352.071.118,00</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.300.000.000,00	845.646.000,00	65,05	240.260.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir/atau Pertokoan	13.500.000.000,00	9.219.771.460,00	68,29	10.741.691.638,00
3	Retribusi Terminal	600.000.000,00	329.675.000,00	54,95	495.080.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	700.000.000,00	285.224.400,00	40,75	283.316.200,00
5	Retribusi Rumah potong Hewan	125.000.000,00	141.775.000,00	113,42	112.572.000,00
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000.000,00	169.550.000,00	84,78	176.029.280,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	450.000.000,00	298.643.000,00	66,37	303.122.000,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>	<b>1.575.000.000,00</b>	<b>1.483.342.206,00</b>	<b>94,18</b>	<b>1.038.993.052,00</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000,00	1.474.377.206,00	98,29	1.038.883.052,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	75.000.000,00	8.965.000,00	11,95	110.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>32.300.000.000,00</b>	<b>19.870.715.616,00</b>	<b>61,52</b>	<b>18.684.010.470,00</b>

### VI.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan realisasinya adalah Rp3.747.741.808,05 atau 74,95% yang diperoleh dari PT. BPRS Bahari Berkesan sebesar Rp2.582.607.766,05 yang merupakan Deviden tahun 2022 yang diterima tahun 2023 dan Deviden dari BPDM sesuai RUPS/ BPDM/2023/DEVIDEN sebesar Rp1.165.134.042,00 sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.000.000.000,00	3.747.741.808,05	74,95	2.877.193.432,16
<b>Jumlah</b>		<b>5.000.000.000,00</b>	<b>3.747.741.808,05</b>	<b>74,95</b>	<b>2.877.193.432,16</b>

### VI.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin kecuali Jasa giro dan Bunga Deposito. Adapun rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

NO	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	204.799.100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	31.229.157.860,00	484.683.564,00	1,55	826.542.500,00
3	Jasa Giro	300.000.000,00	176.841.512,80	58,95	2.921.348,95
4	Pendapatan Bunga	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	646.345.010,23	0,00	859.951.153,75
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	4.628.489,37
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	225.000.000,00	546.977.553,00	243,10	168.425.341,00
8	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan	0,00	1.835.356.402,88	0,00	369.565.053,26
10	Pendapatan dari Pengembalian	9.000.000.000,00	1.280.515.371,55	14,23	933.886.052,85
11	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
12	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	265.703.800,00	0,00	2.816.518.467,00
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA BOS	0,00	0,00	0,00	126.603.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>45.254.157.860,00</b>	<b>5.236.423.214,46</b>	<b>11,57</b>	<b>6.313.840.706,18</b>

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2023 dari anggaran sebesar Rp45.254.157.860,00 dan realisasinya sebesar Rp5.236.423.214,46 atau 11,57% mengalami penurunan sebesar Rp1.077.417.491,72 atau 17,06 % dari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.313.840.706,18.

Rincian Perolehan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2023 dijelaskan pada tabel berikut:

No	Uraian	Realisasi 2023
		(Rp) (Audited)
<b>1</b>	<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>484.683.564,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Hasil Sewa BMD</b>	<b>451.633.564,00</b>
	- Sewa Lahan pada BP2RD	412.558.564,00
	- Sewa Ruang Rapat pada Dinas Kesehatan	575.000,00
	- Sewa Bus Pariwisata pada Dinas Pariwisata	12.300.000,00
	- Sewa Gelora pada Dinas Pemuda dan Olahraga	9.700.000,00
	- Sewa Sport Hall pada Dinas Pemuda dan Olahraga	16.500.000,00
<b>1.2</b>	<b>Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD</b>	<b>33.050.000,00</b>
	- Penjualan Es Balok pada Dinas Kelautan dan Perikanan	33.050.000,00
<b>2</b>	<b>Jasa Giro</b>	<b>176.841.512,80</b>
<b>2.1</b>	<b>Jasa Giro pada Kas Daerah</b>	<b>176.106.432,00</b>
	- Jasa Giro pada Rekening BNI Kas Daerah	735.570,00
	- Remunirasi Dana Bagi Hasil Pusat	175.370.862,00
<b>2.2</b>	<b>Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP</b>	<b>735.080,80</b>
	- Jasa Giro Puskesmas Siko	127.258,93
	- Jasa Giro Puskesmas Sulamadaha	93.097,13
	- Jasa Giro Puskesmas Gambesi	127.642,65

No	Uraian	Realisasi 2023
		(Rp) (Audited)
	- Jasa Giro Puskesmas Kota	127.531,58
	- Jasa Giro Puskesmas Jambula	68.673,06
	- Jasa Giro Puskesmas Mayau	43.335,42
	- Jasa Giro Puskesmas Hiri	54.689,73
	- Jasa Giro Puskesmas Moti	56.894,43
	- Jasa Giro Puskesmas Bahari Berkesan	35.957,87
<b>3</b>	<b>Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</b>	<b>646.345.010,23</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain</b>	<b>646.345.010,23</b>
	- Bagi Hasil/Bonus/Administrasi Bank pada PPKD	646.345.010,23
<b>4</b>	<b>Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>	<b>546.977.553,00</b>
4.1	Pendapatan Denda Pajak Hotel - BP2RD	30.240.976,00
4.2	Pendapatan Denda Pajak Restoran - BP2RD	94.658.479,00
4.3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - BP2RD	17.516.632,00
4.4	Pendapatan Denda Pajak Reklame - BP2RD	4.430.754,00
4.5	Pendapatan Denda Pajak Parkir - BP2RD	12.414.338,00
4.6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - BP2RD	257.667,00
4.7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan - BP2RD	916.420,00
4.8	Pendapatan Denda Pajak Bumi & Bangunan - BP2RD	386.542.287,00
<b>5</b>	<b>Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan</b>	<b>1.835.356.402,88</b>
5.1	Hasil Eksekusi dan Jaminan atas Pengadaan Barang dan Jasa - Pengembalian tahun lalu	1.835.356.402,88
<b>6</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>1.280.515.371,55</b>
6.1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	-
6.2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Pengembalian Tahun Lalu	44.563.271,65
6.3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - Pengembalian Tahun Lalu	1.235.952.099,90
<b>7</b>	<b>Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)</b>	<b>265.703.800,00</b>
7.1	- Pendapatan Non Kapitasi pada Dinas Kesehatan	265.703.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.236.423.214,46</b>

### VI.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, dan transfer dari Pemerintah Provinsi, serta Bantuan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Ternate terdiri dari:

**Tabel Pendapatan Transfer**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	843.155.010.000,00	834.639.860.746,00	98,99	828.664.143.665,00
2	Pendapatan Transfer antar Daerah	97.232.593.169,00	13.718.064.259,00	14,11	18.446.177.414,00
<b>Jumlah</b>		<b>940.387.603.169,00</b>	<b>848.357.925.005,00</b>	<b>90,21</b>	<b>847.110.321.079,00</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 realisasi Pendapatan Transfer mencapai nilai sebesar Rp848.357.925.005,00 atau 90,21% dari target yang dianggarkan sebesar Rp940.387.603.169,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022, maka di Tahun Anggaran 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp1.247.603.926,00 atau 0,15%.

#### VI.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah. Untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2022 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

**Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
1	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>812.768.509.000,00</b>	<b>804.253.359.746,00</b>	<b>98,95</b>	<b>816.874.898.665,00</b>
1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	44.021.683.000,00	51.090.845.649,00	116,06	108.532.975.773,00
1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	609.216.898.000,00	609.216.898.000,00	100,00	585.402.476.250,00
1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	60.005.264.000,00	58.104.997.938,00	96,83	69.435.122.652,00
1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	99.524.664.000,00	85.840.618.159,00	86,25	53.504.323.990,00
2	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>30.386.501.000,00</b>	<b>30.386.501.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.789.245.000,00</b>
2.1	DID	30.386.501.000,00	30.386.501.000,00	100,00	11.789.245.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>843.155.010.000,00</b>	<b>834.639.860.746,00</b>	<b>98,99</b>	<b>828.664.143.665,00</b>



Rincian Dana Transfer Umum di Tahun 2023 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Dana Bagi Hasil Pajak**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.145.964.000,00	2.730.301.630,00	127,23	5.775.161.831,00
2	DBH PPh 21	12.198.187.000,00	13.549.644.205,00	111,08	21.266.149.936,00
3	DBH PPh Ps 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	1.367.327.964,00	0,00	1.431.042.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.344.151.000,00</b>	<b>17.647.273.799,00</b>	<b>123,03</b>	<b>28.472.353.767,00</b>

**Tabel Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	159.564.600,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	19.922.000,00	24.634.112,00	123,65	43.578.000,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	3.561.754.816,00	0,00	74.432.054.406,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	27.015.545.000,00	27.000.483.000,00	99,94	3.410.195.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	254.330.000,00	257.211.711,00	101,13	0,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0,00	0,00	0,00	56.919.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.387.735.000,00	2.599.488.211,00	108,87	1.958.311.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>29.677.532.000,00</b>	<b>33.443.571.850,00</b>	<b>112,69</b>	<b>80.060.622.006,00</b>
<b>Total Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</b>		<b>44.021.683.000,00</b>	<b>51.090.845.649,00</b>	<b>116,06</b>	<b>108.532.975.773,00</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp834.639.860.746,00 atau 98,99%. Realisasi tertinggi dihasilkan dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu sebesar Rp51.090.845.649,00 atau mencapai 116,06%. Jika dibandingkan dengan Keseluruhan realisasi penerimaan Dana Transfer Pusat pada Tahun Anggaran 2022 Rp828.664.143.665,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp5.975.717.081,00 atau 0,72%.

#### VI.1.1.2.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Transferan Dana Alokasi Umum di Tahun 2023 terbagi atas beberapa bagian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
1	DAU	579.897.478.000,00	505.079.650.000,00	91,67	585.402.476.250,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	15.600.000.000,00	15.600.000.000,00	100,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13.719.420.000,00	13.719.420.000,00	100,00	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	27.471.331.000,00	0,00	0,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	40.046.497.000,00	0,00	0,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	7.300.000.000,00	0,00	0,00
<b>Total Dana Alokasi Umum (DAU)</b>		<b>609.216.898.000,00</b>	<b>609.216.898.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>585.402.476.250,00</b>

Terlihat dari tabel diatas, realisasi penerimaan di Tahun 2023 mengalami kenaikan dari nilai realisasi di Tahun 2022 sebesar Rp23.814.421.750 atau 4,07%.

#### VI.1.1.2.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)

Untuk Dana Alolasi Khusus di Tahun 2023 di bagi menjadi dua bagian yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-Paud	488.879.000,00	396.070.476,00	81,02	209.228.997,00
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.658.206.000,00	3.980.237.071,00	85,45	10.141.975.754,00
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.826.025.000,00	2.738.398.469,00	96,90	6.536.640.355,00
4	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-KB	1.552.028.000,00	1.537.745.798,00	99,08	0,00
5	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	1.463.585.400,00
6	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	4.407.585.600,00
7	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	2.823.437.604,00
8	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
9	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.239.989.596,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Pungutan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/ Pariwisata	0,00	0,00	0,00	1.812.980.400,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Afirmasi--Penguatan Prasarana dasar Puskesmas	0,00	0,00	0,00	464.609.592,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	1.212.160.148,00
14	DAK-Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting(KB)	0,00	0,00	0,00	571.360.860,00
15	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler- Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	619.717.600,00
16	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi- Penyediaan Rumah Swadaya	10.977.000.000,00	10.914.798.241,00	99,43	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah- Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	3.623.844.600,00
18	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.238.450.000,00	1.162.766.000,00	93,89	5.635.170.501,00
19	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan -Penugasan	12.747.957.000,00	12.375.173.614,00	97,08	4.382.189.607,00
20	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.268.632.606,00
21	DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan	19.506.917.000,00	19.243.394.280,00	98,65	7.019.641.692,00
22	DAK Fisik-Bidang Jalan-	0,00	0,00	0,00	3.739.195.267,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
	Penugasan-Jalan				
23	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	415.000.000,00	408.152.543,00	98,35	3.415.427.900,00
24	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00	100,00	3.138.897.000,00
26	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	0,00	0,00	0,00	668.000.000,00
27	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
28	DAK Fisik-Bidang Lingkungan dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.002.836.000,00
29	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi	0,00	0,00	0,00	665.933.173,00
30	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.192.500.000,00
31	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	2.250.032.000,00	2.181.553.123,00	96,96	0,00
32	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler	0,00	0,00	0,00	662.500.000,00
33	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Pemukiman-Penugasan	0,00	0,00	0,00	517.082.400,00
34	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	2.103.571.000,00	1.926.808.323,00	91,60	0,00
35	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	201.199.000,00	199.900.000,00	99,35	0,00
a	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>	<b>60.005.264.000,00</b>	<b>58.104.997.938,00</b>	<b>96,83</b>	<b>69.435.122.652,00</b>

Tabel Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
36	DAK Non Fisik-BOS Reguler	32.059.080.000,00	23.495.637.618,00	73,29	0,00
37	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.305.000.000,00	780.000.000,00	59,77	0,00
38	DAK Non Fisik-BOS TPG PNSD	39.983.111.000,00	39.251.743.300,00	98,17	37.065.823.580,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
39	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.144.500.000,00	1.144.500.000,00	100,00	1.442.500.000,00
40	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.073.600.000,00	0,00	0,00	0,00
41	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	888.240.000,00	444.480.000,00	50,04	0,00
42	DAK Non Fisik-BOKKB BOK	4.148.980.000,00	3.710.069.741,00	89,42	9.260.904.446,00
43	DAK Non Fisik-BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan	369.184.000,00	0,00	0,00	0,00
44	DAK Non Fisik-BOKKB Akreditasi Puskesmas	12.605.387.000,00	0,00	0,00	0,00
45	DAK Non Fisik-BOKKB Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DAK Non Fisik-BOKKB BOKB	2.910.812.000,00	2.652.414.658,00	91,12	1.311.436.000,00
47	DAK Non Fisik-PK2UKM	369.370.000,00	285.855.350,00	77,39	964.302.000,00
48	DAK Non Fisik- Dan Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
49	DAK Non Fisik- Dan Pelayanan Kepariwisata	200.000.000,00	179.442.341,00	89,72	978.604.000,00
50	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	0,00	0,00
51	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	417.400.000,00	417.399.997,00	100,00	380.149.000,00
52	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	1.303.804.964,00
53	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00	487.880.000,00	81,59	0,00
54	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	452.000.000,00	385.808.050,00	85,36	796.800.000,00
55	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	12.605.387.104,00	0,00	0,00
<b>b</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>99.524.664.000,00</b>	<b>85.840.618.159,00</b>	<b>86,25</b>	<b>53.504.323.990,00</b>
<b>TOTAL DAK</b>		<b>159.529.928.000,00</b>	<b>143.945.616.097,00</b>	<b>90,23</b>	<b>122.939.446.642,00</b>

#### VI.1.1.2.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Insentif Daerah

Pada tahun 2023, Dana Insentif Daerah merupakan bagian dari akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sedangkan pada tahun 2022 akun Pendapatan Transfer Pusat Lainnya terdiri dari dana tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Dana Insentif Daerah sebagai berikut:

**Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023 ( <i>Audited</i> )		Realisasi 2022 ( <i>Audited</i> )
		2023 (Rp)	2023 (Rp)	%	(Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	30.386.501.000,00	30.386.501.000,00	100,00	11.789.245.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>30.386.501.000,00</b>	<b>30.386.501.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.789.245.000,00</b>

Dana Insentif Daerah yaitu dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan kriteria utama adalah Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun lalu dan bisa menetapkan Perda APBD tepat waktu. Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah pada tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp18.597.256.000,00 atau 157,75% jika dibandingkan tahun 2022.

#### VI.1.1.2.5 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Akun Transfer bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya Provinsi adalah yang dibagikan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing daerah, dan untuk Tahun 2023 dana bagi hasil sepenuhnya berasal dari bagi hasil pajak dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) ( <i>Audited</i> )	%	(Rp) ( <i>Audited</i> )
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	21.701.942.763,00	1.259.277.437,00	5,80	1.255.556.879,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.769.796.711,00	1.608.082.519,00	7,06	1.422.732.319,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.597.256.194,00	7.620.265.601,00	18,32	3.203.016.293,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.640.659.501,00	0,00	0,00	664.003.108,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.522.938.000,00	3.230.438.702,00	33,92	11.900.868.815,00
<b>Jumlah</b>		<b>97.232.593.169,00</b>	<b>13.718.064.259,00</b>	<b>14,11</b>	<b>18.446.177.414,00</b>

Tabel rincian di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan untuk akun ini sebesar Rp13.718.064.259,00 atau 14,11% sehingga tidak dapat mencapai target penerimaan dari yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2022, maka terjadi Penurunan sebesar Rp4.728.113.155,00 atau 25,63%.

#### VI.1.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah yang bukan bersumber dari PAD dan Dana Transfer. Akun ini menampung penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya dengan rincian perbandingan realisasi pada tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
I	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>4.973.313.000,00</b>
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	4.973.313.000,00
II	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>6.259.302.600,00</b>	<b>7.108.569.477,37</b>	<b>113,57</b>	<b>25.803.008.980,99</b>
1	Pendapatan Hibah Dana Bos	0,00	0,00	0,00	24.001.071.340,00
2	Pendapatan dari BLUD	0,00	0,00	0,00	1.801.937.640,99
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.259.302.600,00	7.108.569.477,37	113,57	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.259.302.600,00</b>	<b>7.108.569.477,37</b>	<b>113,57</b>	<b>30.776.321.980,99</b>

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp7.108.569.477,37 terdiri dari Pendapatan JKN dan BLUD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

No.	Puskesmas FKTP dan BLUD	Anggaran Pendapatan TA 2023 (Rp)	Pendapatan TA 2023 (Rp)	Pendapatan TA 2022 (Rp)
1	Puskesmas Jambula	378.000.000,00	441.995.266,00	0,00
2	Puskesmas Gambesi	272.000.000,00	491.133.916,00	0,00
3	Puskesmas Kota	821.169.000,00	703.703.768,00	0,00
4	Puskesmas Sulamadaha	244.800.000,00	428.117.422,00	0,00
5	Puskesmas Siko	1.128.709.200,00	1.307.106.947,00	0,00
6	Puskesmas Mayau	180.000.000,00	174.413.931,00	0,00
7	Puskesmas Hiri	178.225.200,00	217.587.222,00	0,00
8	Puskesmas Perawatan Moti	294.379.200,00	315.946.757,00	0,00
9	Puskesmas Bahari Berkesan	302.605.200,00	337.490.851,00	0,00
10	Puskesmas Kalumata	1.549.921.600,00	1.722.164.569,93	1.151.410.775,20
11	Puskesmas Kalumpang	909.493.200,00	968.908.827,44	650.526.865,79
<b>JUMLAH</b>		<b>6.259.302.600,00</b>	<b>7.108.569.477,37</b>	<b>1.801.937.640,99</b>

## VI.1.2. BELANJA

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2023 akun Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp1.142.924.415.701,73 dan direalisasikan sebesar Rp997.232.861.242,65 atau 87,25% sehingga terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp145.691.554.458,35 atau 12,75%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp944.244.475.383,44, Belanja Daerah mengalami kenaikan Rp52.988.385.859,21 atau 5,61%. Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023 ( <i>Audited</i> )		Realisasi 2022 ( <i>Audited</i> )
			(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Operasional	941.492.189.010,00	845.299.917.881,06	89,78	753.025.207.943,12
2	Belanja Modal	199.932.226.691,73	150.560.092.761,59	75,31	171.446.515.540,32
3	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	1.372.850.600,00	91,52	19.772.751.900,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.142.924.415.701,73</b>	<b>997.232.861.242,65</b>	<b>87,25</b>	<b>944.244.475.383,44</b>

Berdasarkan tabel realisasi di atas, terlihat bahwa realisasi belanja baik Belanja Operasi, Belanja Modal maupun Belanja Tak Terduga seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan dengan realisasi terendah pada akun Belanja Modal yaitu sebesar Rp150.560.092.761,59 atau 75,31%.

#### VI.1.2.1 Belanja Operasional

Belanja Operasional merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Ternate yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023 ( <i>Audited</i> )		Realisasi 2022 ( <i>Audited</i> )
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Pegawai	503.505.508.562,00	451.162.028.029,87	89,60	447.014.483.809,89
2	Belanja Barang dan Jasa	427.587.680.448,00	384.990.027.073,19	90,04	289.109.992.093,23
3	Belanja Hibah	8.630.000.000,00	7.378.862.778,00	85,50	14.552.134.040,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.769.000.000,00	1.769.000.000,00	100,00	2.348.598.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>941.492.189.010,00</b>	<b>845.299.917.881,06</b>	<b>89,78</b>	<b>753.025.207.943,12</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran Tahun Anggaran 2023 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp845.299.917.881,06 atau 89,78% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp941.492.189.010,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp96.192.271.128,94 atau 10,22%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pada pos Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp753.025.207.943,12 maka terjadi kenaikan realisasi belanja operasional sebesar Rp92.274.709.937,94 atau 12,25%. Berikut penjelasan ringkas mengenai realisasi Belanja Operasi tahun 2023.

##### VI.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah daerah. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp451.162.028.029,87 atau 89,60% dengan sisa anggaran belanja sebesar Rp52.343.480.532,13 atau 10,40%. Realisasi anggaran 2023 di tunjukan seperti pada tabel di bawah ini:



Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Objek Belanja Pegawai	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)		Realisasi 2022 (Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	305.572.528.000,00	293.490.161.998,00	96,05	289.148.029.754,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	112.256.917.014,00	92.679.928.434,00	82,56	116.253.082.240,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	56.476.387.934,00	43.047.799.524,87	76,22	10.246.759.624,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.352.589.473,00	19.866.335.599,00	97,61	20.080.178.197,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	201.640.549,00	168.618.717,00	83,62	162.363.869,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	741.768.792,00	647.540.662,00	87,30	688.968.792,00
7	Belanja Pegawai BOS	6.542.316.000,00	0,00	0,00	10.435.101.333,89
	Belanja Pegawai BLUD	1.361.360.800,00	1.261.643.095,00	92,68	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>503.505.508.562,00</b>	<b>451.162.028.029,87</b>	<b>89,60</b>	<b>447.014.483.809,89</b>

#### VI.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp384.990.027.073,19 atau 90,04% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp42.597.653.374,81 atau 9,96%. Realisasi pos belanja ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan barang cetakan, pembayaran tagihan air, listrik, dan telepon, penyediaan bibit tanaman dan ternak, persediaan obat, penyediaan bahan material untuk pemeliharaan bangunan dan gedung, serta jaringan irigasi, biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah. Pengeluaran belanja barang ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap SKPD. Belanja Barang ini terdiri dari:

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)		Realisasi 2022 (Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Barang	129.088.208.403,00	110.412.877.190,48	85,53	64.224.653.732,77
2	Belanja Jasa	172.875.880.690,00	154.446.280.745,60	89,34	136.334.402.012,18
3	Belanja Pemeliharaan	11.759.886.056,00	9.473.110.223,46	80,55	10.226.261.598,00

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)		Realisasi 2022 (Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
4	Belanja Perjalanan Dinas	75.850.803.265,00	64.635.964.467,00	85,21	57.664.653.872,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.295.094.920,00	9.313.619.141,00	90,47	9.567.426.634,00
6	Belanja Barang dan Jasa Bos	26.821.764.000,00	24.275.791.527,00	0,00	9.347.529.721,00
7	Belanja Barang dan Jasa Bos-BOP PAUD	0,00	268.560.000,00	0,00	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	175.920.000,00	0,00	0,00
9	Belanja Barang dan Jasa KPN Kapitasi	0,00	10.794.914.035,00	0,00	0,00
10	Belanja Barang dan Jasa BLUD	896.043.114,00	1.192.989.743,65	133,14	1.745.064.523,28
<b>Jumlah</b>		<b>427.587.680.448,00</b>	<b>384.990.027.073,19</b>	<b>90,04</b>	<b>289.109.992.093,23</b>

#### VI.1.2.1.3 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.378.862.778,00 atau 85,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.630.000.000. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.552.134.040,00, maka Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar (Rp7.173.271.262,00) atau (49,29%). Rincian Belanja Hibah tersebut sebagai berikut:

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah**

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi (Audited)	%	Realisasi (Audited)
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.278.000.000,00	6.027.172.778,00	82,81	13.823.176.500,00
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.352.000.000,00	1.351.690.000,00	99,98	728.957.540,00
<b>JUMLAH</b>		<b>8.630.000.000,00</b>	<b>7.378.862.778,00</b>	<b>85,50</b>	<b>14.552.134.040,00</b>

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.700.000.000,00	700.000.000,00	41,18	3.637.500.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	525.000.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
	Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.278.000.000,00	5.027.172.778,00	95,25	9.660.676.500,00
4	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.352.000.000,00	1.351.690.000,00	99,98	728.957.540,00
<b>Jumlah Belanja Hibah</b>		<b>8.630.000.000,00</b>	<b>7.378.862.778,00</b>	<b>85,50</b>	<b>14.552.134.040,00</b>

#### VI.1.2.1.3.1 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 sebesar Rp6.027.172.778,00 atau 82,81% dari Anggaran sebesar Rp7.278.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.823.176.500,00, maka terdapat penurunan sebesar (Rp7.796.003.722,00) atau (56,40%). Rincian Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari:

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.700.000.000,00	700.000.000,00	41,18	3.637.500.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	525.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.278.000.000,00	5.027.172.778,00	95,25	9.660.676.500,00
<b>Belanja Hibah</b>		<b>7.278.000.000,00</b>	<b>6.027.172.778,00</b>	<b>82,81</b>	<b>13.823.176.500,00</b>

#### VI.1.2.1.3.2 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.351.690.000,00 atau 99,98% dari Anggaran sebesar Rp1.352.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp728.957.540,00, maka terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp622.732.460,00 atau 85,43%. Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terdiri dari:

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Partai Politik**

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi 2023 (Audited)		Realisasi 2022 (Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	DPD Golkar	155.740.000,00	155.430.000,00	99,80	83.828.580,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi 2023 (Audited)		Realisasi 2022 (Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
2	DPD Demokrat	112.965.000,00	112.965.000,00	100,00	60.925.790,00
3	DPD PAN	78.270.000,00	78.270.000,00	100,00	42.213.620,00
4	DPC PDI - P	154.680.000,00	154.680.000,00	100,00	83.424.080,00
5	DPC Hanura	81.345.000,00	81.345.000,00	100,00	43.872.070,00
6	DPD PKS	84.675.000,00	84.675.000,00	100,00	45.668.050,00
7	DPC PPP	98.965.000,00	98.965.000,00	100,00	53.321.190,00
8	DPC PBB	65.970.000,00	65.970.000,00	100,00	35.579.820,00
9	DPD Nasdem	146.970.000,00	146.970.000,00	100,00	79.265.820,00
10	DPC Gerindra	89.640.000,00	89.640.000,00	100,00	48.345.840,00
12	DPC PKB	130.200.000,00	130.200.000,00	100,00	70.221.200,00
13	DPC Berkarya	73.140.000,00	73.140.000,00	100,00	39.446.840,00
14	DPC PERINDO	79.440.000,00	79.440.000,00	100,00	42.844.640,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.352.000.000,00</b>	<b>1.351.690.000,00</b>	<b>99,98</b>	<b>728.957.540,00</b>

#### VI.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga Non Pemerintah di bidang pendidikan dan keagamaan.

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp1.769.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.769.000.000,00 atau 100,00%. Realisasi pos belanja ini diperuntukkan untuk bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat, dan Organisasi Sosial Kelompok Masyarakat. Realisasi tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan tahun pengalokasian 2022 sebesar (Rp579.598.000,00) atau (24,68%). Rincian perbandingan realisasi belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial**

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)		Realisasi 2022 (Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1.	Bantuan Sosial untuk Keluarga kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	996.798.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.769.000.000,00	1.769.000.000,00	100,00	1.351.800.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.769.000.000,00</b>	<b>1.769.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.348.598.000,00</b>

#### VI.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Anggaran dan

realisasi belanja modal Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2023 serta perbandingan realisasinya dengan tahun 2022, rinciannya sebagai berikut:

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**

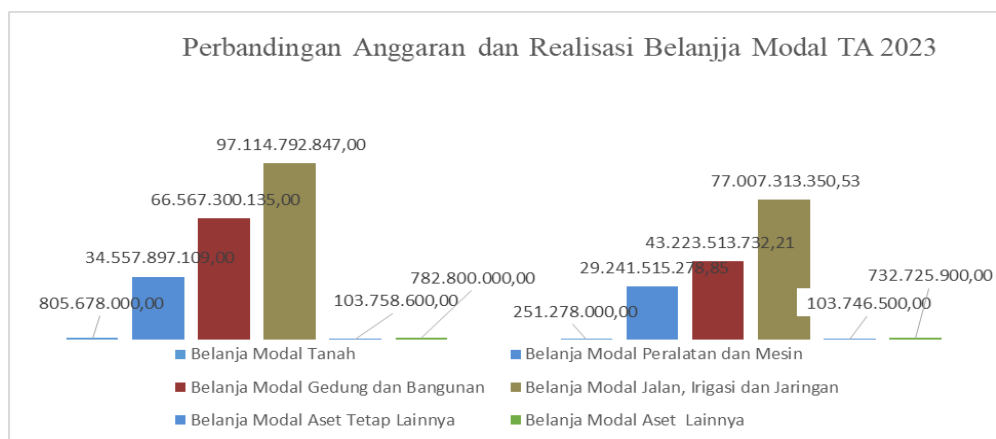
No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)		Realisasi 2022 (Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Modal Tanah	805.678.000,00	251.278.000,00	31,19	19.712.728.081,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.557.897.109,00	29.241.515.278,85	84,62	28.627.036.244,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.567.300.135,00	43.223.513.732,21	64,93	50.945.119.880,32
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	97.114.792.847,73	77.007.313.350,53	79,30	70.605.329.536,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	103.758.600,00	103.746.500,00	99,99	1.556.301.799,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	782.800.000,00	732.725.900,00	93,60	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>199.932.226.691,73</b>	<b>150.560.092.761,59</b>	<b>75,31</b>	<b>171.446.515.540,32</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp199.932.226.691,73 dan direalisasikan sebesar Rp150.560.092.761,59 atau 75,31%. Realisasi Belanja Modal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD selama Tahun Anggaran 2023.

Terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal dengan jumlah penambahan aset tetap dan aset lainnya hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, hal ini disebabkan karena tidak seluruh realisasi Belanja Modal menghasilkan aset tetap dan aset lainnya, karena apabila terdapat anggaran dengan kode rekening Belanja Modal namun setelah dihitung perjenis satuan barangnya tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap dan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap dan aset lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi, maka barang yang diperoleh akan dikelompokkan dalam barang inventaris.

Berikut disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2023.

**Grafik 6.1.2.2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023**



### VI.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah berdasarkan definisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp805.678.000,00 dan realisasikan sebesar Rp251.278.000,00 atau 31,19% realisasi tersebut turun sebesar Rp19.461.450.081,00 atau 98,73% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.712.728.081,00.

Rincian penetapan Anggaran tahun 2023 dan perbandingan realisasinya antara tahun 2023 dan 2022 pada Belanja Modal Tanah sebagai berikut:

**Tabel Pendapatan Anggaran dan Perbandingan Realisasi**

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022 (Audited)
			(Audited)		
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	805.678.000,00	251.278.000,00	31,19	0,00
2	Belanja Modal Tanah Untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	17.713.247.581,00
3	Belanja Modal Tanah Daerah Pertahanan	0,00	0,00	0,00	1.999.480.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>805.678.000,00</b>	<b>251.278.000,00</b>	<b>31,19</b>	<b>19.712.728.081,00</b>

Rincian Belanja Modal Tanah per SKPD adalah sebagai berikut :

**Tabel Rincian Belanja Modal Tanah per SKPD**

No.	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)		Realisasi 2022 (Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	0,00	0,00	0,00	17.713.247.581,00
2	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	805.678.000,00	251.278.000,00	31,19	1.999.480.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>805.678.000,00</b>	<b>251.278.000,00</b>	<b>31,19</b>	<b>19.712.728.081,00</b>

### VI.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap Peralatan dan Mesin yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dan menambah aset pemerintah. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp34.557.897.109,00 dan direalisasikan sebesar Rp29.241.515.278,85 atau 84,62%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp614.479.034,85 atau 2,15%. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada halaman tabel di bawah ini:

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
1	Belanja Modal Tractor	132.800.000,00	129.642.000,00	97,62	181.818.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
2	Belanja Modal Electric Generating Set	38.826.200,00	7.069.750,00	18,21	0,00
3	Belanja Modal Pompa	9.174.748,00	7.623.111,00	83,09	10.010.000,00
4	Belanja Modal Mesin Bor	9.082.000,00	9.024.300,00	99,36	0,00
5	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	3.496.500,00
6	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.533.000.000,00	1.200.000.000,00	78,28	440.000.000,00
7	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.800.000.000,00	3.150.500.000,00	82,91	0,00
8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.745.500.000,00	4.590.000.000,00	68,05	3.477.489.000,00
9	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	155.320.000,00	143.351.000,00	92,29	301.387.000,00
10	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.375.000.000,00	2.375.000.000,00	100,00	0,00
11	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	750.000.000,00	590.000.000,00	78,67	754.100.000,00
12	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	60.000.000,00	59.990.000,00	99,98	66.900.000,00
13	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	475.000.000,00	473.964.000,00	99,78	0,00
14	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	149.706.810,00
15	Belanja Modal Peralatan Las	3.050.000,00	3.035.850,00	99,54	0,00
16	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	120.447.195,00	114.387.360,00	94,97	0,00
17	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	6.264.500,00	6.216.000,00	99,23	0,00
18	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	18.194.400,00	18.115.200,00	99,56	0,00
19	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	2.777.088,00	2.775.800,00	99,95	0,00
20	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	83.490.000,00	83.250.000,00	99,71	0,00
21	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	444.149.043,00	373.931.426,85	84,19	2.569.509.566,00
22	Belanja Modal Mebel	3.034.531.649,00	2.034.687.402,00	67,05	3.688.124.748,00
23	Belanja Modal Alat Pembersih	224.666.280,00	148.568.280,00	66,13	59.168.900,00
24	Belanja Modal Alat	971.794.293,00	813.094.758,00	83,67	455.999.980,00

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
	Pendingin				
25	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	163.484.360,00
26	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	339.291.149,00	285.809.100,00	84,24	183.661.000,00
27	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakara	493.265.136,00	483.679.277,00	98,06	0,00
28	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	1.379.400,00
29	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00
30	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	40.906.800,00	30.609.900,00	74,83	23.060.000,00
31	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	210.650.000,00	184.308.730,00	87,50	341.401.830,00
32	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.124.178.170,00	1.075.055.731,00	95,63	73.050.000,00
33	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	67.497.934,00	66.827.500,00	99,01	0,00
34	Belanja Modal Peralatan Cetak	834.358.535,00	740.150.733,00	88,71	0,00
35	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	413.764.174,00	387.339.900,00	93,61	0,00
36	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	0,00	8.490.600,00
37	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	118.848.000,00
38	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	47.923.545,00	47.727.500,00	99,59	88.978.931,00
39	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
40	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.540.000.000,00	1.525.726.798,00	99,07	871.806.150,00
41	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.462.218.300,00	4.312.095.386,00	96,64	6.364.658.260,00
42	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
43	Belanja Modal Komputer Jaringan	150.865.000,00	146.106.500,00	96,85	0,00
44	Belanja Modal Personal Computer	2.604.920.468,00	2.421.682.016,00	92,97	5.901.043.778,00
45	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	531.275.420,00	531.275.420,00	100,00	23.125.000,00
46	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	10.231.400,00
47	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	63.222.415,00	57.721.150,00	91,30	801.305.485,00
48	Belanja Modal Peralatan Jaringan	237.129.500,00	235.897.200,00	99,48	212.814.100,00



No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp) (Audited)	%	(Rp) (Audited)
49	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	43.930.657,00	32.750.600,00	74,55	911.623.449,00
50	Belanja Modal Topi Kerja	1.782.300,00	0,00	0,00	0,00
51	Belanja Modal Sabuk Pengaman	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	0,00
52	Belanja Modal Sepatu Lapangan	9.535.020,00	0,00	0,00	0,00
53	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	0,00	109.335.000,00
54	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	150.000.000,00	149.218.000,00	0,00	0,00
55	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	5.566.000,00	5.566.000,00	100,00	0,00
56	Belanja Modal Peralatan Permainan	87.497.300,00	87.024.000,00	99,46	229.228.997,00
57	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	98.801.890,00	94.467.600,00	95,61	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>34.557.897.109,00</b>	<b>29.241.515.278,85</b>	<b>84,62</b>	<b>28.627.036.244,00</b>

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD

No.	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Audited)		(Audited)
			(Rp)	%	(Rp)
1.	Dinas Pendidikan	1.458.226.700,00	653.500.000,00	44,81	8.589.159.462,00
2	Dinas Kesehatan	8.583.333.316,00	7.737.446.307,85	90,15	6.467.858.260,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	10.155.172.480,00	7.581.903.995,00	74,66	3.286.180.375,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	604.165.257,00	592.084.618,00	98,00	62.219.000,00
5	Dinas Kebakaran	328.529.585,00	322.379.076,00	98,13	0,00
6	Satpol PP	11.341.550,00	11.341.550,00	100,00	59.953.190,00
7	Dinas Sosial	148.688.980,00	148.042.230,00	99,57	99.279.450,00
8	BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	142.752.260,00	141.944.950,00	99,43	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan	72.984.450,00	72.984.450,00	100,00	172.029.800,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	51.024.630,00	47.420.000,00	92,94	87.254.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	742.306.380,00	736.450.900,00	99,21	933.471.850,00
13	Dinas Kependudukan dan Capil	231.387.000,00	176.000.000,00	76,06	373.959.250,00
14	Dinas KB	1.540.000.000,00	1.525.726.798,00	99,07	1.212.160.148,00
15	Dinas Perhubungan	1.131.617.530,00	970.455.000,00	85,76	0,00
16	Dinas Kominfo	874.365.510,00	869.678.850,00	99,46	128.748.000,00
17	Dinas Koperasi	0,00	0,00	0,00	11.954.250,00
18	Dinas Penanaman Modal	106.074.320,00	105.441.750,00	99,40	78.690.000,00

No.	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022 (Audited)
			(Audited)		
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	129.025.050,00	129.020.850,00	100,00	28.200.000,00
20	Dinas Kebudayaan	56.990.890,00	56.701.230,00	99,49	20.327.000,00
21	Dinas Perpustakaan	211.016.410,00	210.235.959,00	99,63	89.781.200,00
22	Dinas Kelautan	21.011.760,00	21.011.350,00	100,00	0,00
23	Dinas Pariwisata	303.973.840,00	302.016.205,00	99,36	443.303.741,00
24	Dinas Pertanian	319.402.080,00	312.958.000,00	97,98	1.129.705.000,00
25	Dinas Perindustrian	541.239.650,00	489.568.150,00	90,45	156.375.200,00
26	Sekretariat Daerah	1.397.781.477,00	805.496.673,00	57,63	602.292.365,00
27	Inspektorat Daerah	105.015.790,00	104.656.800,00	99,66	161.322.050,00
28	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	193.033.480,00	191.054.900,00	98,98	869.363.750,00
29	BPKAD	369.633.936,00	311.471.500,00	84,26	50.428.750,00
30	BP2RD	414.776.923,00	396.815.575,00	95,67	572.368.600,00
31	Badan Kepegawaian	557.787.610,00	542.602.850,00	97,28	338.412.500,00
32	Sekretariat DPRD	3.025.028.415,00	2.980.004.000,00	98,51	1.419.714.693,00
33	Kec. Ternate Utara	73.635.870,00	73.603.670,00	99,96	176.725.340,00
34	Kec. Ternate Tengah	57.818.530,00	33.467.170,00	57,88	147.377.950,00
35	Kec. Ternate Selatan	68.681.800,00	68.610.600,00	99,90	297.456.810,00
36	Kec. Pulau Ternate	118.967.200,00	118.967.200,00	100,00	103.587.720,00
37	Kec. Ternate Barat	84.694.560,00	84.629.800,00	99,92	87.737.330,00
38	Kec. Moti	62.771.170,00	62.661.000,00	99,82	230.387.300,00
39	Kec. Hiri	189.149.440,00	188.786.042,00	99,81	9.675.030,00
40	Kec. Pulau Batang Dua	65.625.280,00	64.375.280,00	98,10	129.576.880,00
41	Kesbang	8.866.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>34.557.897.109,00</b>	<b>29.241.515.278,85</b>	<b>84,62</b>	<b>28.627.036.244,00</b>

### VI.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap gedung dan bangunan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dan menambah aset pemerintah. Untuk Tahun 2023 realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada Pemerintah kota Ternate adalah sebesar Rp43.223.513.732,21, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

NO	URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022 (Audited)
			(Audited)		
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	42.234.934.608,00	27.907.163.792,71	66,08	21.072.305.488,29
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	79.999.952,00	79.999.952,00	100,00	0,00

NO	URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			(Audited)		(Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
	Bangunan Kesehatan				
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	44.823.900,00	44.823.900,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.465.161.824,00	9.497.005.640,00	70,53	16.177.564.194,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	4.677.940.700,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	671.852.045,00	548.243.045,00	81,60	0,00
10	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.111.447.053,00	2.065.732.607,00	40,41	4.171.452.417,00
11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00	49.589.000,00	99,18	0,00
13	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	1.335.491.500,00
14	Belanja Modal Pagar	4.859.099.753,00	2.980.974.826,50	61,35	3.510.365.581,03
15	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	49.981.000,00	49.980.969,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>66.567.300.135,00</b>	<b>43.223.513.732,21</b>	<b>64,93</b>	<b>50.945.119.880,32</b>

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD

No.	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			(Audited)		(Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1.	Dinas Pendidikan	14.180.591.368,00	9.898.828.388,00	69,81	16.177.564.194,00
2	Dinas Kesehatan	3.562.759.000,00	1.007.245.059,00	28,27	2.717.248.612,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	28.350.973.107,00	17.691.094.366,08	62,40	18.800.273.599,03
4	Dinas Perumahan	49.981.000,00	49.980.969,00	100,00	0,00
5	Dinas Sosial	4.218.275.531,00	3.092.146.973,00	73,30	0,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	900.000.000,00	629.323.156,16	69,92	0,00
7	Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	86.700.419,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	3.635.582.478,00	2.850.908.599,97	78,42	1.335.491.500,00

No.	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022 (Audited)
			(Audited)		
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
10	Dinas Perhubungan	149.917.000,00	149.374.000,00	99,64	1.128.534.450,00
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	237.640.000,00	237.093.230,00	99,77	0,00
13	Dinas Kelautan Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.033.255.103,00
14	Dinas Pariwisata	2.718.350.427,00	1.968.240.479,00	72,41	3.684.687.882,00
15	Dinas Pertanian	549.500.000,00	548.110.000,00	99,75	1.436.006.501,00
16	Dinas Pendustrian	673.980.000,00	389.553.749,00	57,80	1.020.517.000,00
18	Inspektorat Daerah	121.890.000,00	118.987.381,00	97,62	103.480.086,00
19	Sekretariat DPRD	3.132.502.996,00	1.758.039.585,00	56,12	0,00
20	Kec. Ternate Utara	596.922.715,00	96.922.715,00	16,24	117.600.000,00
21	Kec. Ternate Tengah	219.978.920,00	219.740.028,00	99,89	347.250.000,00
22	Kec. Ternate Selatan	106.731.180,00	106.709.600,00	99,98	0,00
23	Kec. Pulau Ternate	0,00	0,00	0,00	116.400.000,00
24	Kec. Moti	319.145.234,00	56.419.800,00	17,68	129.888.140,00
25	Kec. Pulau Hiri	128.896.510,00	0,00	100,00	154.720.000,00
26	Kec. Pulau Batang Dua	0,00	0,00	0,00	33.150.000,00
27	Kec. Ternate Barat	539.114.669,00	259.615.194,00	48,16	169.000.000,00
28	Kesbang	2.100.000.000,00	1.891.763.950,00	90,08	1.727.724.904,29
29	Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	199.100.000,00
30	BP2RD	74.568.000,00	74.520.000,00	99,94	426.527.490,00
<b>Jumlah</b>		<b>66.567.300.135,00</b>	<b>43.223.513.732,21</b>	<b>64,93</b>	<b>50.945.119.880,32</b>

#### VI.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal jalan irigasi dan jaringan adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap jalan irigasi dan jaringan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dan menambah nilai aset pemerintah. Untuk Tahun 2023 Pemerintah Kota Ternate menganggarkan belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp97.114.792.847,73 dan direalisasikan sebesar Rp77.007.313.350,53.

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)		Realisasi 2022 (Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Modal jalan Irigasi dan Jaringan-Belanja Modal Jalan Kabupaten/Kota	36.805.492.335,73	31.645.364.769,90	85,98	35.170.995.687,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Belanja Modal Jalan Khusus	4.863.417.973,00	4.421.415.148,00	90,91	0,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Belanja Modal Jalan Lainnya	5.941.714.825,00	4.679.118.279,73	78,75	0,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	5.489.423.200,00	4.657.265.675,00	84,84	0,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Jembatan Penyebrangan	269.568.000,00	208.651.500,00	77,40	5.219.530.722,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)		Realisasi 2022 (Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	15.668.217.360,00	10.903.155.230,51	69,59	8.581.026.948,00
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	14.460.491.610,00
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penangulanagn Bencana Alam Lainnya	23.038.898.464,00	18.105.528.638,53	78,59	0,00
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.261.739.825,00	565.642.909,91	44,83	3.662.209.302,00
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Instalasi Air Kotor lainnya	1.036.389.100,00	1.036.389.100,00	100,00	0,00
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Modal Instalasi - Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	3.045.955.441,00
17	Belanja Modal Instalasi - Belanja Modal Instalasi Pengelola Sampah	1.159.940.000,00	220.500.858,95	19,01	465.119.826,00
18	Belanja Modal Instalasi - Belanja Modal Instalasi Pengelola Sampah Lainnya	320.000.000,00	319.559.600,00	99,86	0,00
19	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	509.991.765,00	244.721.640,00	47,99	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>97.114.792.847,73</b>	<b>77.007.313.350,53</b>	<b>79,30</b>	<b>70.605.329.536,00</b>

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD Adalah sebagai berikut :

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD**

No.	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022 (Audited)
		(Rp)	(Audited)		(Rp)
			(Rp)	%	
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
			(Audited)		(Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
2	Dinas Pekerjaan Umum	77.109.558.531,73	58.802.739.989,53	76,26	66.574.927.728,00
3	Dinas Perumahan Permukiman	8.466.490.000,00	7.612.366.677,00	89,91	99.655.441,00
4	BPBD	4.629.577.000,00	4.011.002.570,00	86,64	897.750.818,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	116.550.000,00
6	Dinas Perhubungan	434.568.000,00	208.651.500,00	48,01	1.474.306.723,00
7	Perikanan	159.000.000,00	158.512.529,00	99,69	0,00
8	Dinas Pariwisata	89.375.525,00	89.250.000,00	99,86	237.507.476,00
9	Dinas Pertanian	427.500.000,00	427.500.000,00	100,00	808.000.000,00
10	Dinas Perdagangan dan Pendustrian	199.345.300,00	99.200.700,00	49,76	231.789.000,00
11	Kec. Ternate Utara	1.080.787.675,00	1.080.787.675,00	100,00	0,00
12	Kec. Ternate Tengah	1.193.736.420,00	1.193.736.420,00	100,00	0,00
13	Kec. Ternate Selatan	1.482.655.465,00	1.481.366.359,00	99,91	164.842.350,00
14	Kec. Pulau Ternate	531.200.947,00	531.200.947,00	100,00	0,00
15	Kec. Ternate Barat	374.720.001,00	374.720.001,00	100,00	0,00
16	Kec. Pulau Hiri	478.947.750,00	478.947.750,00	100,00	0,00
17	Kec. Moti	290.023.369,00	290.023.369,00	100,00	0,00
18	Kec. Pulau Batang Dua	167.306.864,00	167.306.864,00	100,00	0,00
19	Kesbang	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>97.114.792.847,73</b>	<b>77.007.313.350,53</b>	<b>79,30</b>	<b>70.605.329.536,00</b>

#### VI.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal aset tetap lainnya adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap lainnya yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dan menambah nilai aset pemerintah dan pada tahun 2023 Kota Ternate menganggarkan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp103.758.600,00 dan terealisasi sebesar Rp103.746.500,00.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

NO	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023		Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	103.758.600,00	103.746.500,00	99,99	1.556.301.799,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>103.758.600,00</b>	<b>103.746.500,00</b>	<b>99,99</b>	<b>1.556.301.799,00</b>

### VI.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal aset tetap lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: aset tidak berwujud - *software*. Untuk tahun 2023 Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp782.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp732.725.900,00 atau 93,60%.

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya**

NO	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)		Realisasi 2022 (Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Software	782.800.000,00	732.725.900,00	93,60	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>782.800.000,00</b>	<b>732.725.900,00</b>	<b>93,60</b>	<b>0,00</b>

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)		Realisasi 2022 (Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Dinas Koperasi	111.000.000,00	111.000.000,00	100,00	0,00
2	Dinas Pemudah dan Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
3	Dinas Pariwisata	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
4	Sekretariat Daerah	171.800.000,00	170.800.000,00	99,42	0,00
5	Inspektorat Daerah	50.000.000,00	49.839.000,00	99,68	0,00
6	badan Perencanaan pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	250.000.000,00	249.510.000,00	99,80	0,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	160.000.000,00	111.576.900,00	69,74	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>782.800.000,00</b>	<b>732.725.900,00</b>	<b>93,60</b>	<b>0,00</b>

### VI.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Ternate. Pada Tahun Anggaran 2023 Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.372.850.600,00 dengan persentase realisasi sebesar 91,52%.

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)		Realisasi 2022 (Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	1.372.850.600,00	91,52	19.772.751.900,00
<b>J u m l a h</b>		<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.372.850.600,00</b>	<b>91,52</b>	<b>19.772.751.900,00</b>

Adapun rincian belanja tak terduga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga**

No	No Bukti	Uraian	Nilai
1	01285/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.0.0/2023	Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi dan Kebakaran Dalam Wilayah Kota Ternate Tahun 2023 Sesuai SK Walikota No. 73/III.3/KT/2023 Tanggal, 17 Februari 2023	165.632.000,00
2	03906/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.0.0/2023	Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan darurat Pengurangan Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor di wilayah kota Ternate (Pekerjaan Rekonstruksi/bangun kembali talud pengaman tebing dan tanah kel. Malikurubu) Sesuai SK Walikota No. 133.A/III.3/KT/20	384.750.000,00
3	04155/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.0.0/2023	Pemby Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan darurat Pengurangan Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor di wilayah kota Ternate (Pekerjaan Rekonstruksi/bangun kembali talud pengaman tebing dan tanah Kel.Tafraka-Mado Hiri) Sesuai SK Walikota No. 133.A/III.3	205.703.500,00
4	07358/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.0.0/2023	Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan darurat Pengurangan Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor di wilayah kota Ternate (Pekerjaan Rekonstruksi/bangun kembali talud pengaman tebing dan tanah kel. sangadji) Sesuai SK Walikota No. 133.A/III.3/KT/2023	128.326.000,00
5	07359/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.0.0/2023	Pemby Blanja Tidak Terduga Untuk Penanganan darurat Pengurangan Resiko Bencana Banjir & Tanah Longsor di wilayah kota Ternate (Pekerjaan Rekonstruksi/bangun kembali talud pengaman tebing dan tanah kel. Dufa-dufa) Sesuai SK Walikota No. 133.A/III.3/KT/202	136.304.100,00
6	10365/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.0.0/2023	TU NIHIL atas SP2D No. 8554/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.0.0/2023 Belanja Bantuan TIDAK TERDUGA Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi dan Kebakaran Dalam Wilayah Kota Ternate Tahun 2023	352.135.000,00
<b>TOTAL BELANJA TAK TERDUGA</b>			<b>1.372.850.600,00</b>

#### VI.1.2.4 SURPLUS/DEFISIT

Dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Ternate menganggarkan defisit anggaran sebesar (Rp42.220.498.989,73) tetapi dalam realisasinya terjadi surplus sebesar Rp38.211.559.021,77

**Tabel Surplus/Defisit**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)		Realisasi 2022 (Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Surplus/Defisit	(42.220.498.989,73)	(38.211.599.021,77)	90,50	28.172.755.618,39
	<b>J u m l a h</b>	<b>(42.220.498.989,73)</b>	<b>(38.211.559.021,77)</b>	<b>90,50</b>	<b>28.172.755.618,39</b>

#### VI.1.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate, baik



penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kota Ternate terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

#### VI.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Akun Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate yang perlu dibayar kembali yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Kota Ternate untuk Tahun Anggaran 2023 seluruhnya terdiri dari Penggunaan SILPA yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp42.220.498.989,73

#### VI.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Ternate tidak menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan.

#### VI.1.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Akun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2023.

**Tabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)		Realisasi 2022 (Audited)
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	SILPA	0,00	4.008.939.967,96	0,00	42.220.498.989,73
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008.939.967,96</b>	<b>0,00</b>	<b>42.220.498.989,73</b>

SILPA untuk Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.008.939.967,96 atau 100,00%.

**Tabel Perhitungan SILPA Tahun 2023**

NO	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih/Kurang
		(Rp)	(Rp) (Audited)	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAERAH	154.057.010.943,00	103.554.807.738,51	(50.502.203.204,49)
2	PENDAPATAN TRANSFER	940.387.603.169,00	848.357.925.005,00	(92.029.678.164,00)
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.259.302.600,00	7.108.569.477,37	849.266.877,37
4	BELANJA OPERASI	941.492.189.010,00	845.299.917.881,06	(96.192.271.128,94)
5	BELANJA MODAL	199.932.226.691,73	150.560.092.761,59	(49.372.133.930,14)
6	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	1.372.850.600,00	(127.149.400,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(42.220.498.989,73)</b>	<b>(38.211.559.021,77)</b>	<b>4.008.939.967,96</b>

## VI.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

### VI.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah Saldo Anggaran Lebih di tahun sebelumnya pada tahun 2022. Saldo Anggaran Lebih awal tahun 2023 adalah sebesar Rp42.220.498.989,73.

### VI.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih tahun 2022 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yaitu sebesar Rp42.220.498.989,73.

### VI.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp4.008.939.967,96.

## VI.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

### VI.3.1. ASET

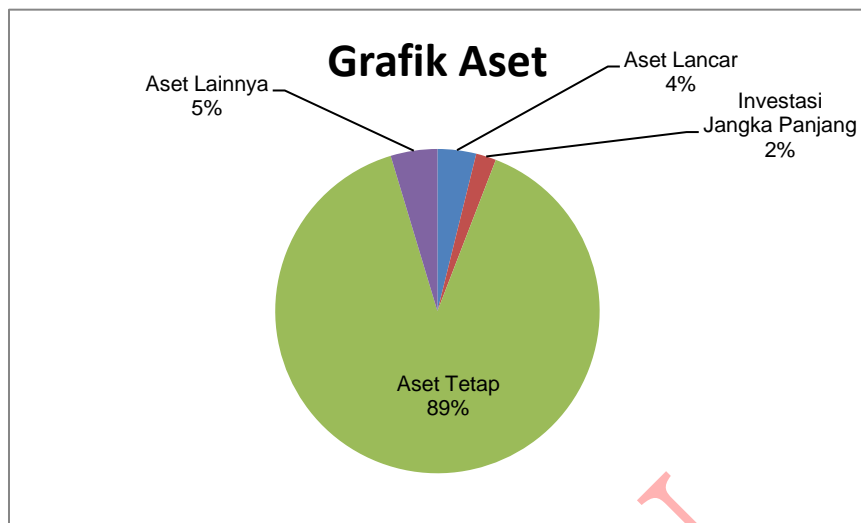
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Kota Ternate terbagi dalam:

Tabel Aset

No	Uraian	Saldo 31	Saldo 31	Kenaikan/ Penurunan	
		Desember 2023	Desember 2022	Jumlah	%
		(Rp) (Audited)	(Rp) (Audited)		
1	Aset Lancar	110.311.940.828,02	101.292.906.829,76	9.019.033.998,26	8,90
2	Investasi Jangka Panjang	57.578.134.849,74	60.358.640.232,40	(2.780.505.382,67)	(4,61)
3	Aset Tetap	2.562.169.819.952,59	2.528.583.907.980,29	33.585.911.972,30	1,33
4	Aset Lainnya	133.258.538.807,42	72.357.688.547,92	60.900.850.259,50	84,17
	<b>Jumlah</b>	<b>2.863.318.434.437,77</b>	<b>2.762.593.143.590,37</b>	<b>100.725.290.847,40</b>	<b>3,65</b>

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi peningkatan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sebesar Rp100.725.290.847,40 atau 3,65%. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate sebagian besar terdiri dari Aset Tetap, yaitu 89% dari keseluruhan Aset yang dimiliki. Berikut komposisi Aset Kota Ternate.

**Grafik VI.4. Komposisi Aset Pemerintah Kota Ternate  
Per 31 Desember 2023**



#### VI.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki atau untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

**Tabel Aset Lancar**

No	Uraian	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
<b>1</b>	<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>3.090.317.224,30</b>	<b>40.892.861.831,52</b>
	a. Kas di Kas Daerah	282.755.275,52	10.581.770.246,96
	b. Kas di Bendahara Pengeluaran	181.743.664,20	53.840.164,00
	c. Kas di Bendahara Penerimaan	13.403.125,35	16.082.800,00
	d. Kas BLUD	222.066.112,43	106.356.475,56
	e. Kas Di FKTP	259.104,80	0,00
	f. Kas di Bendahara Bos	5.530.101,00	5.684.010,00
	g. Kas Lainnya	574.086.772,00	129.128.135,00
	h. Kas BOK Puskesmas	1.810.473.069,00	0,00
	i. Setara Kas	0,00	30.000.000.000,00
<b>2</b>	<b>Piutang</b>	<b>95.806.781.251,01</b>	<b>51.317.537.026,40</b>
	a. Piutang Pajak	36.187.717.617,00	26.556.630.949,00
	b. Piutang Retribusi	5.968.516.125,00	5.273.074.875,00
	c. Piutang Lain2 PAD Yang SAH	0,00	0,00
	d. Piutang Transfer Antar Daerah	74.556.294.939,06	37.056.934.354,06
	e. Piutang Lainnya	2.793.948.674,22	1.275.571.310,44
	f. Penyisihan Piutang	(23.699.696.104,27)	(18.844.674.462,10)
<b>3</b>	<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>106.589.041,09</b>	<b>319.659.566,47</b>
<b>4</b>	<b>Persediaan</b>	<b>11.308.253.311,62</b>	<b>8.762.848.405,37</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>110.311.940.828,02</b>	<b>101.292.906.829,76</b>

### VI.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai di tangan Bendahara dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.090.317.224,30 mengalami penurunan sebesar Rp37.802.544.607,22 atau 92,44% dari saldo Tahun sebelumnya sebesar Rp40.892.861.831,52.

#### VI.3.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas dalam Kas Daerah berada dibawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Saldo Kas di Kas Daerah terdiri dari Penerimaan dan Pendapatan Daerah, penyeteroran Pengembalian sisa uang persediaan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp282.755.275,52 mengalami penurunan sebesar Rp10.299.014.971,44 atau 97,33% dari Tahun sebelumnya sebesar Rp10.581.770.246,96 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Kas di Kas Daerah**

No	Nama Bank	Peruntukan Rekening	No. Rekening	Saldo Tahun 2023	Saldo Tahun 2022
				(Rp) (Audited)	(Rp) (Audited)
1	Rekening Pengeluaran BPRS	Pengeluaran	011100101	6.003.999,64	0,00
2	Rekening Penerimaan BPRS	Penerimaan	011100102	0,00	0,00
3	Rekening Gaji BPRS	Gaji	011100103	0,00	0,00
4	Rekening Penerimaan PFK BPRS	Penerimaan PFK	011100238	0,00	317.304.670,50
5	Bank Negara Indonesia	Penerimaan (PPJ)	0086130053	101.456.165,00	100.720.595,00
6	Bank Syariah Mandiri (RKUD)	Penerimaan	7373737458	96.207.966,88	8.921.725.473,96
7	BPDM	Penerimaan	0601002024	79.087.144,00	1.242.019.507,50
8	Bank Syariah Indonesia Ex BSM (RKUD)	Deposito	7373737458	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>				<b>282.755.275,52</b>	<b>10.581.770.246,96</b>

Saldo Kas di Kas Daerah tersebut telah dilakukan rekonsiliasi dengan Rekening Koran. Rincian hasil rekonsiliasi Kas di Kas Daerah sebagai berikut:

**Tabel Hasil Rekonsiliasi Kas di Kas Daerah**

No	Nama Bank	No. Rekening	Saldo Buku Pembantu Kas Daerah	Saldo Rek Koran	Selisih
1	Bank Syariah Indonesia (RKUD)	7373737458	96.207.966,88	96.207.966,97	(0,09)
2	BPRS Rekening Pengeluaran	011100101	6.003.999,64	0,00	6.003.999,64
3	BPRS Rekening Penerimaan	011100102	0,00	0,00	0,00
4	BPRS Rekening Gaji	011100103	0,00	0,00	0,00
5	BPRS Rekening Penerimaan PFK	011100238	0,00	0,00	0,00
6	BNI	0086130053	101.456.165,00	101.456.165,00	0,00

No	Nama Bank	No. Rekening	Saldo Buku Pembantu Kas Daerah	Saldo Rek Koran	Selisih
7	BPDM Penerimaan	601002024	79.087.144,00	15.000.000,00	64.087.144,00
8	Bank Syariah Mandiri (Deposito)	7373737458	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>282.755.275,52</b>	<b>212.664.131,97</b>	<b>70.091.143,55</b>

Berdasarkan hasil rekonsiliasi diatas terdapat selisih sebesar Rp70.091.143,55, selisih tersebut antara lain:

- Selisih sebesar Rp0,09 pada Bank Syariah Indonesia (RKUD) merupakan selisih karna pelimpahan dari Rekening Penerimaan BPRS ke BSI sebesar Rp219.914.701,91 tetapi BSI mencatat sebesar Rp219.914.702,00
- Selisih sebesar Rp6.003.99,64 pada Rekening Pengeluaran BPRS merupakan selisih yang terdiri dari :
  - a. Pajak yang sudah terlanjur di setorkan sebesar Rp6.000.000,00 atas SP2D No. 06814 pada Dinas Pertanian Kota Ternate dan telah mengajukan restitusi ke Kantor Pajak sesuai surat nomor 520/DISTAN/337/4/2024 untuk Pajak PPN senilai Rp5.280.000,00 dan 520/Distan/338/4/2024 untuk Pajak PPh 22 senilai Rp720.000,00;
  - b. Selisih lebih pencatatan sebesar Rp4.000,00 pada tanggal 28 Desember 2023 atas SP2D No. 11424 yang harusnya tercatat sebesar Rp17.595.555,00 tetapi bank mencatat sebesar Rp17.599.555,00;
  - c. Selisih lebih pencatatan senilai Rp0,50 di tanggal 30 Desember 2023 atas SP2D No. 11978 yang harusnya tercatat sebesar Rp20.394.622,33,00 tetapi bank mencatat sebesar Rp20.394.622,83 dan
  - d. Selisih kurang pencatatan sebesar (Rp0,86) pada tanggal 31 Desember 2023 atas SP2D No.11987 yang harusnya tercatat sebesar Rp22.321.863,86 tetapi bank mencatat sebesar Rp22.321.863,00.
- Selisih Sebesar Rp64.087.144,00 pada BPDM Penerimaan merupakan selisih karena pelimpahan dari BPDM ke BSI harusnya di tanggal 29 Desember 2023 tetapi BSI mencatat di tanggal 02 Januari 2024.

#### VI.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp181.743.664,20 dan Rp53.840.164,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran mengalami kenaikan sebesar Rp127.903.500,20 atau 237,57% disebabkan adanya sisa kas belanja UP dan TU pada 3 (Tiga) SKPD yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah sampai dengan akhir periode akuntansi. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel Kas di Bendahara Pengeluaran**

No	SKPD	Saldo 31 Des. 2023	Saldo 31 Des. 2022
		(Rp) ( <i>Audited</i> )	(Rp) ( <i>Audited</i> )
1	Dinas Kesehatan	165.298.250,00	0,00
2	Dinas Kebakaran	848.598,00	0,00
3	DPMPPTSP	0,00	1.070,00

No	SKPD	Saldo 31 Des. 2023	Saldo 31 Des. 2022
		(Rp) (Audited)	(Rp) (Audited)
4	Sekretariat daerah	15.596.816,20	53.839.094,00
<b>Jumlah</b>		<b>181.743.664,20</b>	<b>53.840.164,00</b>

Atas sisa Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetorkan pada awal tahun 2024 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel Penyetoran Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran**

No	SKPD	Tanggal Setor	Nilai	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	10/01/2024	300.000,00	Sisa TU
		22/01/2024	17.700.000,00	Sisa TU
		22/01/2024	16.992.000,00	Sisa TU
		22/01/2024	32.326.684,00	Sisa TU
		01/02/2024	97.974.800,00	Sisa TU
2	Dinas Kesehatan	11/01/2024	4.650,00	Sisa UP
		16/01/2024	116,00	Sisa UP
3	Dinas Kebakaran	12/01/2024	130.000,00	Sisa UP
		12/01/2024	150.000,00	Sisa UP
		12/01/2024	568.598,00	Sisa UP
4	Sekretariat daerah	03/01/2024	1.500.000,00	Pindah Buku Ls Honor Kebersihan
		05/02/2024	2.040.000,00	Sisa UP
		06/03/2024	12.000.000,00	Sisa UP
		18/04/2024	56.816,00	Sisa UP
<b>Jumlah</b>			<b>181.743.664,20</b>	

Rincian sisa Kas di Bendahara Pengeluaran untuk seluruh SKPD disajikan dalam **Lampiran 1**.

#### VI.3.1.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo pada Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Kas di kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.403.125,35 dan Rp16.082.800,00.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan mengalami penurunan sebesar Rp2.679.674,65 atau 16,66% karena pada tahun sebelumnya seluruhnya kas di Bendahara Penerimaan telah disetor ke Kas Daerah dan pada tahun 2023 terdapat penerimaan pendapatan daerah pada Dinas Kesehatan berupa Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp13.375.000,00 dan Jasa Giro Dana Kapitasi sebesar Rp28.125,35 yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023, tetapi telah disetorkan pada Januari 2024. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel Kas di Bendahara Penerimaan**

No	SKPD	Saldo 31 Des. 2023	Saldo 31 Des. 2022
		(Rp) (Audited)	(Rp) (Audited)
1	Dinas Kesehatan	13.403.125,35	15.782.800,00
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah	0,00	300.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.403.125,35</b>	<b>16.082.800,00</b>

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan yang telah disetorkan disajikan pada **Lampiran 2**.

#### VI.3.1.1.1.4. Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp222.066.112,43 dan Rp106.356.475,56. Saldo Kas di BLUD mengalami kenaikan sebesar Rp115.709.636,87 atau 108,79% disebabkan karena masih terdapat sisa dana pada 2 (dua) puskesmas yang belum dibelanjakan sesuai peruntukannya sampai dengan akhir periode akuntansi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Kas di BLUD

No	Kas Di BLUD	Saldo Awal 2023	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir 2023
		(Rp) (Audited)	(Rp)	(Rp)	(Rp) (Audited)
1	Puskesmas Kalumata	19.864.375,56	968.908.827,44	968.788.713,00	19.984.490,00
2	Puskesmas Kalumpang	86.492.100,00	1.722.164.569,93	1.606.575.047,50	202.081.622,43
<b>Jumlah</b>		<b>106.356.475,56</b>	<b>2.691.073.397,37</b>	<b>2.575.363.760,50</b>	<b>222.066.112,43</b>

#### VI.3.1.1.1.5. Kas di FKTP

Kas di FKTP merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendahara JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yaitu Puskesmas, yang berasal dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterima dari BPJS Kesehatan. Pengelolaan dana kapitasi tersebut dilaksanakan oleh Bendahara JKN masing-masing Puskesmas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan membayarkan dana kapitasi tersebut langsung ke Puskesmas atau tidak melalui Kas Daerah.

Saldo Kas di FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp259.104,80 dan Rp0,00. Saldo pada Kas di FKTP terjadi kenaikan sebesar Rp259.104,80 atau 100% dari tahun sebelumnya, karena masih terdapat sisa dana kapitasi pada 4 puskesmas yang belum dibelanjakan sesuai peruntukannya sampai dengan akhir periode akuntansi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Kas di FKTP

No	Nama FKTP	Saldo Awal 2023	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir 2023
		(Rp) (Audited)	(Rp)	(Rp)	(Rp) (Audited)
1	Puskesmas Siko	0,00	1.307.106.947,00	1.307.106.947,00	0,00
2	Puskesmas Sulamadaha	0,00	428.117.422,00	428.068.996,07	48.425,93
3	Puskesmas Gambesi	0,00	491.133.916,00	491.133.916,00	0,00
4	Puskesmas Kota	0,00	703.703.768,00	703.703.768,00	0,00
5	Puskesmas Jambula	0,00	441.995.266,00	441.995.266,00	0,00
6	Puskesmas Mayau	0,00	174.413.931,00	174.413.931,00	0,00
7	Puskesmas Hiri	0,00	217.587.222,00	217.504.190,00	83.032,00
8	Puskesmas Moti	0,00	315.946.757,00	315.923.602,00	23.155,00
9	Puskesmas Bahari Berkesan	0,00	337.490.851,00	337.386.359,13	104.491,87
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>4.417.496.080,00</b>	<b>4.417.236.975,20</b>	<b>259.104,80</b>

#### VI.3.1.1.1.6. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas yang berada dalam penguasaan Bendahara BOS di SD dan SMP. Dana BOS diterima sekolah dari Pemerintah Pusat melalui Kas Daerah

Pemerintah Provinsi, tidak melalui Kas Daerah Kabupaten/Kota. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.530.101,00 mengalami penurunan sebesar Rp153.909,00 atau 2,71% dari Tahun sebelumnya sebesar Rp5.684.010,00. Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan 2022 tersebut sebagai berikut:

**Tabel Kas di Bendahara BOS**

No	Rincian/Total Sekolah	Saldo Awal 2023	Pendapatan BOS	Belanja BOS	Saldo Akhir 2023
		(Rp) (Audited)	(Rp)	(Rp)	(Rp) (Audited)
1	Dana BOS Reguler SDN dan SMPN I Kota Ternate	5.684.010,00	23.496.229.718,00	23.496.383.627,00	5.530.101,00
2	Dana BOS Kinerja SDN dan SMPN I Kota Ternate	0,00	755.000.000,00	755.000.000,00	0,00
3	BOP PAUD dan TK	0,00	268.560.000,00	268.560.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.684.010,00</b>	<b>24.519.789.718,00</b>	<b>24.519.943.627,00</b>	<b>5.530.101,00</b>

Jumlah sekolah penerima Dana BOS Reguler Tahun 2023 dan 2022 sebanyak 98 sekolah terdiri dari 83 SD dan 15 SMP. Penerima Dana Bos Kinerja Sebanyak 22 Sekolah yang terdiri dari 14 SD dan 8 SMP. Penerima BOP PAUD dan TK terdiri dari 10 PAUD dan 2 TK Pembina. Rincian Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

#### VI.3.1.1.1.7. Kas Lainnya

Kas lainnya merupakan kas dari utang PFK yang belum disetor sampai dengan akhir periode akuntansi. Saldo kas lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp574.086.772,00 dan Rp129.128.135,00. Saldo Kas Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp444.958.637,00 atau 344,59% dari Tahun sebelumnya karena masih terdapat Kas dari PFK SKPD dan Dana BOS yang belum disetorkan sampai dengan akhir periode akuntansi. Rincian Utang PFK per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut:

**Tabel Kas Lainnya**

NO	SKPD	Saldo 31 Des 2023	Saldo 31 Des 2022
		(Rp) (Audited)	(Rp) (Audited)
1	Dinas Pendidikan	27.417.302,00	116.335.598,00
2	Dinas Kesehatan	275.515.494,00	0,00
3	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	2.515.040,00
4	Sekretariat Daerah	16.707.076,00	9.132.301,00
5	Kec. Ternate Utara	41.800.588,00	0,00
6	Kec. Ternate Tengah	5.347.529,00	0,00
7	Kec. Ternate Selatan	75.340.871,00	0,00
8	Kec. Ternate Barat	0,00	1.145.196,00
9	Kec. Pulau Ternate	10.125.809,00	0,00
10	Kec. Moti	77.968.614,00	0,00
11	Kec. Pulau Batang Dua	43.863.489,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>574.086.772,00</b>	<b>129.128.135,00</b>



#### VI.3.1.1.1.8. Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas merupakan kas yang digunakan untuk membiayai belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.810.473.069,00. Untuk Saldo Kas Dana BOK Puskesmas tidak terjadi pencatatan pada Tahun-tahun sebelumnya, pencatatannya baru terjadi pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Kas Dana BOK Puskesmas

No	Nama Puskesmas (BOK)	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	%
1	Puskesmas Jambula	929.761.000,00	749.046.507,00	180.714.493,00	80,56
2	Puskesmas Mayau	1.083.661.000,00	950.977.925,00	132.683.075,00	87,76
3	Puskesmas Bahari Berkesan	774.454.000,00	751.112.113,00	23.341.887,00	96,99
4	Puskesmas Kalumata	2.014.388.000,00	1.962.180.161,00	52.207.839,00	97,41
5	Puskesmas Siko	1.394.070.000,00	1.128.861.360,00	265.208.640,00	80,98
6	Puskesmas Kota	1.437.779.960,00	1.104.062.112,00	333.717.848,00	76,79
7	Puskesmas Kalumpang	1.084.735.040,00	809.794.144,00	274.940.896,00	74,65
8	Puskesmas Moti	1.088.331.000,00	846.815.556,00	241.515.444,00	77,81
9	Puskesmas Sulamadaha	1.084.788.104,00	1.046.140.038,00	38.648.066,00	96,44
10	Puskesmas Hiri	1.050.253.000,00	821.675.593,00	228.577.407,00	78,24
11	Puskesmas Gambesi	663.166.000,00	624.248.526,00	38.917.474,00	94,13
<b>Total</b>		<b>12.605.387.104,00</b>	<b>10.794.914.035,00</b>	<b>1.810.473.069,00</b>	<b>85,64</b>

#### VI.3.1.1.1.9. Setara Kas

Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas Pemerintah Kota Ternate yaitu berupa Deposito yang akan jatuh tempo kurang dari 3 bulan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Saldo Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp30.000.000.000,00.

Saldo Setara Kas mengalami penurunan sebesar Rp30.000.000.000,00 atau 100% dari Tahun sebelumnya dikarenakan Setara Kas yang berupa Deposito telah jatuh tempo dan telah dipindah bukukan dari rekening BSI 7373737458 (Deposito) Ke BSI 7373737458 selama periode akuntansi.

#### VI.3.1.1.2. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan merupakan tagihan pendapatan daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi dan lain-lain) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (Dua Belas) bulan kedepan. Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp81.429.546.982,78 dan Rp70.162.211.488,50 Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Piutang Pendapatan

No	Uraian	Saldo Des. 2023	Saldo Des. 2022
		(Rp) (Audited)	(Rp) (Audited)
1	Piutang Pajak	36.187.717.617,00	26.556.630.949,00

No	Uraian	Saldo Des. 2023	Saldo Des. 2022
		(Rp) (Audited)	(Rp) (Audited)
2	Piutang Retribusi	5.968.516.125,00	5.273.074.875,00
3	Piutang Lain2 PAD yang Sah	0,00	0,00
4	Piutang Bagi Hasil Provinsi	74.556.294.939,06	37.056.934.354,06
5	Piutang lainnya	2.793.948.674,22	1.275.571.310,44
<b>JUMLAH</b>		<b>119.506.477.355,28</b>	<b>70.162.211.488,50</b>

#### VI.3.1.1.2.1. Piutang Pajak

Piutang Pajak merupakan tagihan pajak daerah kepada Wajib Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp36.187.717.617,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.631.086.668,00 atau 36,27% dari Tahun sebelumnya sebesar Rp26.556.630.949,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan Piutang Pajak pada Pajak Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Rincian Piutang Pajak, penyisihannya dan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value* atau NRV) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Piutang Pajak

No	Uraian	Saldo Des. 2023	Saldo Des. 2022
		(Rp) (Audited)	(Rp) (Audited)
1	Pajak Hotel	2.093.918.049,00	2.093.918.049,00
2	Pajak Restoran	5.914.108.174,00	404.927.298,00
3	Pajak Hiburan	1.520.623.286,00	1.544.573.286,00
4	Pajak Reklame	864.854.449,00	827.825.742,00
5	Pajak Parkir	125.659.600,00	125.659.600,00
6	Pajak Air Tanah	43.867.241,00	64.840.441,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	916.302.572,00	914.372.663,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	24.708.384.246,00	20.580.513.870,00
<b>Jumlah Piutang Pajak</b>		<b>36.187.717.617,00</b>	<b>26.556.630.949,00</b>
9	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(0,80)	(5.938.745.495,80)
10	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(0,50)	(8.438.238.746,50)
11	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(20.532.707.213,00)	0,00
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Pajak</b>		<b>(20.532.707.214,30)</b>	<b>(14.376.984.242,30)</b>
<b>Jumlah Piutang Pajak Netto</b>		<b>15.655.010.402,70</b>	<b>12.179.646.706,70</b>

Adapun rincian perhitungan Piutang Pajak 2023 dan penyisihan piutang pajak disajikan dalam **Lampiran 4**.

#### VI.3.1.1.2.2. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan tagihan Retribusi Daerah Kepada Pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang di harapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Retribusi Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.968.516.125,00 mengalami kenaikan sebesar Rp695.441.250,00 atau 13,19% dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.273.074.875,00. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan Piutang Retribusi pada Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan berupa Sewa Lahan Waterboom, Sewa Lahan SPBU dan Sewa Goheba. Rincian Piutang Retribusi, penyisihannya dan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value* atau NRV) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Piutang Retribusi

No	Uraian	Saldo 31 Des. 2023	Saldo 31 Des. 2022
		(Rp) (Audited)	(Rp) (Audited)
1	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (BP2RD) - Lahan Waterboom (PT Indo Ternausa)	729.317.750,00	208.376.500,00
2	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (BP2RD) - Lahan SPBU Soasio	393.750.000,00	336.250.000,00
3	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (BP2RD) - Goheba	117.000.000,00	0,00
4	Piutang Retribusi Pemakaian Alat (PUPR)	457.840.000,00	457.840.000,00
5	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan (BP2RD)	2.459.932.292,34	2.459.932.292,34
6	Piutang Retribusi Fasilitas pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan (BP2RD)	1.810.676.082,66	1.810.676.082,66
<b>Jumlah Piutang Retribusi</b>		<b>5.968.516.125,00</b>	<b>5.273.074.875,00</b>
7	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.522.788.685,30)	(4.183.861.216,00)
<b>NRV Piutang Retribusi (Netto)</b>		<b>3.445.727.439,70</b>	<b>1.089.213.659,00</b>

Rincian perhitungan penyisihan Piutang Retribusi disajikan dalam **Lampiran 5**.

#### VI.3.1.1.2.3. Piutang Lain-lain PAD

Piutang Lain-lain PAD merupakan piutang pendapatan terhadap pihak ketiga di luar piutang pajak dan piutang retribusi. Saldo Piutang Lain-lain PAD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

#### VI.3.1.1.2.4. Piutang Bagi Hasil Provinsi

Piutang Bagi Hasil Provinsi merupakan saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Piutang Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp74.556.294.939,06 dan Rp37.056.934.354,06. Piutang tersebut merupakan jumlah bagi hasil pajak daerah sesuai SK Gubernur tetapi belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

Saldo Piutang Bagi Hasil Provinsi mengalami kenaikan sebesar Rp37.499.360.585,00 atau 101,19% karena terdapat penambahan penetapan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp51.217.424.844,00 dan pelunasan piutang sebesar Rp13.718.064.259,00 di tahun 2023. Rincian piutang bagi hasil provinsi per 31 Desember 2023 dan 2022 tersebut sebagai berikut:

Tabel Piutang Bagi Hasil Provinsi

No	Uraian	Saldo 31 Des. 2023	Saldo 31 Des. 2022
		(Rp) (Audited)	(Rp) (Audited)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14.880.949.268,00	7.402.366.873,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.426.976.901,00	7.801.715.502,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40.878.303.371,00	20.394.239.901,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	508.261.152,06	0,06
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	3.861.804.247,00	1.458.612.078,00
<b>Jumlah Piutang Bagi Hasil Provinsi</b>		<b>74.556.294.939,06</b>	<b>37.056.934.354,06</b>

Rincian perhitungan Piutang Bagi Hasil Provinsi disajikan dalam **Lampiran 6**.

### VI.3.1.1.2.5. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.

Saldo Bagian Lancar tuntutan ganti rugi netto tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.793.948.674,22 dan Rp1.275.571.310,44 Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

No	Nama	Kasus	Tgl SKTJM	Sisa Per 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi (Rp)	Sisa Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Asian Hi, Rufai	Kehilangan kas pada Kec. Hiri Thn 2012	24/12/14	16.676.462,00	0,00	16.676.462,00
2	Siti Nur Nelny Teng, SE	Penggunaan uang belanja utk kepentingan pribadi di SKPD Kec, Ternate Tengah	04/05/12	154.050.000,00	0,00	154.050.000,00
3	Leni Marlina Ponto	TGR atas tindak lanjut temuan perjalanan dinas oleh BPK Thn 2011 & 2012 (yg sudah ada SKTJM)	04/11/14	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00
4	Andi Handoko	-	04/11/14	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
5		Penetapan SKTJM dan SK Pembebanan Tahun 2023 (Lampiran 7)	2023	2.608.122.212,22	1.518.377.363,78	1.089.744.848,44
<b>Total</b>				<b>2.793.948.674,22</b>	<b>1.518.377.363,78</b>	<b>1.275.571.310,44</b>

Saldo Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.275.571.310,44 mengalami kenaikan sebesar Rp1.518.377.363,78 atau 119,04%. Kenaikan tersebut terdiri dari penambahan SKTJM sebesar Rp1.960.455.149,85 dan pelunasan SKTJM sebesar Rp110.981.154,33 di tahun 2021, Rp161.232.410,96 di tahun 2022 dan Rp169.864.220,78 di tahun 2023, sehingga saldo Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 adalah Rp2.793.948.674,22. Rincian Perhitungan Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam **Lampiran 7**.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value* atau NRV) saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel NRV Bagian Lancar TGR

No	Uraian	Saldo 31 Des. 2023	Saldo 31 Des. 2022
		(Rp) ( <i>Audited</i> )	(Rp) ( <i>Audited</i> )
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	2.793.948.674,22	1.275.571.310,44
2	Penyisihan Bagian Lancar TGR	(644.200.204,67)	(283.829.003,80)
<b>NRV Bagian Lancar TGR (Netto)</b>		<b>2.149.748.469,55</b>	<b>991.742.306,64</b>

### VI.3.1.1.3. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp106.589.041,09 mengalami penurunan sebesar Rp213.070.525,38 atau 66,66% dari Tahun sebelumnya sebesar Rp319.659.566,47 disebabkan karena beban sewa gedung kantor yang sudah dibayar dimuka telah diterima manfaatnya sehingga mengurangi saldo Beban dibayar dimuka. Rincian Beban dibayar dimuka sebagai berikut:

**Tabel Beban dibayar dimuka**

NO	SKPD	Uraian	2023	2022
			(Rp) (Audited)	(Rp) (Audited)
1	Dinas Kesehatan	Beban Jasa Dibayar Dimuka	0,00	49.725.274,73
2	Dinas Sosial	Beban Jasa Dibayar Dimuka	13.150.684,93	5.356.164,38
3	DP3A	Beban Jasa Dibayar Dimuka	16.273.972,60	16.890.410,96
4	Sekretariat Daerah	Beban Jasa Dibayar Dimuka	73.835.616,44	211.335.616,44
5	Kecamatan Pulau Batang Dua	Beban Jasa Dibayar Dimuka	3.328.767,12	2.835.616,44
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Beban Jasa Dibayar Dimuka	0,00	33.516.483,52
<b>JUMLAH</b>			<b>106.589.041,09</b>	<b>319.659.566,47</b>

Rincian perhitungan Beban dibayar dimuka disajikan dalam **Lampiran 8**.

### VI.3.1.1.4. Persediaan

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Ternate dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.308.253.311,62 mengalami kenaikan sebesar Rp2.545.404.906,25 atau 29,05% dari Tahun sebelumnya sebesar Rp8.762.848.405,37 yang terdiri dari Alat Tulis Kantor, Obat-obatan, barang cetakan, bahan kimia, bibit dan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga berupa tanah dan peralatan mesin dengan Rincian persediaan tersebut per jenis dan per OPD adalah sebagai berikut:

**Tabel Persediaan**

NO	SKPD	31 Des. 2023	31 Des. 2022	KET
		(Rp) (Audited)	(Rp) (Audited)	
1	Dinas Kesehatan	10.215.291.000,71	7.043.831.593,50	Obat-Obatan
2	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	6.301.300,00	16.274.990,00	Atk
3	Dinas Tenaga Kerja	2.904.500,00	4.402.150,00	Atk
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	249.542.350,00	256.885.000,00	Bahan Cetakan
5	Dinas Pengendalian Kependudukan & KB	57.925.602,00	109.992.560,00	Obat-Obatan Lainnya
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	485.454.335,00	Persediaan Untuk dijual/diserahkan
7	Dinas Penanaman Modal DPMTSP	0,00	960.000,00	Bahan Cetakan
8	Dinas Pertanian	0,00	128.500,00	Bahan Kimia/Bibit
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	68.162.880,00	Persediaan Untuk dijual/diserahkan
10	Sekretariat DPRD	0,00	273.300,00	Atk

NO	SKPD	31 Des. 2023	31 Des. 2022	KET
		(Rp) (Audited)	(Rp) (Audited)	
11	Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	1.241.625,00	1.530.300,00	Atk
12	Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah	765.210.353,91	774.952.796,87	Bahan Cetakan
13	Kecamatan Ternate Barat	9.836.580,00	0,00	Persediaan Untuk dijual/diserahkan
<b>JUMLAH</b>		<b>11.308.253.311,62</b>	<b>8.762.848.405,37</b>	

### VI.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Jenis Investasi Jangka Panjang yang digunakan adalah Investasi Permanen dimana Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Pemerintah Kota Ternate merealisasikan Investasi Jangka Panjangnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp57.578.134.849,74 dan Rp60.358.640.232,40 seluruhnya dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

#### VI.3.1.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp57.578.134.849,74 dan Rp60.358.640.232,40 mengalami penurunan sebesar Rp2.780.505.382,66 atau 4,61%. Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023	2022
	(Rp) (Audited)	(Rp) (Audited)
PT. Bank Maluku	4.763.000.000,00	4.763.000.000,00
Perusahaan Daerah Air Minum	25.206.118.098,16	27.986.623.480,82
PT. Bahari Berkesan (Holding Company)	27.609.016.751,58	27.609.016.751,58
<b>JUMLAH</b>	<b>57.578.134.849,74</b>	<b>60.358.640.232,40</b>

Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kota Ternate sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2023.

- Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ternate pada PT Bank Maluku Malut sebesar Rp4.763.000.000,00 berdasarkan atas kepemilikan 4.763 saham yang disetor dari Tahun 2005 s.d 2014 sebagai berikut:

**Tabel Penyertaan Modal pada PT Bank Maluku Malut**

No	Penyertaan Modal PT. Bank Maluku	Nilai
		(Rp)
1	Sampai Dengan 2005	500.000.000,00
2	Penambahan tahun 2006	500.000.000,00
3	Penambahan tahun 2007	500.000.000,00

No	Penyertaan Modal PT. Bank Maluku	Nilai
		(Rp)
4	Penambahan tahun 2009	500.000.000,00
5	Penambahan tahun 2012	500.000.000,00
6	Penambahan tahun 2013	500.000.000,00
7	Penambahan tahun 2013	1.263.000.000,00
8	Penambahan tahun 2014	500.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.763.000.000,00</b>

Persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Ternate pada PT Bank Maluku Malut berdasarkan laporan keuangan PT Bank Maluku Malut Tahun 2023 adalah 1,09% atau kurang dari 20%. Sehingga pencatatannya menggunakan metode biaya (*Cost Method*). Kenaikan kepemilikan saham dikarenakan Pemerintah Kota Ternate belum mencatat konversi deviden menjadi penambahan saham pada Tahun 2013 melalui RUPS Akta Nomor 49 tanggal 22 April 2023.

- b. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ternate pada PDAM Kota Ternate per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp25.206.118.098,16 dan Rp27.986.623.480,81.

Nilai tersebut berdasarkan pencatatan dengan metode ekuitas (*equity method*) karena persentase kepemilikan Pemerintah Kota Ternate pada PDAM Kota Ternate per 31 Desember 2023 adalah sama sebesar 42,69% atau lebih dari 20%. Penyertaan modal tersebut dalam bentuk aset tetap yaitu aset lainnya, instalasi dan jaringan, bangunan, Gedung dan bangunan, alat angkutan serta dana tunai. Nilai ekuitas PDAM Kota Ternate per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp59.044.549.304,67 dan Rp65.557.796.863,00 (berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kota Ternate Tahun 2023). Dengan demikian, nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate pada PDAM Kota Ternate dengan menggunakan metode ekuitas adalah:

**Tabel Penyertaan Modal pada PDAM**

Tahun	Penyertaan Modal	Laba (Rugi) PDAM	Bagian Laba(Rugi) 42,69%	Nilai Investasi
sd 2019	27.120.388.253,00	8.338.418.013,00	3.559.670.649,75	30.680.058.902,75
2020	0,00	(3.114.730.889,00)	(1.329.678.616,51)	29.350.380.286,24
2021	0,00	947.331.880,66	404.415.979,85	29.754.796.266,09
2022	0,00	(2.644.800.454,05)	(1.129.065.313,83)	28.625.730.952,26
2023	0,00	(8.010.336.973,75)	(3.419.612.854,09)	25.206.118.098,16

- c. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ternate pada PT Ternate Bahari Berkesan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp27.609.016.751,58 dan Rp27.609.016.751,58

Nilai tersebut berdasarkan pencatatan dengan metode ekuitas (*equity method*) karena persentase kepemilikan Pemerintah Kota Ternate pada PT Ternate Bahari Berkesan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 99,21% atau lebih dari 20%. Nilai ekuitas PT Ternate Bahari Berkesan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp27.830.206.564,00 (berdasarkan laporan Keuangan Tahun 2023) dan Rp27.830.206.564,00 (berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2022) Dengan demikian, nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate pada PT Ternate Bahari Berkesan dengan menggunakan metode ekuitas adalah:

- Per 31 Desember 2023: Rp27.609.016.751,58 (Rp27.830.206.564,00 x 99,21%)
- Per 31 Desember 2022: Rp27.609.016.751,58 (Rp27.830.206.564,00 x 99,21%)

Sejak awal Tahun 2021 PT. Ternate Bahari Berkesan sudah tidak beroperasi, anak perusahaan yang masih beroperasi hanya Bank Bahari Berkesan, sehingga sejak tahun 2021 laporan keuangan PT Bahari Berkesan tidak lagi bisa menyajikan/memberikan laporan keuangan ke Pemerintah Kota Ternate dikarenakan terdapat kasus yang ditangani oleh kejaksaan. Untuk itu, maka nilai investasi PT Ternate Bahari Berkesan ( *Holding Company* ) tidak dapat disajikan sebagaimana mestinya.

PT Ternate Bahari Berkesan didirikan pada tahun 2015, dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 6 Januari 2014 berbentuk Perseroan Terbatas dengan tujuan pendirian adalah:

- Sebagai Perusahaan induk ( *Holding Company* ) bagi BUMD yang telah dan akan didirikan Pemerintah Kota Ternate.
- Meningkatkan Pendapatan Pemerintah Kota Ternate.
- Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat Kota Ternate.

Modal dasar PT Ternate Bahari Berkesan berasal dari pemasukan ( *inbreng* ) saham-saham milik Pemerintah Kota Ternate pada PD Apotik Bahari berkesan, PT BPRS Bahari Berkesan dan PT Alga Kastela Bahari Berkesan. Untuk saat ini perusahaan daerah Pemerintah Kota Ternate yang masih berjalan/beroperasi hanya PT. BPRS Bahari Berkesan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah  *Holding Company*  Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Citra Gamalama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Aset PD Citra Gamalama menjadi Aset PT Ternate Bahari Berkesan.

### VI.3.2. ASET TETAP

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, klasifikasi, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus akuntansi karena aset tetap memiliki nilai yang signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktifitas



operasi entitas. Aset tetap di bagi menjadi 6 (enam) klasifikasi, yaitu:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- Aset Tetap Lainnya; dan
- Konstruksi dalam Pengerjaan;

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Ternate maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2023 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya dari realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); dan
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai Aset ekstracountable, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Jumlah Aset Tetap Pemerintah Kota Ternate sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp2.695.428.358.762,42 dengan rincian kelompok Aset Tetap dan Mutasi sebagai berikut:

Jenis Aset	Saldo Per 1 Januari 2023	Penambahan (BM)	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Saldo 31 Desember 2023
Tanah	1.094.004.650.987,00	251.278.000,00	845.872.000,00	4.077.602.722,00	1.091.024.198.265,00
Peralatan dan Mesin	324.772.051.533,75	29.241.515.278,85	7.545.605.472,15	4.745.650.874,00	356.813.521.410,75
Gedung dan Bangunan	1.094.620.257.742,64	43.223.513.732,21	37.074.718.628,98	54.330.687.002,90	1.120.587.803.100,93
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.163.757.487.271,99	77.007.313.350,53	198.292.270.272,41	13.072.953.769,51	1.425.984.117.125,42
Aset Tetap Lainnya	54.050.692.645,87	103.746.500,00	4.985.188.889,60	0,00	59.139.628.035,47
Konstruksi Dalam Pengerjaan	201.036.665.349,17	0,00	11.983.057.834,51	189.256.615.020,29	23.763.108.163,39
	<b>3.932.241.805.530,42</b>	<b>149.827.366.861,59</b>	<b>260.726.713.097,65</b>	<b>265.483.509.388,70</b>	<b>4.077.312.376.100,96</b>
Akumulasi Penyusutan	(1.403.657.897.550,76)	0,00	(111.484.658.595,24)	0,00	(1.515.142.556.146,00)
<b>T o t a l</b>	<b>2.528.583.907.979,66</b>	<b>149.827.366.861,59</b>	<b>149.242.054.502,41</b>	<b>265.483.509.388,70</b>	<b>2.562.169.819.954,96</b>
Kemitraan Pihak ke 3	33.356.080.000,00	0,00	0,00	0,00	33.356.080.000,00
Aset Tidak Berwujud	1.930.487.608,00	732.725.900,00	0,00	478.727.717,00	2.184.485.791,00
Aset lain-lain	28.149.479.500,96	0,00	693.494.425,50	321.245.200,00	28.521.728.726,46
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	7.429.853.149,00	0,00	67.704.456.000,00	7.429.853.149,00	67.704.456.000,00
Tagihan Jangka Panjang	1.491.788.290,00	0,00	0,00	0,00	1.491.788.290,00
<b>T o t a l</b>	<b>72.357.688.547,96</b>	<b>732.725.900,00</b>	<b>68.397.950.425,50</b>	<b>8.229.826.066,00</b>	<b>133.258.538.807,46</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>2.600.941.596.527,62</b>	<b>150.560.092.761,59</b>	<b>217.640.004.927,91</b>	<b>273.713.335.454,70</b>	<b>2.695.428.358.762,42</b>

### VI.3.3.1 Tanah

Tanah yang tercatat dalam Aset Tetap Pemerintah Kota Ternate adalah tanah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Ternate, dan dalam kondisi siap dipakai, tanah diperoleh melalui pembelian dan hibah/donasi, termasuk tanah yang digunakan untuk jalan dan bahu jalan yang sudah ada sebelum terbentuknya pemerintah Kota Ternate. Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap dipakai.

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.091.024.198.265,00 dan Rp1.094.004.650.987,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.980.452.722,00 atau 0,27% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Rincian Tanah 2023**

No.	Uraian	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
1.	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	12.262.509.000,00	12.262.509.000,00
2.	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	33.367.056.400,00	33.367.056.400,00
3.	TANAH UNTUK BANGUNAN INDUSTRI	598.400.000,00	598.400.000,00
4.	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	101.151.628.263,00	104.302.362.910,00
5.	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG SARANA OLAH RAGA	11.868.000.000,00	11.868.000.000,00
6.	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH	1.467.524.000,00	1.467.524.000,00
7.	TANAH PERSIL LAINNYA	221.019.300,00	61.831.300,00
8.	TANAH BASAH	6.460.000.000,00	6.460.000.000,00
9.	TANAH KERING	38.354.559.500,00	38.354.559.500,00
10.	TANAH PERKEBUNAN	5.795.850.500,00	5.795.850.500,00
11.	TANAH TANDUS	1.909.919.000,00	1.909.919.000,00
12.	TANAH PERTANIAN	1.194.847.500,00	1.194.847.500,00
13.	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	1.652.000.000,00	1.652.000.000,00
14.	TANAH LAPANGAN PENIMBUNAN BARANG	125.840.000,00	125.840.000,00
15.	TANAH LAPANGAN PENGUJIAN/PENGOLAHAN	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
16.	TANAH UNTUK JALAN	857.728.647.127,00	857.728.647.127,00
17.	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR	649.834.750,00	649.834.750,00
18.	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI	1.223.570.000,00	1.223.570.000,00
19.	TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH	122.500.000,00	122.500.000,00
20.	TANAH UNTUK MAKAM	3.809.027.925,00	3.797.934.000,00
21.	TANAH UNTUK TAMAN	9.361.465.000,00	9.361.465.000,00
22.	TANAH KAMPUNG	600.000.000,00	600.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>1.091.024.198.265,00</b>	<b>1.094.004.650.987,00</b>

Mutasi Aset Tetap Tanah selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01-2023	Rp	1.094.004.650.987,00
Penambahan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	Rp	251.278.000,00
Koreksi Tambah	Rp	845.872.000,00
Koreksi Kurang	Rp	(4.077.602.722,00)
Saldo per 31-12-2023	<b>Rp</b>	<b>1.091.024.198.265,00</b>

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah tersebut sebagai berikut:

**a) Penambahan**

Penambahan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp251.278.000,00, dengan rincian Rp159.188.000,00 untuk Belanja Modal Tanah Perkuburan di Kecamatan Batang Dua dan Rp92.090.000,00 untuk Belanja Modal Ganti Rugi Tanah Bangunan Pendidikan di Kecamatan Batang Dua.

**b) Koreksi Tambah**

Koreksi Tambah Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp845.872.000,00, yang terdiri dari Mutasi Masuk Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp73.920.000,00, Penambahan Belanja Hutang Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp554.000.000,00, Penilaian (*Appraisal*) sebesar Rp143.952.000,00 dan Revaluasi sebesar Rp74.000.000,00.

**c) Koreksi Kurang**

Koreksi Koreksi Kurang Aset Tetap Tanah sebesar Rp4.077.602.722,00, terdiri dari:

1. Mutasi Keluar sebesar Rp73.920.000,00 Kecamatan Ternate Selatan (Kel. Fitu) berupa tanah Deplot Cengkeh sesuai nomor : 593/80/2023 Tanggal 10/04/2023
2. Penghapusan Aset Tetap Tanah sebesar Rp4.003.682.722,00 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Penghapusan:
  - SK Penghapusan sebesar Rp2.190.000.000,00 Sesuai Nomor :140.A/III.3/KT/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - SK Penghapusan sebesar Rp1.113.682.722,00 Sesuai Nomor :201/III.3/KT/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - SK Penghapusan sebesar Rp300.000.000,00 sesuai Nomor 148.A/III.3/KT/2022 Tanggal 26 September 2022 pada Sekretariat Daerah dan
  - SK Penghapusan sebesar Rp400.000.000,00 sesuai Nomor 54.B/III.3/KT/2022 Tanggl 21 Februari 2022 Sekretariat Daerah

Jumlah bidang Tanah Pemerintah Kota Ternate sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 1.215 bidang tanah dengan nilai sebesar Rp1.128.227.353.265,00 berupa tanah kosong/lapangan, tanah untuk gedung dan bangunan, tanah untuk konstruksi jalan, tanah irigasi, tanah sekitar daerah irigasi serta 4 bidang tanah dantaranya adalah merupakan tanah yang di kerjasamakan dengan pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp33.356.080.000,00. Jumlah bidang Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 188 bidang tanah, dan yang belum bersertifikat sebanyak 1.007 bidang tanah. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Ternate telah menerbitkan 326 Sertifikat untuk 118 Bidang Tanah, hal ini dikarenakan dalam satu bidang tanah terdapat beberapa sertifikat. Dari 118 Bidang Tanah tersebut, terdapat 23 Bidang Tanah yang telah diterbitkan Sertifikat namun Bidang Tanah tersebut belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Pemerintah Kota Ternate, dan akan dicatat dalam KIB A Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2023 karena masih menunggu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Bidang Tanah tersebut

yang akan digunakan sebagai Nilai Perolehan. Dari penjelasan tersebut, maka jumlah Bidang Tanah Pemerintah Kota Ternate yang telah bersertifikat sebanyak 283 Bidang Tanah dan 912 Bidang Tanah yang belum bersertifikat.

Rincian jumlah bidang tanah bersertifikat dan belum bersertifikat per kecamatan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel Rincian Bidang Tanah**

No	Uraian	Jumlah (bidang)	Luas (m2)	Nilai (Rp)
<b>A.</b>	<b>Tanah Bersertifikat</b>			
1.	Pulau Ternate	18	37.828,00	4.566.841.690,00
2.	Ternate Selatan	31	52.406,00	12.972.120.810,00
3.	Ternate Utara	117	1.737.335,87	130.222.130.655,00
4.	Ternate Tengah	71	4.267.295,00	119.007.938.494,00
5.	Moti	5	10.980,00	622.141.000,00
6.	Batang Dua	6	15.622,00	623.820.000,00
7.	Pulau Hiri	15	48.337,00	2.024.378.600,00
8.	Ternate Barat	20	113.623,83	9.165.092.143,00
	<b>Sub total</b>	<b>283</b>	<b>6.283.427,70</b>	<b>279.204.463.392,00</b>
<b>B.</b>	<b>Tanah Belum Bersertifikat</b>			
1.	Pulau Ternate	51	282.975,88	22.765.414.033,00
2.	Ternate Selatan	329	2.605.388,37	220.861.669.210,00
3.	Ternate Utara	121	13.042.151,67	28.956.437.054,00
4.	Ternate Tengah	213	49.411.441,73	465.277.236.347,00
5.	Moti	42	326.316,26	12.418.638.310,00
6.	Batang Dua	56	275.458,80	13.312.654.480,00
7.	Pulau Hiri	37	93.627,36	26.884.699.425,00
8.	Ternate Barat	65	192.455,34	21.199.034.014,00
	<b>Sub total</b>	<b>914</b>	<b>66.229.815,41</b>	<b>811.675.782.873,00</b>
	<b>Total Tanah</b>	<b>1.197</b>	<b>72.513.243,11</b>	<b>1.090.880.246.265,00</b>

### VI.3.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang tercatat dalam aset tetap Pemerintah Kota Ternate adalah mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lain yang nilainya memenuhi syarat untuk kapitalisasi dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap dipakai, perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan hibah. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh Pemerintah Kota Ternate melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai sedangkan pengakuan aset peralatan dan mesin dari hibah apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah dalam bentuk berita acara serah terima hibah.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp356.813.521.410,75 dan Rp324.772.051.533,75 mengalami peningkatan sebesar Rp32.041.469.877,00 atau 9,87% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
1.	Alat-alat Besar	25.716.326.717,00	24.021.926.717,00
2.	Alat-alat Angkutan	95.540.049.785,00	85.760.861.958,00
3.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	5.660.860.054,00	5.474.055.914,00
4.	Alat-alat Pertanian	3.704.522.524,00	3.709.422.524,00
5.	Alat-alat Kantot dan Rumah Tangga	98.517.945.421,33	89.442.965.966,33
6.	Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	7.681.769.543,00	7.172.195.209,00
7.	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	20.544.233.533,00	14.856.521.354,00
8.	Alat-alat Laboratorium	33.257.451.875,99	33.210.265.275,99
9.	Alat-alat Persenjataan	103.222.322,00	103.222.322,00
10.	Komputer	62.181.877.981,43	57.451.584.488,43
11.	Alat Eksplorasi	0,00	0,00
12.	Alat Pengeboran	0,00	0,00
13.	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00
14.	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00
15.	Alat Keselamatan Kerja	1.220.067.804,00	1.220.067.804,00
16.	Alat Peraga	92.546.250,00	0,00
17.	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00
18.	Rambu-rambu	2.058.070.000,00	1.908.852.000,00
19.	Peralatan Olahraga	534.577.600,00	440.110.000,00
	<b>Total</b>	<b>356.813.521.410,75</b>	<b>324.772.051.533,75</b>

Mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01-2023	Rp	324.772.051.533,75
Penambahan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	Rp	29.241.515.278,85
Koreksi Tambah	Rp	7.545.605.472,15
Koreksi Kurang	Rp	(4.745.650.874,00)
Saldo Nilai Perolehan per 31-12-2023	Rp	356.813.521.410,75
Akumulasi Penyusutan	Rp	(274.679.870.060,42)
<b>Saldo per 31-12-2023</b>	<b>Rp</b>	<b>82.133.651.350,33</b>

Mutasi Peralatan dan Mesin tahun 2023 terdiri dari:

**a) Penambahan**

Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2023 yang berasal dari kegiatan belanja modal sebesar Rp29.241.515.278,85. Dari nilai tersebut yang diakui sebagai penambahan aset tetap peralatan dan mesin adalah sebesar Rp27.484.564.699,85 dan yang tidak di akui sebagai penambahan aset adalah sebesar Rp1.756.950.579,00 yang terdiri dari Ekstrakomptabel senilai Rp1.157.525.544,00, Reklasifikasi berkurang senilai Rp2.317.560,00 dan belanja barang dan jasa senilai Rp597.107.475,00 (belanja barang yang tidak memenuhi standar aset)

**b) Koreksi Tambah**

Koreksi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sebesar Rp7.545.605.472,15 yang terdiri dari Reklasifikasi Bertambah, Mutasi Masuk, Barang dan Jasa, Koreksi dan Hutang 2023

1. Reklasifikasi Bertambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp320.434.139,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - Reklasifikasi bertambah di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp27.500.139,00 pada Gedung Dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin berupa Papan Informasi
  - Reklasifikasi Bertambah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu Dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin berupa Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga ( Rak Arsip/Rak Besi) sebesar Rp63.840.000,00
  - Reklasifikasi bertambah pada Sekretariat DPRD dari Gedung Dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin berupa Papan nama sebesar Rp229.094.000,00
2. Mutasi bertambah pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.800.926.798,00 yang terdiri dari :
  - Mutasi Masuk pada DPPKBD berupa Alat Laparaskopi ke Dinas Kesehatan (RSUD) sebesar Rp1.392.481.798,00 sesuai BAST No: 476/220.1/2023 Tanggal 23 Juni 2023
  - Mutasi Masuk pada DPPKBD ke DPMPTSP berupa Kendaraan Roda Empat sebesar Rp191.792.000,00 sesuai BAST Nomor: 030/343/2023 Tanggal 08/01/2023 dan Mutasi Masuk pada Dinas Perhubungan ke DPMPTSP berupa Kendaraan Roda Dua sebesar Rp20.000.000,00 sesuai BAST Nomor: 030/341/2023 Tanggal 08/01/2023
  - Mutasi Masuk pada Sekretariat DPRD ke Dinas Kebudayaan berupa kendaraan Roda Dua sebesar Rp17.695.000,00 sesuai BAST Nomor: 030/342/2023 Tanggal 08 Januari 2023
  - Mutasi Masuk pada Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian Berupa Kendaraan Roda Empat sebesar Rp198.958.000,00 sesuai BAST Nomor: 024/217/2023 Tanggal 05 Oktober 2023.
3. Koreksi Tambah dari Barang dan Jasa pada Peralatan Dan Mesin sebesar Rp156.953.642,00 yang terdiri dari:

- Koreksi Tambah Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp138.025.922,00 berupa Jaminan Kesehatan Nasional
  - Koreksi Tambah Barang dan Jasa pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip sebesar Rp18.927.720,00 berupa Peralatan Dan Mesin
4. Koreksi Tambah Dana Bos pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.911.997.257,00
  5. Koreksi Tambah Hutang Tahun 2023 sebesar Rp3.476.024.558,00 yang terdiri dari:
    - Koreksi Tambah Hutang Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.286.899.453,00
    - Hutang Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp596.500.000,00
    - Hutang Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp734.520.000,00
    - Hutang Tahun 2023 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp667.498.500,00
    - Hutang Tahun 2023 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp49.350.600,00
    - Hutang Tahun 2023 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp116.904.645,00
    - Hutang Tahun 2023 pada Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp24.351.360,00

**c) Koreksi Kurang**

Koreksi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.745.650.874 adalah Mutasi Kurang karena Reklasifikasi, Pindah Status Penggunaan, Peralatan Mesin yang dihapuskan, Koreksi, Ekstracomptable, Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Berkurang Dinas Pendidikan sebesar Rp2.317.560,00 ke Aset Tetap Lainnya berupa Buku
2. Mutasi Berkurang sebesar Rp1.800.926.798 yang terdiri dari :
  - Mutasi Keluar pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Senilai Rp1.564.273.798,00 yaitu Mutasi Keluar ke DPMPTSP sebesar Rp171.792.000,00 Berupa Kendaraan Roda Empat sesuai BAST Nomor: 030/343/2023 Tanggal 08/01/2023 dan Mutasi keluar ke Dinas Kesehatan (RSUD) sebesar Rp1.392.481.798,00 Berupa Alat Laparaskopi sesuai BAST Nomor: 476/220.1/2023 Tanggal 23/06/2023
  - Mutasi Keluar pada Dinas Perhubungan ke DPMPTSP sebesar Rp20.000.000,00 berupa Kendaraan Roda Dua sesuai BAST Nomor: 030/041/2023 Tanggal 08/01/2023.
  - Mutasi Keluar pada Sekretariat Daerah Ke Dinas Pertanian sebesar Rp198.958.000,00 berupa Kendaraan Roda Empat sesuai BAST Nomor: 024/217/2023 Tanggal 05/10/2023
  - Mutasi Keluar pada Sekretariat DPRD Ke Dinas Kebudayaan sebesar

Rp17.695.000,00 berupa Kendaraan Roda Dua sesuai BAST Nomor: 030/342/2023 Tanggal 08/01/2023

3. Koreksi Kurang Barang dan Jasa serta Barang Habis Pakai sebesar Rp510.083.475,00 yang terdiri dari:
  - Koreksi Kurang Barang dan Jasa Dinas Kesehatan sebesar Rp13.970.405,00 pada Peralatan Dan Mesin Berupa Alat Kesehatan
  - Koreksi Kurang Barang dan Jasa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp2.184.000,00 Pada Peralatan Dan Mesin berupa kantong plastik dan patok pembatas
  - Koreksi Kurang Barang dan Jasa Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp5.439.000,00 pada Peralatan Dan Mesin berupa Gordyn
  - Koreksi Kurang Barang dan Jasa Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp133.245.000,00 berupa Alat IUD
  - Koreksi Kurang Barang dan Jasa Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebesar Rp13.242.300,00 pada Peralatan Dan Mesin berupa Kabel
  - Koreksi Kurang Barang dan Jasa Dinas Pemuda Dan Olahraga sebesar Rp39.460.850,00 pada Peralatan Dan Mesin
  - Koreksi Kurang Barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp104.952.000,00 yaitu Peralatan Dan Mesin berupa Alat Kebersihan (Tong sampah, Kantong Sampah, dan sapu lidi)
  - Koreksi Kurang Barang dan Jasa pada BP2RD sebesar Rp6.250.000,00 yaitu Peralatan Dan Mesin berupa Ikat pinggang
  - Koreksi Kurang Barang dan Jasa pada DPRD sebesar Rp132.812.000,00 yaitu Peralatan dan Mesin berupa Gordyn
  - Koreksi Kurang Barang dan Jasa pada Kecamatan Ternate Utara sebesar Rp5.816.580,00 yaitu Peralatan dan Mesin berupa Gordyn
  - Koreksi Kurang Barang dan Jas pada Kecamatan Ternate Selatan sebesar Rp25.046.340,00 berupa Tong Sampah
  - Koreksi Kurang Barang dan Jasa pada Kecamatan Pulau Ternate sebesar Rp5.500.000,00 berupa Gordyn
  - Koreksi Kurang Barang dan Jasa pada Kecamatan Ternate Barat sebesar Rp11.165.000,00 yaitu Peralatan dan Mesin berupa Kursi Plastik
  - Koreksi Kurang Barang dan Jasa pada Kecamatan Pulau Moti sebesar Rp11.000.000,00 berupa Gordyn
4. Koreksi kurang Hutang Belanja Dana Bos pada Dinas Pendidikan sebesar Rp720.627.225,00
5. Koreksi Kurang Penghapusan Senilai Rp1.187.773.497,00 yang terdiri dari
  - Koreksi Kurang Penghapusan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp30.428.640,00 yaitu Gedung dan Bangunan sesuai SK Penghapusan Nomor: 156/III.3/KT/2023 Tanggal 20 Mei 2023



- Koreksi Kurang Penghapusan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp273.415.000,00 yaitu Gedung dan Bangunan sesuai SK Penghapusan Nomor:156/III.3/KT/2023 Tanggal 10 Mei 2023
  - Koreksi Kurang Penghapusan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp185.800.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor: 156/III.3/KT/2023 Tanggal 10 Mei 2023
  - Koreksi Kurang Penghapusan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp75.638.200,00 sesuai SK Penghapusan Nomor: 156/III.3/KT/2023 Tanggal 10 Mei 2023
  - Koreksi Kurang Penghapusan pada Dinas Pemuda Dan Olahraga sebesar Rp16.500.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor: 156/III.3/KT/2023 Tanggal 10 Mei 2023
  - Koreksi Kurang Penghapusan pada Inspektorat Daerah sebesar Rp333.391.657,00 sesuai SK Penghapusan Nomor: 126/III.3/KT/2023 Tanggal 03 April 2023
  - Koreksi Kurang Penghapusan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp254.200.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor: 156/III.3/KT/2023 Tanggal 10 Mei 2023
  - Koreksi Kurang Penghapusan pada Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp18.400.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor:156/III.3/KT/2023 Tnggal 10 Mei 2023
6. Koreksi Aset yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap (Extracomptable) sebesar Rp523.922.319,00 yang terdiri dari :
- Koreksi Kurang Extracomptable Dinas Pendidikan sebesar Rp149.700.000,00 yaitu pada Alat Kantor dan Rumah Tangga
  - Koreksi Kurang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp10.292.660,00 terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp7.791.000,00 dan Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp2.501.660,00
  - Koreksi kurang extracomptable Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp16.472.400,00 pada Alat Kantor dan Rumah Tangga
  - Koreksi Kurang Extracomptable Dinas Kebakaran sebesar Rp11.554.989,00 yaitu pada Alat Kantor dan Rumah Tangga
  - Koreksi Kurang Extracomptable pada Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp8.901.090,00 yaitu Alat Kantor dan Rumah Tangga
  - Koreksi Kurang Extracomptable Dinas ketahanan Pangan sebesar Rp1.133.000,00 pada Peralatan dan Mesin yang terdiri dari Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp467.000,00 dan Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebesar Rp666.000,00
  - Koreksi Kurang Extracomptable Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp101.774.000,00 pada Peralatan dan Mesin yang terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp14.750.000,00 dan Peralatan olahraga sebesar Rp87.024.000,00
  - Koreksi Kurang Extracomptable Dinas Komunikasi informatika Dan Persandian sebesar Rp20.828.000,00 yaitu pada Alat Kantor dan Rumah Tangga

- Koreksi kurang Extracomptable pada Dinas Pemuda Dan Olahraga sebesar Rp15.950.000,00 yaitu pada Alat Kantor dan Rumah Tangga
- Koreksi Kurang Ekstracomptable Dinas Perpustakaan Dan Arsip sebesar Rp18.084.000,00 pada alat kantor dan Rumah Tangga
- Koreksi Kurang Ekstracomptable pada Dinas Pariwisata sebesar Rp16.264.180,00
- Koreksi Kurang Ekstracomptable pada Sekretariat Daerah sebesar Rp39.000.000,00
- Koreksi Kurang Ekstracomptable pada BP2RD sebesar Rp6.290.000,00
- Koreksi Kurang Ekstracomptable pada Kecamatan Pulau Hiri sebesar Rp95.660.000,00
- Koreksi Kurang Ekstracomptable pada Kecamatan Pulau Moti sebesar Rp12.018.000,00

### VI.3.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Ternate dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika Gedung dan Bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.120.587.803.102,93 dan Rp1.094.620.257.744,64 mengalami peningkatan sebesar Rp25.967.545.358,29 atau 2,37% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Rincian Gedung dan Bangunan**

No.	Uraian	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) ( <i>Audited</i> )	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) ( <i>Audited</i> )
1.	Bangunan Gedung	1.085.769.080.252,93	1.064.733.005.556,20
2.	Monumen	5.888.314.505,00	4.571.652.150,00
3.	Bangunan Menara	1.077.481.314,64	1.077.481.314,64
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	27.852.927.030,36	24.238.118.723,80
	<b>Total</b>	<b>1.120.587.803.102,93</b>	<b>1.094.620.257.744,64</b>

Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01-2023	Rp	1.094.620.257.744,64
Penambahan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	Rp	43.223.513.732,21
Koreksi Tambah:	Rp	37.074.718.628,98
Koreksi Kurang:	Rp	(54.330.687.002,90)
Saldo Nilai Perolehan per 31-12-2023	Rp	1.120.587.803.102,93
Akumulasi Penyusutan	Rp	(487.745.379.430,00)
<b>Saldo Nilai Buku per 31-12-2023</b>	<b>Rp</b>	<b>632.842.423.672,93</b>

Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2023 terdiri dari:

**a) Penambahan**

Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah sebesar Rp43.223.513.732,21 diperoleh dari kegiatan Belanja Modal, dari nilai tersebut yang diakui sebagai penambahan aset Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp17.677.960.689,94 sedangkan yang tidak diakui sebagai penambahan Aset sebesar Rp25.545.553.042,27 yang terdiri dari Hutang Belanja tahun 2022 sebesar Rp2.256.894.487,00, Reklasifikasi sebesar Rp10.713.935.310,60 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp12.574.723.244,67.

**b) Koreksi Tambah**

Koreksi Tambah Gedung dan Bangunan selama Tahun 2023 sebesar Rp37.074.718.628,98 terdiri dari:

- Koreksi Tambah berupa reklasifikasi Tahun 2023 sebesar Rp9.845.360.951,29 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Aset Jalan dan Irigasi sebesar Rp25.000.440,00 pada Kecamatan Ternate Selatan berupa Rehab Bangunan Kantor Kelurahan Sasa;
  2. Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Aset Jalan dan Irigasi pada Kecamatan Pulau Hiri sebesar Rp110.000.000,00 berupa Bangunan Pagar pada Kelurahan Togolobe;
  3. Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.727.724.904,29 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berupa Bangunan Gedung Kantor;
  4. Reklasifikasi Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp7.982.635.607,00.
- Koreksi tambah Hutang Belanja Tahun 2023 sebesar Rp27.222.957.677,69 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Koreksi tambah Hutang Belanja dari Dinas Kesehatan sebesar Rp1.596.969.200,00 berupa Bangunan Gedung Rumah Singgah sebesar Rp721.031.018,00 dan Bangunan Pagar pada Puskesmas Bahari Berkesan Sebesar Rp149.234.275,00; dan Bangunan Pagar pada Kelurahan Mayau

Kecamatan Batang Dua sebesar Rp726.703.907,00;

2. Koreksi tambah Hutang Belanja sebesar Rp255.316.269,92 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan berupa Bangunan Gedung Kantor;
  3. Koreksi tambah Hutang Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp710.559.844,63 berupa Renovasi Pantai Falajawa sebesar Rp686.878.272,13 dan Bangunan Ornamen City Branding sebesar Rp23.681.572,50;
  4. Koreksi tambah Hutang Belanja sebesar Rp713.715.735,00 pada Dinas Pariwisata berupa Gazebo;
  5. Koreksi tambah Hutang Belanja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp111.484.647,00 berupa Rehab Gedung Kantor;
  6. Koreksi tambah Hutang Belanja sebesar Rp1.370.909.031,00 pada sekretariat DPRD berupa Bangunan Mesjid Kantor;
  7. Koreksi tambah Hutang Belanja pada Kecamatan Ternate Barat sebesar Rp251.254.559,00 berupa Bangunan Kantor Kelurahan Kulaba;
  8. Koreksi tambah Hutang Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp96.942.893,00 berupa Gedung Bangunan Kantor;
  9. Koreksi tambah Hutang Belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.665.978.199,80 berupa Bangunan Gedung Pendidikan;
  10. Koreksi tambah Hutang Belanja sebesar Rp19.449.827.298,34 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Gedung Bangunan sebesar Rp16.850.502.047,07 dan Bangunan Pagar sebesar Rp2.599.325.251,27;
- Koreksi tambah sebesar Rp6.400.000,00 pada Dinas Pendidikan karena kesalahan pencatatan berupa Bangunan Rumah Dinas SDN 74 Kota Ternate.

#### c) Koreksi Kurang

Koreksi Kurang nilai Aset Gedung dan Bangunan selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp54.330.687.002,90 terdiri dari:

- Koreksi Kurang berupa reklasifikasi pada Tahun 2023 sebesar Rp10.713.935.310,60 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Reklasifikasi sebesar Rp1.291.509.317,00 pada Dinas Kesehatan dari aset Gedung dan Bangunan Ke Konstruksi dalam Pengerjaan berupa Bangunan Rumah Singgah;
  2. Reklasifikasi sebesar Rp27.500.139,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari aset Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin berupa Papan Informasi;
  3. Reklasifikasi sebesar Rp3.092.146.973,00 pada Dinas Sosial dari aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Bangunan Gedung Kantor;
  4. Reklasifikasi sebesar Rp49.589.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dari aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Bangunan Gedung Kantor;
  5. Reklasifikasi sebesar Rp3.062.336.994,60 pada Dinas Lingkungan Hidup dari

aset Gedung dan Bangunan ke Aset Renovasi;

6. Reklasifikasi pada Dinas Pariwisata sebesar Rp259.573.122,00 dari aset Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan;
  7. Reklasifikasi sebesar Rp107.056.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari aset Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Tiang Lampu;
  8. Reklasifikasi sebesar Rp63.840.000,00 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dari aset Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan mesin;
  9. Reklasifikasi sebesar Rp229.094.000,00 pada Sekretariat DPRD dari aset Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin berupa Papan Billboard;
  10. Reklasifikasi sebesar Rp64.823.920,00 pada Kecamatan Ternate Tengah dari aset Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan;
  11. Reklasifikasi sebesar Rp79.999.952,00 pada Kecamatan Ternate Barat dari aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pengerjaan berupa Bangunan Posyandu kelurahan Sulamadaha;
  12. Reklasifikasi sebesar Rp56.419.800,00 pada Kecamatan Pulau Moti dari Aset Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan;
  13. Reklasifikasi sebesar Rp733.312.248,00 pada Dinas Pendidikan dari Aset Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Bangunan MCK;
  14. Reklasifikasi sebesar Rp1.596.733.845,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- Koreksi Kurang Hutang Belanja Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.373.295.349,00 dan pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang sebesar Rp883.599.138,00;
  - Koreksi Kurang dari Belanja Modal Barang dan Jasa Tahun 2023 yang tidak diakui sebagai Aset Tetap sebesar Rp38.756.825.305,30 dengan rincian sebagai berikut:
    1. Koreksi Kurang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp22.480.830,00;
    2. Koreksi Kurang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian sebesar Rp624.005.423,00;
    3. Koreksi Kurang Belanja Barang dan Jasa pada Inspektorat Daerah sebesar Rp44.680.356,00;
    4. Koreksi Kurang Belanja Barang dan Jasa pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp10.680.000,00;
    5. Koreksi Kurang Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD sebesar Rp516.581.000,00;
    6. Koreksi Kurang Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Ternate Utara sebesar Rp74.572.265,00;
    7. Koreksi Kurang Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp89.715.000,00;
    8. Koreksi Kurang Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Ternate Selatan sebesar Rp106.709.600,00;

9. Koreksi Kurang Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Ternate Barat sebesar Rp56.934.717,00.
  10. Koreksi Kurang Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Pulau Hiri sebesar Rp70.000.000,00.
  11. Koreksi Kurang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp305.256.737,00;
  12. Koreksi Kurang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp36.835.209.377,30;
- Koreksi kurang Penghapusan Bangunan Gedung sebesar Rp2.603.031.900,00 dengan rincian sebagai berikut :
    1. Koreksi kurang Penghapusan Bangunan Gedung pada Dinas Kesehatan Sebesar Rp74.090.000,00 berupa berupa Bangunan Rumah Singgah;
    2. Koreksi kurang Penghapusan Bangunan Gedung pada Dinas Sosial Berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp1.115.082.900,00;
    3. Koreksi kurang Penghapusan Bangunan Gedung pada dinas Pengendalian Penduduk sebesar Rp452.674.000,00 berupa Bangunan UPTD Ternate Utara;
    4. Koreksi kurang Penghapusan Bangunan Gedung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp396.735.000,00 berupa Bangunan kesenian;
    5. Koreksi kurang Penghapusan sebesar Rp564.450.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa Bangunan Gedung Kantor;

Dari jumlah nilai Gedung dan Bangunan tersebut di atas, termasuk di dalamnya pemerintah kota ternate juga memiliki properti investasi berupa Bangunan Gedung Gamalama Plaza dengan nilai Rp94.848.960.500,00.

#### VI.3.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan.

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.425.984.117.125,05 dan Rp1.163.757.487.271,62 mengalami peningkatan sebesar Rp262.226.629.853,43 atau 22,53% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Rincian Jalan Irigasi dan Jaringan**

No.	Uraian	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des.2022 (Rp) (Audited)
1.	Jalan dan Jembatan	1.079.293.724.517,42	855.961.334.262,89

No.	Uraian	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des.2022 (Rp) (Audited)
2.	Bangunan Air	282.870.274.753,12	244.526.726.494,22
3.	Instalasi	19.595.474.307,57	19.399.168.307,57
4.	Jaringan	44.224.643.546,94	43.870.258.206,94
	<b>Total</b>	<b>1.425.984.117.125,05</b>	<b>1.163.757.487.271,62</b>

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01-2023	Rp	1.163.757.487.271,62
Penambahan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	Rp	77.007.313.350,53
Koreksi Tambah:	Rp	198.292.270.272,41
Koreksi Kurang:	Rp	(13.072.953.769,51)
Saldo Nilai Perolehan per 31-12-2023	Rp	1.425.984.117.125,05
Akumulasi Penyusutan	Rp	(752.717.306.655,58)
<b>Saldo per 31-12-2023</b>	<b>Rp</b>	<b>673.266.810.469,84</b>

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari:

**a) Penambahan**

Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari pelaksanaan program kegiatan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp77.007.313.350,53 yang diakui sebagai penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah sebesar Rp63.934.359.581,02 dan yang tidak diakui sebagai aset tetap sebesar Rp13.072.953.769,51 yang terdiri dari Reklasifikasi berkurang sebesar Rp6.057.668.187,51, hutang belanja tahun 2022 Rp1.954.537.471,00, dan Barang Jasa sebesar Rp5.060.748.111,00.

**b) Koreksi Tambah**

Koreksi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2023 adalah sebesar Rp198.292.270.272,41 yang terdiri dari :

- Reklasifikasi tambah sebesar Rp180.817.028.599,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Reklasifikasi bertambah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp733.312.248,00 yang merupakan Reklas dari Gedung dan Bangunan Berupa MCK.
  2. Reklasifikasi bertambah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp179.546.254.509,00 yang merupakan reklas dari KDP yang terdiri dari jalan dan jembatan sebesar Rp173.547.846.296,00 dan bangunan air sebesar Rp5.998.408.213,00.
  3. Reklasifikasi bertambah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp49.589.000,00 yang merupakan Reklas dari Gedung dan Bangunan berupa Jalan Paving Blok.
  4. Reklasifikasi bertambah pada Dinas Pariwisata sebesar Rp259.573.122,00

berupa Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan yang terdiri dari Jalan sebesar Rp187.341.463,00 dan Tandon Air sebesar Rp72.231.659,00

5. Reklasifikasi bertambah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp107.056.000,00 yang merupakan Reklas dari Gedung dan Bangunan berupa bak sampah gamalama.
  6. Reklasifikasi bertambah pada Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp64.823.920,00 berupa reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Jalan khusus kompleks sebesar Rp35.000.020,00 dan Bangunan MCK sebesar Rp29.823.900,00
  7. Reklasifikasi bertambah pada Kecamatan Pulau Moti sebesar Rp56.419.800,00 dari gedung dan bangunan berupa tambatan perahu.
- Hutang Belanja sebesar Rp16.595.403.673,41 dengan rincian sebagai berikut :
    1. Bertambah Hutang Belanja pada Dinas PUPR sebesar Rp15.431.648.173,41 berupa jalan sebesar Rp8.435.167.598,90 dan Bangunan air sebesar Rp6.996.480.574,51
    2. Bertambah Hutang Belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp740.147.300,00
    3. Bertambah Hutang Belanja pada Dinas Perhubungan sebesar Rp224.694.500,00
    4. Bertambah Hutang Belanja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp198.913.700,00
  - Koreksi tambah belanja Dana Tidak Terduga (DTT) Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp879.838.000,00 berupa Bangunan air/irigasi yakni pembangunan talud penahan tanah.

#### c) Koreksi Kurang

Koreksi Kurang aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp13.072.953.769,51 dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi berkurang karena Reklasifikasi sebesar Rp6.057.668.187,51 yang terdiri dari:
  1. Reklas Berkurang pada Dinas PUPR sebesar Rp5.922.667.747,51 yang terdiri dari reklas ke KDP berupa jalan sebesar Rp671.024.628,00 dan bangunan air sebesar Rp5.251.643.119,51
  2. Reklas berkurang pada Kecamatan Ternate Selatan sebesar Rp25.000.440,00 reklas ke gedung dan bangunan (Rehab Kantor Lurah).
  3. Reklas berkurang pada Kecamatan Pulau Hiri sebesar Rp110.000.000,00 reklas ke gedung dan bangunan berupa pagar di kelurahan togolobe.
- Koreksi kurang Hutang Belanja Tahun 2022 pada Dinas PUPR sebesar Rp1.954.537.471,00
- Koreksi berkurang Barang dan Jasa sebesar Rp5.060.748.111,00 yang terdiri dari:
  1. Belanja Barang dan Jasa pada Dinas PUPR sebesar Rp2.660.883.932,00 berupa jalan sebesar Rp2.128.253.603,00 dan bangunan air sebesar Rp532.630.329,00



2. Belanja Barang Jasa pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp118.059.600,00 berupa tempat pembuangan sampah.
3. Belanja Barang Jasa pada Dinas Perhubungan sebesar Rp165.000.000,00 berupa pengadaan lampu untuk pesantren di kelurahan fitu.
4. Belanja Barang Jasa pada Kecamatan Ternate Utara sebesar Rp496.746.603,00 rehab berupa jalan sebesar Rp183.004.275,00 bangunan air sebesar Rp278.788.803,00 bangunan pengamanan sebesar Rp12.676.800,00 dan bangunan air bersih sebesar Rp22.276.725,00
5. Belanja Barang Jasa pada Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp470.139.920,00 rehab berupa jalan dan jembatan Rp136.477.000,00 dan bangunan air sebesar Rp333.662.920,00
6. Belanja Barang Jasa pada Kecamatan Ternate Selatan sebesar Rp403.545.019,00 rehab berupa jalan dan jembatan sebesar Rp195.720.000,00 bangunan air sebesar Rp151.272.519,00 dan instalasi sebesar Rp56.552.500,00
7. Belanja Barang Jasa pada Kecamatan Pulau Ternate sebesar Rp179.005.787,00 rehab berupa jalan dan jembatan sebesar Rp123.245.070,00 bangunan air sebesar Rp26.244.850,00 dan instalasi sebesar Rp29.515.867,00
8. Belanja Barang Jasa pada Kecamatan Ternate Barat sebesar Rp229.720.000,00 rehab berupa bangunan pengamanan sebesar Rp89.720.000,00 dan instalasi pengolah sampah sebesar Rp140.000.000,00
9. Belanja Barang Jasa Pada Kecamatan Pulau Hiri sebesar Rp330.147.250,00 rehab berupa jalan dan jembatan sebesar Rp128.035.910,00 dan bangunan air sebesar Rp202.111.340,00
10. Belanja Barang Jasa pada Kecamatan Pulau Batang Dua sebesar Rp7.500.000,00 berupa tempat sampah di kelurahan perum bersatu.

### VI.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp59.139.628.035,47 dan Rp54.050.692.645,87 mengalami peningkatan sebesar Rp5.088.935.389,60 atau 9,42% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Rincian Aset Tetap Lainnya**

No	Uraian	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) ( <i>Audited</i> )	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) ( <i>Audited</i> )
1.	Bahan Perpustakaan	33.203.497.771,97	31.176.899.376,97
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	107.426.000,00	107.426.000,00

No	Uraian	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
3.	Hewan	0,00	0,00
4.	Biota Perairan	0,00	0,00
5.	Tanaman	764.975.870,00	764.975.870,00
6.	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00
7.	Aset Tetap Dalam Renovasi	25.063.728.393,50	22.001.391.398,90
	<b>Total</b>	<b>59.139.628.035,47</b>	<b>54.050.692.645,87</b>

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01-2023	Rp	54.050.692.645,87
Penambahan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	Rp	103.746.500,00
Koreksi Tambah	Rp	4.985.188.889,60
Koreksi Kurang	Rp	0,00
<b>Saldo Nilai Perolehan per 31-12-2023</b>	<b>Rp</b>	<b>59.139.628.035,47</b>

Mutasi Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

**a) Koreksi Tambah**

Koreksi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.985.188.889,60 yaitu Reklasifikasi sebesar Rp3.062.336.994,60 Pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Renovasi Taman Nukila dan Pantai Falajawa. Reklasifikasi sebesar Rp2.317.560,00 Pada Dinas Pendidikan berupa Buku, dan Penambahan dari Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.920.534.335,00 berupa Buku pada Dinas Pendidikan.

**b) Penambahan Belanja Modal**

Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 103.746.500,00 pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip berupa Buku.

### VI.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp23.763.108.163,39 dan Rp201.036.665.349,17 mengalami penurunan sebesar Rp177.273.557.185,78 atau 88,18% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)**

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
1.	Dinas Pekerjaan	Pembangunan Jalan Baru Salero	- Kontrak Nomor: 600/3478/SP/TR/DPUPR-KT/2018.		748.750.000,00

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
	Umum	– Dufa – Dufa / Reklamasi Sumber Dana: (APBD)	Tgl. 10 Juli 2018 Nilai kontrak Rp 748.000.000,00 Jk. Waktu 150 hari (10/07/2018 s.d 12/12/2018) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			- Kontrak Nomor: 600/4870.a/SP/TR/DPU-PR/Kota- Tte/2019 Tgl. 24 Oktober 2019 Nilai Kontrak Rp. 29.558.807.000 Jk. Waktu 360 hari (24/10/2019 s/d 18/10/2020) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		29.558.807.001,00
			- Kontrak Nomor: 600/2910/ DPUPR/KT-TTE/2022 Tgl. 16 September 2022 Nilai Kontrak Rp. 1.898.099.628,15 Jk. Waktu 90 hari (16/10/2022 s/d 14/12/2022) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		1.803.194.646,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan		248.600.000,00 98.780.000,00
			<b>Total</b>		<b>32.458.131.647,00</b>
2.	Dinas Pekerjaan Umum	Reklamasi Kawasan Kayu Merah - Kalumata Sumber Dana: (APBD)	- Kontrak Nomor: 600/3919/SP/TR/DPU-PR/KT/2017 Tgl. 02-Aug-2017 Nilai kontrak Rp 34.734.000.000,00 Jk. Waktu 360 hari (02/08/2017 s/d 28/07/ 2018) Progres Fisik 26% Keuangan 100%		
			- Kontrak Nomor: 600/2378/DPUPR/Kota-Tte/2019 Tgl. 19 Juni 2019 Nilai kontrak Rp 199.820.000,00 Jk. Waktu 150 hari (19/06/2019 s/d 20/11/ 2019) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		192.320.000,00
			- Kontrak Nomor: 600/4869/SP/TR/DPU-PR/Kota Tte/2019 Tgl. 24 Oktober 2019 Nilai Kontrak Rp 68.354.760.284,00 Jk. Waktu 360 hari (24/10/2019 s/d 18/10/2020)		68.354.760.283,00
			Progres Fisik 52% Keuangan 100%		35.233.576.000,00
			- Kontrak Nomor: 600/5154/SP/TR/DPU-PR/Kota-		34.724.000.716,00

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
			Tte/2019 Tgl. 11 November 2019 Nilai Kontrak Rp 34.724.000.717 Jk. Waktu 360 hari (11/11/ 2019 s/d 10/11/2020) Progres Fisik 100% Keuangan 79,85%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang Lainnya		1.066.169.330,00 495.244.200,00 14.375.001,00
			<b>Total</b>		<b>140.080.445.530,00</b>
3.	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>	Pembangunan Talud Penahan Ombak Pelabuhan Hiri Kel. Sulamadah Sumber Dana: (APBD)	- Kontrak Nomor : 600/2985/DPUPR/KT/2021. Tgl. 19-Nov-2021 Nilai Kontrak Rp. 1.372.749.500,00 Jk. Waktu 45 hari (9/11/2021 s.d 23/12/2021) Progres Fisik 100% Keuangan 100%	355.310.700,00	355.310.700,00
			- Kontrak Nomor : 600/2058/DPUPR/KT/2022. Tgl. 14-Jul-2022 Nilai Kontrak Rp. 2.963.442.407,00 Jk. Waktu 150 hari (14/07/2022 s.d 11/12/2022) Progres Fisik 100% Keuangan 100%	2.867.544.407,00	1.978.605.640,00
			- Kontrak Nomor : 650/0042/SP/TR/DPUPR/KT/2023. Tgl. 07-Ags-2023 Nilai Kontrak Rp. 2.076.382.364,00 Jk. Waktu 147 HK (07-08-2023 s/d 31-12-2023) Progres Fisik 60% Keuangan 60%	1.432.703.830,88	
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang Lainnya	91.470.500,00 292.042.000,00	91.470.500,00 192.808.000,00
			<b>Total</b>	<b>5.039.071.436,88</b>	<b>2.618.194.840,00</b>
4.	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>	Pembangunan Ruko Kelurahan Soa Sio (Multy Year) Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/852/SP/BJK/DPU-KT/2013 Tgl. 01 Agustus 2013 Nilai Kontrak Rp 4.952.400.000,00 Jk. Waktu 500 hari (01/08/2013 s/d 12/12/2014) Progres Fisik 25,74% Keuangan 25,74%	1.274.747.760,00	1.274.747.760,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang Lainnya	84.100.000,00 55.555.000,00 10.200.000,00	84.100.000,00 55.555.000,00 10.200.000,00

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
			<b>Total</b>	<b>1.424.602.760,00</b>	<b>1.424.602.760,00</b>
5.	Dinas Pekerjaan Umum	Air Bersih Kelurahan Foramadiahi  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/1113.b/SPK/CK/DPU-KT/2015 Tgl. 20-Mei-2015  Nilai Kontrak Rp 171.015.000,00 Jk. Waktu 90 hari (20/05/2015 s/d 18/08/2015) Progres Fisik 63% Keuangan 63%	102.609.000,00	102.609.000,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan		
			<b>Total</b>	<b>102.609.000,00</b>	<b>102.609.000,00</b>
6.	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi Jembatan Kota Ternate  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/3388/DPUPR/KT/2020 Tgl. 11-November-2020 Nilai Kontrak Rp 78.925.000,00 Jk. Waktu 30 hari (11/11/2020 s/d 10/12/2020) Progres Fisik 0% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	78.925.000,00	78.925.000,00
			<b>Total</b>	<b>78.925.000,00</b>	<b>78.925.000,00</b>
7.	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Revitalisasi Kawasan Terminal Bastiong  Sumber Dana: (APBD)	- Kontrak Nomor : 600/46/SP/TR/DPUPR/KOTA-Tte/2020 Tgl. 07-Januari-2020 Nilai Kontrak Rp 98.091.000,00 Jk. Waktu 180 hari (07/01/2020 s/d 06/02/2020) Progres Fisik -% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	98.091.000,00	98.091.000,00
			<b>Total</b>	<b>98.091.000,00</b>	<b>98.091.000,00</b>
8.	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Teknis Penggantian Jembatan dalam Kota  Sumber Dana : (APBD)	- Kontrak Nomor : 600/3316/DPUPR/KOTA/2021 Tgl. 16-Desember-2021 Nilai Kontrak Rp 94.242.500,00 Jk. Waktu 15 hari (16/12/2021 s/d 30/12/2021) Progres Fisik 0% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	94.242.500,00	94.242.500,00
			<b>Total</b>	<b>94.242.500,00</b>	<b>94.242.500,00</b>
9.	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan dalam	- Kontrak Nomor : 600/3318/DPUPR/KOTA/2021 Tgl. 16-Desember-2021		

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
		Kota	Nilai Kontrak Rp 94.242.500,00		
		Sumber Dana : (APBD)	Jk. Waktu 15 hari (16/12/2021 s/d 30/12/2021) Progres Fisik 0% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	94.242.500,00	94.242.500,00
			<b>Total</b>	<b>94.242.500,00</b>	<b>94.242.500,00</b>
10.	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Teknis Peningkatan dan Pembangunan Jalan dalam Kota.	- Kontrak Nomor : 600/3295/DPUPR/KOTA/2021 Tgl. 14-Desember-2021 Nilai Kontrak Rp 96.290.700,00		
		Sumber Dana : (APBD)	Jk. Waktu 18 hari (14/12/2021 s/d 31/12/2021) Progres Fisik 0% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	96.290.700,00	96.290.700,00
			<b>Total</b>	<b>96.290.700,00</b>	<b>96.290.700,00</b>
11.	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Spam Kel. Tobololo	- Kontrak Nomor : 600/1673/DPUPR/KT-TTE/2022 Tgl. 17-Juni-2022 Nilai Kontrak Rp 2.207.328.855,00	2.067.933.101,00	2.067.933.101,00
		Sumber Dana : (APBD)	Jk. Waktu 120 HK (17/06/2022 s/d 15/10/2022) Progres Fisik 82% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya	63.433.795,00 56.411.959,00 19.550.000,00	63.433.795,00 56.411.959,00 19.550.000,00
			<b>Total</b>	<b>2.207.328.855,00</b>	<b>2.207.328.855,00</b>
12.	Dinas Pekerjaan Umum	Rehab Saluran Air Sekunder dan Plat Beton. Kel. Tanah Raja	- Kontrak Nomor : 600/2157/DPUPR/KT-TTE/2022 Tgl. 21-Juli-2022 Nilai Kontrak Rp 344.196.249,00		234.401.296,00
		Sumber Dana : (APBD)	Jk. Waktu 120 HK (21/07/2022 s/d 18/11/2022) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya		4.484.225,00
			<b>Total</b>		<b>238.885.521,00</b>
13.	Dinas Pekerjaan Umum	Pembuatan Talud Penahan Tanah RT.006/RW.003. Kel. Tanah Tinggi Barat	- Kontrak Nomor : 600/3036/DPUPR/KT-TTE/2022 Tgl. 23-Sep-2022 Nilai Kontrak Rp 75.837.526,00		72.879.250,00
		Sumber Dana :	Jk. Waktu 90 HK		

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
		APBD)	(23/09/2022 s/d 21/12/2022) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya		1.684.328,00 1.273.948,00
			<b>Total</b>		<b>75.837.526,00</b>
14.	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Talud Dan Deker Kampus A Dan B Universitas Muhammadiyah Maluku Utara  Sumber Dana : (APBD)	- Kontrak Nomor : 600/3269/DPUPR/KT-TTE/2022 Tgl. 21-Okt-2022 Nilai Kontrak Rp 436.808.771,00 Jk. Waktu 80 HK (21/10/2022 s/d 19/01/2022) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		414.968.332,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya		9.590.422,00 7.253.753,00
			<b>Total</b>		<b>431.812.507,00</b>
15.	Dinas Pekerjaan Umum	Pengadaan Talud Penahan Ombak Kel. Takofi  Sumber Dana : (APBD)	- Kontrak Nomor : 600/3739/DPUPR/KT-TTE/2022 Tgl. 16-Nov-2022 Nilai Kontrak Rp 312.206.187,00 Jk. Waktu 35 HK (16/11/2022 s/d 20/12/2022) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		283.470.500,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya		16.322.372,00 12.413.315,00
			<b>Total</b>		<b>312.206.187,00</b>
16.	Dinas Pekerjaan Umum	Pekerjaan Penataan Pedestrian Kawasan Kuliner Blakang Mall Jatiland  Sumber Dana : (APBD)	- Kontrak Nomor : 600/3907/DPUPR/KT-TTE/2022 Tgl. 28-Nov-2022 Nilai Kontrak Rp 6.112.732.693,00 Jk. Waktu 33 HK (28/11/2022 s/d 31/12/2022) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		3.743.898.733,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya		493.264.000,00 193.528.500,00
			<b>Total</b>		<b>4.430.691.233,00</b>
17.	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Jalan Menuju Makam Sultan Baabullah Di Kelurahan Foradiahi Sumber Dana : (APBD)	- Kontrak Nomor : 600/2765/DPUPR/KT/2022 Tgl. 06-09-2022 Nilai Kontrak Rp 961.724.930,00 Jk. Waktu 90 HK		814.084.666,00

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
			(06/09/2022 s/d 04/12/2022) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya		6.786.905,00
			<b>Total</b>		<b>820.871.571,00</b>
18.	Dinas Pekerjaan Umum	Rehab Saluran Air RT.014/RW.005 Kelurahan Kayu Merah  Sumber Dana : (APBD)	- Kontrak Nomor : 600/1295/DPUPR/KT-TTE/2022 Tgl. 18-05-2022  Nilai Kontrak Rp 105.892.097,00 Jk. Waktu 120 HK (18/05/2022 s/d 15/09/2022) Progres Fisik 100% Keuangan 100%	103.904.350,00	103.904.350,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya	1.987.747,00	1.987.747,00
			<b>Total</b>	<b>105.892.097,00</b>	<b>105.892.097,00</b>
19.	Dinas Pekerjaan Umum	Perbaikan Drainase Kawasan Ternate Utara  Sumber Dana : (APBD)	- Kontrak Nomor : 600/3022/DPUPR/KT-TTE/2022 Tgl. 23-09-2022  Nilai Kontrak Rp 618.604.248,00 Jk. Waktu 90 HK (23/09/2022 s/d 22/12/2022) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		499.421.040,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya		9.554.199,00
			<b>Total</b>		<b>508.975.239,00</b>
20.	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Tugu Sultan Babullah  Sumber Dana : (APBD)	- Kontrak Nomor : 600/984/DPUPR/KT/2022 Tgl. 13-04-2022  Nilai Kontrak Rp 77.147.220,00 Jk. Waktu 30 HK (13/04/2022 s/d 12/05/2022) Progres Fisik 0% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya	77.147.220,00	77.147.220,00
			<b>Total</b>	<b>77.147.220,00</b>	<b>77.147.220,00</b>
21.	Dinas Pekerjaan Umum	Pembuatan Pagar dan Jalan Masuk Pekuburan Kel.	- Kontrak Nomor : 600/1729/DPUPR/KT/2022 Tgl. 22-06-2022		307.257.000,00



No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
		Tarau Sumber Dana : (APBD)	Nilai Kontrak Rp 307.257.000,00 Jk. Waktu 120 HK (22/06/2022 s/d 20/10/2022) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya		
			<b>Total</b>		<b>307.257.000,00</b>
22.	Dinas Pekerjaan Umum	Pembuatan Pagar Kuburan Dan Jalan Masuk Pekuburan Kel. Sango Sumber Dana : (APBD)	- Kontrak Nomor : 600/1731/DPUPR/KT/2022 Tgl. 22-06-2022 Nilai Kontrak Rp 307.756.000,00 Jk. Waktu 120 HK (22/06/2022 s/d 20/10/2022) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		307.756.000,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya		
			<b>Total</b>		<b>307.756.000,00</b>
23.	Dinas Pekerjaan Umum	Pekerjaan Kajian Teknis Kantor Walikota Sumber Dana : (APBD)	- Kontrak Nomor : 600/2039/DPUPR/KT/2022 Tgl. 13-07-2022 Nilai Kontrak Rp 397.491.000,00 Jk. Waktu 120 HK (13/07/2022 s/d 10/11/2022) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		198.745.500,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya		
			<b>Total</b>		<b>198.745.500,00</b>
24.	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan TPQ Rt. 004, Rt. 002 Kel. Makassar Timur Sumber Dana : (APBD)	- Kontrak Nomor : 600/2195/DPUPR/KT/2022 Tgl. 25-07-2022 Nilai Kontrak Rp 305.009.000,00 Jk. Waktu 120 HK (25/07/2022 s/d 22/11/2022) Progres Fisik 100% Keuangan 100%	305.009.000,00	305.009.000,00
			-Kontrak Nomor : 640/277/BG/DPUPR/KT/2023 Tgl. 14-04-2023 Nilai Kontrak Rp 147.460.000,00 120 HK	140.087.000,00	

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
			(14-04-2023 s/d 11-08-2023) Progres Fisik 100% Keuangan 95%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya		
			<b>Total</b>	<b>445.096.000,00</b>	<b>305.009.000,00</b>
25.	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Kantor Polres  Sumber Dana : (APBD)	- Kontrak Nomor : 600/2747/DPUPR/KT/2022 Tgl. 05-09-2022 Nilai Kontrak Rp 4.182.646.756,00 Jk. Waktu 100 HK (05/09/2022 s/d 13/12/2022) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		3.959.999.404,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya		147.963.000,00 74.684.352,00
			<b>Total</b>		<b>4.182.646.756,00</b>
26.	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Gedung Polisi Militer (POM)  Sumber Dana : (APBD)	- Kontrak Nomor : 600/2774/DPUPR/KT/2022 Tgl. 12-09-2022 Nilai Kontrak Rp 2.616.827.351,00 Jk. Waktu 100 HK (12/09/2022 s/d 20/12/2022) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		2.449.999.371,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya		117.413.000,00 49.414.980,00
			<b>Total</b>		<b>2.616.827.351,00</b>
27.	Dinas Pekerjaan Umum	Rehabilitasi Rumah Dinas Walikota  Sumber Dana : (APBD)	- Kontrak Nomor : 600/1997/DPUPR/KT/2022 Tgl. 11-07-2022 Nilai Kontrak Rp 2.616.827.351,00 Jk. Waktu 120 HK (11/07/2022 s/d 08/11/2022) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		369.403.000,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan - Penunjang lainnya		
			<b>Total</b>		<b>369.403.000,00</b>
		Perbaikan Drainase Kawasan Ternate Selatan  Sumber Dana:	-Kontrak Nomor : 614/595/DPUPR/KT-TTE/2023 Tgl. 25-Ags-2023 Nilai Kontrak Rp 1.800.077.477,00	1.242.053.459,00	

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
		(APBD)	Jk. Waktu 120 HK (25/08/2023 s/d 22/12/2023) Progres Fisik 65,32% Keuangan 65,32%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	37.152.889,00 37.313.295,00	
			<b>Total</b>	<b>1.316.519.643,00</b>	
		Pembangunan Talud Pantai Kel. Mayau Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 650/0086/SP/TR/DPUPR/KT/2023. Tgl. 06-Okt-2023 Nilai Kontrak Rp 282.878.754,00 Jk. Waktu 80 HK (06/10/2023 s/d 24/12/2023) Progres Fisik 30% Keuangan 30%	84.863.626,00	
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	1.625.073,00 6.880.657,00	
			<b>Total</b>	<b>93.369.357,00</b>	
		Pembangunan Jaringan Perpipaan Kel. Kasturian Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 690/352/DPUPR/KT-TTE/2023. Tgl. 17-Jul-2023 Nilai Kontrak Rp 387.402.543,00 Jk. Waktu 150 HK (17/07/2023 s/d 13/12/2023) Progres Fisik 30% Keuangan 30%	116.220.763,00	
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan		
			<b>Total</b>	<b>116.220.763,00</b>	
		Perencanaan Peremajaan Jaringan Perpipaan Air Minum Dalam Kota Ternate Sumber Dana : (APBD)	-Kontrak Nomor : 690/722/CK/DPUPR-KT/2023. Tgl. 14-Sept-2023 Nilai Kontrak Rp 244.986.990,00 Jk. Waktu 60 HK (14/09/2023 s/d 12/11/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	244.986.990,00	
			<b>Total</b>	<b>244.986.990,00</b>	
		Peningkatan Jalan Tanah Ke Aspal Takome-Lotto Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/2886/DPUPR/KT/2023. Tgl. 31-Ags-2023 Nilai Kontrak Rp 627.991.825,80 Jk. Waktu 120 HK (31/08/2023 s/d 28/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan		

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
			- Pengawasan		
			<b>Total</b>		
		Pembangunan Jalan Setapak RT.13 RW.05 Kel.Sangaji 1 Paket  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/2711A/DPUPR/KT-TTE/2023. Tgl. 15-Ags-2023  Nilai Kontrak Rp 99.231.414,39  Jk. Waktu 90 HK (15/08/2023 s/d 12/11/2023)  Progres Fisik 100% Keuangan 95%	49.615.707,00	
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan		
			<b>Total</b>	<b>49.615.707,00</b>	
		Pembangunan Trans Depo  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 658/864/CK/DPUPR/KT-TTE/2023. Tgl. 17-Okt-2023  Nilai Kontrak Rp 403.836.197,00  Jk. Waktu 70 HK (17/10/2023 s/d 25/12/2023)  Progres Fisik 50,89% Keuangan 50,89%	252.397.623,00	
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.350.000,00 59.274.000,00	
			<b>Total</b>	<b>411.021.623,00</b>	
		Perencanaan Pembangunan Jalan Paving/Rabat	-Kontrak Nomor : 600/4124/DPUPR/KT-TTE/2023. Tgl. 20-Des-2023  Nilai Kontrak Rp 49.783.500,00  Jk. Waktu 11 HK (20/12/2023 s/d 31/12/2023)  Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
		Sumber Dana: (APBD)	Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	49.783.500,00	
			<b>Total</b>	<b>49.783.500,00</b>	
		Perencanaan Teknis Talud Penahan Ombak Kawasan Kota Ternate II	-Kontrak Nomor : 600/4063A/DPUPR/KT-TTE/2023. Tgl. 15-Des-2023  Nilai Kontrak Rp 99.123.000,00  Jk. Waktu 15 HK (15/12/2023 s/d 31/12/2023)  Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
		Sumber Dana : (APBD)	Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.123.000,00	
			<b>Total</b>	<b>99.123.000,00</b>	
		Perencanaan	-Kontrak Nomor :		

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
		Teknis Talud Penahan Tanah Kawasan Kota Ternate II  Sumber Dana : (APBD)	600/3877/DPUPR/KT-TTE/2023. Tgl. 01-Des-2023 Nilai Kontrak Rp 99.285.060,00 Jk. Waktu 30 HK (01/12/2023 s/d 30/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.285.060,00	
			<b>Total</b>	<b>99.285.060,00</b>	
		Perencanaan Teknis Talud Penahan Tanah Kawasan Kota Ternate I  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/3866A/DPUPR/KT-TTE/2023. Tgl. 01-Des-2023 Nilai Kontrak Rp 99.340.560,00 Jk. Waktu 30 HK (01/12/2023 s/d 30/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.340.560,00	
			<b>Total</b>	<b>99.340.560,00</b>	
		Perencanaan Teknis Talud Penahan Ombak Kawasan Kota Ternate I  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/3880/DPUPR/KT-TTE/2023. Tgl. 01-Des-2023 Nilai Kontrak Rp 99.340.560,00 Jk. Waktu 30 HK (01/12/2023 s/d 30/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.340.560,00	
			<b>Total</b>	<b>99.340.560,00</b>	
		Perencanaan Teknis Rehabilitasi Drainase Kawasan Kota Ternate II  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/3997/DPUPR-KT/2023. Tgl. 12-Des-2023 Nilai Kontrak Rp 99.250.872,00 Jk. Waktu 15 HK (12/12/2023 s/d 26/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.250.872,00	
			<b>Total</b>	<b>99.250.872,00</b>	
		Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Kawasan Kota Ternate I  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/3868/DPUPR-KT/2023. Tgl. 01-Des-2023 Nilai Kontrak Rp 99.451.560,00 Jk. Waktu 25 HK (01/12/2023 s/d 25/12/2023)		

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
			Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.451.560,00	
			<b>Total</b>	<b>99.451.560,00</b>	
		Perencanaan Teknis Rehabilitasi Drainase Kawasan Kota Ternate I  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/3991/DPUPR-KT/2023. Tgl. 12- Des-2023 Nilai Kontrak Rp 99.234.555,00 Jk. Waktu 15 HK (12/12/2023 s/d 26/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.234.555,00	
			<b>Total</b>	<b>99.234.555,00</b>	
		Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Kawasan Kota Ternate II  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/3865/DPUPR-KT/2023. Tgl. 01- Des-2023 Nilai Kontrak Rp 99.451.560,00 Jk. Waktu 25 HK (01/12/2023 s/d 25/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.451.560,00	
			<b>Total</b>	<b>99.451.560,00</b>	
		Perencanaan Teknis Normalisasi Kali Mati/Barangka Kec. Batang Dua  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/3873/DPUPR-KT/2023. Tgl. 01- Des-2023 Nilai Kontrak Rp 99.157.410,00 Jk. Waktu 25 HK (01/12/2023 s/d 25/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.157.410,00	
			<b>Total</b>	<b>99.157.410,00</b>	
		Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/3838/DPUPR/KT/2023. Tgl. 30- Nov-2023 Nilai Kontrak Rp 99.309.480,00 Jk. Waktu 30 HK (30/11/2023 s/d 29/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.309.480,00	
			<b>Total</b>	<b>99.309.480,00</b>	

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
		Perencanaan Teknis Pembangunan Tempat Ibadah	-Kontrak Nomor : 600/3859/DPUPR/KT/2023. Tgl. 01-Des-2023 Nilai Kontrak Rp 99.622.500,00 Jk. Waktu 30 HK (01/12/2023 s/d 30/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
		Sumber Dana: (APBD)	Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.622.500,00	
			<b>Total</b>	<b>99.622.500,00</b>	
		Perencanaan Tahap Iii Kantor Polres Ternate	-Kontrak Nomor : 600/3811/DPUPR/KT/2023. Tgl. 29-Nov-2023 Nilai Kontrak Rp 99.586.980,00 Jk. Waktu 30 HK (29/11/2023 s/d 28/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
		Sumber Dana: (APBD)	Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.586.980,00	
			<b>Total</b>	<b>99.586.980,00</b>	
		Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Belajar Ponpes Aisyah Syarif Muslim	-Kontrak Nomor : 600/3844/DPUPR/KT/2023. Tgl. 30-Nov-2023 Nilai Kontrak Rp 99.295.605,00 Jk. Waktu 30 HK (30/11/2023 s/d 29/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
		Sumber Dana: (APBD)	Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.295.605,00	
			<b>Total</b>	<b>99.295.605,00</b>	
		Perencanaan Teknis Pembangunan Asrama Ponpes Aisyah Syarif Muslim	-Kontrak Nomor : 600/3841/DPUPR/KT/2023. Tgl. 30-Nov-2023 Nilai Kontrak Rp 99.295.605,00 Jk. Waktu 30 HK (30/11/2023 s/d 29/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
		Sumber Dana: (APBDP)	Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.295.605,00	
			<b>Total</b>	<b>99.295.605,00</b>	
		Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Lurah Kecamatan Ternate Utara	-Kontrak Nomor : 600/3835/DPUPR/KT/2023. Tgl. 30-Nov-2023 Nilai Kontrak Rp 99.367.200,00 Jk. Waktu 30 HK		

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
		Sumber Dana: (APBD)	(30/11/2023 s/d 29/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.367.200,00	
			<b>Total</b>	<b>99.367.200,00</b>	
		Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Lurah Kecamatan Ternate Selatan  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/3832/DPUPR/KT/2023. Tgl. 30- Nov-2023  Nilai Kontrak Rp 99.478.200,00  Jk. Waktu 30 HK  (30/11/2023 s/d 29/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.478.200,00	
			<b>Total</b>	<b>99.478.200,00</b>	
		Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Lurah Kecamatan Ternate Selatan  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/3829/DPUPR/KT/2023. Tgl. 30- Nov-2023  Nilai Kontrak Rp 99.500.400,00  Jk. Waktu 30 HK  (30/11/2023 s/d 29/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.500.400,00	
			<b>Total</b>	<b>99.500.400,00</b>	
		Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/4060/DPUPR/KT/2023. Tgl. 15- Des-2023  Nilai Kontrak Rp 69.120.608,00  Jk. Waktu 15 HK  (15/12/2023 s/d 29/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	69.120.608,00	
			<b>Total</b>	<b>69.120.608,00</b>	
		Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/4063/DPUPR/KT/2023. Tgl. 15- Des-2023  Nilai Kontrak Rp 69.120.275,00  Jk. Waktu 15 HK  (15/12/2023 s/d 29/12/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	69.120.275,00	
			<b>Total</b>	<b>69.120.275,00</b>	



No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
		Perencanaan Teknis Rumah Dinas DANDIM  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 600/153/DPUPR/KT/2023. Tgl. 16-Mar-2023  Nilai Kontrak Rp 98.735.055,00 Jk. Waktu 30 HK (16/03/2023 s/d 14/04/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	98.735.055,00	
			<b>Total</b>	<b>98.735.055,00</b>	
		Perencanaan Penataan Kawasan Pesisir Mangga Dua Utara  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 650/0070/SP/TR/DPUPR/KT/2023. Tgl. 04-Sep-2023  Nilai Kontrak Rp 198.980.820,00 Jk. Waktu 60 HK (04/09/2023 s/d 02/11/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	198.980.820,00	
			<b>Total</b>	<b>198.980.820,00</b>	
		Perencanaan Teknis Ded Rumah Dinas Jabatan Walikota Ternate Kel. Kalumpang  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 640/373/BG/DPUPR/KT/2023. Tgl. 29-Mei-2023  Nilai Kontrak Rp 363.475.000,00 Jk. Waktu 60 HK (29/05/2023 s/d 27/07/2023) Progres Fisik 100% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	363.475.000,00	
			<b>Total</b>	<b>363.475.000,00</b>	
32.	Dinas Kesehatan	Pembangunan Rumah Sakit Daerah  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor : 440/2123/SP-MASTER PLAIN RSD/DINKES/DAU/2019. Tgl. 25-Sep-2019  Nilai kontrak Rp 1.709.679.000,00 Jk. Waktu 90 hari (25/09/2019 s.d. 23/12/2019) Progres Fisik 0% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	1.709.679.000,00	1.709.679.000,00
			<b>Total</b>	<b>1.709.679.000,00</b>	<b>1.709.679.000,00</b>
		Pembangunan Rumah Singgah Peduli Bahim	-Kontrak Nomor: 440/3032/SPK-JK/RUMAH BAHIM/DAU/2023  Tgl. 01-Nov-2023	<b>1.153.135.917,00</b>	

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
		Sumber Dana: (APBD)	Nilai Kontrak Rp 1.601.577.662,00  Jk. Waktu 55 Hari  (01/11/2023 s.d. 25/12/2023)  Progres Fisik 95% Keuangan 60 %		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	90.005.000,00 48.368.400,00	
			<b>Total</b>	<b>1.291.509.317,00</b>	
33.	<b>Dinas Pariwisata</b>	Pembuatan Panggung Kesenian/ Pertunjukan (DAK)  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor: 05.a/SP-PPH/Dispar-KT/2018.  Tgl. 13-Nov-2018  Nilai Kontrak Rp 422.870.000,00  Jk. Waktu 45 HK (31/08/20 s.d. 28/12/18)  Progres Fisik 20% Keuangan 100%	422.870.000,00	422.870.000,00
			-Kontrak Nomor: 10.a/SP-PKPH/Dispar-KT/2019.  Tgl. 05-Nov-2019  Nilai Kontrak Rp 687.405.036,88  Jk. Waktu 45 HK (05/11/20 s.d. 20/12/20)  Progres Fisik 40% Keuangan 100%	687.405.036,88	687.405.036,88
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	84.045.000,00 21.760.000,00	84.045.000,00 21.760.000,00
			<b>Total</b>	<b>1.216.080.036,88</b>	<b>1.216.080.036,88</b>
34	<b>Dinas Sosial</b>	Pembangunan Kantor Dinas Sosial Tahap I  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor: 460/296/VII/DINSOS-KT/2022. Tgl. 15-Jul-2022  Nilai Kontrak Rp 1.710.473.368,00  Jk. Waktu 120 HK (15/Jul/22 s.d. 12/11/2022)  Progres Fisik 20% Keuangan 100%	1.710.473.368,00	1.710.473.368,00
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan		
			<b>Total</b>	<b>1.710.473.368,00</b>	<b>1.710.473.368,00</b>
		Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Dinas Sosial Kota Ternate.  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor: 460/357/DINSOS-KT/VIII/2023. Tgl. 28-Ags-2023  Nilai Kontrak Rp 3.092.146.973,00  Jk. Waktu 120 Hari (28-Ags-2023 s.d. 25-Des-2023)  Progres Fisik 70 % Keuangan 60%	2.893.158.383,00	

No.	OPD	Nama KDP	Keterangan	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	99.579.210,00 99.409.380,00	
			<b>Total</b>	<b>3.092.146.973,00</b>	
35	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat</b>	Pembangunan Gedung Kantor Tahap 1  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor: 027/267/BKBP/VIII/2022.  Tgl. 31 Agustus 2022  Nilai Kontrak Rp 1.727.724.904,29  Jk. Waktu 360 HK (31/08/2022 s.d. 26/08/2023)  Progres Fisik 50% Keuangan 100%		1.627.991.404,29
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan		99.733.500,00
			<b>Total</b>		<b>1.727.724.904,29</b>
36	<b>Kecamatan Moti</b>	Jasa Konsultasi Perencanaan  Sumber Dana : (APBD)	-Kontrak Nomor: 051/55/SPK/Kec. Moti – KT/2022  Tgl. 1 Agustus 2022  Nilai Kontrak Rp 29.640.000,00  Jk. Waktu 30 HK (1/08/2022 s.d. 31/08/2022)  Progres Fisik 0% Keuangan 100%		
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan	29.640.000,00	29.640.000,00
			<b>Total</b>	<b>29.640.000,00</b>	<b>29.640.000,00</b>
37.	<b>Kecamatan Ternate Barat</b>	Pembangunan Posyandu  Sumber Dana: (APBD)	-Kontrak Nomor: 511.3/678-KL/2023. Tgl. 08/Des/2023  -Nilai Kontrak Rp 79.999.952,00 -Jk. Waktu 30 Hari (08-Des-2023 s.d. 09-Jan-2024)  Progres Fisik 40% Keuangan 100% Jangka Waktu Penyeselaian tanggal 31 Mei 2024	<b>79.999.952,00</b>	
			Biaya atribusi: - Perencanaan - Pengawasan		
			<b>Total</b>	<b>79.999.952,00</b>	
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>23.763.108.163,39</b>	<b>201.036.665.349,17</b>

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 01-01-2023	Rp	201.036.665.349,17
Penambahan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	Rp	0,00
Koreksi tambah:	Rp	11.983.057.834,51
Koreksi Kurang:	Rp	(189.256.615.020,29)
Saldo per 31-12-2023	Rp	23.763.108.163,39

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdiri dari:

**a) Penambahan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23.763.108.163,39. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang timbul sebagai akibat belum selesainya pekerjaan pembangunan fisik konstruksi dan belum ada Berita Acara Serah Terima selesainya pekerjaan dari Pihak Ketiga kepada Pengguna Barang dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut ini:

NO.	NAMA OPD	Konstruksi Dalam Pengerjaan Per- 31 Des 2023 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.633.579.516,51
2.	Dinas Kesehatan	3.001.188.317,00
3.	Dinas Pariwisata	1.216.080.036,88
4.	Dinas Sosial	4.802.620.341,00
5.	Kecamatan Moti	29.640.000,00
6.	Kecamatan Ternate Barat	79.999.952,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.763.108.163,39</b>

**b) Koreksi Tambah**

Koreksi tambah reklasifikasi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2023 sebesar Rp11.983.057.834,51 yang terdiri dari:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp7.519.401.592,51 yang merupakan reklasifikasi terdiri dari; Bangunan Gedung senilai Rp1.497.424.365,00, Pagar senilai Rp99.309.480,00, Jalan senilai Rp671.024.628,00, dan Bangunan Air senilai Rp5.251.643.119,51;
2. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.291.509.317,00 yang merupakan penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa pembangunan Rumah Singgah;
3. Dinas Sosial sebesar Rp3.092.146.973,00 yang merupakan penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang berupa Pembangunan Gedung Kantor;
4. Kecamatan Ternate Barat sebesar Rp79.999.952,00 merupakan tambahan dari pembangunan Posyandu Kelurahan Sulamadaha yang dibangun menggunakan Anggaran Dana Kelurahan.

**c) Koreksi Kurang**

Koreksi kurang nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp189.256.615.020,29 yang merupakan reklasifikasi berkurang dan mutasi keluar dari:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp187.528.890.116,00 yang terdiri dari reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan Senilai Rp7.367.622.607,00, Pagar senilai Rp615.013.000,00, Jalan senilai Rp173.547.846.296,00, dan Bangunan Air senilai Rp5.998.408.213,00;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.727.724.904,29 yaitu reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Kantor.

Rincian Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang telah selesai sebagai berikut :

No.	NAMA OPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>187.528.890.116,00</b>
	Gedung dan Bangunan	7.367.622.607,00
	Pagar	615.013.000,00
	Jalan	173.547.846.296,00
	Bangunan Air	5.998.408.213,00
2	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>1.727.724.904,29</b>
	Gedung dan Bangunan	1.727.724.904,29
	<b>Jumlah</b>	<b>189.256.615.020,29</b>

### VI.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp1.515.142.556.146,00) dan (Rp1.403.657.897.550,76) mengalami peningkatan sebesar (Rp111.484.658.595,24) atau 7,94% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Akumulasi Penyusutan**

No	Uraian	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des.2022 (Rp) (Audited)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	274.679.870.060,42	250.083.396.976,67
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	487.745.379.430,00	452.036.336.167,00
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	752.717.306.655,58	701.538.164.407,09
	<b>Jumlah</b>	<b>1.515.142.556.146,00</b>	<b>1.403.657.897.550,76</b>

Apabila disandingkan nilai perolehan Aset Tetap, maka akan diperoleh Nilai Buku untuk masing-masing Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel Rincian Nilai Buku**

No	Uraian	Nilai	Nilai Buku 31 Des. 2023 (Rp)
1.	Tanah		1.091.024.198.265,00
2.	Peralatan dan Mesin	356.813.521.410,75	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(274.679.870.060,42)	
	Nilai Buku Peralatan dan Mesin		82.133.651.350,33
3.	Gedung dan Bangunan	1.120.587.803.100,93	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(487.745.379.430,00)	

No	Uraian	Nilai	Nilai Buku 31 Des. 2023 (Rp)
	Nilai Buku Gedung dan Bangunan		632.842.423.670,93
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.425.984.117.125,42	
	Akum Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(752.717.306.655,58)	
	Nilai Buku Jalan, Irigasi, dan Jaringan		673.266.810.469,84
5.	Aset Tetap Lainnya		59.139.628.035,47
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan		23.763.108.163,39
	<b>Total Aset Tetap</b>		<b>2.562.169.819.954,96</b>

#### VI.3.4. ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp132.858.383.087,96 dan Rp72.357.688.547,96 mengalami peningkatan sebesar Rp60.232.083.259,50 atau 83,24% terdiri dari:

Tabel Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp) (Audited)
1.	Tagihan Jangka Panjang	1.491.788.290,00	1.491.788.290,00
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	33.356.080.000,00	33.356.080.000,00
3.	Aset Tak Berwujud	2.184.485.791,00	1.930.487.608,00
4.	Aset Lain-lain	28.521.728.726,46	28.149.479.500,96
5.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	67.704.456.000,00	7.429.853.149,00
	<b>Jumlah</b>	<b>133.258.538.807,46</b>	<b>72.357.688.547,96</b>

##### VI.3.4.1 Tagihan Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) digunakan untuk mencatat tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri (bendahara dan bukan bendahara) yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan daerah, namun belum dilengkapi dengan penetapan yang sah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menyebutkan bahwa ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Nilai Tagihan Jangka Panjang/TP TGR per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.491.788.290,00 yang diuraikan pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan
1	Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2011 yang hilang karena pencurian	105.581.293,00	105.581.293,00	Sudah ada laporan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Ternate sesuai nomor B/246/IV/2011/Reskrim tanggal 01 April 2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pid.B/2011/PN.Tte taggal 14 Januari 2012
2	Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Ternate Selatan TA 2011 yang hilang karena pencurian	64.260.008,00	64.260.008,00	Sudah ada laporan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Ternate sesuai nomor B/246/IV/2011/Reskrim tanggal 01 April 2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pid.B/2011/PN.Tte taggal 14 Januari 2012
3	Penggunaan uang kas oleh mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate TA 2011 untuk kepentingan pribadi	243.658.266,00	243.658.266,00	Belum dilakukan tuntutan perbendaharaan kepada mantan bendahara yang bersangkutan. Meskipun demikian sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan oleh Inspektorat dan selanjutnya akan diberitahukan kepada BPK untuk proses tuntutan perbendaharaan
4	Penerimaan Retribusi Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2019 yang telah dipungut namun tidak disetor oleh petugas Pemungut	1.078.288.723,00	1.078.288.723,00	Tuntutan ganti rugi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kerugian daerah tersebut akan dilakukan melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) pada tahun 2024
<b>Jumlah</b>		<b>1.491.788.290,00</b>	<b>1.491.788.290,00</b>	

Selain TP dan TGR tersebut, terdapat kerugian daerah berdasarkan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Uang Retribusi Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate sebesar **Rp1.068.242.189,00**. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor **700.04/17-Insp.Kt/2023** Tanggal **27 Oktober 2023**, diketahui terdapat penerimaan retribusi- pelayanan pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate periode bulan Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 yang telah dipungut dari wajib retribusi namun tidak disetor ke kas daerah sebesar **Rp1.068.242.189,00** dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi penerimaan pendapatan retribusi pasar bulan Februari s.d. Desember 2022 sebesar Rp970.968.539,00.
- Realisasi penerimaan pendapatan retribusi pasar bulan Januari 2023 sebesar

Rp97.273.650,00

Atas kerugian daerah tersebut belum dilakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan sedang dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) kepada pegawai yang bersangkutan. Kasus tersebut telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ternate. Kejaksaan Negeri Ternate telah menetapkan Tersangka kepada oknum yang merupakan pegawai negeri bukan Bendahara di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate yang bertanggungjawab atas kerugian daerah tersebut.

#### VI.3.4.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah aset milik Pemerintah Kota Ternate yang digunakan oleh pihak ketiga melalui perjanjian dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan/atau meningkatkan pendapatan daerah.

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sama sebesar Rp33.356.080.000,00 atau tidak ada perubahan. Nilai yang diakui Pemerintah Kota Ternate atas aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga ini mengacu pada isi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ternate dan pihak ketiga, sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

**Tabel Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

No.	Aset Pemkot Ternate yang Dikerjasamakan	Pengakuan Nilai Tanah yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga (Rp)	Penggunaan oleh Pihak Ketiga (Aset Bangun Guna Serah)	Keterangan - Nama Pihak Ketiga - Nomor & Tanggal Perjanjian - Masa Kerjasama - Keterangan Lain
1.	Tanah seluas 26.162 M2	3.350.000.000,00	Bangunan Waterboom	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Indoteranusa</li> <li>Perjanjian Nomor : 556.35/2012 dan 00102/IN/PK/TP/T/II/2012</li> <li>tanggal 02 Februari 2012</li> <li>Masa Pengembalian 30 tahun.</li> </ul>
2.	Tanah seluas 38.457 M2 (Sertifikat Hak Pengelolaan No.01 tanggal 25 Oktober 2004)	26.524.546.000,00	Mall JatiLand	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Jati Luhur Gemiling</li> <li>Perjanjian Nomor 80///KOTA TTE/2014 tanggal 11 Mei 2004</li> <li>Masa Pengembalian 25 tahun</li> <li>Di atas tanah tersebut terdapat sertifikat HGB atas Nama PT Jati Luhur Gemiling No.26 tanggal 24 Nopember 2004 seluas 33.073 M2</li> </ul>
3.	Tanah seluas 6.750 M2	2.314.624.000,00	Mall Hypermart	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Sumber Arta Bahari Sejahtera</li> <li>Masa Pengembalian 30 tahun.</li> </ul>
4.	Tanah seluas 1.470 M2 (Sertifikat Hak Pengelola No 05 Tanggal 05 Agustus 2015)	1.166.910.000,00	SPBU	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Yuseda Mandiri</li> <li>Masa Pengembalian 30 tahun.</li> </ul>
	<b>Total</b>	<b>33.356.080.000,00</b>		



### VI.3.4.3 Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.184.485.791,00 dan Rp1.930.487.608,00 mengalami peningkatan sebesar Rp253.998.183,00 atau 13,16% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Rincian Aset Tak Berwujud**

No.	Aset Tidak Berwujud	OPD	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des.2022 (Rp) (Audited)
1.	Software	Bappelitbangda	248.976.000,00	25.300.000,00
2.	Software	BP2RD	836.426.615,00	1.015.942.812,00
3.	Software	BPKAD	145.643.132,00	43.281.677,00
4.	Software	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.742.590,00	4.698.145,00
5.	Software	Dinas Kesehatan	35.794.701,00	48.334.248,00
6.	Software	Diskominfo	202.340.600,00	259.260.300,00
7.	Software	DLH	13.330.417,00	16.529.717,00
8.	Software	DP3A	35.577.966,00	43.201.816,00
9.	Software	DPMPSTP	26.540.000,00	32.180.000,00
10.	Software	Inspektorat Daerah	48.177.700,00	0,00
11.	Software	Kec. Ternate Utara	28.107.566,00	35.896.466,00
12.	Software	Setda	253.665.000,00	104.775.000,00
13.	Software	BKPSDMD	223.266.587,00	252.916.577,00
14.	Software	DPRD	43.230.250,00	48.170.850,00
15.	Software	Dispora	14.875.000,00	0,00
16.	Software	Dinas Pariwisata	24.791.667,00	0,00
<b>Jumlah Aset Tidak Berwujud</b>			<b>2.184.485.791,00</b>	<b>1.930.487.608,00</b>

Mutasi Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2023 dan 2022 serta amortisasi dan nilai nettanya adalah sebagai berikut:

**Tabel Mutasi Aset Tak Berwujud**

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp) (Audited)	Tahun 2022 (Rp) (Audited)
1.	Saldo Awal Aset Tak Berwujud	1.930.487.608,00	2.236.601.627,00
2.	Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	732.725.900,00	0,00
3.	Koreksi tambah dari reklasifikasi aset yang dihasilkan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	49.406.000,00
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>2.663.213.508,00</b>	<b>2.286.007.627,00</b>
4.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(478.727.717,00)	(355.520.019,00)
	<b>Nilai Aset Tak Berwujud Netto</b>	<b>2.184.485.791,00</b>	<b>1.930.487.608,00</b>

Koreksi Tambah Aset Tidak Berwujud berupa reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang terdiri dari:

Tabel Koreksi Bertambah Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp) (Audited)
1.	Dinas Koperasi & UKM	111.000.000,00
2.	Dinas Pemuda dan Olahraga	15.000.000,00
3.	Dinas Pariwisata	25.000.000,00
4.	Sekretariat Daerah	170.800.000,00
5.	Inspektorat Daerah	49.839.000,00
6.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	249.510.000,00
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	111.576.900,00
	<b>Total</b>	<b>732.725.900,00</b>

#### VI.3.4.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap karena tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sama sebesar Rp96.226.184.726,46 dan Rp35.579.332.649,96 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Aset Lain-lain

No.	Aset Lain-lain	Saldo 31 Desember 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp) (Audited)
1.	Aset dalam kondisi rusak berat yang sedang dalam proses usulan penghapusan	10.599.691.072,25	10.599.691.072,25
2.	Aset yang tidak diketahui keberadaannya	4.998.666,42	4.998.666,42
3.	Aset Persediaan (yang akan diserahkan ke masyarakat)	767.695.562,00	767.695.562,00
4.	Aset Persediaan (yang akan diserahkan ke pihak ketiga)	16.318.299.000,29	16.318.299.000,29
5.	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	831.044425,50	458.795.200,00
6.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	67.704.456.000,00	7.429.853.149,00
	<b>Jumlah Aset Lain-lain</b>	<b>96.226.184.726,46</b>	<b>35.579.332.649,96</b>

- 1) Aset dalam kondisi rusak berat sebesar Rp10.599.691.072,25 sedang dalam proses usulan penghapusan;
- 2) Aset yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp4.998.666,42;
- 3) Aset Persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp767.695.562,00 saat ini prosesnya masih dalam tahap Pembuatan BAST;
- 4) Aset Persediaan yang akan diserahkan ke pihak ketiga sebesar Rp16.318.299.000,29 saat ini prosesnya masih dalam tahap Pembuatan BAST;
- 5) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah adalah tahun 2023 sebesar Rp831.044.425,50 dan 2022 sebesar Rp451.369.500,00 yang diuraikan pada tabel dibawah ini :

No	Uraian Tuntutan/Kasus Perbendaharaan	2023	2022	Reklas ke Piutang Lainnya	Saldo Akhir	Keterangan
1	Pendapatan Retribusi Terminal tahun 2023 dan 2022 yang belum disetorkan oleh petugas pungut	203.975.000,00	176.269.500,00	176.269.500,00	203.975.000,00	<p>a. Ret Terminal tahun 2022 sudah di terbitkan SK Pembebanan a.n Faruk Albaar No:12.a/PS-MPPKD/XII/2023 sebesar Rp52.150.000 terhitung sejak tgl 27 Desember 2023 s.d 27 Desember 2024</p> <p>b. Ret Terminal tahun 2022 sudah di terbitkan SK Pembebanan a.n Anwar Hasjim No:12.b/PS-MPPKD/XII/2023 sebesar Rp13.350.000 terhitung sejak tgl 27 Desember 2023 s.d 27 Desember 2024</p> <p>c. Ret Terminal tahun 2022 sudah di terbitkan SK Pembebanan a.n Arifin No:12.c/PS-MPPKD/XII/2023 sebesar Rp110.769.500 terhitung sejak tgl 27 Desember 2023 s.d 27 Desember 2024</p> <p>d. Ret Terminal tahun 20223 sudah di terbitkan SKTJM sebesar Rp204.225.000 terhitung sejak tgl 17 Mei 2024 s.d 17 Mei 2026 a.n Muchtar, S.Pi.,M.Si</p>
2	Pendapatan Retribusi Pelayanan Sewa Kios Pasar tahun 2023 yang belum disetorkan oleh petugas pungut	128.836.000,00	275.100.000,00	137.550.000,00	266.386.000,00	<p>a. Ret Sewa Kios Pasar tahun 2022 sudah di terbitkan SK Pembebanan a.n Hadi Hairudin No:11.a/PS-MPPKD/XII/2023 sebesar Rp150.000.000 terhitung sejak tgl 27 Desember 2023 s.d 27 Desember 2023</p> <p>b. Ret Sewa Kios Pasar tahun 2022 sudah di terbitkan SK Pembebanan a.n Rusmin Iskandar No:11.b/PS-MPPKD/XII/2023 sebesar Rp25.728.000 terhitung sejak tgl 27 Desember 2023 s.d 27 Desember 2023</p> <p>c. Ret Sewa Kios Pasar tahun 2022 sudah di terbitkan SK Pembebanan a.n Jamaludin Yusup No:11.c/PS-MPPKD/XII/2023 sebesar Rp49.686.000 terhitung sejak tgl 27 Desember 2023 s.d 27 Desember 2023</p> <p>d. Ret Sewa Kios Pasar tahun 2022 sudah di terbitkan SK Pembebanan a.n Lutfi Umahuk No:11.d/PS-MPPKD/XII/2023 sebesar Rp49.686.000 terhitung sejak tgl 27 Desember 2023 s.d 27 Desember 2023</p> <p>e. Ret Sewa Kios Pasar tahun 2023 sudah di terbitkan SKTJM a.n Rusmin Iskandar terhitung sejak 21 Mei 2024 s.d 21 Mei 2026 sebesar Rp20.376.000</p> <p>f. Ret Sewa Kios Pasar tahun 2023 sudah di terbitkan SKTJM a.n Hadi Hairudi terhitung sejak 21 Mei 2024 s.d 21 Mei 2026 sebesar Rp108.100.000</p>
3	Pendapatan retribusi Pasar Grosir tahun 2023 yang belum disetorkan oleh petugas pungut	335.956.000,00	0,00	0,00	335.956.000,00	Ret Pasar tahun 2023 sudah di terbitkan SKTJM a.n Guntur H Doa terhitung sejak 17 Mei 2024 s.d 17 Mei 2026 sebesar Rp335.956.000,00
4	Belanja Barang dan Jasa yang tidak sesuai ketentuan oleh Mantan Kasubag Keuangan pada Dinas Pariwisata Kota Ternate Tahun 2022	49.454.851,00	0,00	24.727.425,50	24.727.425,50	Sudah di terbitkan SK Pembebanan No. 17/PS-MPPKD/XII/2023 a.n Rini terhitung sejak 27 Desember 2023 s.d 27 Desember 2025 sebesar Rp49.454.851,00
<b>Jumlah</b>		<b>718.221.851,00</b>	<b>451.369.500,00</b>	<b>338.546.925,50</b>	<b>831.044.425,50</b>	

- 6) Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp67.704.456.000,00 yang merupakan Piutang Transfer Pusat yang baru disalurkan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	DBH PUSAT	NILAI PENETAPAN	PENYALURAN	
		NON TUNAI (TDF) - 2023	TGL	NILAI
1	<b>DBH PAJAK PENGHASILAN</b>		25 Maret 2024	31.769.641.130,00
	PPH 21	2.180.551.000,00	27 Maret 2024	35.934.814.870,00
	PPH PASAL 25/29	30.159.000,00		
	DBH PBB	11.675.000,00		
2	<b>DBH SDA</b>			
	DBH SDA Minyak Bumi	62.651.000,00		
	DBH SDA Gas Bumi	339.250.000,00		
	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	7.833.000,00		
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	5.028.000,00		
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	64.947.111.000,00		
	DBH SDA Kehutanan-PSDH	11.747.000,00		
	DBH SDA Kehutanan-IIUPH	108.451.000,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>67.704.456.000,00</b>		<b>67.704.456.000,00</b>

### VI.3.3. KEWAJIBAN

Pemerintah Kota Ternate hanya berupa Kewajiban Jangka Pendek, tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

#### VI.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp66.967.065.384,99 dan Rp6.078.581.317,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp60.888.484.067,99 atau 1.001,69%. Kewajiban Jangka Pendek tersebut terdiri dari:

##### VI.3.5.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang sampai dengan akhir tahun belum disetor ke kas Negara atau pihak ketiga lainnya, yaitu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp579.558.220,00 dan Rp143.664.653,00 mengalami kenaikan sebesar Rp435.893.567,00 atau 303,41%. Kenaikan yang signifikan disebabkan pajak pada Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Kecamatan baru disetorkan pada tahun 2024. Rincian Utang PFK tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel Utang PFK

No.	SKPD	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
1	BUD	5.471.448,00	14.536.518,00
2	Dinas Pendidikan (Dana BOS)	27.417.302,00	116.335.598,00

No.	SKPD	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
3	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	275.515.494,00	0,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	2.515.040,00
5	Sekretariat Daerah	16.707.076,00	9.132.301,00
6	Kecamatan Ternate Utara	41.800.588,00	0,00
7	Kecamatan Ternate Tengah	5.347.529,00	1.145.196,00
8	Kecamatan Ternate Selatan	75.340.871,00	0,00
9	Kecamatan Pulau Ternate	10.125.809,00	0,00
10	Kecamatan Ternate Barat	0,00	0,00
11	Kecamatan Moti	77.968.614,00	0,00
12	Kecamatan Pulau Batang Dua	43.863.489,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>579.558.220,00</b>	<b>143.664.653,00</b>

Rincian jenis utang PFK disajikan dalam **Lampiran 9**.

#### VI.3.5.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan penerimaan daerah atas jasa pelayanan yang belum diberikan oleh Pemerintah Kota Ternate. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### VI.3.5.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja merupakan belanja barang jasa yang belum terbayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp33.328.879.407,71 dan Rp1.842.907.846,00 mengalami kenaikan sebesar Rp31.485.971.561,71 atau 1.708,49% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Utang Beban Tahun Anggaran 2023**

No	SKPD	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
1	DINAS PENDIDIKAN	11.322.600.914,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	4.731.597.496,00	723.484.646,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	5.814.222.195,35	1.119.423.200,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN & PERTANAHAN	409.731.488,00	0,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	128.144.539,00	0,00
6	DINAS KEBAKARAN	158.834.809,00	0,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	88.743.303,00	0,00
8	DINAS SOSIAL	221.573.276,00	0,00
9	DINAS TENAGA KERJA	116.087.611,00	0,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	108.864.123,00	0,00
11	DINAS KETAHAHAN PANGAN	102.881.636,00	0,00

No	SKPD	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	503.634.635,36	0,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	91.777.953,00	0,00
14	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN & KELUARGA BERENCANA	88.465.987,00	0,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	159.195.657,00	0,00
16	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA & PERSANDIAN	77.251.424,00	0,00
17	DINAS KOPERASI USAHA KECIL & MENENGAH	112.644.184,00	0,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	160.247.757,00	0,00
19	DINAS PEMUDA & OLAH RAGA	572.362.971,00	0,00
20	DINAS KEBUDAYAAN	110.375.500,00	0,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH	119.395.932,00	0,00
22	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	212.918.348,00	0,00
23	DINAS PARIWISATA	172.742.317,00	0,00
24	DINAS PERTANIAN	268.266.385,00	0,00
25	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	637.953.942,00	0,00
26	SEKRETARIAT DAERAH	627.607.225,00	0,00
27	INSPEKTORAT DAERAH	174.467.217,00	0,00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH	108.676.069,00	0,00
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH	985.355.337,00	0,00
30	BADAN PENGELOLAAN PAJAK & RETRIBUSI DAERAH	1.198.107.641,00	0,00
31	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH	232.504.923,00	0,00
32	SEKRETARIAT DPRD	486.719.378,00	0,00
33	KECAMATAN TERNATE UTARA	340.126.800,00	0,00
34	KECAMATAN TERNATE TENGAH	636.258.989,00	0,00
35	KECAMATAN TERNATE SELATAN	346.320.240,00	0,00
36	KECAMATAN PULAU TERNATE	124.048.688,00	0,00
37	KECAMATAN TERNATE BARAT	123.921.966,00	0,00
38	KECAMATAN PULAU HIRI	72.877.170,00	0,00
39	KECAMATAN MOTI	102.573.424,00	0,00
40	KECAMATAN PULAU BATANG DUA	92.494.703,00	0,00
41	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	1.186.305.255,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>33.328.879.407,71</b>	<b>1.842.907.846,00</b>

Rincian jenis utang beban disajikan dalam **Lampiran 10**.

#### VI.3.5.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah belanja aset tetap yang belum terbayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp33.058.627.757,28 dan Rp4.092.008.818,00 mengalami kenaikan sebesar Rp28.966.618.939,28 atau 707,88% terdiri dari:

Tabel Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023

No	SKPD	Saldo 31 Des. 2023 (Rp) (Audited)	Saldo 31 Des. 2022 (Rp) (Audited)
1	DINAS PENDIDIKAN	3.842.580.911,00	1.373.295.409,00
2	DINAS KESEHATAN	2.193.469.200,00	0,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	21.626.832.371,73	2.718.713.409,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN & PERTANAHAN	1.221.498.500,00	0,00
5	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	255.316.269,92	0,00
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	710.559.844,63	0,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	224.694.500,00	0,00
8	DINAS PARIWISATA	713.715.735,00	0,00
9	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	359.748.947,00	0,00
10	SEKRETARIAT DAERAH	116.904.645,00	0,00
11	SEKRETARIAT DPRD	1.370.909.031,00	0,00
12	KECAMATAN TERNATE TENGAH	24.351.360,00	0,00
13	KECAMATAN TERNATE BARAT	251.254.559,00	0,00
14	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	146.791.883,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>33.058.627.757,28</b>	<b>4.092.008.818,00</b>

Rincian jenis utang jangka pendek lainnya disajikan dalam **Lampiran 11**.

### VI.3.6. EKUITAS

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.796.351.369.052,78 dan Rp2.756.514.562.273,37 terjadi kenaikan sebesar Rp39.836.806.779,41 atau 1,45%.

## VI.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### VI.4.1 PENDAPATAN - LO

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan - LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan - LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD. Pendapatan - LO pada Tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp1.062.083.725.079,23 lebih besar jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp1.005.505.660.305,38. Realisasi Tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp56.578.064.773,85 atau 5,63% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Pendapatan – LO

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	108.520.726.160,86	96.998.960.515,84
2.	Pendapatan Transfer - LO	946.454.429.441,00	877.512.656.729,55
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	7.108.569.477,37	30.994.043.059,99
	<b>Jumlah</b>	<b>1.062.083.725.079,23</b>	<b>1.005.505.660.305,38</b>

#### VI.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

Pendapatan Asli Daerah – LO pada Tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp108.520.726.160,86 lebih besar jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp96.998.960.515,84. Realisasi Tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.521.765.645,02 atau 11,88%. Berikut rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO:

Tabel Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	78.653.974.597,00	69.180.927.100,50
2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	20.882.558.416,00	18.734.412.227,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	3.747.741.808,05	2.877.193.432,16
4.	Lain-lain PAD yang Sah - LO	5.236.451.339,81	6.206.427.756,18
	<b>Jumlah</b>	<b>108.520.726.160,86</b>	<b>96.998.960.515,84</b>

##### VI.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi hak Pemerintah Daerah dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp78.653.974.597,00 dan Rp69.180.927.100,50 terdiri dari :

Tabel Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1.	Pajak Hotel-LO	6.346.805.070,00	5.765.921.279,00



No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
2.	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	14.856.052.135,00	13.654.419.284,50
3.	Pajak Tontonan Film-LO	3.164.060.220,00	2.627.733.243,00
4.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	2.947.653.080,00	2.913.582.410,00
5.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	26.378.019.089,00	23.995.951.617,00
6.	Pajak Parkir-LO	547.394.212,00	381.857.940,00
7.	Pajak Air Tanah-LO	781.092.425,00	694.488.605,00
8.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	1.541.102.039,00	1.778.127.585,00
9.	PBBP2-LO	11.513.302.214,00	8.053.952.811,00
10.	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	10.578.494.113,00	9.314.892.326,00
	<b>Jumlah</b>	<b>78.653.974.597,00</b>	<b>69.180.927.100,50</b>

Berdasarkan rincian di atas, jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi penerimaan terbesar terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 adalah Pajak Penerangan Jalan – LO, yaitu sebesar Rp26.378.019.089,00 atau 33,54% dibanding total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp78.653.974.597,00. Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2023 naik sebesar Rp9.473.047.496,50 atau 13,69% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp69.180.927.100,50.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah - LO tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak yang sampai dengan akhir tahun belum dipenuhi oleh Wajib Pajak. Berikut rincian penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis transaksi dan perbedaannya jika dibandingkan dengan pendapatan pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

**Tabel Rincian Perbedaan Pendapatan Pajak LO-LRA**

No.	Uraian	Realisasi LO 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2023 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1.	Pajak Hotel-LO	6.346.805.070,00	6.346.805.070,00	0,00
2.	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	14.856.052.135,00	14.856.052.135,00	0,00
3.	Pajak Tontonan Film-LO	3.164.060.220,00	3.164.060.220,00	0,00
4.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	2.947.653.080,00	2.907.430.335,00	40.222.745,00
5.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	26.378.019.089,00	26.378.019.089,00	0,00
6.	Pajak Parkir-LO	547.394.212,00	547.394.212,00	0,00
7.	Pajak Air Tanah-LO	781.092.425,00	802.065.625,00	(20.973.200,00)
8.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	1.541.102.039,00	1.541.102.039,00	0,00

No.	Uraian	Realisasi LO 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2023 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
9.	PBBP2-LO	11.513.302.214,00	7.578.504.262,00	3.934.797.952,00
10.	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	10.578.494.113,00	10.578.494.113,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>78.653.974.597,00</b>	<b>74.699.927.100,00</b>	<b>3.954.047.497,00</b>

Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas terdapat perbedaan pada laporan operasional jika dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran sebesar Rp3.954.047.497,00 merupakan kenaikan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp4.143.925.883,00 dan penyesuaian atas piutang tahun lalu sebesar (Rp189.878.386,00).

#### VI.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah pungutan Pemerintah Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. Retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 20.882.558.416,00 dan Rp18.734.412.227,00 terdiri dari:

**Tabel Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	189.613.250,00	132.528.557,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	5.031.184.000,00	3.298.988.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.116.253.600,00	751.174.000,00
4	Retribusi Los-LO	170.782.000,00	298.368.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	100.920.000,00	0,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	377.700.000,00	506.460.000,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	50.210.000,00	57.520.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	194.211.000,00	96.639.000,00
9	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	1.182.772.500,00	240.260.000,00
10	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan LO	9.555.727.460,00	10.741.691.638,00
11	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-	533.650.000,00	696.750.000,00
12	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	285.224.400,00	283.316.200,00
13	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	141.775.000,00	112.572.000,00

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
14	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	169.550.000,00	176.029.280,00
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	298.643.000,00	303.122.000,00
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	1.000.000,00	1.038.883.052,00
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	1.474.377.206,00	110.000,00
18	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	8.965.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.882.558.416,00</b>	<b>18.734.412.227,00</b>

Tabel Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah LO – LRA

No.	Uraian	Realisasi LO 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2023 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	189.613.250,00	183.663.950,00	5.949.300,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	5.031.184.000,00	5.031.184.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.116.253.600,00	1.116.253.600,00	0,00
4	Retribusi Los-LO	170.782.000,00	41.946.000,00	128.836.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	100.920.000,00	100.920.000,00	0,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	377.700.000,00	377.700.000,00	0,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	50.210.000,00	50.210.000,00	0,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	194.211.000,00	194.211.000,00	0,00
9	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	1.182.772.500,00	845.646.000,00	337.126.500,00
10	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan LO	9.555.727.460,00	9.219.771.460,00	335.956.000,00
11	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	533.650.000,00	329.675.000,00	203.975.000,00
12	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	285.224.400,00	285.224.400,00	0,00
13	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	141.775.000,00	141.775.000,00	0,00
14	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	169.550.000,00	169.550.000,00	0,00
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	298.643.000,00	298.643.000,00	0,00
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	1.474.377.206,00	1.474.377.206,00	0,00
18	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	8.965.000,00	8.965.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.882.558.416,00</b>	<b>19.870.715.616,00</b>	<b>1.011.842.800,00</b>

Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp1.011.842.800,00 tersebut merupakan:

- Perbedaan retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp5.949.300,00 yang merupakan pelunasan pendapatan tahun lalu yang baru disetorkan tahun 2023 sebesar (Rp7.425.700,00) dan sisa penerimaan yang belum di setorkan sebesar Rp13.375.000,00.
- Perbedaan retribusi pelayanan sewa los/kios pasar sebesar Rp128.836.000,00 yang merupakan penerimaan pada Dinas Koperasi dan UKM yang belum disetorkan.
- Perbedaan retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp337.126.500,00 yang merupakan penambahan piutang pada Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah tahun 2023 yang terdiri dari Lahan Goheba sebesar Rp50.000.000,00, SPBU Soasio sebesar Rp78.750.000,00 dan Waterboom sebesar Rp208.376.500,00.
- Perbedaan retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir/pertokoan sebesar Rp335.956.000,00 yang merupakan penerimaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang belum disetorkan.
- Perbedaan retribusi penyediaan fasilitas lainnya di Lingkungan Terminal sebesar Rp203.975.000,00 yang merupakan penerimaan pada Dinas Perhubungan yang belum disetorkan.

#### VI.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.747.741.808,05 dan Rp2.877.193.432,16. Pendapatan pada tahun 2023 diperoleh dari PT.BPRS Bahari Berkesan sebesar Rp2.582.607.766,05 dan BPDM sebesar Rp1.165.134.042,00. Berikut adalah rincian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan jika dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran:

**Tabel Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN – LO	3.747.741.808,05	2.877.193.432,16
	<b>Jumlah</b>	<b>3.747.741.808,05</b>	<b>2.877.193.432,16</b>

Tidak ada perbedaan antara pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah – LO dan LRA.

#### VI.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah – LO

Akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.236.451.339,81 dan Rp6.206.427.756,18, mengalami penurunan sebesar (Rp969.976.416,37) atau (15,63%) yang terdiri dari:

Tabel Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	0,00	204.799.100,00
2	Hasil Sewa BMD-LO	451.633.564,00	806.542.500,00
3	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	33.050.000,00	20.000.000,00
4	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	176.106.432,00	728.257,00
5	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	763.206,15	2.193.091,95
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	646.345.010,23	859.951.153,75
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00	4.628.489,37
8	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	30.240.976,00	76.683.987,00
9	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	94.658.479,00	69.889.191,00
10	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	17.516.632,00	4.129.423,00
11	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	4.430.754,00	11.117.148,00
12	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	12.414.338,00	4.769.811,00
13	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	257.667,00	1.835.781,00
14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	916.420,00	0,00
15	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	386.542.287,00	0,00
16	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	1.835.356.402,88	369.565.053,26
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	44.563.271,65	55.133.037,94
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	1.235.952.099,90	771.340.064,91
19	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP-LO	265.703.800,00	2.816.518.467,00
20	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	126.603.200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.236.451.339,81</b>	<b>6.206.427.756,18</b>

Tabel Perbedaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO – LRA

No.	Uraian	Realisasi LO 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2023 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	Hasil Sewa BMD-LO	451.633.564,00	451.633.564,00	0,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	33.050.000,00	33.050.000,00	0,00
3	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	176.106.432,00	176.106.432,00	0,00
4	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	763.206,15	735.080,80	28.125,35
5	Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain-LO	646.345.010,23	646.345.010,23	0,00
6	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	30.240.976,00	30.240.976,00	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	94.658.479,00	94.658.479,00	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	17.516.632,00	17.516.632,00	0,00
9	Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	4.430.754,00	4.430.754,00	0,00
10	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	12.414.338,00	12.414.338,00	0,00
11	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	257.667,00	257.667,00	0,00
12	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	916.420,00	916.420,00	0,00
13	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan	386.542.287,00	386.542.287,00	0,00

	Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO			
14	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO	1.835.356.402,88	1.835.356.402,88	0,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	44.563.271,65	44.563.271,65	0,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	1.235.952.099,90	1.235.952.099,90	0,00
17	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP-LO	265.703.800,00	265.703.800,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.236.451.339,81</b>	<b>5.236.423.214,46</b>	<b>28.125,35</b>

Terdapat selisih sebesar Rp28.125,35 yang merupakan pendapatan jasa giro kapitasi yang belum disetorkan oleh Dinas Kesehatan tahun 2023.

#### VI.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO

Pendapatan Transfer – LO merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, yang menjadi hak Pemerintah Daerah dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan. Pendapatan Transfer – LO diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah dan/atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal dengan kurang salur. Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp946.454.429.441,00 dan Rp877.512.656.729,55 terdiri dari:

**Tabel Pendapatan Transfer – LO**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	864.850.503.597,00	824.304.751.814,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	30.386.501.000,00	11.789.245.000,00
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	51.217.424.844,00	41.418.659.915,55
	<b>Jumlah</b>	<b>946.454.429.441,00</b>	<b>877.512.656.729,55</b>

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 secara total mengalami kenaikan sebesar Rp68.941.772.711,45 atau 7,86% dibandingkan Tahun 2022.

##### VI.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LO

Transfer Pemerintah Pusat – LO adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN berupa Dana Perimbangan yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp864.850.503.597,00 dan Rp824.304.751.814,00 terdiri dari:

Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1.	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	16.980.184.000,00	31.663.744.741,00
2.	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam - LO	94.707.805.500,00	84.299.084.181,00
3.	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	609.216.898.000,00	585.402.476.250,00
4.	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	143.945.616.097,00	122.939.446.642,00
	<b>Jumlah</b>	<b>864.850.503.597,00</b>	<b>824.304.751.814,00</b>

#### VI.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Dana Bagi Hasil Pajak – LO yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN khususnya Pajak yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2023 sebesar Rp16.980.184.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp31.663.744.741,00 maka realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp14.683.560.741,00) atau (46,37%). Rincian realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LO tersebut sebagai berikut:

Tabel Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak – LO

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	2.571.287.000,00	6.247.767.636,00
2	Bagi Hasil PPh 21	13.306.443.000,00	23.689.902.141,00
3	Bagi Hasil PPh Ps 25 dan Pasal 29/WPOPND	1.102.454.000,00	1.726.074.964,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.980.184.000,00</b>	<b>31.663.744.741,00</b>

Tabel Perbedaan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LO – LRA

No.	Uraian	Realisasi LO 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2023 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	2.571.287.000,00	2.730.301.630,00	(159.014.630,00)
2	Bagi Hasil PPh 21	13.306.443.000,00	13.549.644.205,00	(243.201.205,00)
3	Bagi Hasil PPh Ps 25 dan Pasal 29/WPOPND	1.102.454.000,00	1.367.327.964,00	(264.873.964,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>16.980.184.000,00</b>	<b>17.647.273.799,00</b>	<b>(667.089.799,00)</b>

Terdapat perbedaan sebesar (Rp667.089.799,00) yang merupakan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2022 sebesar Rp3.191.390.974,00 di kurangi TDF tahun 2023 Rp2.222.385.000,00 dan koreksi kurang atas pengakuan TDF tahun 2022 sebesar Rp301.916.175,00.

#### VI.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO

Realiasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO Tahun 2023 sebesar Rp94.707.805.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp84.299.084.181,00, maka realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.408.270.793,00 atau 12,35%. Rincian realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO tersebut sebagai berikut:

**Tabel Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Bagi Hasil SDA Minyak Bumi - LO	0,00	98.690.639,00
2	Bagi Hasil Gas Bumi - LO	0,00	172.605.786,00
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	27.755.000,00	48.290.112,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	20.090.000,00	0,00
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti-LO	91.947.594.000,00	81.388.942.222,00
6	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	324.631.500,00	363.572.211,00
7	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	0,00	56.919.000,00
8	DBH SDA Perikanan-LO	2.387.735.000,00	2.170.064.211,00
	<b>Jumlah</b>	<b>94.707.805.000,00</b>	<b>84.299.084.181,00</b>

**Tabel Perbedaan Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LO – LRA**

No.	Uraian	Realisasi LO 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2023 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	27.755.000,00	24.634.112,00	3.120.888,00
2	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	20.090.000,00	3.561.754.816,00	(3.541.664.816,00)
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti-LO	91.947.594.000,00	27.000.483.000,00	64.947.111.000,00
4	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	324.631.500,00	257.211.711,00	67.419.789,00
5	DBH SDA Perikanan-LO	2.387.735.000,00	2.599.488.211,00	(211.753.211,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>94.707.805.500,00</b>	<b>33.443.571.850,00</b>	<b>61.264.233.650,00</b>

Terdapat perbedaan sebesar Rp61.264.233.650,00 yang merupakan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2022 sebesar Rp4.238.462.175,00 di kurangi TDF tahun 2023 Rp65.482.071.000,00 dan koreksi kurang atas pengakuan TDF tahun 2022 sebesar Rp20.624.825,00.

#### VI.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LO

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum – LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp609.216.898.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp585.402.476.250,00, maka realisasi Tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp23.814.421.750,00 atau 4,07%.

**Tabel Rincian Dana Alokasi Umum – LO**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	DAU-LO	505.079.650.000,00	585.402.476.250,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	15.600.000.000,00	0,00



No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	13.719.420.000,00	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	27.471.331.000,00	0,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	40.046.497.000,00	0,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	7.300.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>609.216.898.000,00</b>	<b>585.402.476.250,00</b>

Tidak ada perbedaan antara dana alokasi umum – LO dan LRA.

#### VI.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus - LO

Realisasi Dana Alokasi Khusus – LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp143.945.616.097,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp122.939.446.642,00 maka realisasi Tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp21.006.169.455,00 atau 17,09%. Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus – LO tersebut sebagai berikut:

**Tabel Rincian Dana Alokasi Khusus – LO**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	396.070.476,00	209.228.997,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	3.980.237.071,00	10.141.975.754,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	2.738.398.469,00	6.536.640.355,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	1.537.745.798,00	1.463.585.400,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	0,00	4.407.585.600,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	2.181.553.123,00	2.823.437.604,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	1.926.808.323,00	1.239.989.596,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata-LO	0,00	1.812.980.400,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas-LO	0,00	464.609.592,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	0,00	1.212.160.148,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	199.900.000,00	571.360.860,00
12	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	10.914.798.241,00	619.717.600,00
13	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	0,00	3.623.844.600,00
14	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	1.162.766.000,00	5.635.170.501,00
15	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	12.375.173.614,00	4.382.189.607,00
16	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	0,00	2.268.632.606,00

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
17	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	19.243.394.280,00	7.019.641.692,00
18	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	0,00	3.739.195.267,00
19	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	408.152.543,00	3.415.427.900,00
20	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	1.040.000.000,00	3.138.897.000,00
21	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi-LO	0,00	668.000.000,00
22	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	0,00	1.002.836.000,00
23	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi-LO	0,00	1.858.433.173,00
24	DAK Fisik ...	0,00	662.500.000,00
25	DAK Fisik...	0,00	517.082.400,00
26	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	23.495.637.618,00	0,00
27	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	780.000.000,00	0,00
28	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	39.251.743.300,00	37.065.823.580,00
29	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.144.500.000,00	1.442.500.000,00
30	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	444.480.000,00	0,00
31	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	3.710.069.741,00	9.260.904.446,00
32	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	2.652.414.658,00	1.311.436.000,00
33	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	285.855.350,00	964.302.000,00
34	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	417.399.997,00	0,00
35	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan-LO	179.442.341,00	978.604.000,00
36	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	487.880.000,00	380.149.000,00
37	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	385.808.050,00	1.303.804.964,00
38	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	12.605.387.104,00	0,00
39	DAK Non Fisik	0,00	796.800.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>143.945.616.097,00</b>	<b>122.939.446.642,00</b>

Tidak ada perbedaan antara dana alokasi khusus – LO dan LRA.

#### VI.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO seluruhnya berupa Dana Insentif Daerah – LO.

##### VI.4.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah - LO

Realisasi Dana Insentif Daerah - LO Tahun 2023 sebesar Rp30.386.501.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp11.789.245.000,00. maka realisasi Tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.597.256.000,00 atau 157,75%. Rincian realisasi dana insentif daerah – LO tersebut sebagai berikut:

**Tabel Rincian Dana Perimbangan – LO**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Dana Insentif Daerah	30.386.501.000,00	11.789.245.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>30.386.501.000,00</b>	<b>11.789.245.000,00</b>

Untuk Tahun 2023, Pendapatan Dana Insentif Daerah seluruhnya berasal dari pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

#### VI.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO seluruhnya merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi – LO tahun 2023.

**Tabel Rincian Dana Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	51.217.424.844,00	41.418.659.915,55
	<b>Jumlah</b>	<b>51.217.424.844,00</b>	<b>41.418.659.915,55</b>

#### VI.4.1.2.3.1 Bagi Hasil Pajak Provinsi - LO

Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi – LO Tahun 2023 sebesar Rp51.217.424.844,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp41.418.659.915,55 maka realisasi Tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.798.764.928,45 atau 23,66%.

**Tabel Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi – LO**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	8.737.859.832,00	6.099.070.424,78
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	8.233.343.918,00	6.148.284.092,77
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	28.104.329.071,00	17.292.981.990,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	508.261.152,00	404.474.005,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	5.633.630.871,00	11.473.849.403,00
	<b>Jumlah</b>	<b>51.217.424.844,00</b>	<b>41.418.659.915,55</b>

**Tabel Perbedaan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi LO – LRA**

No.	Uraian	Realisasi LO 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2023 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	8.737.859.832,00	1.259.277.437,00	7.478.582.395,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	8.233.343.918,00	1.608.082.519,00	6.625.261.399,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	28.104.329.071,00	7.620.265.601,00	20.484.063.470,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	508.261.152,00	0,00	508.261.152,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	5.633.630.871,00	3.230.438.702,00	2.403.192.169,00
	<b>Jumlah</b>	<b>51.217.424.844,00</b>	<b>13.718.064.259,00</b>	<b>37.499.360.585,00</b>

Terdapat selisih sebesar Rp37.499.360.585,00 yang merupakan kenaikan piutang transfer daerah tahun 2023.

#### VI.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO seluruhnya berupa Pendapatan Hibah – LO

##### VI.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri; dan atau kelompok masyarakat/perorangan. Penerimaan ini tidak bersifat mengikat sehingga dapat mempengaruhi kebijakan daerah.

Pendapatan hibah digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan umum, serta pemberdayaan aparatur daerah. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.108.569.477,37 dan Rp30.994.043.059,99, mengalami penurunan sebesar (Rp23.885.473.582,62) atau (77,06%). Pendapatan Hibah tahun 2023 tersebut berasal dari Pendapatan dari BLUD dan JKN Kapitasi.

**Tabel Rincian Pendapatan Hibah – LO**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) ( <i>Audited</i> )	Realisasi 2022 (Rp) ( <i>Audited</i> )
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	0,00	5.191.034.079,00
2	Pendapatan Hibah Dana Bos - LO	0,00	24.001.071.340,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	7.108.569.477,37	1.801.937.640,99
	<b>Jumlah</b>	<b>7.108.569.477,37</b>	<b>30.994.043.059,99</b>

Tidak ada perbedaan antara Lain- lain PAD yang sah – LO dan LRA.

#### VI.4.2 BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Realisasi Beban Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp988.537.952.443,60 dan Rp914.719.918.137,80, mengalami kenaikan sebesar Rp73.818.034.305,80 atau 8,07%

##### VI.4.2.1.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar

Rp470.056.726.300,87 dan Rp447.014.483.809,89 mengalami kenaikan sebesar Rp23.042.242.490,98 atau 5,15% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Rincian Beban Pegawai – LO**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	293.490.161.998,00	289.148.029.754,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	100.399.967.141,00	116.253.082.240,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.907.459.088,87	10.246.759.624,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	20.181.335.599,00	20.080.178.197,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	168.618.717,00	162.363.869,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	647.540.662,00	688.968.792,00
7	Beban Pegawai Bos	0,00	10.435.101.333,89
8	Beban Pegawai BLUD	1.261.643.095,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>470.056.726.300,87</b>	<b>447.014.483.809,89</b>

**Tabel Rincian Perbedaan Beban Gaji dan Tunjangan LO – LRA**

No.	Beban Gaji & Tunjangan	Realisasi LO 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2023 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	293.490.161.998,00	293.490.161.998,00	0,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	100.399.967.141,00	92.679.928.434,00	7.720.038.707,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.907.459.088,87	43.047.799.524,87	10.859.659.564,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	20.181.335.599,00	19.866.335.599,00	315.000.000,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	168.618.717,00	168.618.717,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	647.540.662,00	647.540.662,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	1.261.643.095,00	1.261.643.095,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>470.056.726.300,87</b>	<b>451.162.028.029,87</b>	<b>18.894.698.271,00</b>

Terdapat Selisih sebesar Rp18.849.689.271,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN bulan Desember tahun 2023 sebesar Rp7.720.038.707,00 pada 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp10.859.659.564,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.837.311.400,00, Disperkim sebesar Rp12.000.000,00, DPMPTSP sebesar Rp500.000,00 dan BPPRD sebesar Rp1.009.848.164,00.
- Utang Beban Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp315.000.000,00 pada Sekretariat DPRD.

### VI.4.2.1.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp108.980.748.842,56 dan Rp94.798.164.957,08 mengalami kenaikan sebesar Rp14.182.583.885,48 atau 14,96% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Beban Persediaan LO**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1.	Beban Persediaan Pakai Habis	21.555.921.025,08	23.165.207.575,36
2.	Beban Persediaan Bahan /Material	87.424.827.817,48	71.632.957.381,72
	<b>Jumlah</b>	<b>108.980.748.842,56</b>	<b>94.798.164.957,08</b>

**Tabel Perbedaan Beban/Belanja Persediaan LO – LRA**

No.	Beban/Belanja Persediaan	Realisasi LO 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2023 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	Beban/Belanja Persediaan Pakai Habis	21.555.921.025,08	22.801.886.574,48	(1.245.965.549,40)
2	Beban/Belanja Persediaan Bahan /Material	87.424.827.817,48	87.610.990.616,00	(186.162.798,52)
	<b>Jumlah</b>	<b>108.980.748.842,56</b>	<b>110.412.877.190,48</b>	<b>(1.432.128.347,92)</b>

Penjelasan perbedaan sebesar (Rp1.432.128.347,92) tersebut dirinci sebagai berikut:

- Perbedaan Beban dengan Belanja Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp51.125.914,85 merupakan persediaan tahun 2023 sebesar (Rp10.447.425,00) dikurangi persediaan tahun 2022 sebesar Rp22.480.740,00, utang pada Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp75.315.320,00 dan pencatatan aset yang berasal dari beban persediaan sebesar (Rp36.222.720,15).
- Perbedaan Beban dan Belanja Persediaan Kertas dan Cover sebesar Rp13.165.152,00 merupakan utang pada Dinas Pekerjaan Umum tahun 2023.
- Perbedaan Beban dan Belanja Persediaan Cetak sebesar Rp18.945.092,96 merupakan persediaan tahun 2022 sebesar Rp1.032.797.796,87 dikurangi persediaan tahun 2023 sebesar (Rp1.014.752.703,91) dan Utang tahun 2023 sebesar Rp900.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum.
- Perbedaan Beban dan Belanja Persediaan Alat Listrik sebesar Rp107.701.828,00 merupakan utang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp99.487.080,00 dan Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp8.214.748,00.
- Perbedaan Beban dan Belanja Persediaan Perlengkapan Pendukung Olahraga sebesar Rp192.147.500,00 merupakan utang tahun 2023 pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
- Perbedaan Beban dan Belanja Persediaan Obat (Rp2.491.267.595,21) merupakan persediaan tahun 2023 sebesar (Rp10.215.291.000,71) dikurangi persediaan tahun 2022 sebesar Rp7.043.831.593,50 dan Utang beban tahun 2023 sebesar Rp680.191.812,00 pada Dinas Kesehatan.

- g. Perbedaan Beban dengan Belanja Persediaan Obat Lainnya sebesar Rp862.216.558,00 yang merupakan persediaan obat tahun 2023 sebesar (Rp57.925.602,00) pada DPPKB Kota Ternate dikurangi persediaan tahun 2022 sebesar Rp109.992.560,00 dan Utang beban sebesar Rp810.149.600 tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kota Ternate.
- h. Perbedaan Beban dengan Belanja Bahan Kimia sebesar Rp128.500,00 yang merupakan persediaan tahun 2022 pada Dinas Kebakaran Kota Ternate.
- i. Perbedaan Beban dengan Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sebesar Rp71.172.900,00 merupakan utang pada Dinas Kebakaran sebesar Rp28.313.300,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp38.638.000,00, dan Kec. Ternate Tengah sebesar Rp4.221.600,00.
- j. Perbedaan Beban dengan Belanja Bahan Lainnya sebesar Rp273.016.086,00 yang merupakan pencatatan aset dari beban persediaan.
- k. Perbedaan Beban dengan Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebesar Rp8.939.770,00 yang merupakan utang pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp3.560.000,00 dan Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp5.379.770,00.
- l. Perbedaan Beban dengan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp3.640.523.077,00 merupakan:
- Utang sebesar Rp74.858.400,00 pada Dinas Kelautan Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp358.610.000,00.
  - Pesediaan tahun 2023 sebesar (Rp9.836.580,00) pada Kecamatan Ternate Barat.
  - Pengakuan Aset dari beban yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp3.663.274.042,00.
  - Utang belanja tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar (Rp1.000.000.000,00).
  - Persediaan Tahun 2022 sebesar Rp553.617.215,00.
- k. Perbedaan Beban dengan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar (Rp4.497.345.131,52) merupakan:
- Utang beban pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp3.105.950.504,35 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp1.059.348.661,00
  - Pencatatan aset pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar (Rp8.662.644.296,87) tahun 2023.
- l. Perbedaan Beban dengan Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp82.322.000,00 yang merupakan utang tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp14.362.000,00, Dinas Sosial sebesar Rp6.000.000,00, DPMPSTP sebesar Rp6.048.000,00 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp55.912.000,00.
- m. Perbedaan Beban dengan Belanja pakaian dinas PDL sebesar Rp114.330.000,00 yang merupakan utang tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum.
- n. Perbedaan Beban dengan Belanja pakaian olahraga sebesar Rp120.750.000,00 yang merupakan utang tahun 2023 pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

### VI.4.2.1.3 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp202.040.624.285,83 dan Rp165.213.992.281,01. Realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp36.826.632.004,82 atau 22,29%. Rincian realisasi Beban Jasa tersebut sebagai berikut:

**Tabel Rincian Beban Jasa – LO**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Beban Jasa Kantor	132.408.781.325,80	122.261.908.264,18
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	14.533.924.275,00	12.966.559.234,00
3	Beban Sewa Tanah	4.324.063.320,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.993.268.525,38	2.973.401.139,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.496.959.050,00	2.743.278.095,55
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	155.399.750,00	554.572.000,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	60.000.000,00	479.171.770,00
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	2.451.454.832,00	45.000.000,00
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	2.518.080.900,00
10	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00	12.000.000,00
11	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	680.154.970,00	2.970.568.000,00
12	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.759.512.171,00	6.596.858.634,00
13	Beban Barang Ekstra Komptable	301.462.353,00	0,00
14	Beban Barang dan Jasa BOS	20.443.259.935,00	9.347.529.721,00
15	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	268.560.000,00	0,00
16	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	175.920.000,00	0,00
17	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.794.914.035,00	0,00
18	Beban Barang dan Jasa BLUD	1.192.989.743,65	1.745.064.523,28
	<b>Jumlah</b>	<b>202.040.624.285,83</b>	<b>165.213.992.281,01</b>

**Tabel Rincian Perbedaan Beban Jasa LO – LRA**

No.	Beban Barang dan Jasa	Realisasi LO 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2023 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.702.541.363,20	0,00	1.702.541.363,20
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.153.443.130,00	5.153.443.130,00	0,00
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.451.430.000,00	6.437.020.000,00	14.410.000,00
4	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	1.278.000.000,00	1.278.000.000,00	0,00
5	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	96.000.000,00	88.800.000,00	7.200.000,00



No.	Beban Barang dan Jasa	Realisasi LO 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2023 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
6	Beban Honorarium Rohaniwan	63.732.000,00	63.732.000,00	0,00
7	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	711.410.000,00	708.100.000,00	3.310.000,00
8	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	55.545.000,00	55.545.000,00	0,00
9	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	8.446.875.000,00	8.404.545.000,00	42.330.000,00
10	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	481.600.000,00	481.600.000,00	0,00
11	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	1.530.700.000,00	1.530.700.000,00	0,00
12	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	2.815.725.000,00	2.815.725.000,00	0,00
13	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	94.125.000,00	94.125.000,00	0,00
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.207.200.000,00	1.204.600.000,00	2.600.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Kertertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.538.993.240,00	4.538.993.240,00	0,00
16	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.458.350.000,00	1.458.350.000,00	0,00
17	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	431.000.000,00	431.000.000,00	0,00
18	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	95.200.000,00	95.200.000,00	0,00
19	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	117.300.000,00	117.300.000,00	0,00
20	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	53.150.000,00	53.150.000,00	0,00
21	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.241.250.000,00	1.241.250.000,00	0,00
22	Beban Jasa Tenaga Administrasi	38.797.600.000,00	38.790.700.000,00	6.900.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	103.000.000,00	103.000.000,00	-
24	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.726.860.000,00	1.712.285.000,00	14.575.000,00
25	Beban Jasa Tenaga Ahli	4.932.595.600,00	4.707.673.600,00	224.922.000,00
26	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	18.032.723.000,00	17.918.723.000,00	114.000.000,00
27	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.178.050.000,00	1.152.050.000,00	26.000.000,00
28	Beban Jasa Tenaga Supir	1.482.200.000,00	1.475.000.000,00	7.200.000,00
29	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	75.295.600,00	75.295.600,00	0,00
30	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	230.200.000,00	230.200.000,00	0,00

No.	Beban Barang dan Jasa	Realisasi LO 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2023 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
31	Beban Jasa Tata Rias	47.225.000,00	47.225.000,00	0,00
32	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00
33	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	42.587.060,00	42.587.060,00	0,00
34	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00
35	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	201.500.000,00	201.500.000,00	0,00
36	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00
37	Beban Jasa Kalibrasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
38	Beban Jasa Pengolahan Sampah	267.600.000,00	267.600.000,00	0,00
39	Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	3.027.112.124,00	2.973.706.719,00	53.405.405,00
40	Beban Jasa Operator Kapal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
41	Beban Tagihan Air	576.733.152,00	576.733.152,00	0,00
42	Beban Tagihan Listrik	3.877.545.184,00	3.805.322.017,00	72.223.167,00
43	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	785.774.137,00	765.554.137,00	20.220.000,00
44	Beban Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan	3.798.210.286,60	3.735.498.098,60	62.712.188,00
45	Beban Paket/Pengiriman	23.759.970,00	23.759.970,00	0,00
46	Beban Penambahan Daya	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
47	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	367.341.772,00	359.248.092,00	8.093.680,00
48	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	11.557.229.707,00	11.557.229.707,00	0,00
49	Beban Lembur	3.075.749.000,00	3.049.549.000,00	26.200.000,00
50	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	14.144.285.175,00	13.205.798.221,00	938.486.954,00
51	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	389.639.100,00	389.639.100,00	0,00
52	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	473.956.840,00	473.956.840,00	0,00
53	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	746.500.000,00	746.500.000,00	0,00
54	Beban Sewa Mebel	2.354.006.480,00	2.354.006.480,00	0,00
55	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	749.600.000,00	749.600.000,00	0,00
56	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	986.820.525,38	773.750.000,00	213.070.525,38
57	Beban Sewa Bangunan Gudang	87.750.000,00	67.750.000,00	20.000.000,00
58	Beban Sewa Bangunan Kesehatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

No.	Beban Barang dan Jasa	Realisasi LO 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2023 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
59	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.775.098.000,00	2.775.098.000,00	0,00
60	Beban Sewa Hotel	142.400.000,00	142.400.000,00	0,00
61	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	447.339.990,00	0,00	447.339.990,00
62	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	444.262.060,00	0,00	444.262.060,00
63	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	99.789.000,00	99.789.000,00	0,00
64	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	505.568.000,00	155.399.750,00	350.168.250,00
65	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	155.399.750,00	0,00	155.399.750,00
66	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
67	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.944.797.907,00	1.944.797.907,00	0,00
68	Beban Sosialisasi	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00
69	Beban Bimbingan Teknis	471.456.925,00	471.456.925,00	0,00
70	Beban Barang Ekstra Komptable Peralatan Mesin	156.082.300,00	0,00	156.082.300,00
71	Beban Barang Ekstra Komptable Gedung dan Bangunan	145.380.053,00	0,00	145.380.053,00
72	Beban Barang dan Jasa BOS	20.443.259.935,00	24.275.791.527,00	(3.832.531.592,00)
73	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	268.560.000,00	268.560.000,00	0,00
74	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	175.920.000,00	175.920.000,00	0,00
75	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.794.914.035,00	10.794.914.035,00	0,00
76	Beban Barang dan Jasa BLUD	1.192.989.743,65	1.192.989.743,65	0,00
77	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	625.154.970,00	625.154.970,00	0,00
78	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
79	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.759.512.171,00	8.633.464.171,00	126.048.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>202.040.624.285,83</b>	<b>200.468.075.192,25</b>	<b>1.572.549.093,58</b>

Perbedaan sebesar Rp1.572.549.093,58 tersebut dirinci sebagai berikut:

- a. Perbedaan Beban dengan Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp1.702.541.363,00 pengurangan pencatatan aset dari beban barang dan jasa.
- b. Perbedaan Beban dan Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat

Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp14.410.000,00 merupakan utang pada Disperkim sebesar Rp1.460.000,00 dan DPMPTSP sebesar Rp2.950.000,00.

- c. Perbedaan Beban dan Belanja Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar Rp7.200.000,00 merupakan utang pada DPMPTSP tahun 2023.
- d. Perbedaan Beban dengan Belanja Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebesar Rp3.310.000,00 merupakan utang tahun 2023 pada DPMPTSP.
- e. Perbedaan Beban dengan Belanja Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp42.330.000,00 yang merupakan utang beban tahun 2023 pada Dinas Pendidikan.
- f. Perbedaan Beban dengan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp2.600.000,00 yang merupakan utang beban pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- g. Perbedaan Beban dengan Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp6.900.000,00 yang merupakan utang beban pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.150.000,00 dan DPMPTSP sebesar Rp1.750.000,00.
- h. Perbedaan Beban dengan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp14.575.000,00 yang merupakan utang beban pada Disperkim sebesar Rp9.600.000,00 dan DPMPTSP sebesar Rp4.975.000,00.
- i. Perbedaan Beban dengan Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp224.922.000,00 yang merupakan utang beban tahun 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- j. Perbedaan Beban dengan Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp114.000.000,00 yang merupakan utang beban pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp4.500.000,00, Disperkim sebesar Rp18.000.000,00, DPMPTSP sebesar Rp3.000.000,00 dan Kecamatan Ternate Tengah sebesar Rp88.500.000,00.
- k. Perbedaan Beban dengan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp26.000.000,00 yang merupakan utang beban pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp10.000.000,00, dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp16.000.000,00.
- l. Perbedaan Beban dengan Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp7.200.000,00 yang merupakan utang beban pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.600.000,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.200.000,00, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.200.000,00 dan DPMPTSP sebesar Rp1.200.000,00.
- m. Perbedaan Beban dengan Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan sebesar Rp53.405.405,00 yang merupakan utang beban pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp13.405.405,00, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp10.000.000,00 dan Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp30.000.000,00.
- n. Perbedaan Beban dengan Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp72.223.167,00 yang merupakan utang tahun 2023 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp26.665.000,00, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp29.000.415,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp16.557.752,00.
- o. Perbedaan Beban dengan Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar Rp20.220.000,00 yang merupakan utang tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp5.520.000,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp14.700.000,00.

- p. Perbedaan Beban dengan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp62.712.188,00 yang utang pada Dinas Pekerjaan umum sebesar Rp29.733.200,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp32.978.988,00.
- q. Perbedaan Beban dengan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp8.093.680,00 yang merupakan utang 2023 pada Dinas Pekerjaan umum sebesar Rp3.093.680,00 dan Kec. Tte Tengah sebesar Rp5.000.000,00.
- r. Perbedaan Beban dengan Belanja Lembur sebesar Rp26.200.000,00 yang merupakan utang 2023 pada Dinas Kebakaran.
- s. Perbedaan Beban dengan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp938.486.954,00 yang merupakan utang beban barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Tahun 2023 sebesar Rp1.661.971.600,00 dikurangi utang tahun 2022 sebesar (Rp723.484.646,00).
- t. Perbedaan Beban/Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp213.070.525,38 merupakan beban dibayar dimuka tahun 2022 sebesar Rp319.659.566,47 dikurangi sisa beban dibayar dimuka tahun 2023 sebesar (Rp106.589.041,09).
- u. Perbedaan Beban dengan Belanja Sewa Gudang sebesar Rp20.000.000,00 yang merupakan utang tahun 2023 pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
- v. Perbedaan Beban dengan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung sebesar Rp447.339.990,00 yang merupakan pencatatan aset konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- w. Perbedaan Beban dengan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebesar Rp444.262.060,00 yang merupakan utang tahun 2023 sebesar Rp2.221.377.550,00 dikurangi pencatatan aset sebesar Rp1.777.115.490,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- x. Perbedaan Beban dengan Belanja Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah sebesar Rp350.168.250.000,00 yang merupakan pencatatan aset pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp505.568.000,00 dan reklasifikasi antar beban sebesar (Rp155.399.750,00).
- y. Perbedaan Beban dengan Belanja Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah sebesar Rp155.399.750,00 yang merupakan reklasifikasi antar beban pada Dinas Pekerjaan Umum.
- z. Perbedaan Beban dengan Belanja *Ekstra Komptable* Peralatan Mesin Rp156.082.300,00 yang merupakan pencatatan aset dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi.
- aa. Perbedaan Beban dengan Belanja *Ekstra Komptable* Gedung dan Bangunan Rp145.380.053,00 yang merupakan pencatatan aset dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi.
- bb. Perbedaan Beban dengan Belanja Barang dan Jasa Bos sebesar (Rp3.832.531.592,00) yang merupakan pencatatan aset Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- cc. Perbedaan Beban dengan Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp126.048.000,00 yang merupakan utang tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp270.000.000,00 dan pencatatan aset dari beban barang dan jasa sebesar (Rp143.952.000,00) pada Disperkim.

#### VI.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.942.437.022,82 dan Rp5.472.238.218,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.489.581.136,82 atau 46,82% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Rincian Beban Pemeliharaan – LO**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.406.969.200,39	2.081.142.603,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.011.636.822,43	2.959.115.615,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	860.797.000,00	431.980.000,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	663.034.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.942.437.022,82</b>	<b>5.472.238.218,00</b>

**Tabel Rincian Beban Pemeliharaan LO – LRA**

No.	Beban Pemeliharaan	Realisasi LO 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2023 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	33.360.300,00	33.360.300,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.004.877.321,00	1.004.877.321,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	471.168.514,00	412.940.200,00	58.228.314,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	88.434.000,00	88.434.000,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	238.985.550,39	238.985.550,39	0,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	60.720.000,00	60.720.000,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	668.909.672,00	663.389.672,00	5.520.000,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	522.235.043,00	522.235.043,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	318.278.800,00	293.028.800,00	25.250.000,00
10	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.951.085.112,43	5.476.553.627,07	474.531.485,36
11	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	60.551.710,00	60.551.710,00	0,00
12	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	560.797.000,00	0,00	560.797.000,00
13	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
14	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	663.034.000,00	618.034.000,00	45.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.942.437.022,82</b>	<b>9.473.110.223,46</b>	<b>1.469.326.799,36</b>

Rincian penjelasan perbedaan sebesar Rp1.469.326.799,36 tersebut sebagai berikut:

- a. Perbedaan Beban dengan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp58.228.314,00 merupakan utang tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Perbedaan Beban dengan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebesar Rp5.520.000,00 merupakan utang tahun 2023 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- c. Perbedaan Beban dengan Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebesar Rp25.250.000,00 merupakan utang tahun 2023 pada DPMPTSP.
- d. Perbedaan Beban dengan Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp474.531.485,36 merupakan utang tahun 2023.
- e. Perbedaan Beban dengan Pemeliharaan Jalan Kota sebesar Rp560.797.000,00 merupakan utang tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum.
- f. Perbedaan Beban dengan Pemeliharaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya sebesar Rp300.000.000,00 merupakan pencatatan aset dari beban pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum.
- g. Perbedaan Beban dengan Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp45.000.000,00 merupakan utang tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

#### VI.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp64.635.964.467,00 dan Rp58.278.653.872,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.357.310.595,00 atau 10,91% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	36.560.651.245,00	19.762.883.100,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	10.522.538.996,00	7.067.217.704,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.639.080.600,00	11.582.924.859,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.892.860.000,00	3.097.378.920,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	609.231.974,00	16.858.249.289,00
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	411.601.652,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>64.635.964.467,00</b>	<b>58.368.653.872,00</b>

**Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas LO – LRA**

No.	Beban Perjalanan Dinas	Realisasi LO 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2023 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	36.560.651.245,00	36.560.651.245,00	0,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	10.522.538.996,00	10.522.538.996,00	0,00

No.	Beban Perjalanan Dinas	Realisasi LO 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi LRA 2023 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.639.080.600,00	14.639.080.600,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.892.860.000,00	1.892.860.000,00	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	609.231.974,00	609.231.974,00	0,00
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	411.601.652,00	411.601.652,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>64.635.964.467,00</b>	<b>64.635.964.467,00</b>	<b>0,00</b>

Tidak ada perbedaan pada Beban dan Belanja Perjalanan Dinas LO – LRA.

#### VI.4.2.1.6 Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.628.862.778,00 dan Rp14.552.134.040,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, realisasi Beban Hibah Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp5.923.271.262,00) atau 40,70%.

**Tabel Rincian Beban Hibah – LO**

No.	Beban Hibah	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.700.000.000,00	3.637.500.000,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	300.000.000,00	1.253.957.540,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.277.172.778,00	9.660.676.500,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.351.690.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.628.862.778,00</b>	<b>14.552.134.040,00</b>

**Tabel Rincian Perbedaan Beban Hibah LO – LRA**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited) - LO	Realisasi 2023 (Rp) (Audited) - LRA	Perbedaan (Rp)
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.700.000.000,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.277.172.778,00	5.027.172.778,00	250.000.000,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.351.690.000,00	1.351.690.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.628.862.778,00</b>	<b>7.378.862.778,00</b>	<b>1.250.000.000,00</b>

Terdapat perbedaan nilai realisasi Beban Hibah (LO) dengan realisasi Belanja Hibah (LRA) sebesar Rp1.250.000.000,00 yang merupakan utang tahun 2023 pada Kesbangpol sebesar Rp1.075.000.000,00, Dinas Pemuda Olahraga sebesar Rp50.000.000,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp125.000.000,00.



#### VI.4.2.1.7 Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.769.000.000,00 dan Rp5.965.261.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp4.196.261.000,00) atau (70,34%). Realisasi Beban Bantuan Sosial tersebut seluruhnya untuk organisasi sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Beban Bantuan Sosial - LO**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	996.798.000,00
2	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	1.769.000.000,00	4.968.463.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.769.000.000,00</b>	<b>5.965.261.000,00</b>

Tidak terdapat perbedaan antara beban dan belanja bantuan sosial LO dan LRA.

#### VI.4.2.1.8 Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp114.967.494.573,65 dan Rp116.387.556.264,03 mengalami penurunan sebesar (Rp1.420.061.690,38) atau (1,22%) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Rincian Beban dan Amotisasi**

No.	Beban Penyusutan dan Amotisasi	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	25.575.381.941,25	32.133.493.122,13
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	37.062.753.277,40	28.089.634.202,90
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	51.961.631.638,00	55.808.908.920,00
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	367.727.717,00	355.520.019,00
	<b>Jumlah</b>	<b>114.967.494.573,65</b>	<b>116.387.556.264,03</b>

#### VI.4.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.516.094.172,87 dan Rp3.895.356.192,70 mengalami kenaikan sebesar Rp2.620.737.980,17 atau 67,28 terdiri dari:

**Tabel Rincian Penyisihan Piutang**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	6.155.722.972,00	3.797.353.650,90
2	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	360.371.200,87	98.002.541,80
	<b>Jumlah</b>	<b>6.516.094.172,87</b>	<b>3.895.356.192,70</b>

**VI.4.2.1.10 Beban Lain-Lain**

Realisasi Beban Lain-lain Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.161.459.835,09 mengalami penurunan sebesar Rp1.161.459.853,09 atau 100%, hal ini disebabkan penurunan nilai investasi atas nilai saji penyertaan modal tahun 2022. Sedangkan untuk tahun 2023 penurunan nilai investasi badan usaha milk daerah dicatat pada pos defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

**VI.4.2.1.11 Beban Transfer**

Realisasi Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Beban Transfer adalah beban pengeluaran uang yang diberikan kepada Partai Politik.

**VI.4.2.1.12 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**

Surplus (Defisit) dari Operasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp73.545.772.635,63 dan Rp90.785.742.167,58. Realisasi Surplus (Defisit) dari Operasi Tahun 2023 tersebut turun sebesar (Rp17.239.969.531,95) atau (18,99%) dibanding Tahun 2022.

**VI.4.2.2 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.967.630.168,66 dan Rp1.332.095.594,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.635.534.574,66 atau 498,13%. Surplus (Defisit) tersebut berasal dari Defisit Penghapusan Aset LO sebesar Rp5.187.124.786,00 dan Defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp2.780.505.382,66 tahun 2023 .

**VI.4.2.2.1 Defisit Penghapusan Aset LO**

Defisit Penghapusan Aset LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar sebesar Rp5.187.124.786,00 dan Rp1.332.095.594,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.855.029.192,00 atau 289,40% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Perhitungan Defisit Penghapusan Aset -LO**

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai Aset yang dihapuskan	Akumulasi Penyusutan	Defisit Penghapusan Aset
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
1	Sekretariat Daerah	Penghapusan Tanah Bangunan Kantor Sesuai BAST Nomor : 54.B/III.3/2022, Tanggal 21 Februari 2022	700.000.000,00	-	700.000.000,00
2	Disperkim	Penghapusan Tanah Bangunan Kantor Sesuai BAST 140.A/III.3/2022, Tanggal 31 Agustus 2022	3.303.682.722,00	-	3.303.682.722,00

No	Nama SKPD	Uraian	Nilai Aset yang dihapuskan	Akumulasi Penyusutan	Defisit Penghapusan Aset
3	Kesbangpol	Penghapusan Bangunan Gedung sesuai BAST 900/545/1/BPKP/2023 Tanggal 24 November 2023	564.450.000,00	478.669.500,00	85.780.500,00
4	DPPKBD	Penghapusan Bangunan Gedung Kantor UPTD Ternate Utara dan Pagar sesuai Nomor 54/III.3/KT/2023 Tanggal 25 Januari 2023	347.074.000,00	119.162.073,00	227.911.927,00
5	Dinas Sosial	Penghapusan Bangunan gedung sesuai BAP No. 53/III.3/KT/2023 Tgl. 25 Januari 2023	1.115.082.900,00	529.161.013,00	585.921.887,00
6	BPKAD	Penghapusan Banguna Panggung Kesenian Sesuai Nomor : 119.A/III.3/KT/2022 Tanggal 25 JULI 2022	396.735.000,00	191.755.250,00	204.979.750,00
7	DPPKBD	Penghapusan Bangunan Gedung Kantor UPTD Ternate Utara dan Pagar sesuai Nomor 54/III.3/KT/2023 Tanggal 25 Januari 2023	105.600.000,00	26.752.000,00	78.848.000,00
<b>Total</b>			<b>6.532.624.622,00</b>	<b>1.345.499.836,00</b>	<b>5.187.124.786,00</b>

#### VI.4.2.2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya masing-masing tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp2.780.505.382,66 dan Rp0,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.780.505.382,66. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 terdapat penurunan atas nilai saji penyertaan modal PDAM.

#### VI.4.2.2.3 SUPRLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp64.315.142.466,96 dan Rp89.453.646.573,58. Realisasi Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2023 tersebut turun sebesar (Rp25.138.504.106,62) atau (28,10%) dibanding Tahun 2022.

#### VI.4.2.3 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun Anggaran;
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah

Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 seluruhnya berasal dari Beban Luar Biasa.

#### VI.4.2.3.1 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp573.012.600,00 dan Rp282.479.700,00 yang seluruhnya bersumber dan belanja tidak terduga tahun 2023. Beban luar biasa mengalami kenaikan sebesar Rp290.532.900,00 atau 102,85%.

**Tabel Beban Tak Terduga - LO**

No.	Beban Tak Terduga	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Beban Tak Terduga	573.012.600,00	282.479.700,00
	<b>Jumlah</b>	<b>573.012.600,00</b>	<b>282.479.700,00</b>

**Tabel Rincian Beban Tak Terduga LO – LRA**

No.	Beban Tak Terduga	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Tak Terduga	573.012.600,00	1.372.850.600,00	(799.838.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>573.012.600,00</b>	<b>1.372.850.600,00</b>	<b>(799.838.000,00)</b>

Terdapat perbedaan beban/belanja tak terduga sebesar (Rp799.838.000,00) yang terdiri dari :

- Pembayaran utang tahun 2023 sebesar Rp820.147.300,00 dikurangi sebesar (Rp966.715.300,00);
- Pencatatan aset jalan, irigasi dan jaringan yang bersumber dari beban tidak terduga sebesar (Rp653.270.000,00) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### VI.4.2.3.2 SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

Surplus dari Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp573.012.600,00 dan Rp282.479.700,00. Realisasi Surplus dari Pos Luar Biasa Tahun 2023 tersebut kenaikan sebesar Rp290.532.900,00 atau 102,85% dibanding Tahun 2022.

#### VI.4.2.4 SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit – LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp65.005.129.866,97 dan Rp89.171.166.873,58. Realisasi Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2023 tersebut turun sebesar (Rp24.166.037.006,61) atau (27,10%) dibanding Tahun 2022.

## VI.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di bawah pengelolaan Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2023. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

### VI.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp112.348.533.739,82 dan Rp195.314.891.671,13, yang berasal dari Arus Kas Masuk dan Keluar sebagai berikut:

#### VI.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi terdiri dari:

##### VI.5.1.1.1 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pajak Daerah

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

**Tabel Penerimaan Pajak Daerah**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Pajak Hotel	6.346.805.070,00	5.765.921.279,00
2	Pajak Restoran	14.856.052.135,00	13.654.419.284,50
3	Pajak Hiburan	3.164.060.220,00	2.627.733.243,00
4	Pajak Reklame	2.907.430.335,00	2.734.646.040,00
5	Pajak Penerangan Jalan	26.378.019.089,00	23.995.951.617,00
6	Pajak Parkir	547.394.212,00	381.857.940,00
7	Pajak Air Tanah	802.065.625,00	682.743.355,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam	1.541.102.039,00	1.778.127.585,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	7.578.504.262,00	5.719.250.664,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.578.494.113,00	9.314.892.326,00
<b>Jumlah</b>		<b>74.699.927.100,00</b>	<b>66.655.543.333,50</b>

##### VI.5.1.1.2 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah

Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

Tabel Penerimaan Retribusi Daerah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
<b>I</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>7.096.088.550,00</b>	<b>5.278.483.500,00</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	183.663.950,00	84.139.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	5.031.184.000,00	3.759.583.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.116.253.600,00	751.174.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	41.946.000,00	22.968.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.920.000,00	0,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	377.700.000,00	506.460.000,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.210.000,00	57.520.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	194.211.000,00	96.639.000,00
<b>II</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>11.291.284.860,00</b>	<b>12.352.071.118,00</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	845.646.000,00	240.260.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	9.219.771.460,00	10.741.691.638,00
3	Retribusi Terminal	329.675.000,00	495.080.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	285.224.400,00	283.316.200,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	141.775.000,00	112.572.000,00
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	169.550.000,00	176.029.280,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga	298.643.000,00	303.122.000,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.000.000,00	0,00
<b>III</b>	<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>	<b>1.483.342.206,00</b>	<b>1.038.993.052,00</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.474.377.206,00	1.038.883.052,00
2	Retribusi Izin Trayek	8.965.000,00	110.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.870.715.616,00</b>	<b>18.669.547.670,00</b>

#### VI.5.1.1.3 Arus Kas Masuk dari Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus masuk dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.747.741.808,05 dan Rp2.877.193.432,16, untuk Tahun 2023 Penerimaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berasal dari Bank BPRS Sebesar Rp2.582.607.766,05 dan dari Bank BPDM Sebesar Rp1.165.134.042,00.

#### VI.5.1.1.4 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

Tabel Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak	484.683.564,00	826.542.500,00

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
	Dipisahkan		
2	Penerimaan Jasa Giro-LRA	176.841.512,80	2.921.348,95
3	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	646.345.010,23	859.951.153,75
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	4.628.489,37
5	Pendapatan Denda Pajak - LRA	546.977.553,00	168.425.341,00
6	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.835.356.402,88	369.565.053,26
7	Pendapatan dari Pengembalian	1.280.515.371,55	933.886.052,85
8	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	126.603.200,00
9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	265.703.800,00	0,00
10	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	204.799.100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.236.423.214,46</b>	<b>3.497.322.239,18</b>

#### VI.5.1.1.5 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

**Tabel Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	2.730.301.630,00	5.775.161.831,00
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	13.549.644.205,00	21.266.149.936,00
3	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan pasal 29/WPOPON	1.367.327.964,00	1.431.042.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.647.273.799,00</b>	<b>28.472.353.767,00</b>

#### VI.5.1.1.6 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty	27.000.483.000,00	3.410.195.000,00
2	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan	2.599.488.211,00	1.958.311.000,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	257.211.711,00	56.919.000,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	24.634.112,00	43.578.000,00
5	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Gas Bumi	0,00	159.564.600,00
6	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-landrent	3.561.754.816,00	74.432.054.406,00
	<b>Jumlah</b>	<b>33.443.571.850,00</b>	<b>80.060.622.006,00</b>

#### VI.5.1.1.7 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp609.216.898.000,00 dan Rp585.402.476.250,00.

#### VI.5.1.1.8 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama Tahun 2023 yang terdiri dari :

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp143.945.616.097,00 dan Rp122.939.446.642,00. Untuk Tahun 2023 Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp58.104.997.938,00 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Sebesar Rp85.840.618.159,00.

#### VI.5.1.1.9 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Penyesuaian

Arus Kas Masuk dari Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat yang telah disetorkan ke Kas Daerah. Dana Insentif Daerah selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp30.386.501.000,00 dan Rp11.789.245.000,00.

#### VI.5.1.1.10 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan, yang terdiri dari:

**Tabel Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1	PKB	1.259.277.437,00	1.255.556.879,00
2	BBNKB	1.608.082.519,00	1.422.732.319,00
3	PBBKB	7.620.265.601,00	3.203.016.293,00
4	Pajak Air Permukaan	0,00	664.003.108,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	3.230.438.702,00	11.900.868.815,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.718.064.259,00</b>	<b>18.446.177.414,00</b>

#### VI.5.1.1.11 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendapatan Lainnya

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendapatan Lainnya yang telah diterima dan disetorkan ke kas daerah selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.108.569.477,37 dan Rp4.629.577.000,00.

#### VI.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi terdiri dari:



#### **VI.5.1.2.1 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pegawai**

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp451.162.028.029,87 dan Rp436.579.382.476,00. Pengeluaran kas pada belanja ini diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta belanja pegawai BLUD.

#### **VI.5.1.2.2 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Barang**

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Pembayaran Belanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp384.990.027.073,19 dan Rp274.871.746.666,71.

Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang habis pakai, pembayaran jasa perkantoran, pembayaran iuran jaminan/asuransi, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, pembayaran jasa konsultasi konstruksi dan non konstruksi, beasiswa pendidikan PNS, kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah, dan pemeliharaan aset tetap Pemerintah Kota Ternate.

#### **VI.5.1.2.3 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Subsidi**

Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Subsidi selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### **VI.5.1.2.4 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Hibah**

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.378.862.778,00 dan Rp14.552.134.040,00. Pengeluaran arus kas ini diperuntukkan bagi pemberian hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum dan hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

#### **VI.5.1.2.5 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bantuan Sosial**

Arus Kas Keluar dari Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang berasal dari Pos Pembayaran Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.769.000.000,00 dan Rp2.348.598.000,00. Pengeluaran arus kas ini diperuntukkan bagi pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

#### **VI.5.1.2.6 Arus Kas Keluar Untuk Bantuan Keuangan**

Arus Kas Keluar untuk Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pengeluaran arus kas ini merupakan pengeluaran yang diperuntukkan untuk bantuan kepada partai politik.

#### **VI.5.1.2.7 Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Tidak Terduga**

Arus Kas Keluar ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.372.850.600,00 dan Rp19.772.751.900,00.

### **VI.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN**

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Ternate kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp150.560.092.761,59) dan (Rp167.199.068.576,32) yang berasal dari Arus Kas Masuk dan Keluar sebagai berikut:

#### **VI.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi diperoleh dari penjualan atas peralatan dan mesin yaitu kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### **VI.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi terdiri dari:

##### **VI.5.2.2.1 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Tanah**

Arus Kas Keluar dari Perolehan Tanah merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah. Arus Kas Keluar dari Perolehan Tanah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp251.278.000,00 dan Rp19.712.728.081,00.

##### **VI.5.2.2.2 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Peralatan dan Mesin**

Arus Kas Keluar dari Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin.

Arus Kas Keluar dari Perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp29.241.515.278,85 dan Rp25.935.891.079,00.

##### **VI.5.2.2.3 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Gedung dan Bangunan**

Arus Kas Keluar dari Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan.

Arus Kas Keluar dari Perolehan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp43.223.513.732,21 dan Rp50.945.119.880,32. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini digunakan untuk melaksanakan pembangunan gedung tempat kerja dan Tugu/Tanda Batas.

#### **VI.5.2.2.4 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Arus Kas Keluar dari Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam rangka memperoleh aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan.

Arus Kas Keluar dari Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengeluaran Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp77.007.313.350,53 dan Rp70.605.329.536,00. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan, jembatan, instalasi pengolahan sampah, bangunan air dan jaringan listrik.

#### **VI.5.2.2.5 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya**

Arus Kas Keluar dari Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam rangka memperoleh aset tetap berupa belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Arus Kas Keluar dari Perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp103.746.500,00 dan Rp0,00.

#### **VI.5.2.2.6 Arus Kas Keluar untuk Perolehan Aset Lainnya**

Arus Kas Keluar dari Perolehan Aset Lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Arus Kas Keluar dari Perolehan Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp732.725.900,00 dan Rp0,00.

### **VI.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

Arus Kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas ini untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### **VI.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kota Ternate.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas ini untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp409.014.414,55 dan (Rp1.017.476.355,00) yang berasal dari Arus Kas Masuk dan Keluar sebagai berikut:

**VI.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris terdiri dari:

**VI.5.4.1.1 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan ke Kas Negara sampai dengan akhir tahun.

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp67.352.650.858,23 dan Rp30.038.850.698,00.

**VI.5.4.1.2 Arus Kas Masuk dari Koreksi Saldo Kas Tahun Berjalan**

Arus Kas Masuk dari Koreksi Saldo Kas Tahun Berjalan merupakan sisa Kas Tahun Berjalan di bendahara pengeluaran. Arus Kas Masuk dari Koreksi Saldo Kas Tahun Berjalan untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.556.816,20 dan Rp7.829.615,00.

**VI.5.4.1.3 Arus Kas Masuk dari Saldo Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk Tahun 2023 & 2022 masing-masing sebesar Rp13.403.125,35 dan Rp0,00.

**VI.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris terdiri dari:

**VI.5.4.2.1 Arus Kas Keluar untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

Arus Kas Keluar untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan ke Kas Negara Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023.

Arus Kas Keluar untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp66.916.757.291,23 dan Rp31.010.316.504,00.

**VI.5.4.2.2 Arus Kas Keluar untuk Koreksi Saldo Kas Tahun Lalu**

Arus Kas Keluar untuk Koreksi Saldo Kas Tahun Lalu untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp53.839.094,00 dan Rp53.840.164,00.

**VI.5.5 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS**

Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp37.802.544.607,22) dan Rp27.098.346.739,81 .

## VI.5.6 SALDO KAS

Total Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.090.317.224,30 dan Rp40.892.861.831,52 terdiri dari:

**Tabel Saldo Kas**

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)
1.	Kenaikan (Penurunan) Kas	(37.802.544.607,22)	27.098.346.739,81
2.	Saldo Awal Kas	40.892.861.831,52	13.483.423.507,15
3.	Saldo Akhir Kas (1+2)	3.090.317.224,30	40.581.770.246,96
	<i>Terdiri dari :</i>		
a.	Saldo Kas Daerah	282.755.275,52	40.581.770.246,96
b.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	181.743.664,20	53.840.164,00
c.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	13.403.125,35	16.082.800,00
d.	Kas di FKTP	259.104,80	0,00
e.	Kas di Bendahara BOS	5.530.101,00	5.684.010,00
f.	Kas di BLUD	222.066.112,43	106.356.475,56
g.	Kas Lainnya	574.086.772,00	129.128.135,00
h.	BOK	1.810.473.069,00	0,00
	<b>Total Kas 2023 (3=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>3.090.317.224,30</b>	<b>40.892.861.831,52</b>

Untuk penyusunan laporan arus kas tahun 2023 berbeda dengan penyusunan laporan arus kas tahun 2022, yang mana untuk tahun 2023 laporan arus kas menggambarkan arus kas secara keseluruhan Pemerintah Kota Ternate, sedangkan untuk tahun 2022 laporan arus kas hanya menggambarkan arus kas yang ada di Bendahara Umum Daerah (BUD).

## VI.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara laporan Operasional dengan Neraca yang menginformasikan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada periode pelaporan yang terdiri dari ekuitas awal, Surplus (Defisit) - LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas	Realisasi 2023 (Rp) (Audited)	Realisasi 2022 (Rp) (Audited)	Kenaikan /Penurunan	%
Ekuitas Awal	2.756.514.562.273,37	2.674.279.382.210,48	82.235.180.062,89	3,08
Surplus/Defisit-LO	65.005.129.866,97	89.171.166.873,58	(24.166.037.006,61)	-27,10
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar (Netto)	(25.168.323.087,56)	(6.935.986.810,69)	(18.232.336.276,87)	262,87
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>2.796.351.369.052,78</b>	<b>2.756.514.562.273,37</b>	<b>39.836.806.779,41</b>	<b>1,45</b>

### VI.6.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 sebesar Rp2.756.514.562.273,37, sedangkan Saldo Ekuitas Awal Tahun 2022 (*audited*) sebesar Rp2.674.279.382.210,48. Saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp82.235.180.062,89 atau 3,08%.

### VI.6.2 Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp65.005.129.866,97 dan Rp89.171.166.873,58.

### VI.6.3 Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif kesalahan mendasar sebesar Rp(25.168.323.087,56) terdiri dari:

**Tabel Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar**

No	Uraian	Jumlah
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	125.011.206,20
2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.680.654.789,28
3	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(275.100.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	936.500.147,41
5	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	74.000.000,00
6	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(498.810.500,00)
7	Rumah Negara Golongan III	6.400.000,00
8	Piutang Bagi Hasil Pajak dan Lain-lain	38.682.300.868,00
9	Penyisihan Piutang Retribusi	1.661.072.530,70
10	DBH PBB - LO	6.815.962.250,00
11	DBH PPh Pasal 21-LO	(7.140.594.750,00)
12	DBH SDA -LO	324.632.500,00
13	DAK Fisik Reguler LO	(427.680.741,00)
14	DAK Non Fisik-BOP-LO	427.680.741,00
15	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan dan Lain-lain - LO	(26.504.459.000,00)
16	DAU-LO	26.504.459.000,00
17	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Lain-lain LO	(32.646.946.947,00)
18	Alat Kantor dan Jalan Lainnya	(41.673.618.777,35)
19	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.925.507.079,20
20	Kas di BPRS Rek Penerimaan - 011100102	(165.293.484,00)
<b>Total</b>		<b>(25.168.323.087,56)</b>

### VI.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp2.796.351.369.052,78, sedangkan Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2022 (*audited*) sebesar Rp2.756.514.562.273,37. Saldo Akhir Tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp39.836.806.779,41 atau 1,45%.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

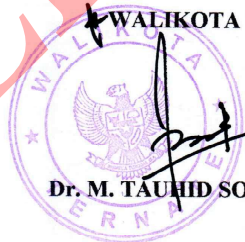
Pemerintah Kota Ternate memiliki 41 Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai entitas akuntansi. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasi dari 41 Perangkat daerah entitas akuntansi tersebut kemudian disampaikan kepada Wali Kota melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 diharapkan mampu memberikan informasi tentang kinerja pengelolaan Keuangan Daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah serta sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan manajemen, baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Kota Ternate.

Demikian Laporan Keuangan Kota Ternate Tahun Anggaran 2023.

**WALIKOTA TERNATE**



**Dr. M. TAUHID SOLEMAN, M. Si**

## KONDISI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN SELAMA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama SKPD	Saldo Per 31 Desember 2022 (Audited)	Kondisi Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2023															Saldo Per 31 Desember 2023 (Audited)
			Penerimaan Kas				Pengeluaran Kas											
			Sisa UP 2022	SP2D UP	SP2D GU	SP2D TU	SP2D LS	SPJ GU	SPJ NIHL (UP)	SPJ TU	SPJ LS GAJI	SPJ LS BARJAS	Koreksi atas Saldo Tahun Lalu	Penyetoran Sisa UP thn lalu dan Koreksi	Penyetoran Sisa UP thn berjalan	Penyetoran Sisa GU thn berjalan	Penyetoran Sisa LS thn berjalan	
1	DINAS PENDIDIKAN	-	525.800.000,00	2.301.836.733,00	-	-	183.097.387.845,00	2.301.836.733,00	525.800.000,00	-	153.348.230.920,00	29.715.856.925,00	-	-	-	33.300.000,00	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	260.000.000,00	674.102.274,00	-	3.900.378.417,00	93.189.080.181,00	671.102.274,00	259.135.312,00	3.657.900.236,00	-	56.812.328.171,00	36.247.747.415,00	-	-	129.004.595,00	77.184.697,00	165.298.250,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	-	100.000.000,00	73.759.017,00	-	-	106.769.489.567,61	73.759.017,00	100.000.000,00	-	-	9.070.968.296,00	97.696.131.821,61	-	-	-	2.389.450,00	-
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN & PERTANAHAN	-	100.000.000,00	915.185.391,00	-	-	26.550.603.566,00	915.185.391,00	100.000.000,00	-	-	4.183.338.368,00	22.367.265.198,00	-	-	-	-	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	75.000.000,00	722.972.600,00	-	-	9.301.973.426,00	722.972.600,00	75.000.000,00	-	-	4.266.204.906,00	5.032.168.520,00	-	-	-	3.600.000,00	-
6	DINAS KEBAKAARAN	-	45.000.000,00	249.480.122,00	-	-	6.875.059.323,00	249.480.122,00	33.725.072,00	-	-	3.310.407.821,00	3.564.651.502,00	-	-	10.426.330,00	-	848.598,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	30.000.000,00	120.000.000,00	-	197.415.000,00	8.750.623.265,00	120.000.000,00	30.000.000,00	197.415.000,00	-	3.430.994.949,00	5.319.628.316,00	-	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	-	40.000.000,00	215.839.000,00	-	190.210.120,00	10.508.728.764,00	215.839.000,00	40.000.000,00	190.170.620,00	-	4.383.484.946,00	6.125.243.818,00	-	-	-	-	39.500,00
9	DINAS TENAGA KERJA	-	40.000.000,00	115.255.800,00	-	156.334.000,00	5.260.504.433,00	115.255.800,00	39.780.810,00	156.334.000,00	-	3.109.080.711,00	2.129.127.592,00	-	-	219.190,00	-	-
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PELENDUNGAN ANAK	-	20.000.000,00	257.810.000,00	-	930.133.920,00	7.000.486.801,16	257.810.000,00	20.000.000,00	907.618.849,00	-	3.946.736.095,00	3.040.945.015,16	-	-	-	12.805.691,00	22.515.071,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	50.000.000,00	691.876.986,00	-	-	5.061.464.816,00	691.876.986,00	49.729.800,00	-	-	3.406.108.991,00	1.650.680.731,00	-	-	270.200,00	-	-
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	150.000.000,00	896.187.345,00	-	-	36.147.727.409,18	896.187.345,00	146.250.881,00	-	-	6.415.008.024,00	29.732.653.158,18	-	-	3.749.119,00	-	66.227,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	-	40.000.000,00	313.847.727,00	-	289.385.000,00	6.051.052.786,00	313.847.727,00	39.990.654,00	289.385.000,00	-	3.420.974.301,00	2.618.776.825,00	-	-	9.346,00	-	11.301.667,00
14	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN & KELUARGA BERENCANA	-	45.000.000,00	130.853.282,00	-	2.583.614.812,00	6.534.054.505,00	130.853.282,00	44.994.270,00	2.583.614.812,00	-	3.213.823.832,00	3.319.165.673,00	-	-	5.730,00	-	1.065.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	75.000.000,00	267.772.767,00	-	-	12.463.633.782,00	267.772.767,00	74.874.000,00	-	-	6.570.279.687,00	5.893.354.095,00	-	-	126.000,00	-	-
16	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA & PERSANDIAN	-	75.000.000,00	450.000.000,00	-	-	7.144.990.160,00	450.000.000,00	75.000.000,00	-	-	2.912.342.459,00	4.232.647.701,00	-	-	-	-	-
17	DINAS KOPERASI USAHA NEOL & MENENGAH	-	40.000.000,00	150.411.893,00	-	471.321.026,00	9.464.147.075,00	150.411.893,00	40.000.000,00	471.321.026,00	-	4.182.827.146,00	5.276.019.929,00	-	-	-	-	5.300.000,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	1.070,00	50.000.000,00	448.384.330,00	-	213.856.400,00	5.594.515.097,00	448.384.330,00	43.201.710,00	211.454.254,00	-	3.494.659.777,00	2.099.855.320,00	1.070,00	6.798.290,00	-	-	2.402.146,00
19	DINAS PEMUDA & OLAH RAGA	-	50.000.000,00	200.000.000,00	-	1.742.180.740,00	6.265.510.298,00	200.000.000,00	50.000.000,00	1.741.980.740,00	-	3.412.935.698,00	2.849.512.800,00	-	-	-	-	3.061.800,00
20	DINAS KEBUDAYAAN	-	30.000.000,00	329.982.000,00	-	362.090.250,00	8.031.363.309,00	329.982.000,00	30.000.000,00	362.090.250,00	-	3.951.441.429,00	4.056.671.850,00	-	-	-	-	23.250.030,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH	-	30.000.000,00	360.000.000,00	-	269.916.240,00	4.742.399.638,00	360.000.000,00	30.000.000,00	269.916.240,00	-	3.029.406.669,00	1.619.760.590,00	-	-	-	-	93.232.379,00
22	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	-	50.000.000,00	398.291.543,00	-	366.767.060,00	19.761.878.055,00	398.291.543,00	50.000.000,00	366.767.060,00	-	4.996.165.526,00	14.765.712.529,00	-	-	-	-	-
23	DINAS PARWISATA	-	75.000.000,00	280.583.655,00	-	913.746.520,00	11.193.574.073,00	280.583.655,00	75.000.000,00	877.404.920,00	-	4.554.423.956,00	6.633.405.335,00	-	-	-	-	5.744.782,00
24	DINAS PERTANIAN	-	50.000.000,00	537.708.611,00	-	182.398.450,00	14.783.768.318,00	537.708.611,00	50.000.000,00	182.398.450,00	-	9.836.935.918,00	4.942.732.400,00	-	-	-	-	4.100.000,00
25	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	-	100.000.000,00	300.000.000,00	-	449.917.000,00	15.159.265.885,00	300.000.000,00	99.795.000,00	248.000.000,00	-	6.860.262.570,00	8.291.640.615,00	-	-	205.000,00	-	7.362.700,00
26	SEKRETARIAT DAERAH	53.839.094,00	800.000.000,00	4.453.536.583,00	-	2.093.442.023,00	42.972.761.075,00	4.453.536.583,00	797.586.095,00	2.093.442.023,00	-	17.299.691.448,00	25.634.010.559,00	53.839.094,00	-	373.905,00	-	39.059.068,00
27	INSPEKTORAT DAERAH	-	50.000.000,00	289.626.795,00	-	-	8.087.946.089,00	289.626.795,00	50.000.000,00	-	-	4.938.219.617,00	3.128.148.714,00	-	-	-	-	21.577.758,00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH	-	100.000.000,00	911.540.949,00	-	2.489.858.985,00	16.686.765.570,00	911.540.949,00	98.200.000,00	2.489.658.609,00	-	3.703.235.006,00	12.942.551.004,00	-	-	1.800.000,00	-	40.979.560,00
29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH	-	150.000.000,00	1.004.507.487,00	-	352.135.000,00	13.202.900.403,00	1.001.003.027,00	150.000.000,00	352.135.000,00	-	5.836.420.935,00	7.279.985.185,00	-	-	3.504.460,00	-	86.494.283,00
30	BADAN PENGELOLAAN PAJAK & RETRIBUSI DAERAH	-	100.000.000,00	920.462.430,00	-	-	26.172.797.492,00	920.462.430,00	100.000.000,00	-	-	9.905.877.583,00	16.262.133.049,00	-	-	-	-	4.786.860,00
31	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH	-	100.000.000,00	1.126.277.960,00	-	340.175.070,00	15.408.304.910,00	1.126.277.960,00	100.000.000,00	320.627.070,00	-	6.223.643.455,00	9.161.756.578,00	-	-	-	-	2.904.877,00
32	SEKRETARIAT DPRD	-	150.000.000,00	1.125.085.045,00	-	-	53.765.987.974,00	1.125.085.045,00	149.997.022,00	-	-	24.289.839.297,00	29.394.444.647,00	-	-	2.978,00	-	81.794.030,00
33	KECAMATAN TERNATE UTARA	-	35.000.000,00	150.068.528,00	-	270.711.790,00	19.129.827.458,00	150.068.528,00	34.796.986,00	270.711.790,00	-	11.868.056.590,00	7.261.770.868,00	-	-	203.014,00	-	-
34	KECAMATAN TERNATE TENGAH	-	35.000.000,00	87.541.000,00	-	118.687.130,00	21.048.337.338,00	87.541.000,00	35.000.000,00	118.687.130,00	-	12.949.205.100,00	8.097.132.238,00	-	-	-	-	2.000.000,00
35	KECAMATAN TERNATE SELATAN	-	35.000.000,00	125.254.614,00	-	716.602.840,00	21.046.235.667,00	125.254.614,00	32.821.276,00	716.602.840,00	-	12.789.594.696,00	8.256.640.971,00	-	-	2.178.724,00	-	-
36	KECAMATAN PULAU TERNATE	-	35.000.000,00	202.772.533,00	-	255.032.762,00	7.757.146.078,00	202.772.533,00	35.000.000,00	255.032.762,00	-	4.319.446.795,00	3.437.699.283,00	-	-	-	-	-
37	KECAMATAN TERNATE BARAT	-	35.000.000,00	173.971.058,00	-	380.156.490,00	8.739.162.682,00	173.971.058,00	34.849.078,00	380.156.490,00	-	4.699.025.818,00	4.039.236.844,00	-	-	150.922,00	-	900.000,00



No.	Nama SKPD	Saldo Per 31 Desember 2022 (Audited)	Kondisi Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2023															Saldo Per 31 Desember 2023 (Audited)
			Penerimaan Kas				Pengeluaran Kas										Jumlah	
			Sisa UP 2022	SP2D UP	SP2D GU	SP2D TU	SP2D LS	SPJ GU	SPJ NIHL (UP)	SPJ TU	SPJ LS GAJI	SPJ LS BARJAS	Koreksi atas Saldo Tahun Lalu	Penyetoran Sisa UP thn lalu dan Koreksi	Penyetoran Sisa UP thn berjalan	Penyetoran Sisa GÜthn berjalan		
38	KECAMATAN PULAU HIRI	-	30.000.000,00	188.580.545,00	475.183.130,00	5.222.182.371,00	188.580.545,00	30.000.000,00	475.183.130,00	2.313.918.027,00	2.908.264.344,00	-	-	-	-	-	-	-
39	KECAMATAN MOTI	-	25.000.000,00	94.460.360,00	561.505.750,00	5.505.351.100,00	94.460.360,00	24.995.000,00	561.505.750,00	3.249.392.040,00	2.252.359.060,00	-	-	5.000,00	-	3.600.000,00	-	-
40	KECAMATAN PULAU BATANG DUA	-	30.000.000,00	54.781.287,00	912.775.320,00	5.316.719.286,00	54.781.287,00	29.673.960,00	872.275.320,00	2.781.755.093,00	2.527.181.920,00	-	-	326.040,00	-	7.782.273,00	40.500.000,00	-
41	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	-	37.500.000,00	245.425.677,00	-	11.491.696.577,00	245.425.677,00	37.500.000,00	-	3.471.720.017,00	8.019.976.560,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>J U M L A H</b>		<b>53.840.164,00</b>	<b>3.893.300.000,00</b>	<b>22.646.032.927,00</b>	<b>22.185.931.245,00</b>	<b>907.257.404.427,95</b>	<b>22.639.528.467,00</b>	<b>3.862.696.926,00</b>	<b>21.619.789.371,00</b>	<b>446.758.412.683,00</b>	<b>459.844.647.497,95</b>	<b>53.839.094,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>27.709.710,00</b>	<b>6.504.460,00</b>	<b>654.344.247,00</b>	<b>400.848.390,00</b>	<b>181.743.664,20</b>

SALINAN

**REKAPITULASI SISA KAS BENDAHARAN PENERIMAAN  
PUSKESMAS / UPTD / RSUD  
TAHUN 2023**

NO	PUSKESMAS / UPTD	NILAI	URAIAN SETORAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	TANGGAL PENYETORAN	NILAI PENYETORAN	SISA
1	PKM SIKO	Rp 1.820.000	Retribusi pelayanan kesehatan bulan Desember 2023	23 Januari 2024	Rp 1.820.000	Rp -
	JUMLAH	Rp 1.820.000			Rp 1.820.000	
2	PKM KOTA	Rp 1.500.000	Retribusi pelayanan kesehatan bulan Desember 2023	05 Januari 2024	Rp 1.500.000	Rp -
	JUMLAH	Rp 1.500.000			Rp 1.500.000	
3	PKM GAMBESI	Rp 500.000	Retribusi pelayanan kesehatan bulan Desember 2023	29 Januari 2024	Rp 500.000	Rp -
	JUMLAH	Rp 500.000			Rp 500.000	
4	PKM JAMBULA	Rp 1.565.000	Retribusi pelayanan kesehatan bulan Oktober s/d Desember 2023	17 Januari 2024	Rp 1.565.000	Rp -
	JUMLAH	Rp 1.565.000			Rp 1.565.000	
5	PKM BAHARI BERKESAN	Rp 820.000	Retribusi pelayanan kesehatan bulan November s/d Desember 2023	10 Januari 2024	Rp 820.000	Rp -
	JUMLAH	Rp 820.000			Rp 820.000	
6	PKM SULAMADAHA	Rp 985.000	Retribusi pelayanan kesehatan bulan November s/d Desember 2023	09 Januari 2004	Rp 985.000	Rp -
	JUMLAH	Rp 985.000			Rp 985.000	
7	PKM HIRI	Rp 1.075.000	Retribusi pelayanan kesehatan bulan September s/d Desember 2023	04 Januari 2024	Rp 1.075.000	Rp -
	JUMLAH	Rp 1.075.000			Rp 1.075.000	
8	PKM MOTI	Rp 200.000	Retribusi pelayanan kesehatan bulan Desember 2023	10 Januari 2024	Rp 200.000	Rp -
	JUMLAH	Rp 200.000			Rp 200.000	
9	PKM MAYAU	Rp 300.000	Retribusi pelayanan kesehatan bulan September s/d Desember 2023	10 Januari 2024	Rp 300.000	Rp -
	JUMLAH	Rp 300.000			Rp 300.000	
10	UPTD LABKESDA	Rp 750.000	Retribusi pelayanan kesehatan bulan Desember 2023		Rp 750.000	Rp -
		Rp 1.900.000	Pengembalian retribusi pelayanan kesehatan bulan Desember 2023		Rp 1.900.000	
	JUMLAH	Rp 2.650.000			Rp 2.650.000	
11	RSUD	Rp 1.870.000	Retribusi pelayanan kesehatan bulan Desember 2023	05 Januari 2024	Rp 1.870.000	Rp -
	JUMLAH	Rp 1.870.000			Rp 1.870.000	

NO	PUSKESMAS / UPTD	NILAI	URAIAN SETORAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	TANGGAL PENYETORAN	NILAI PENYETORAN	SISA
12	Dinas Kesehatan	Rp 90.000	Retribusi Pengambilan data mahasiswa bulan November & Desember 2023	04 Januari 2024	Rp 90.000	Rp -
	JUMLAH	Rp 90.000			Rp 90.000	
13	Bunga Jagir Dana Kapitasi	Rp 26.161,50	Bunga Jagir Dana Kapitasi JKN bulan November 2023 PKM Gambesi	17 Januari 2024	Rp 26.161,50	Rp -
		Rp 1.963,85	Bunga Jagir Dana Kapitasi JKN bulan Februari 2023 PKM Jambula	26 Januari 2024	Rp 1.963,85	Rp -
	JUMLAH	Rp 28.125,35			Rp 28.125,35	
	TOTAL	Rp 13.403.125,35			Rp 13.403.125,35	Rp -

SALINAN

## Kas di Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS-REGULER) per 31 Desember 2023

NO.	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL PER 01 JANUARI 2023	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN SALDO AKHIR		
						BANK	TUNAI	PFK
1	SDN 1 KOTA TERNATE	50.000,00	435.240.000,00	435.240.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
2	SDN 2 KOTA TERNATE	50.000,00	386.640.000,00	386.640.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
3	SDN 3 KOTA TERNATE	94.500,00	261.315.500,00	261.360.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
4	SDN 4 KOTA TERNATE	50.000,00	241.920.000,00	241.920.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
5	SDN 5 KOTA TERNATE	50.000,00	293.760.000,00	293.760.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
6	SDN 6 KOTA TERNATE	50.000,00	406.296.000,00	406.296.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
7	SDN 7 KOTA TERNATE	50.000,00	259.200.000,00	259.200.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
8	SDN 8 KOTA TERNATE	50.000,00	316.440.000,00	316.440.000,00	50.000,00	50.000,00	-	3.456.433,00
9	SDN 9 KOTA TERNATE	50.000,00	265.680.000,00	265.680.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
10	SDN 10 KOTA TERNATE	50.000,00	199.800.000,00	199.800.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
11	SDN 11 KOTA TERNATE	50.000,00	181.440.000,00	181.440.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
12	SDN 12 KOTA TERNATE	50.000,00	247.320.000,00	247.320.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
13	SDN 13 KOTA TERNATE	50.000,00	195.480.000,00	195.480.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
14	SDN 14 KOTA TERNATE	50.000,00	142.203.600,00	142.203.600,00	50.000,00	50.000,00	-	-
15	SDN 15 KOTA TERNATE	50.000,00	152.280.000,00	152.280.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
16	SDN 16 KOTA TERNATE	50.000,00	262.440.000,00	262.440.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
17	SDN 17 KOTA TERNATE	50.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
18	SDN 18 KOTA TERNATE	50.000,00	186.840.000,00	186.840.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
19	SDN 19 KOTA TERNATE	50.000,00	97.200.000,00	97.200.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
20	SDN 20 KOTA TERNATE	50.000,00	101.520.000,00	101.520.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
21	SDN 21 KOTA TERNATE	50.400,00	356.349.600,00	356.318.900,00	81.100,00	81.100,00	-	-
22	SDN 22 KOTA TERNATE	100.000,00	245.160.000,00	245.210.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
23	SDN 23 KOTA TERNATE	50.000,00	184.680.000,00	184.680.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
24	SDN 24 KOTA TERNATE	50.000,00	167.400.000,00	167.400.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
25	SDN 25 KOTA TERNATE	50.000,00	311.040.000,00	311.040.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
26	SDN 26 KOTA TERNATE	52.700,00	127.437.300,00	127.440.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
27	SDN 27 KOTA TERNATE	50.000,00	173.830.000,00	173.830.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
28	SDN 28 KOTA TERNATE	244.000,00	137.160.000,00	137.354.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
29	SDN 29 KOTA TERNATE	100.000,00	184.680.000,00	184.680.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	-
30	SDN 30 KOTA TERNATE	100.000,00	291.600.000,00	291.650.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
31	SDN 31 KOTA TERNATE	50.000,00	305.640.000,00	305.640.000,00	50.000,00	50.000,00	-	7.031.172,00
32	SDN 32 KOTA TERNATE	50.000,00	361.800.000,00	361.800.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
33	SDN 33 KOTA TERNATE	50.000,00	285.476.400,00	285.476.400,00	50.000,00	50.000,00	-	-
34	SDN 34 KOTA TERNATE	50.000,00	223.560.000,00	223.560.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
35	SDN 35 KOTA TERNATE	50.000,00	152.280.000,00	152.280.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
36	SDN 36 KOTA TERNATE	50.100,00	163.029.900,00	163.030.000,00	50.000,00	50.000,00	-	3.395.581,00
37	SDN 37 KOTA TERNATE	50.000,00	167.400.000,00	167.400.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
38	SDN 38 KOTA TERNATE	50.870,00	429.839.130,00	429.840.000,00	50.000,00	50.000,00	-	346.846,00
39	SDN 39 KOTA TERNATE	50.000,00	209.520.000,00	209.520.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
40	SDN 40 KOTA TERNATE	50.000,00	222.480.000,00	222.480.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
41	SDN 41 KOTA TERNATE	50.000,00	124.200.000,00	124.200.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
42	SDN 42 KOTA TERNATE	99.200,00	90.620.800,00	90.670.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
43	SDN 43 KOTA TERNATE	50.000,00	163.080.000,00	163.080.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
44	SDN 44 KOTA TERNATE	50.000,00	439.560.000,00	439.560.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
45	SDN 45 KOTA TERNATE	52.000,00	264.600.000,00	264.601.999,00	50.001,00	50.000,00	1,00	-
46	SDN 46 KOTA TERNATE	100.200,00	279.719.800,00	279.720.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
47	SDN 47 KOTA TERNATE	50.000,00	243.000.000,00	242.950.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
48	SDN 48 KOTA TERNATE	50.000,00	225.720.000,00	225.720.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
49	SDN 49 KOTA TERNATE	50.000,00	238.630.000,00	238.630.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
50	SDN 50 KOTA TERNATE	50.000,00	298.080.000,00	298.080.000,00	50.000,00	50.000,00	-	7.765.685,00
51	SDN 51 KOTA TERNATE	50.000,00	77.760.000,00	77.609.600,00	200.400,00	200.400,00	-	414.820,00
52	SDN 52 KOTA TERNATE	90.000,00	137.160.000,00	137.160.000,00	90.000,00	90.000,00	-	12.000,00
53	SDN 53 KOTA TERNATE	50.000,00	137.160.000,00	137.160.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
54	SDN 54 KOTA TERNATE	50.000,00	157.680.000,00	157.680.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
55	SDN 55 KOTA TERNATE	50.000,00	127.390.000,00	127.390.000,00	50.000,00	50.000,00	-	732.837,00
56	SDN 56 KOTA TERNATE	50.000,00	240.840.000,00	240.840.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
57	SDN 57 KOTA TERNATE	50.000,00	154.440.000,00	154.440.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
58	SDN 58 KOTA TERNATE	50.000,00	138.190.000,00	138.181.400,00	58.600,00	58.600,00	-	-
59	SDN 59 KOTA TERNATE	50.000,00	126.360.000,00	126.360.000,00	50.000,00	50.000,00	(0,00)	-
60	SDN 60 KOTA TERNATE	50.000,00	146.880.000,00	146.880.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
61	SDN 61 KOTA TERNATE	50.000,00	109.080.000,00	109.080.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
62	SDN 62 KOTA TERNATE	50.000,00	93.960.000,00	93.960.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
63	SDN 63 KOTA TERNATE	50.000,00	159.840.000,00	159.840.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-

NO.	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL PER 01 JANUARI 2023	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN SALDO AKHIR		
						BANK	TUNAI	PFK
64	SDN 64 KOTA TERNATE	50.000,00	71.280.000,00	71.280.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
65	SDN 65 KOTA TERNATE	50.000,00	211.680.000,00	211.680.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
66	SDN 66 KOTA TERNATE	50.000,00	88.560.000,00	88.560.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
67	SDN 67 KOTA TERNATE	50.000,00	78.840.000,00	78.840.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
68	SDN 68 KOTA TERNATE	50.000,00	79.919.628,00	79.919.628,00	50.000,00	50.000,00	-	-
69	SDN 69 KOTA TERNATE	50.000,00	143.640.000,00	143.640.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
70	SDN 70 KOTA TERNATE	50.000,00	88.560.000,00	88.560.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
71	SDN 71 KOTA TERNATE	50.000,00	115.560.000,00	115.560.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
72	SDN 72 KOTA TERNATE	50.000,00	96.120.000,00	96.120.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
73	SDN 73 KOTA TERNATE	50.000,00	93.960.000,00	93.960.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-
74	SDN 74 KOTA TERNATE	100.000,00	75.600.000,00	75.600.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	-
75	SDN 75 KOTA TERNATE	50.000,00	31.320.000,00	31.320.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
76	SDN 76 KOTA TERNATE	50.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
77	SDN 77 KOTA TERNATE	50.000,00	52.920.000,00	52.920.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
78	SDN 78 KOTA TERNATE	50.000,00	60.480.000,00	60.480.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
79	SDN 79 KOTA TERNATE	100.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
80	SDN 80 KOTA TERNATE	50.000,00	73.440.000,00	73.440.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
81	SDN 81 KOTA TERNATE	50.000,00	117.720.000,00	117.720.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
82	SDN 82 KOTA TERNATE	50.000,00	74.520.000,00	74.520.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
83	SDN 83 KOTA TERNATE	50.000,00	62.640.000,00	62.640.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
84	SMP N 1 KOTA TERNATE	50.000,00	1.561.560.000,00	1.561.560.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-
85	SMP N 2 KOTA TERNATE	50.000,00	1.285.680.000,00	1.285.680.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
86	SMP N 3 KOTA TERNATE	100.000,00	630.960.000,00	630.960.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
87	SMP N 4 KOTA TERNATE	50.000,00	1.106.160.000,00	1.106.160.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
88	SMP N 5 KOTA TERNATE	50.000,00	568.920.000,00	568.920.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	4.262.328,00
89	SMP N 6 KOTA TERNATE	100.000,00	802.560.000,00	802.560.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
90	SMP N 7 KOTA TERNATE	50.000,00	1.407.120.000,00	1.407.120.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
91	SMP N 8 KOTA TERNATE	50.000,00	112.200.000,00	112.200.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
92	SMP N 9 KOTA TERNATE	50.000,00	68.510.000,00	68.510.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
93	SMP N 10 KOTA TERNATE	50.000,00	150.480.000,00	150.480.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
94	SMP N 11 KOTA TERNATE	50.000,00	96.360.000,00	96.360.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
95	SMP N 12 KOTA TERNATE	50.040,00	72.599.960,00	72.600.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
96	SMP N 13 KOTA TERNATE	50.000,00	139.920.000,00	139.920.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
97	SMP N 14 KOTA TERNATE	50.000,00	51.480.000,00	51.480.000,00	50.000,00	50.000,00	(0,00)	-
98	SMP N 15 KOTA TERNATE	100.000,00	68.640.000,00	68.640.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.684.010,00</b>	<b>23.495.637.618,00</b>	<b>23.495.791.527,00</b>	<b>5.530.101,00</b>	<b>5.430.100,00</b>	<b>100.001,00</b>	<b>27.417.702,00</b>

**Kas di Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS-KINERJA)  
Per 31 Desember 2023**

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	PENERIMAAN	B.BARJAS BOSKIN	B. MODAL BOSKIN	SALDO AKHIR
1	SDN 1 KOTA TERNATE	-	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
2	SDN 2 KOTA TERNATE	-	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
3	SDN 19 KOTA TERNATE	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
4	SDN 27 KOTA TERNATE	-	22.500.000,00	6.970.532,00	15.529.468,00	-
5	SDN 28 KOTA TERNATE	-	22.500.000,00	17.063.532,00	5.436.468,00	-
6	SDN 38 KOTA TERNATE	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
7	SDN 40 KOTA TERNATE	-	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
8	SDN 41 KOTA TERNATE	-	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
9	SDN 49 KOTA TERNATE	-	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
10	SDN 57 KOTA TERNATE	-	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
11	SDN 59 KOTA TERNATE	-	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
12	SDN 65 KOTA TERNATE	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
12	SDN 79 KOTA TERNATE	-	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
13	SDN 80 KOTA TERNATE	-	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
14	SDN 83 KOTA TERNATE	-	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
15	SMP N 1 KOTA TERNATE	-	35.000.000,00	18.745.000,00	16.255.000,00	-
16	SMP N 2 KOTA TERNATE	-	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
17	SMP N 4 KOTA TERNATE	-	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-
18	SMP N 5 KOTA TERNATE	-	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
19	SMP N 7 KOTA TERNATE	-	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
20	SMP N 9 KOTA TERNATE	-	70.000.000,00	47.447.900,00	22.552.100,00	-
21	SMP N 13 KOTA TERNATE	-	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
22	SMP N 14 KOTA TERNATE	-	120.000.000,00	85.585.500,00	34.414.500,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>780.000.000,00</b>	<b>685.812.464,00</b>	<b>94.187.536,00</b>	-

SALINAN

**Kas di Bendahara Dana Bantuan Operasional PAUD dan SKB  
Per 31 Desember 2023**

NO	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Nilai Penyaluran	Laporan Penggunaan Dana (Kegiatan)		Silpa Saat ini
1	PAUD PEMBINA 1 KOTA TERNATE	69925066	Kec. Ternate Utara	59.040.000,00	29.520.000,00	29.520.000,00	-
2	PAUD PEMBINA 2 KOTA TERNATE	69972223	Kec. Pulau Ternate	30.240.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00	-
3	PAUD PEMBINA 3 KOTA TERNATE	69924536	Kec. Ternate Utara	21.600.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-
4	PAUD PEMBINA 4 KOTA TERNATE	69875642	Kec. Ternate Barat	12.240.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	-
5	PAUD PEMBINA 5 KOTA TERNATE	69875644	KEC. MOTI	12.240.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	-
6	PAUD PEMBINA 6 KOTA TERNATE	69925998	KEC. MOTI	5.760.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	-
7	PAUD PEMBINA 7 KOTA TERNATE	69943529	Kec. Ternate Utara	45.360.000,00	22.680.000,00	22.680.000,00	-
8	PAUD PEMBINA 8 KOTA TERNATE	60203521	Kec. Ternate Utara	33.840.000,00	16.920.000,00	16.920.000,00	-
9	PAUD PEMBINA 9 KOTA TERNATE	60203488	Kec. Pulau Ternate	21.600.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-
10	PAUD PEMBINA 10 KOTA TERNATE	69925526	Kec. Pulau Hiri	9.360.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	-
11	TK PEMBINA 11 KOTA TERNATE	69917378	KEC. MOTI	9.360.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	-
12	TK PEMBINA 12 KOTA TERNATE	60203493	KEC. MOTI	7.920.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	-
13	SKB KOTA TERNATE	P9956837	Kec. Ternate Utara	175.920.000,00	110.460.000,00	65.460.000,00	-
<b>T O T A L</b>				<b>444.480.000,00</b>	<b>244.740.000,00</b>	<b>199.740.000,00</b>	-

SALINAN

LAPORAN REKAPITULASI  
PENERIMAAN PAJAK DAN PELUNASAN PIUTANG PER 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO	JENIS PAJAK	PIUTANG S/D THN 2022	KOREKSI TAHUN 2023	PIUTANG S/D THN 2022 SETELAH DI KOREKSI (+/-)	PEMBAYARAN PIUTANG DI THN 2023	SISA PIUTANG S/D 2023	POTENSI 2023	REALISASI 2023	SISA PIUTANG 2023	NILAI PENYISIHAN PIUTANG 2023	PIUTANG TOTAL
1	PAJAK HOTEL	2.093.918.049		2.093.918.049	-	2.093.918.049	6.346.805.070	6.346.805.070	-	1.046.959.024.50	2.093.918.049
2	PAJAK RESTORAN	404.927.298	5.545.816.456 (150.000)	5.950.743.754	36.635.580	5.914.108.174	14.671.854.555	14.819.416.555	-	2.957.054.087.00	5.914.108.174
3	PAJAK HIBURAN	1.544.573.286		1.544.423.286	23.800.000	1.520.623.286	3.140.260.220	3.140.260.220	-	152.383.528.60	1.520.623.286
4	PAJAK REKLAME	827.825.742	(557.338)	827.268.404	551.816.318	275.452.086	2.864.177.630	2.274.775.267	589.402.363	177.022.928.20	864.854.449
5	PAJAK PPJ	-		-	-	-	26.378.019.089	26.378.019.089	-	-	-
6	PAJAK MBLB	914.372.663	(12.083.107)	902.289.556	-	902.289.556	1.555.115.055	1.541.102.039	14.013.016	451.144.778.00	916.302.572
7	PAJAK PARKIR	125.659.600		125.659.600	-	125.659.600	547.394.212	547.394.212	-	12.565.960.00	125.659.600
8	PAJAK AIR TANAH	64.840.441		64.840.441	48.367.100	16.473.341	781.092.425	753.698.525	27.393.900	5.778.588.50	43.867.241
9	PAJAK BPTHB	-		-	-	-	10.578.494.113	10.578.494.113	-	-	-
10	PBB	20.580.513.870		20.580.513.870	919.531.253	19.660.982.617	11.899.844.501	6.892.442.872	5.047.401.629	15.729.798.319.50	24.708.384.246
	TOTAL	26.556.630.949	5.533.026.011	32.089.656.960	1.580.150.251	30.509.506.709	78.763.056.870	73.232.407.962	5.678.210.908	20.532.707.214.30	36.187.717.617

SALINAN



## PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI TAHUN 2023

NO	Uraian Piutang	Tahun	Tanggal Penetapan	SKPD	Nama Debitur	Nilai Berdasar Umur Piutang				Nilai Piutang	Penyisihan Berdasar Tarif Penyisihan								
						LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	Jumlah Beban	Pembayaran	Piutang Awal		
						Lancar	Kurang Lancar	DIRAGUKAN	Macet		0,0%	10%	50%	100%	Penyisihan (LO)/	2019 s.d 2023	2019 s.d 2023		
						1-tahun	1s/d2tahun	2s/d3tahun	didas3tahun		Penyisihan Piutang						(Neraca )		
						RP	RP	RP	RP		RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	RP	
1	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	2019	01/01/2019	Dinas PU	CV. AP	-	-	-	457.840.000,00	457.840.000,00	-	-	-	457.840.000,00	457.840.000,00	-	457.840.000,00		
2	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	2019	01/01/2019	BP2RD	Goheba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-		
3	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	2020	01/01/2020	BP2RD	Goheba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-		
4	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	2021	01/01/2021	BP2RD	Goheba	-	-	17.000.000,00	-	17.000.000,00	-	-	8.500.000,00	-	8.500.000,00	33.000.000,00	50.000.000,00	-	
5	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	2022	01/01/2022	BP2RD	Goheba	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
6	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	2023	02/02/2023	BP2RD	Goheba	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-	
7	Retribusi Pasar	2022	01/01/2022	BP2RD	Pasar gabungan	-	2.178.427.318,00	-	-	2.178.427.318,00	-	217.842.731,80	-	-	217.842.731,80	-	2.178.427.318,00	-	
8	Retribusi Pasar	2021	01/01/2021	BP2RD	Pasar gabungan	-	-	1.385.078.507,00	-	1.385.078.507,00	-	-	692.539.253,50	-	692.539.253,50	-	1.385.078.507,00	-	
9	Retribusi Pasar	2020	01/01/2020	BP2RD	Pasar gabungan	-	-	-	707.102.550,00	707.102.550,00	-	-	-	707.102.550,00	-	707.102.550,00	-		
10	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	2019	01/01/2019	BP2RD	SPBU Soa Sio	-	-	-	78.750.000,00	78.750.000,00	-	-	-	78.750.000,00	78.750.000,00	-	78.750.000,00	-	
11	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	2020	01/01/2020	BP2RD	SPBU Soa Sio	-	-	-	78.750.000,00	78.750.000,00	-	-	-	78.750.000,00	78.750.000,00	-	78.750.000,00	-	
12	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	2021	01/01/2021	BP2RD	SPBU Soa Sio	-	-	78.750.000,00	-	78.750.000,00	-	-	39.375.000,00	-	39.375.000,00	-	78.750.000,00	-	
13	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	2022	01/01/2022	BP2RD	SPBU Soa Sio	-	78.750.000,00	-	-	78.750.000,00	-	7.875.000,00	-	-	7.875.000,00	-	78.750.000,00	-	
14	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	2023	02/02/2023	BP2RD	SPBU Soa Sio	78.750.000,00	-	-	-	78.750.000,00	-	-	-	-	-	-	78.750.000,00	-	
15	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	2019	01/01/2019	BP2RD	Waterboom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.376.500,00	208.376.500,00	-	
16	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	2020	01/01/2020	BP2RD	Waterboom	-	-	-	104.188.250,00	104.188.250,00	-	-	-	104.188.250,00	104.188.250,00	104.188.250,00	208.376.500,00	-	
17	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	2021	01/01/2021	BP2RD	Waterboom	-	-	208.376.500,00	-	208.376.500,00	-	-	104.188.250,00	-	104.188.250,00	-	208.376.500,00	-	
18	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	2022	01/01/2022	BP2RD	Waterboom	-	208.376.500,00	-	-	208.376.500,00	-	20.837.650,00	-	-	20.837.650,00	-	208.376.500,00	-	
19	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	2023	02/02/2023	BP2RD	Waterboom	208.376.500,00	-	-	-	208.376.500,00	-	-	-	-	-	-	208.376.500,00	-	
<b>J U M L A H</b>						<b>337.126.500,00</b>	<b>2.515.553.818,00</b>	<b>1.689.205.007,00</b>	<b>1.426.630.800,00</b>	<b>5.968.516.125,00</b>	<b>-</b>	<b>251.555.381,80</b>	<b>844.602.503,50</b>	<b>1.426.630.800,00</b>	<b>2.522.788.685,30</b>	<b>445.564.750,00</b>	<b>6.414.080.875,00</b>	<b>-</b>	

## PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 2023

Pendapatan Transfer Provinsi	SK No.	Piutang 2022	Penetapan di 2023	Realisasi (Dibayarkan di 2023)		Piutang 2023
				Tanggal	Jumlah (Rp)	
<b>PJR</b>						
Pajak Rokok TWL III (2022)	32/KPTS/BAPENDA/X/II/2022	1.458.612.078,00		03/03/2023	1.458.612.078,00	-
Pajak Rokok TWL IV (2022)	12/KPTS/BAPENDA/IV/2023		1.771.826.624,00	26/06/2023	1.771.826.624,00	-
Pajak Rokok Bulan Desember (2022)	31/KPTS/BAPENDA/X/2023		1.369.946.969,00			1.369.946.969,00
Pajak Rokok TWL I (2023)	31/KPTS/BAPENDA/X/2023		2.491.857.278,00			2.491.857.278,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.458.612.078,00</b>	<b>5.633.630.871,00</b>		<b>3.230.438.702,00</b>	<b>3.861.804.247,00</b>
<b>PBB-KB</b>						
PBB-KB TWL III (2021)	7/KPTS/BAPENDA/X/2021	3.101.257.911,00	-	03/03/2023	3.101.257.911,00	-
PBB-KB TWL IV (2021)	973/43/BAPENDA/II/2022	3.869.007.690,00	-	31/07/2023	3.869.007.690,00	-
PBB-KB TWL I (2022)	973/131/BAPENDA/IV/2022	3.834.281.789,00	-	31/07/2023	650.000.000,00	3.184.281.789,00
PBB-KB TWL II (2022)	20/KPTS/BAPENDA/VI/2022	4.497.141.807,00	-			4.497.141.807,00
PBB-KB TWL III (2022)	27/KPTS/BAPENDA/X/2022	5.092.550.704,00	-			5.092.550.704,00
PBB-KB TWL IV (2022)	01/KPTS/Bapenda/I/2023		5.828.466.884,00			5.828.466.884,00
PBB-KB TWL I (2023)	15/KPTS/BAPENDA/IV/2023		5.595.599.770,00			5.595.599.770,00
PBB-KB TWL II (2023)	27/KPTS/BAPENDA/VIII/2023		5.342.347.379,00			5.342.347.379,00
PBB-KB TWL III (2023)	33/KPTS/BAPENDA/XI/2023		5.100.683.007,00			5.100.683.007,00
PBB-KB TWL IV (2023)	03/KPTS/BAPENDA/II/2024		6.237.232.031,00			6.237.232.031,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.394.239.901,00</b>	<b>28.104.329.071,00</b>		<b>7.620.265.601,00</b>	<b>40.878.303.371,00</b>
<b>PKB &amp; BBN-KB</b>						
PKB TWL III (2021)	6/KPTS/BAPENDA/X/2021	1.259.277.437,00	-	10/07/2023	1.259.277.437,00	-
PKB TWL IV (2021)	973/50/BAPENDA/II/2022	1.747.936.774,00	-			1.747.936.774,00
PKB TWL I (2022)	973/133.1/Bapenda/IV/2022	1.628.358.493,00				1.628.358.493,00
PKB TWL II (2022)	21/KPTS/BAPENDA/VI/2022	1.304.932.417,00				1.304.932.417,00
PKB TWL III (2022)	029/KPTS/BAPENDA/X/2022	1.461.861.752,00				1.461.861.752,00
PKB TWL IV (2022)	03/KPTS/Bapenda/I/2023		2.111.961.228,00			2.111.961.228,00
PKB TWL I (2023)	14/KPTS/BAPENDA/IV/2023		1.522.845.203,00			1.522.845.203,00
PKB TWL II (2023)	28/KPTS/BAPENDA/VIII/2023		1.466.019.880,00			1.466.019.880,00
PKB TWL III (2023)	32/KPTS/BAPENDA/XI/2023		1.859.760.150,00			1.859.760.150,00
PKB TWL IV (2023)	04/KPTS/BAPENDA/II/2024		1.777.273.371,00			1.777.273.371,00
BBN-KB TWL III (2021)	6/KPTS/BAPENDA/X/2021	1.608.082.519,00		10/07/2023	1.608.082.519,00	-
BBN-KB TWL IV (2021)	973/50/BAPENDA/II/2022	1.727.400.292,00				1.727.400.292,00
BBN-KB TWL I (2022)	973/133.1/Bapenda/IV/2022	1.825.066.530,00				1.825.066.530,00
BBN-KB TWL II (2022)	21/KPTS/BAPENDA/VI/2022	1.528.524.673,00				1.528.524.673,00
BBN-KB TWL III (2022)	029/KPTS/BAPENDA/X/2022	1.112.641.488,00				1.112.641.488,00
BBN-KB TWL IV (2022)	03/KPTS/Bapenda/I/2023		1.537.745.740,00			1.537.745.740,00
BBN-KB TWL I (2023)	14/KPTS/BAPENDA/IV/2023		1.758.170.019,00			1.758.170.019,00
BBN-KB TWL II (2023)	28/KPTS/BAPENDA/VIII/2023		1.386.218.278,00			1.386.218.278,00
BBN-KB TWL III (2023)	32/KPTS/BAPENDA/XI/2023		1.778.362.120,00			1.778.362.120,00
BBN-KB TWL IV (2023)	04/KPTS/BAPENDA/II/2024		1.772.847.761,00			1.772.847.761,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.204.082.375,00</b>	<b>16.971.203.750,00</b>		<b>2.867.359.956,00</b>	<b>29.307.926.169,00</b>
<b>P3-AP</b>						
P3-AP TWL III (2021)	973/35/BAPENDA/X/2021	0,06	-			0,06
P3-AP TWL IV (2022)	02/KPTS/Bapenda/I/2023		139.740.917,00			139.740.917,00
P3-AP TWL I (2023)	13/KPTS/BAPENDA/IV/2023		199.164.438,00			199.164.438,00
P3-AP TWL II (2023)	26/KPTS/BAPENDA/VIII/2023		162.727.560,00			162.727.560,00
P3-AP TWL III (2023)	34/KPTS/BAPENDA/XI/2023		3.382.935,00			3.382.935,00
P3-AP TWL IV (2023)	05/KPTS/BAPENDA/II/2024		3.245.302,00			3.245.302,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,06</b>	<b>508.261.152,00</b>		-	<b>508.261.152,06</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37.056.934.354,06</b>	<b>51.217.424.844,00</b>		<b>13.718.064.259,00</b>	<b>74.556.294.939,06</b>

PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG NON PAJAK DAN NON RETRIBUSI (TP TGR) 2023

NO	Tgl Penetapan	Nama Debitur	Nilai Berdasarkan Umur Piutang				Nilai Piutang	Penyisihan Berdasarkan Tarif Penyisihan					Pelunasan 2023	Pelunasan 2022	Pelunasan 2021	Jumlah SKTJM (Nilai Pokok) s/d tahun 2023
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	Jumlah Beban Penyisihan (LOV) Penyisihan Piutang (Meraca)				
			(< tahun)	(1-2 Tahun)	(>2 - 5 Tahun)	(>5 Tahun)		0,0%	10%	50%	100%					
			RP	RP	RP	RP		RP	RP	RP	RP					
1	4-May-12	Kec. Tte Tengah Siti Nur Nelry Teng. SE	-	-	-	154.050.000,00	-	-	-	154.050.000,00	154.050.000,00	-	-	-	154.050.000,00	
2	4-Nov-14	PPKD Lenny Marlina Ponto	-	-	-	8.350.000,00	-	-	-	8.350.000,00	8.350.000,00	-	-	-	8.350.000,00	
3	4-Nov-14	PPKD Andry Handoko	-	-	-	6.750.000,00	-	-	-	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	-	6.750.000,00	
4	24-Dec-14	Kec. Hiri Aslan H Rufai	-	-	-	16.676.462,00	-	-	-	16.676.462,00	16.676.462,00	-	-	-	16.676.462,00	
5	9-Aug-21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794.250,00	-	-	794.250,00
6	9-Aug-21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322.000,00	-	-	322.000,00	
7	9-Aug-21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.000,00	-	162.000,00	162.000,00
8	9-Aug-21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	727.750,00	-	-	-	363.875,00	-	-	363.875,00	-	-	727.750,00
9	9-Aug-21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	1.054.250,00	-	-	-	527.125,00	-	-	527.125,00	-	750.000,00	2.105.250,00
10	10-Aug-21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.000,00	644.000,00
11	10-Aug-21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539.000,00	539.000,00
12	10-Aug-21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	10-Aug-21	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	1.675.100,00	-	-	-	837.550,00	-	-	837.550,00	-	1.471.000,00	2.971.000,00
14	10-Aug-21	Dinas Sosial	-	-	-	2.100.000,00	-	-	-	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00	-	1.500.000,00	1.675.100,00
15	10-Aug-21	Dinas Sosial	-	-	-	2.350.000,00	-	-	-	1.175.000,00	-	-	1.175.000,00	-	500.000,00	2.850.000,00
16	12-Aug-21	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.348.050,00	-	-	3.348.050,00
17	12-Aug-21	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	8.094.750,00	-	-	-	4.047.375,00	-	-	4.047.375,00	-	-	8.594.750,00
18	12-Aug-21	Dinas Pendidikan - SMAN 5 Kota Ternate	-	-	-	1.419.000,00	-	-	-	709.500,00	-	-	709.500,00	-	500.000,00	1.419.000,00
19	13-Aug-21	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	13-Aug-21	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	1.543.000,00	-	-	-	771.500,00	-	-	771.500,00	-	1.000.000,00	2.446.000,00
21	13-Aug-21	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	400.000,00	1.600.000,00
22	13-Aug-21	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.000,00	2.100.000,00
23	16-Aug-21	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	1.060.000,00	-	-	-	530.000,00	-	-	530.000,00	-	1.565.000,00	2.065.000,00
24	16-Aug-21	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	1.135.200,00	-	-	-	567.600,00	-	-	567.600,00	-	500.000,00	1.737.400,00
25	18-Aug-21	Dinas Pariwisata	-	-	-	1.832.000,00	-	-	-	916.000,00	-	-	916.000,00	-	102.200,00	1.832.000,00
26	18-Aug-21	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	18-Aug-21	Dinas Pariwisata	-	-	-	512.000,00	-	-	-	256.000,00	-	-	256.000,00	-	1.563.860,00	2.163.860,00
28	18-Aug-21	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00	2.622.000,00
29	18-Aug-21	SATPOL PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822.000,00	1.675.100,00
30	18-Aug-21	SATPOL PP	-	-	-	237.500,00	-	-	-	118.750,00	-	-	118.750,00	-	707.800,00	1.167.800,00
31	18-Aug-21	SATPOL PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.000,00	1.167.800,00
32	18-Aug-21	SATPOL PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.500,00	475.000,00
33	19-Aug-21	Dinas Pertanian	-	-	-	1.290.000,00	-	-	-	645.000,00	-	-	645.000,00	-	1.417.800,00	1.667.800,00
34	19-Aug-21	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.937.000,00	2.937.000,00
35	19-Aug-21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Maluku Utara	-	-	-	580.000,00	-	-	-	290.000,00	-	-	290.000,00	-	250.000,00	1.667.800,00
36	19-Aug-21	Kantor Lurah Santiong Kota Ternate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.937.000,00	2.937.000,00
37	19-Aug-21	Kantor Lurah Santiong Kota Ternate Tengah	-	-	-	1.110.000,00	-	-	-	555.000,00	-	-	555.000,00	-	1.000.000,00	1.848.000,00
38	19-Aug-21	Dinas Kebudayaan	-	-	-	9.200.000,00	-	-	-	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00	-	558.000,00	1.848.000,00
39	19-Aug-21	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	20-Aug-21	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538.000,00	-	300.000,00	838.000,00
41	20-Aug-21	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
42	20-Aug-21	Dinas Perhubungan	-	-	-	4.862.331,00	-	-	-	2.431.165,50	-	-	2.431.165,50	-	-	4.862.331,00
43	20-Aug-21	Dinas Perhubungan	-	-	-	4.831.950,00	-	-	-	2.415.975,00	-	-	2.415.975,00	-	500.000,00	3.331.950,00
44	20-Aug-21	Dinas Pertanian	-	-	-	667.800,00	-	-	-	333.900,00	-	-	333.900,00	-	1.000.000,00	1.667.800,00
45	20-Aug-21	SATPOL PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971.329,00	2.971.329,00
46	20-Aug-21	SATPOL PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288.300,00	888.300,00
47	20-Aug-21	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426.287,00	1.926.287,00
48	20-Aug-21	Dinas PUPR	-	-	-	52.250.000,00	-	-	-	26.125.000,00	-	-	26.125.000,00	-	1.050.000,00	53.300.000,00
49	23-Aug-21	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	6.908.952,00	-	-	-	3.454.476,00	-	-	3.454.476,00	-	-	1.447.500,00
50	23-Aug-21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
51	23-Aug-21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.077.500,00	1.227.500,00
52	24-Aug-21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.022.000,00	1.135.500,00
53	24-Aug-21	Baq. Organisasi SETDA	-	-	-	2.080.000,00	-	-	-	1.040.000,00	-	-	1.040.000,00	-	750.000,00	2.830.000,00
54	25-Aug-21	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	593.750,00	-	-	-	296.875,00	-	-	296.875,00	-	-	593.750,00
55	25-Aug-21	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	2.529.000,00	-	-	-	1.264.500,00	-	-	1.264.500,00	-	-	2.529.000,00
56	25-Aug-21	Kantor Kecamatan Moti	-	-	-	1.400.000,00	-	-	-	700.000,00	-	-	700.000,00	-	1.800.000,00	4.058.000,00
57	25-Aug-21	Kantor Kecamatan Moti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.075.000,00	3.075.000,00
58	25-Aug-21	Kantor Kecamatan Moti	-	-	-	3.925.000,00	-	-	-	1.962.500,00	-	-	1.962.500,00	-	-	4.175.000,00
59	26-Aug-21	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	400.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	200.000,00	600.000,00
60	26-Aug-21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	1.179.000,00	-	-	-	589.500,00	-	-	589.500,00	-	150.000,00	1.329.000,00
61	26-Aug-21	Baq. Umum SETDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470.000,00	1.170.000,00
62	26-Aug-21	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	325.000,00
63	26-Aug-21	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	150.000,00	-	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00	-	200.000,00	350.000,00
64	26-Aug-21	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678.750,00
65	26-Aug-21	Kantor Kecamatan Ternate Selatan	-	-	-	2.060.098,00	-	-	-	1.030.049,00	-	-	1.030.049,00	-	250.000,00	2.917.098,00
66	26-Aug-21	Kantor Kecamatan Ternate Tengah	-	-	-	1.886.500,00	-	-	-	943.250,00	-	-	943.250,00	-	400.000,00	4.686.500,00
67	27-Aug-21	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00	350.000,00
68	27-Aug-21	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	600.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	600.000,00
69	27-Aug-21	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	350.000,00	-	-	-	175.000,00	-	-	175.000,00	-	-	350.000,00
70	27-Aug-21	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	400.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	400.000,00
71	27-Aug-21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	2.930.900,00	-	-	-	1.465.450,00	-	-	1.465.450,00	-	-	2.930.900,00
72	27-Aug-21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	14.511.800,00	-	-	-	7.255.900,00	-	-	7.255.900,00	-	-	14.511.800,00
73	27-Aug-21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.800,00	644.800,00
74	27-Aug-21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	20.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	800.000,00	820.000,00
75	27-Aug-21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.648.400,00	2.889.400,00

NO	Tgl Penetapan	Nama Debitur	Nilai Berdasar Umur Piutang					Nilai Piutang	Penyisihan Berdasar Tarif Penyisihan					Pelunasan 2023	Pelunasan 2022	Pelunasan 2021	Jumlah SKTJM (Nilai Pokok) s/d tahun 2023
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	Jumlah Beban Penyisihan (LO/ Penyisihan Piutang (Meraca))		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET					
			( $\leq$ tahun)	(1-2 Tahun)	(> 2 - 5 Tahun)	(> 5 Tahun)			0,0%	10%	50%	100%					
			RP	RP	RP	RP			RP	RP	RP	RP	RP				
76	27-Aug-21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	2.311.400,00	-	2.311.400,00	-	-	1.155.700,00	-	1.155.700,00	-	-	1.302.000,00	3.613.400,00	
77	27-Aug-21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	306.000,00	-	306.000,00	-	-	153.000,00	-	153.000,00	-	-	-	306.000,00	
78	27-Aug-21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	873.000,00	250.000,00	150.000,00	1.273.000,00	
79	30-Aug-21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	20.807.800,00	-	20.807.800,00	-	-	10.403.900,00	-	10.403.900,00	-	500.000,00	2.500.000,00	23.807.800,00	
80	30-Aug-21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	1.492.500,00	-	1.492.500,00	-	-	746.250,00	-	746.250,00	-	1.367.500,00	800.000,00	3.660.000,00	
81	30-Aug-21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	3.425.000,00	-	3.425.000,00	-	-	1.712.500,00	-	1.712.500,00	-	-	1.750.000,00	5.175.000,00	
82	30-Aug-21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	2.471.700,00	-	2.471.700,00	-	-	1.235.850,00	-	1.235.850,00	-	-	-	2.471.700,00	
83	30-Aug-21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.514.000,00	371.000,00	2.885.000,00	
84	30-Aug-21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	-	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-	500.000,00	
85	30-Aug-21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	1.102.000,00	-	1.102.000,00	-	-	551.000,00	-	551.000,00	236.000,00	-	58.000,00	1.387.000,00	
86	30-Aug-21	Dinas PUPR	-	-	14.375.000,00	-	14.375.000,00	-	-	7.187.500,00	-	7.187.500,00	-	625.000,00	-	15.000.000,00	
87	30-Aug-21	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	5.604.000,00	-	5.604.000,00	-	-	2.802.000,00	-	2.802.000,00	-	-	-	5.604.000,00	
88	30-Aug-21	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	-	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-	1.600.000,00	
89	31-Aug-21	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	250.000,00	-	250.000,00	-	-	125.000,00	-	125.000,00	-	-	-	250.000,00	
90	1-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	20.498.500,00	-	20.498.500,00	-	-	10.249.250,00	-	10.249.250,00	-	500.000,00	-	20.998.500,00	
91	1-Sep-21	Kantor Lurah Bastiong Talangame - Ternate Selatan	-	-	561.000,00	-	561.000,00	-	-	280.500,00	-	280.500,00	200.000,00	-	150.000,00	911.000,00	
92	1-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	1.104.167,00	-	1.104.167,00	-	-	552.083,50	-	552.083,50	-	-	-	1.104.167,00	
93	1-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.122.500,00	22.122.500,00	
94	1-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	-	600.000,00	-	600.000,00	-	800.000,00	-	2.000.000,00	
95	2-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	2.500.000,00	800.000,00	4.300.000,00	
96	2-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	8.000.000,00	-	20.000.000,00	
97	2-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	6.900.000,00	-	6.900.000,00	-	-	3.450.000,00	-	3.450.000,00	-	-	500.000,00	7.400.000,00	
98	2-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100.000,00	-	-	6.100.000,00	
99	2-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	1.000.000,00	-	7.000.000,00	
100	2-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100.000,00	-	-	3.100.000,00	
101	2-Sep-21	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	4.020.000,00	-	4.020.000,00	-	-	2.010.000,00	-	2.010.000,00	-	-	-	4.020.000,00	
102	2-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	-	17.500.000,00	-	17.500.000,00	-	-	15.000.000,00	50.000.000,00	
103	2-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496.005,00	-	496.005,00	
104	2-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	14.500.000,00	-	14.500.000,00	-	-	7.250.000,00	-	7.250.000,00	-	1.500.000,00	-	16.000.000,00	
105	2-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	10.090.000,00	-	10.090.000,00	-	-	5.045.000,00	-	5.045.000,00	-	-	-	10.090.000,00	
106	2-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	106.345.000,00	-	106.345.000,00	-	-	53.172.500,00	-	53.172.500,00	-	-	15.000.000,00	121.345.000,00	
107	2-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	85.500,00	-	85.500,00	-	-	42.750,00	-	42.750,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	
108	2-Sep-21	Kantor Kecamatan Ternate Selatan	-	-	1.470.000,00	-	1.470.000,00	-	-	735.000,00	-	735.000,00	-	1.475.500,00	-	1.581.000,00	
109	2-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	1.470.000,00	-	1.470.000,00	-	-	735.000,00	-	735.000,00	-	-	-	1.470.000,00	
110	2-Sep-21	Dinas PUPR	-	-	18.361.000,00	-	18.361.000,00	-	-	9.180.500,00	-	9.180.500,00	-	-	-	18.361.000,00	
111	2-Sep-21	Kantor Kecamatan Moti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300.000,00	5.350.000,00	-	8.650.000,00	
112	2-Sep-21	Bagian BPPJ Sekretariat Daerah Kota Ternate	-	-	375.000,00	-	375.000,00	-	-	187.500,00	-	187.500,00	257.500,00	-	1.600.000,00	2.232.500,00	
113	3-Sep-21	Sekretariat DPRD	-	-	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	-	625.000,00	-	625.000,00	-	2.000.000,00	-	3.250.000,00	
114	6-Sep-21	Kantor Kecamatan Moti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025.000,00	-	-	2.025.000,00	
115	6-Sep-21	Kantor Kecamatan Moti	-	-	2.099.000,00	-	2.099.000,00	-	-	1.049.500,00	-	1.049.500,00	-	450.000,00	-	2.549.000,00	
116	7-Sep-21	Dinas Pendidikan - UPTD Pendidikan Dasar Kec. Batang Dua	-	-	9.546.936,00	-	9.546.936,00	-	-	4.773.468,00	-	4.773.468,00	-	-	-	9.546.936,00	
117	9-Sep-21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	10.858.000,00	-	10.858.000,00	-	-	5.429.000,00	-	5.429.000,00	3.000.000,00	4.800.000,00	2.000.000,00	20.658.000,00	
118	9-Sep-21	Kantor Lurah Bula Kecamatan Ternate Barat	-	-	69.153.915,00	-	69.153.915,00	-	-	34.576.957,50	-	34.576.957,50	-	-	500.000,00	69.653.915,00	
119	9-Sep-21	Kantor Lurah Sulamadaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.690.000,00	-	1.690.000,00	
120	9-Sep-21	Kantor Lurah Tobololo - Ternate Barat	-	-	650.000,00	-	650.000,00	-	-	325.000,00	-	325.000,00	-	-	-	650.000,00	
121	9-Sep-21	Kantor Lurah Loto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	-	-	550.000,00	
122	7-Sep-21	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.022.000,00	400.000,00	-	1.422.000,00	
123	7-Sep-21	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.122.000,00	600.000,00	-	1.722.000,00	
124	7-Sep-21	UPTD Kec. Ternate Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.194.012,00	-	5.194.012,00	
125	9-Sep-21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	2.225.000,00	-	2.225.000,00	-	-	1.112.500,00	-	1.112.500,00	-	-	200.000,00	2.425.000,00	
126	9-Sep-21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.848.000,00	-	-	9.848.000,00	
127	13-Sep-21	Dinas Kebudayaan	-	-	24.310.000,00	-	24.310.000,00	-	-	12.155.000,00	-	12.155.000,00	-	400.000,00	-	24.710.000,00	
128	14-Sep-21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	2.976.200,00	-	2.976.200,00	-	-	1.488.100,00	-	1.488.100,00	-	-	-	2.976.200,00	
129	14-Sep-21	Kantor Lurah Ngade Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.432.000,00	1.000.000,00	495.000,00	3.927.000,00	
130	17-Sep-21	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	-	-	2.007.500,00	-	2.007.500,00	-	-	1.003.750,00	-	1.003.750,00	-	-	1.500.000,00	3.507.500,00	
131	20-Sep-21	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	-	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-	500.000,00	
132	21-Sep-21	Sekretariat Daerah (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)	-	-	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	3.725.000,00	-	3.725.000,00	-	750.000,00	842.500,00	9.042.500,00	
133	21-Sep-21	Kantor Kelurahan Jati Selatan	-	-	934.250,00	-	934.250,00	-	-	467.125,00	-	467.125,00	-	472.000,00	-	1.406.250,00	
134	21-Sep-21	Dinas Pemasdam Kebakaran	-	-	1.519.300,00	-	1.519.300,00	-	-	759.650,00	-	759.650,00	-	-	-	1.519.300,00	
135	21-Sep-21	Bagian Pencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906.250,00	-	200.000,00	1.106.250,00	
136	21-Sep-21	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447.500,00	450.000,00	800.000,00	1.697.500,00	
137	21-Sep-21	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807.750,00	200.000,00	800.000,00	1.807.750,00	
138	21-Sep-21	Sekretariat Daerah	-	-	8.875.000,00	-	8.875.000,00	-	-	4.437.500,00	-	4.437.500,00	-	-	-	8.875.000,00	
139	22-Sep-21	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.990.833,33	1.990.833,33	
140	22-Sep-21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	-	1.600.000,00	-	1.600.000,00	-	-	200.000,00	3.400.000,00	
141	22-Sep-21	Sekretariat Daerah	-	-	6.742.500,00	-	6.742.500,00	-	-	3.371.250,00	-	3.371.250,00	257.500,00	1.500.000,00	142.500,00	8.642.500,00	
142	22-Sep-21	Sekretariat Daerah	-	-	7.650.000,00	-	7.650.000,00	-	-	3.825.000,00	-	3.825.000,00	350.000,00	-	142.500,00	8.142.500,00	
143	22-Sep-21	Sekretariat Daerah	-	-	7.650.000,00	-	7.650.000,00	-	-	3.825.000,00	-	3.825.000,00	-	350.000,00	-	8.000.000,00	
144	22-Sep-21	Sekretariat Daerah	-	-	9.700.000,00	-	9.700.000,00	-	-	4.850.000,00	-	4.850.000,00	-	306.250,00	-	10.006.250,00	
145	22-Sep-21	Sekretariat Daerah	-	-	5.600.000,00	-	5.600.000,00	-	-	2.800.000,00	-	2.800.000,00	700.000,00	1.300.000,00	142.500,00	7.742.500,00	
146	23-Sep-21	Sekretariat Daerah	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	-	250.000,00	-	250.000,00	-	500.000,00	-	1.250.000,00	
147	23-Sep-21	Sekretariat Daerah	-	-	906.250,00	-	906.250,00	-	-	453.125,00	-	453.125,00	-	200.000,00	-	1.106.250,00	





NO	Tgl Penetapan	Nama Debitur	Nilai Berdasar Umur Piutang				Nilai Piutang	Penyisihan Berdasar Tarif Penyisihan					Pelunasan 2023	Pelunasan 2022	Pelunasan 2021	Jumlah SKTJM (Nilai Pokok) s/d tahun 2023
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	Jumlah Beban				
			( $\leq$ tahun)	(1-2 Tahun)	(>2 - 5 Tahun)	(+5 Tahun)		0,0%	10%	50%	100%	Penyisihan (LO)/				
			RP	RP	RP	RP		RP	RP	RP	RP	Penyisihan Piutang (Neraca)				
297	28-Dec-23	Kantor Lurah Toboleu Kec. Temate Utara - Kec. Tte utara - Dishub	18.686.525,00	-	-	-	18.686.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18.686.525,00
298	28-Dec-23	CV. Putra Tegono Berkarya/Koperasi UKM	61.046.200,00	-	-	-	61.046.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	61.046.200,00
299	28-Dec-23	UD. Sukma Jaya/Koperasi UKM	34.720.392,00	-	-	-	34.720.392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	34.720.392,00
300	28-Dec-23	CV. Tiga Putra Arvaquna/Disperindag	30.704.000,00	-	-	-	30.704.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.704.000,00
301	28-Dec-23	CV. Bintang Jaya Konstruksi/Dishub	9.112.154,81	-	-	-	9.112.154,81	-	-	-	-	-	-	-	-	9.112.154,81
<b>JUMLAH</b>			<b>1.625.733.545,57</b>	<b>82.051.471,65</b>	<b>900.337.195,00</b>	<b>185.826.462,00</b>	<b>2.793.948.674,22</b>	-	<b>8.205.147,17</b>	<b>450.168.597,50</b>	<b>185.826.462,00</b>	<b>644.200.206,67</b>	<b>169.818.453,41</b>	<b>161.278.178,33</b>	<b>110.981.154,33</b>	<b>3.236.026.460,29</b>

SALINAN

Tabel Perhitungan Beban dibayar dimuka  
Tahun 2023

No	SKPD	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Tgl Mulai Kontrak	Tgl Akhir Kontrak	Masa Kontrak	Harga Kontrak Per Hari	Lama Kontrak s.d Tahun 2023	Beban Kontrak s.d Tahun 2023	Saldo Akhir
1	DP3A	027/107/DP3A-KT/V/2023,	45.000.000,00	12-May-23	12-May-24	365	123.287,67	233	28.726.027,40	16.273.972,60
2	Setda/Perwakilan Ktr Walikota (Mess)	No.24/2022	275.000.000,00	15-Jul-22	15-Jul-24	730	376.712,33	534	201.164.383,56	73.835.616,44
3	Dinas Sosial	No.900/19.a/II/2023	100.000.000,00	17-Feb-23	17-Feb-24	365	273.972,60	317	86.849.315,07	13.150.684,93
4	Kecamatan Pulau Batang Dua	No.009/SPK-SG/KCBD/II/2023	45.000.000,00	27-Jan-23	27-Jan-24	365	123.287,67	338	41.671.232,88	3.328.767,12
TOTAL			465.000.000,00				897.260,27		358.410.958,90	106.589.041,10

SALINAN



## REKAP UTANG PFK AUDITED TAHUN 2023

URAIAN	SALDO AWAL (Audited)	PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO AKHIR
Utang Taspen	6.771.290,00	58.469.449,00	63.349.768,00	1.890.971,00
Utang luran Jaminan Kesehatan	4.538.452,00	9.353.240.572,00	9.355.982.931,00	1.796.093,00
Utang PPh 21	1.151.217,00	12.211.547.226,00	12.087.949.415,00	124.749.028,00
Utang PPh 22	806.010,00	1.205.375.652,00	1.166.523.786,00	39.657.876,00
Utang PPh 23	1.490.094,00	721.692.640,00	694.437.210,00	28.745.524,00
Utang PPh Ps 4 (2)	-	6.034.989,00	-	6.034.989,00
Utang PPN Pusat	126.807.031,00	22.624.532.471,23	22.375.434.998,23	375.904.504,00
Utang Taperum	-	-	-	-
Utang luran Wajib Pegawai	1.358.766,00	19.298.850.289,00	19.299.662.795,00	546.260,00
Utang luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	185.429,00	1.868.109.919,00	1.868.237.108,00	58.240,00
Utang luran Jaminan Kematian (JKM)	556.364,00	4.797.651,00	5.179.280,00	174.735,00
<b>TOTAL</b>	<b>143.664.653,00</b>	<b>67.352.650.858,23</b>	<b>66.916.757.291,23</b>	<b>579.558.220,00</b>

## RINCIAN UTANG PFK TAHUN 2023

URAIAN	PPKD	DIKNAS DANA BOS	DINKES JKN + BLUD	SEKRETARIAT DAERAH	KECAMATAN TERNATE UTARA	KECAMATAN TERNATE TENGAH
Utang Taspen	1.890.971,00	-	-	-	-	-
Utang luran Jaminan Kesehatan	1.796.093,00	-	-	-	-	-
Utang PPh 21	1.005.149,00	2.204.000,00	120.467.379,00	-	150.000,00	-
Utang PPh 22	-	-	16.695.425,00	181.500,00	5.439.329,00	519.414,00
Utang PPh 23	-	1.500.920,00	6.065.951,00	9.311.653,00	457.496,00	46.440,00
Utang PPh Ps 4 (2)	-	-	440.000,00	-	-	-
Utang PPN Pusat	-	23.712.382,00	131.846.739,00	7.213.923,00	35.753.763,00	4.781.675,00
Utang Taperum	-	-	-	-	-	-
Utang luran Wajib Pegawai	546.260,00	-	-	-	-	-
Utang luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	58.240,00	-	-	-	-	-
Utang luran Jaminan Kematian (JKM)	174.735,00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.471.448,00</b>	<b>27.417.302,00</b>	<b>275.515.494,00</b>	<b>16.707.076,00</b>	<b>41.800.588,00</b>	<b>5.347.529,00</b>

URAIAN	KECAMATAN TERNATE TENGAH	KECAMATAN TERNATE SELATAN	KECAMATAN PULAU TERNATE	KECAMATAN TERNATE MOTI	KECAMATAN PULAU BATANG DUA	TOTAL
Utang Taspen	-	-	-	-	-	1.890.971,00
Utang luran Jaminan Kesehatan	-	-	-	-	-	1.796.093,00
Utang PPh 21	-	-	635.000,00	-	287.500,00	124.749.028,00
Utang PPh 22	519.414,00	8.484.825,00	380.951,00	3.162.051,00	4.794.381,00	39.657.876,00
Utang PPh 23	46.440,00	1.824.746,00	3.812.883,00	3.016.215,00	2.709.220,00	28.745.524,00
Utang PPh Ps 4 (2)	-	-	-	5.594.989,00	-	6.034.989,00
Utang PPN Pusat	4.781.675,00	65.031.300,00	5.296.975,00	66.195.359,00	36.072.388,00	375.904.504,00
Utang Taperum	-	-	-	-	-	-
Utang luran Wajib Pegawai	-	-	-	-	-	546.260,00
Utang luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	-	-	-	-	-	58.240,00
Utang luran Jaminan Kematian (JKM)	-	-	-	-	-	174.735,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.347.529,00</b>	<b>75.340.871,00</b>	<b>10.125.809,00</b>	<b>77.968.614,00</b>	<b>43.863.489,00</b>	<b>579.558.220,00</b>

**DAFTAR RINCIAN HUTANG BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA TERNATE  
PER 31 DESEMBER TAHUN 2023**

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Penambahan RKB MTs Babull Jannah Moya, sesuai SP No: 19/SP/TENDER/PENAMB.RKB/MTs-BABULLJANNAH/DP-KT/2023 Tgl 2 September 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/137a/DISDIK-KT/2023 tgl 21 Desember 2023	Utang Belanja Barang	192.362.803,00
2	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pembangunan Lab. Komputer SD Al Irsyad, sesuai SP No: 11/SP/TENDER/PEMB-R.LABKOM/SD.AL.IRSYAD/DP-KT/2023 tgl 31 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/149a/DISDIK-KT/2023	Utang Belanja Barang	207.918.949,00
3	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Penambahan RKB SD Alkhairat Falajawa II, sesuai SP No: 16/SP/TENDER/PENAMB.RKB/SD-ALKHAIRAT-FJ2/DP-KT/2023 tgl 18 September 2023 dan Berita Acara Pembayaran No: 602.1/152a/DISDIK-KT/2023 tgl 28 Des 2023	Utang Belanja Barang	185.638.259,00
4	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100%n Pembangunan Ruang UKS SD Al Irsyad, sesuai SPK No: 13/SPK/PEMB.R.UKS/SD.AL.IRSYAD/DP-KT/2023 tgl 18 Juli 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/155a/DISDIK-KT/2023	Utang Belanja Barang	43.698.902,00
5	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Area Bermain PAUD Santo Yosep (DAK), sesuai SPK No: 07/SPK/PEMB-AB/PAUD-ST.YOSEP/DP-KT/2023 tgl 17 Juli 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/142a/DISDIK-KT/2023	Utang Belanja Barang	4.421.433,00
6	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Rehab Ruang Guru/Kepsek SD ISLAMIAH2/DP-KT/2023, sesuai SPK No: 15/SPK/DAU/PWS-R.KEPSEK.ISLAMIAH2/DP-KT/2023 tgl 8 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/01a/DISDIK-KT/2023	Utang Belanja Barang	2.000.000,00
7	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan Perpustakaan dan Ruang UKS SD Al Irsyad, sesuai SPK No: 18/SPK/DAK/PWS-PERPUS.UKS.ALIRSYAD/DP-KT/2023 tgl 01 Sept 2023 berita acara pembayaran No: 602.1/02a/PWS/DISDIK-KT/2023	Utang Belanja Barang	6.719.914,00
8	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah SD Islamiyah 2, sesuai SPK No: 18/SPK/REHAB-R.GURU/KEPSEK/SD.ISLAMIAH-2/DP-KT/2023 dan Berita acara pembayaran No: 602.1/145a/DISDIK-KT/2023 tgl 27 desember 2023	Utang Belanja Barang	4.739.529,00
9	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Rehab Jamban SD Al Irsyad Beserta Sanitasinya, sesuai SPK No: 08/SPK/DAK/PWS-JAMBAN.ALIRSYAD/DP-KT/2023 tgl 19 Juli 2023 dan Berita acara pembayaran No: 602.1/24a/PWS/DISDIK-KT/2023	Utang Belanja Barang	2.446.521,00
10	Dinas Pendidikan	Pembayaran 60% Pembangunan Perpustakaan SD Al Irsyad, sesuai SP No: 13/SP/PEMB-PERPUS/SD.AL.IRSYAD/DP-KT/2023 tgl 31 Agst 2023 dan Berita acara pembayaran No: 602.1/153a/DISDIK-KT/2023 tgl 28 Desember 2023	Utang Belanja Barang	69.784.852,00
11	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pembangunan jamban SMP Ulul Albaab, sesuai SP No: 15/SP/TENDER/PEMB-JAMBAN.SAN/SMP.ULULALBAAB/DP-KT/2023 Tgl 31 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/136a/DISDIK-KT/2023	Utang Belanja Barang	10.462.944,00
12	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Teknik Penambahan RKB MI Babullah Loto, MTs babull Jannah dan SD Alkhairat Falajawa 2, sesuai SPK No: 05/SPK/DAU/PWS-RKB.MADRASAH.SD/DP-KT/2023 tgl 3 Oktober 2023 dan Berita Acara Pembayaran No: 602.1/22a/DISDIK-KT	Utang Belanja Barang	18.916.200,00
13	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Penambahan RKB MI Babullah Loto, sesuai SP No: 18/SP/TENDER/PENAB.RKB/MI.BABULLAH-LOTO/DP-KT/2023 tgl 2 Oktober 2023 dan Berita acara pembayaran No: 602.1/149a/DISDIK-KT/2023 tgl 27 Desember 2023	Utang Belanja Barang	175.396.298,00
14	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Rehab Ruang Guru/Kepasek SD Islamiyah 2, sesuai SPK No: 18/SPK/REHAB-R.GURU/KEPSEK/SD.ISLAMIAH-2/DP-KT/2023 tgl 7 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/120a/DISDIK-KT/2023	Utang Belanja Barang	42.655.762,00
15	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pembangunan Lab Komputer SD Al Irsyad, sesuai SPK No: 15/SPK/DAK/PWS-LABKOM.ALIRSYAD/DP-KT/2023 Tgl 1 September 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/05a/Pws/DISDIK-KT/2023	Utang Belanja Barang	6.000.000,00
16	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Teknik Pembangunan Jamban SMP Ulul Albaab Beserta Sanitasinya, sesuai SPK No: 05/SPK/DAK/PWS-JAMBAN.ULULALBAAB/DP-KT/2023 tgl 1 Sept 2023 dan Berita acara pembayaran No: 602.1/21a/PWS/DISDIK-KT/2023	Utang Belanja Barang	4.444.548,00
17	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pambangunan Area Bermain PAUD Pembina 1 (DAK), sesuai SPK No: 08/SPK/PEMB-AB/PAUD-PEMBINA.1/DP-KT/2023 tgl 17 Juli 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/147a/DISDIK-KT/2023	Utang Belanja Barang	3.061.041,00
18	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Teknik Pembangunan Ruang UKS SMPN 10, sesuai SPK No: 04/SPK/DAK/PWS-UKS.SMPN10/DP-KT/2023 tgl 8 September 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/04a/Pws/DISDIK-KT/2023	Utang Belanja Barang	6.041.849,00
19	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Teknik Pemb. Area Bermain PAUD Santo Yosep (DAK), sesuai SPK No: 02/SPK/DAK/PWS-APE.SANTOYOSEP/DP-KT/2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/03a/Pws/DISDIK-KT/2023	Utang Belanja Barang	2.805.000,00
20	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Rehab Jamban SD Al Irsyad, sesuai SPK No: 05/SPK/REHAB-JMB.SD.ALIRSYAD/DP-KT/2023 tgl 27 Juni 2023 dan Berita acara pembayaran No: 602.1/141a/DISDIK-KT/2023 tgl 27 Des 2023	Utang Belanja Barang	6.798.649,00
21	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Ruang UKS SMPN 10 (DAK), sesuai SP No:01/SP/TENDER/PEMB-R.UKS/SMPN-10/DP-KT/2023 tgl 24 Juli 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/158a/DISDIK-KT/2023	Utang Belanja Barang	16.390.320,00
22	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Rehabilitasi Jamban SDN 16, sesuai SPK No:10/SPK/DAU/PWS-JMB.SD.16/DP-KT/2023 tgl 23 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/26a/PWS/DISDIK-KT/2023	Utang Belanja Barang	4.000.000,00
23	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan PEMBANGUNAN PAGAR PAUD TOGAFO	Utang Belanja Barang	4.536.264,00
24	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan PEMBANGUNAN RUANG LAB KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SD AL IRSYAD	Utang Belanja Barang	38.108.624,00
25	Dinas Pendidikan	Pembayaran Langsung Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Dinas Pendidikan Triwulan III Tahap III bagi 2 Guru	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	25.132.200,00
26	Dinas Pendidikan	Pembayaran Langsung Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bulan JUNI s/d JULI 2023 SMP KATOLIK BINTANG LAUT TERNATE Tahun 2023	Utang Belanja Jasa	12.980.000,00

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
27	Dinas Pendidikan	Pembayaran Langsung Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bulan JUNI s/d JULI 2023 SMP IT ALKHAIRAT TERNATE Tahun 2023	Utang Belanja Jasa	5.850.000,00
28	Dinas Pendidikan	Pembayaran Langsung Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bulan JUNI s/d JULI 2023 SD ISLAM INSANTAMA Tahun 2023	Utang Belanja Jasa	6.300.000,00
29	Dinas Pendidikan	Pembayaran Langsung Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bulan JUNI s/d JULI 2023 SD NEGERI 66 KOTA TERNATE Tahun 2023	Utang Belanja Jasa	7.000.000,00
30	Dinas Pendidikan	Pembayaran Langsung Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bulan JUNI s/d JULI 2023 SD NEGERI 42 KOTA TERNATE Tahun 2023	Utang Belanja Jasa	7.500.000,00
31	Dinas Pendidikan	Pembayaran Langsung Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bulan JUNI s/d JULI 2023 SMP LPM BIDO Tahun 2023	Utang Belanja Jasa	2.700.000,00
32	Dinas Pendidikan	Pembayaran Langsung Honorarium Tutor Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket A, B dan C bulan Desember 2023	Utang Belanja Jasa	4.800.000,00
33	Dinas Pendidikan	Pembayaran Langsung Honorarium Pengelola Aset SKB bulan Desember 2023 kegiatan Jasa Tenaga Administrasi Satuan PNF SKB Kota Ternate	Utang Belanja Jasa	350.000,00
34	Dinas Pendidikan	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Dinas Pendidikan Kota Ternate bulan DESEMBER 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	378.460.853,00
35	Dinas Pendidikan	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD Triwulan IV bulan Oktober s/d November 2023 bagi 415 Guru PAUD, SD dan SMP	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN	207.500.000,00
36	Dinas Pendidikan	Pembayaran Langsung Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Dinas Pendidikan Kota Ternate Triwulan IV bagi 765 Guru	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN	9.604.679.200,00
<b>JUMLAH</b>				<b>11.322.600.914,00</b>
1	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pengadaan Obat-Obatan, Sesuai SPK Nomor: 440/2822.A/SPK-OBAT/DINKES/DAU/2023, Tanggal 16 Oktober 2023 dan BAP Nomor: 440/4009.A/BAP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 27 Desember 2023	Utang Belanja Barang	49.972.000,00
2	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pengadaan Obat-Obatan Sesuai SPK Nomor: 440/3263.A/PESANAN-OBAT/DINKES/XI/DAU/2023, Tanggal 24 November 2023 dan BAP Nomor: 440/4006.A/BAP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 27 Desember 2023	Utang Belanja Barang	39.150.810,00
3	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pengadaan Obat-Obatan, Sesuai SPK Nomor: 440/2996.A/SPK-OBAT/DINKES/DAU/2023, Tanggal 30 Oktober 2023 dan BAP Nomor: 440/3894.A/BAP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 21 Desember 2023	Utang Belanja Barang	10.750.000,00
4	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pengadaan BMHP Puskesmas dan UPTD Sesuai SPK Nomor: 440/3031/SPK-BMHP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 01 November 2023 dan BAP Nomor: 440/3413/BAP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 05 Desember 2023	Utang Belanja Barang	300.000.000,00
5	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pengadaan Obat-Obatan Sesuai SPK Nomor: 440/2067.A/SPK-OBAT/DINKES/DAU/2023, Tanggal 07 Agustus 2023 dan BAP Nomor: 440/3415.A/BAP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 05 Desember 2023	Utang Belanja Barang	23.141.550,00
6	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pengadaan BMHP Dinkes, Sesuai SPK Nomor: 440/2800.A/SPK-BMHP PTM/DINKES/BOK/2023, Tanggal 12 Oktober 2023 dan BAP Nomor: 440/3414/BAP/DINKES/BOK/2023, Tanggal 05 Desember 2023	Utang Belanja Barang	286.000.000,00
7	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pengadaan Obat-Obatan, Sesuai SPK Nomor: 440/2048.A/SPK-OBAT/DINKES/DAU/2023, Tanggal 02 Agustus 2023 dan BAP Nomor: 440/3410/BAP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 05 Desember 2023	Utang Belanja Barang	115.404.480,00
8	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pengadaan Obat-Obatan, Sesuai SPK Nomor: 440/2066.A/SPK-OBAT/DINKES/DAU/2023, Tanggal 07 Agustus 2023 dan BAP Nomor: 440/3415/BAP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 05 Desember 2023	Utang Belanja Barang	111.745.000,00
9	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pengadaan Obat-Obatan, Sesuai SPK Nomor: 440/2823.A/SPK-OBAT/DINKES/DAU/2023, Tanggal 16 Oktober 2023 dan BAP Nomor: 440/4004.A/BAP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 27 Desember 2023	Utang Belanja Barang	11.150.000,00
10	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pengadaan BMHP Puskesmas dan UPTD, Sesuai SPK Nomor: 440/2960.A/SPK-BMHP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 25 Oktober 2023 dan BAP Nomor: 440/3403/BAP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 05 Desember 2023	Utang Belanja Barang	124.009.600,00
11	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pengadaan Obat-Obatan, Sesuai SPK Nomor: 440/2994.A/SPK-OBAT/DINKES/DAU/2023, Tanggal 30 Oktober 2023 dan BAP Nomor: 440/3895.A/BAP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 21 Desember 2023	Utang Belanja Barang	49.500.000,00
12	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pengadaan Obat-Obatan, Sesuai SPK Nomor: 440/1305.A/SPK-OBAT/DINKES/DAU/2023, Tanggal 15 Mei 2023 dan BAP Nomor: 440/3038/BAP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 02 November 2023	Utang Belanja Barang	200.165.000,00
13	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pengadaan BMHP DINKES, Sesuai SPK Nomor: 440/2620.A/SPK-BMHP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 29 September 2023 dan BAP Nomor: 440/3467/BAP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 07 Desember 2023 (DAU)	Utang Belanja Barang	35.300.000,00
14	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pengadaan Obat-Obatan, Sesuai SPK Nomor: 440/2997.A/SPK-OBAT/DINKES/DAU/2023, Tanggal 30 Oktober 2023 dan BAP Nomor: 3896.A/BAP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 21 Desember 2023	Utang Belanja Barang	11.623.000,00
15	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pengadaan Obat-Obatan, Sesuai SPK Nomor: 440/2824.A/SPK-OBAT/DINKES/DAU/2023, Tanggal 16 Oktober 2023 dan BAP Nomor: 440/4007.A/BAP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 27 Desember 2023	Utang Belanja Barang	48.550.500,00
16	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pengadaan Obat-Obatan, Sesuai SPK Nomor: 440/2998.A/SPK-OBAT/DINKES/DAU/2023, Tanggal 30 Oktober 2023 dan BAP Nomor: 440/3897.A/BAP/DINKES/DAU/2023, Tanggal 21 Desember 2023	Utang Belanja Barang	9.039.472,00
17	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pengadaan BMHP Dinkes, Sesuai SPK Nomor: 440/2824.A/SPK-BMHP/DINKES/BOK/2023, Tanggal 16 Oktober 2023, dan BAP Nomor: 440/3554/BAP/DINKES/BOK/2023, Tanggal 07 Desember 2023	Utang Belanja Barang	64.840.000,00
18	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung Tagihan Rekening Listrik Puskesmas Gambesi Bulan Oktober S/D November Tahun 2023	Utang Belanja Jasa	6.945.000,00
19	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung Tagihan Rekening Listrik Rumah Sakit Kota Ternate Bulan November Tahun 2023	Utang Belanja Jasa	4.020.000,00

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
20	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung Tagihan Iuran Peserta PBP/PP Kelas III yang Di Daftarkan Oleh Pemerintah Daerah Bulan September Tahun 2023 Sesuai Nomor Surat:1201/X-05/0823 Tanggal 04 September 2023 Dengan Jumlah Peserta 40.047	Utang Belanja Jasa	1.401.680.000,00
21	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung Tagihan Rekening Listrik Puskesmas Kalumata Bulan Oktober S/D Desember Tahun 2023	Utang Belanja Jasa	10.670.000,00
22	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung Tagihan Iuran Peserta PBP/PP Kelas III yang Di Daftarkan Oleh Pemerintah Daerah Bulan September Tahun 2023 Sesuai Nomor Surat:1201/X-05/0823 Tanggal 04 September 2023 Dengan Jumlah Peserta 40.047	Utang Belanja Jasa	112.166.600,00
23	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung Honorarium Jasa Tenaga Supir RSUD Kota ternate Sesuai SK Nomor:440/02.A/SK/DINKES/2023 Tanggal 11 Januari 2023 Dinas Kesehatan Kota Ternate Bulan Agustus S/D Oktober Tahun 2023 an.Adi Radjabessy	Utang Belanja Jasa	3.600.000,00
24	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung Belanja Jasa Non Kapitasi Puskesmas Sulamadaha, BLUD Puskesmas Kalumpang, Puskesmas Perawatan Hiri, Puskesmas Perawatan Moti Dan Puskesmas Siko Tahun 2023	Utang Belanja Jasa	148.125.000,00
25	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung Tagihan Rekening Listrik Puskesmas Jambula Bulan September S/D Oktober Tahun 2023	Utang Belanja Jasa	5.030.000,00
26	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) P3K Dinas Kesehatan Kota Ternate Bulan Desember Tahun 2023 Dengan Jumlah Pegawai 31 Orang	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	73.200.644,00
27	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Dinas Kesehatan Kota Ternate Bulan Desember Tahun 2023 Dengan Jumlah Pegawai 566 Jiwa	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.475.818.840,00
<b>JUMLAH</b>				<b>4.731.597.496,00</b>
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Penyediaan Fotocopy Sub. Bagian Keuangan T.A 2023	Utang Belanja Barang	1.848.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung sesuai Prestasi Kerja Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Lanjutan Gedung Polisi Militer (POM) sesuai Kontrak No: 640/354/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 23-05-2023 dan BAP No: 640/984/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 05-12-2023	Utang Belanja Barang	168.194.160,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin II (Progres 100%) Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Polisi Militer (POM) sesuai Kontrak No: 640/313/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 02-05-2023 ADD No: 640/803/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 17-10-2023 dan BAP No: 640/900/BG/DPUPR	Utang Belanja Barang	701.927.189,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Belanja Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor (Foto Copy) Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan gedung T.A 2023	Utang Belanja Barang	6.929.200,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung MC-02 (100%) Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Lanjutan Kantor Polres Ternate sesuai Kontrak No: 640/418/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 13-06-2023 dan BAP No: 640/1046/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 18-12-2023	Utang Belanja Barang	56.808.800,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung MC 01 + Retensi Pekerjaan Rehab Kantor Polsek Kec. Moti sesuai Kontrak No: 600/4000/DPUPR/KT/2023 TGL. 12-12-2023 dan BAP No: 600/4159/DPUPR/KT/2023 TGL. 22-12-2023	Utang Belanja Barang	199.238.871,48
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Belanja Makan dan Minum Rapat Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah T.A 2023	Utang Belanja Barang	6.240.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Belanja Snack Rapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD T.A 2023	Utang Belanja Barang	612.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin II (Progres 100%) Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Kantor Polres Ternate sesuai Kontrak No: 640/246/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 10-04-2023 ADD No: 640/766/ADD-K/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 06-10-2023 dan BAP No: 640/979.D/BG/DPU	Utang Belanja Barang	1.547.247.827,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung belanja suku cadang alat angkutan darat bermotor spesifikasi ban luar ukuran 750/16 GT operasional mobil tinja T.A 2023	Utang Belanja Barang	3.560.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Belanja Makan dan Minum Rapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD T.A 2023	Utang Belanja Barang	1.920.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Penyediaan Fotocopy Sub. Bagian Umum T.A 2023	Utang Belanja Barang	3.298.952,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Penyediaan Fotocopy Sub. Bagian Perencanaan T.A 2023	Utang Belanja Barang	1.089.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus Pekerjaan Pengadaan Pakaiannya Dinas ASN/PNS sesuai Kontrak No: 600/3007/DPUPR/KT/2023 TGL. 26-10-2023 dan BAP No: 600/3896/DPUPR/KT/2023 TGL. 04-12-2023	Utang Belanja Barang	114.330.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Belanja Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor (Jilid) Keg. Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung T. A 2023	Utang Belanja Barang	900.000,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung T.A 2023	Utang Belanja Barang	5.590.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Kantor POLRES Ternate	Utang Belanja Barang	297.547.658,87
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Polisi Militer (POM)	Utang Belanja Barang	134.985.998,00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Belanja Internet Bulan NOVEMBER & DESEMBER TAHUN 2023	Utang Belanja Jasa	25.485.600,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung sekaligus pekerjaan perencanaan teknis pembangunan asrama ponpes aisyah syarif muslim sesuai kontrak No: 600/3841/DPUPR/KT/2023 TGL. 30-11-2023 dan BAP No: 600/4221A/DPUPR/KT/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.295.605,00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Tahun Anggaran 2023 Tagihan Bulan DESEMBER 2023	Utang Belanja Jasa	4.500.000,00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pagor sesuai Kontrak No: 600/3838/DPUPR/KT/2023 TGL. 30-11-2023 dan BAP No: 600/4230/DPUPR/KT/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.309.480,00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus Pekerjaan Perencanaan Perumahan Jaringan Perpipaan Air Minum Dalam Kota Ternate sesuai Kontrak No: 690/722/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 14-09-2023 dan BAP No: 690/1032.d/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 12-12-2023	Utang Belanja Jasa	244.986.990,00
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Langanan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Bulan MEI s/d DESEMBER T.A 2023	Utang Belanja Jasa	3.120.000,00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung sekaligus pekerjaan perencanaan teknis pembangunan kantor lurah kecamatan ternate utara sesuai kontrak No: 600/3835/DPUPR/KT/2023 TGL. 30-11-2023 dan BAP No: 600/4183A/DPUPR/KT/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.367.200,00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung sekaligus pekerjaan perencanaan teknis pembangunan kantor lurah kecamatan ternate tengah sesuai kontrak No: 600/3832/DPUPR/KT/2023 TGL. 30-11-2023 dan BAP No: 600/4233A/DPUPR/KT/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.478.200,00

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus Pekerjaan Perencanaan Tahap III Kantor Polres Ternate sesuai Kontrak No: 600/3811/DPUPR/KT/2023 TGL. 29-11-2023 dan BAP No: 600/4226/DPUPR/KT/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.586.980,00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus (100%) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan sesuai Kontrak No: 600/4060/DPUPR/KT/2023 TGL. 15-12-2023 dan BAP No: 600/4209/BM/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Belanja Jasa	69.120.608,00
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus (100%) perencanaan teknis talud penahan ombak kawasan kota ternate II sesuai Kontrak No: 600/4063A/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 15-12-2023 dan BAP No: 600/4207A/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.123.000,00
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung sekaligus pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi drainase kawasan kota ternate II sesuai Kontrak No: 600/3997/DPUPR-KT/2023 TGL. 12-12-2023 dan BAP No: 600/4204A/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.250.872,00
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Honorarium Penjaga Kantor (UPTD PALD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 Tagihan Bulan DESEMBER 2023	Utang Belanja Jasa	2.000.000,00
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus (100%) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Paving/Rabat sesuai Kontrak No: 600/4124/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 20-12-2023 dan BAP No: 600/4221/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Belanja Jasa	49.783.500,00
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus (100%) Pekerjaan Perencanaan Teknis Talud Penahan Tanah Kawasan Kota Ternate I sesuai Kontrak No: 600/3866A/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 01-12-2023 dan BAP No: 600/4211A/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.340.560,00
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Honorarium Penjaga Kantor (PUPR) Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 Tagihan bln DESEMBER 2023	Utang Belanja Jasa	8.000.000,00
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus pekerjaan perencanaan teknis pembangunan drainase kawasan kota ternate I sesuai Kontrak No: 600/3868/DPUPR-KT/2023 TGL. 01-12-2023 dan BAP No: 600/4200A/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.451.560,00
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung sekaligus (100%) pekerjaan perencanaan teknis talud penahan ombak kawasan kota ternate I sesuai kontrak No: 600/3880/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 01-12-2023 dan BAP No: 600/4213A/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.340.560,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung sekaligus (100%) pekerjaan jasa konsultasi penyusunan naskah akademik ranperda RTRW kota ternate sesuai kontrak No: 600/3859A/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 01-12-2023 dan BAP No: 600/4234/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.275.070,00
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung sekaligus pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi drainase kawasan kota ternate I sesuai kontrak No: 600/3991/DPUPR-KT/2023 TGL. 12-12-2023 dan BAP No: 600/4202A/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.234.555,00
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Tempat Ibadah sesuai Kontrak No: 600/3859/DPUPR/KT/2023 TGL. 01-12-2023 dan BAP No: 600/4185A/DPUPR/KT/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.622.500,00
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Jasa Iklan Reklame (Jasa Media Online) T.A 2023	Utang Belanja Jasa	13.405.405,00
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung sekaligus (100%) pekerjaan perencanaan teknis talud penahan tanah kawasan kota ternate II sesuai kontrak No: 600/3877/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 01-12-2023 dan BAP No: 600/4209A/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.285.060,00
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus (100%) Pekerjaan Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai Kontrak No: 600/4063/DPUPR/KT/2023 TGL. 15-12-2023 dan BAP No: 600/4207/BM/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Belanja Jasa	69.120.275,00
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung sekaligus pekerjaan perencanaan teknis pembangunan drainase kawasan kota ternate II sesuai kontrak No: 600/3865/DPUPR-KT/2023 TGL. 01-12-2023 dan BAP No: 600/4198A/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.451.560,00
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (FAJAR MALUT) Bulan JANUARI s/d DESEMBER T.A 2023	Utang Belanja Jasa	2.400.000,00
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Honorarium Sopir Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 Tagihan bln DESEMBER 2023	Utang Belanja Jasa	1.200.000,00
46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung sekaligus pekerjaan perencanaan teknis pembangunan kantor lurah kecamatan ternate selatan sesuai kontrak No: 600/3829/DPUPR/KT/2023 TGL. 30-11-2023 dan BAP No: 600/4229A/DPUPR/KT/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.500.400,00
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung sekaligus pekerjaan perencanaan teknis pembangunan gedung belajar ponpes aisyah syarif muslim sesuai kontrak No: 600/3844/DPUPR/KT/2023 TGL. 30-11-2023 dan BAP No: 600/4225A/DPUPR/KT/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.295.605,00
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Pajak Kendaraan roda 4	Utang Belanja Jasa	3.093.680,00
49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran langsung sekaligus pekerjaan perencanaan teknis normalisasi kali mati/barangka kec. batang dua sesuai kontrak No: 600/3873/DPUPR-KT/2023 TGL. 01-12-2023 dan BAP No: 600/4196A/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Belanja Jasa	99.157.410,00
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Belanja Internet Bulan OKTOBER TAHUN 2023	Utang Belanja Jasa	4.247.600,00
51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Pemeliharaan Kendaraan Roda 6	Utang Belanja Pemeliharaan	58.228.314,00
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (Pembuatan Pojok Rempah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate T. A 2023)	Utang Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00
53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan DESEMBER 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	194.896.390,00
<b>JUMLAH</b>				<b>5.814.222.195,35</b>
1	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atas Kegiatan Penatausahaan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus Bulan Nopember 2023	Utang Belanja Jasa	1.300.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli #Honor Fasilitator DAK Perumahan Bulan Desember 2023 atas Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Utang Belanja Jasa	15.300.000,00
3	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Pembayaran Belanja jasa Tenaga Ahli #Tenaga Ahli Penilai Tanah Pengadaan Tanah untuk Lokasi Kediaman Ex. Gubernur Kelurahan Kalumpang sesuai SPK Nomor : 593/004/SPK/DPRKPP/2023 Tanggal 05 Desember 2023 dan BAP 100% Nomor : 653/005/KJPP-PT/BA-PT/DPRKP	Utang Belanja Jasa	14.570.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Kegiatan Penatausahaan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus Bulan Desember 2023 a/n. Idham Wahid, ST dkk	Utang Belanja Jasa	4.800.000,00

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
5	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Belanja jasa Tenaga Ahli #Tenaga Ahli Penilai Tanah Pengadaan Tanah untuk Lokasi Akses Masuk Pasar Ternak Kelurahan Sulamadaha sesuai SPK Nomor : 593/003/SPK/DISPERKIMTAN/2023 Tanggal 05 Desember 2023 dan BAP 100% Nomor : 653/06/KJPP-PT/BA	Utang Belanja Jasa	35.800.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan untuk Bulan Desember 2023 atas Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Utang Belanja Jasa	3.000.000,00
7	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli #Honor Fasilitas DAK Perumahan Bulan Nopember 2023 atas Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Utang Belanja Jasa	15.300.000,00
8	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan untuk Bulan Desember 2023 atas Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Utang Belanja Jasa	2.000.000,00
9	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum atas Kegiatan Penatausahaan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus Bulan Nopember 2023 a/n. Idham Wahid, ST dkk	Utang Belanja Jasa	4.800.000,00
11	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rusunawa untuk Bulan Desember 2023 atas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Utang Belanja Jasa	7.500.000,00
13	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atas Kegiatan Penatausahaan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus Bulan Desember 2023	Utang Belanja Jasa	1.300.000,00
14	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Belanja jasa Tenaga Ahli #Tenaga Ahli Penilai Tanah Pengadaan Tanah untuk Lokasi Pekuburan Warga Kelurahan Bido dan Lokasi SMP Negeri 8 Kelurahan Mayau Kec. Batang Dua sesuai SPK Nomor : 001/SPK/KPA-DISPERKIMTAN/2023 Tanggal 01 Desember 20	Utang Belanja Jasa	70.000.000,00
15	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rusunawa untuk Bulan Nopember 2023 atas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Utang Belanja Jasa	7.500.000,00
16	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Utang Belanja Jasa	11.460.000,00
17	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Belanja jasa Tenaga Ahli #Tenaga Ahli Penilai Tanah Pengadaan Tanah untuk Lokasi kantor Lurah Maliao, Kantor Bapeliabangsa Kota Ternate dan Kantor Camat Pulau Ternate sesuai SPK Nomor : 002/SPK/KPA-DISPERKIMTAN/2023 Tanggal 01 Desember 2023	Utang Belanja Jasa	73.952.000,00
20	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rusunawa untuk Bulan Desember 2023 atas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Utang Belanja Jasa	7.000.000,00
21	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir untuk Bulan Desember 2023 atas Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Utang Belanja Jasa	1.200.000,00
24	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rusunawa untuk Bulan Nopember 2023 atas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Utang Belanja Jasa	7.000.000,00
22	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	113.949.488,00
12	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan untuk Bulan Desember 2023 atas Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.500.000,00
19	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Belanja Jasa Pengelola BMD Yang Menghasilkan Pendapatan #Honorarium Pengurus Barang Inventaris untuk Bulan Desember 2023 atas Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>409.731.488,00</b>
1	Dinas Kebakaran	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Atas Beban Kerja PNS / TPP Bulan Desember 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	104.321.509,00
2	Dinas Kebakaran	Pembayaran langsung Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas-Dexalite dan Pertamina Bulan Oktober - Desember 2023	Utang Belanja Barang	28.313.300,00
3	Dinas Kebakaran	Pembayaran Langsung Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Belanja Uang Lembur Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Uang Makan Lembur Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun 2023	Utang Belanja Jasa	26.200.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>158.834.809,00</b>
1	Satuan Polisi Pamong Praja	Belanja langsung Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS (TPP) untuk bulan Desember Tahun 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	128.144.539,00
<b>JUMLAH</b>				<b>128.144.539,00</b>
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembayaran Langsung (LS) Belanja TTP Bulan Desember Tahun 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	88.743.303,00
<b>JUMLAH</b>				<b>88.743.303,00</b>
1	Dinas Sosial	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember pada Dinas Sosial Kota Ternate Tahun Anggaran 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	115.376.228,00
2	Dinas Sosial	Pembayaran Langsung Penyediaan Bahan Logistik Kantor Belanja Makanan dan Minuman Rapat T.A 2023	Utang Belanja Barang	6.000.000,00
3	Dinas Sosial	Pembayaran Langsung Pembayaran Sekaligus Rehab Rumah Singgah sesuai Surat Perjanjian Nomor : 000.7.2.7/479/XI/DINSOS-KT/2023 Tanggal 22 Nov 2023 sesuai BAP Nomor : 400.9/453/XI/DINSOS-KT/2023 Tanggal 7 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023	Utang Belanja Pemeliharaan	100.197.048,00
<b>JUMLAH</b>				<b>221.573.276,00</b>
1	Dinas Tenaga Kerja	Pembayaran Langsung Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja (TPP) Bulan Desember 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	86.087.611,00
2	Dinas Tenaga Kerja	Belanja Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai Surat Penawaran Kerja Sama Penyebaran Informasi No. 077/CHMR-HR/I/2023 tanggal 25 Januari 2023	Utang Belanja Jasa	30.000.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>116.087.611,00</b>
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembayaran Langsung Belanja Honorarium Tambahan Penghasilan Pegawai DP3A Kota Ternate Bulan Desember Tahun Anggaran 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	108.864.123,00
<b>JUMLAH</b>				<b>108.864.123,00</b>
1	Dinas Ketahanan Pangan	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja (TPP) bulan Desember 2023 bagi 31 Pegawai	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	102.881.636,00
<b>JUMLAH</b>				<b>102.881.636,00</b>
1	Dinas Lingkungan Hidup	Pembayaran Retensi 5% Atas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (Poros Drainase)1(satu) paket (Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-bangunan gedung kantor) sesuai SPK No:027/215/SPK/DP/DLH-KT/2023 tgl 19/10/2023 dan BAP No:981	Utang Belanja Pemeliharaan	3.738.746,98
2	Dinas Lingkungan Hidup	Pembayaran Retensi 5% Atas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan gedung tempat kerja (Pemeliharaan Landmark) 1(satu) Paket (Belanja Pemeliharaan Bangunan gedung) sesuai Surat Perintah Kerja No:027/217/SPK/RTH/DLH-KT/2023 tgl 20/10/2023 dan BAP No:981/15	Utang Belanja Pemeliharaan	4.129.150,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Distabilitas 1(satu) Paket (blj pemeliharaan bangunan gdn-g- Bangunan gdn-g ktr) sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) No:027/334/SPK/PSPD/DLH-KT/2023 tgl 26/11/2023 dan BAP No:981/141/DLH-KT/2023	Utang Belanja Pemeliharaan	49.692.717,38

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
6	Dinas Lingkungan Hidup	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN -TPP bulan Desember 2023 an. Mahmud Kausaha,SE cs	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	176.074.021,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan penyusunan Dokumen Amdal dan RKL-RPL Kegiatan Reklamasi Fitu,Sasa,Gambesi (Blj jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak lain) sesuai Surat Perjanjian (Kontak Swakelola) Nomor:027/03/AMDAL/DLH-KT/2023 tgl 03/04/2023	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	270.000.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>503.634.635,36</b>
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (TPP) Bulan Desember Tahun 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	91.777.953,00
<b>JUMLAH</b>				<b>91.777.953,00</b>
1	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	Pembayaran langsung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Desember 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	88.465.987,00
<b>JUMLAH</b>				<b>88.465.987,00</b>
1	Dinas Perhubungan	Pembayaran Langsung Belanja Honorarium Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (TPP) Bulan Desember Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Tahun 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	159.195.657,00
<b>JUMLAH</b>				<b>159.195.657,00</b>
1	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Pembayaran Langsung atas Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember 2023 Bagi ASN Dinas Kominfosandi Ternate	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	77.251.424,00
<b>JUMLAH</b>				<b>77.251.424,00</b>
1	Dinas Koperasi dan UKM	Belanja Langsung Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember 2023 Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	112.644.184,00
<b>JUMLAH</b>				<b>112.644.184,00</b>
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembayaran Langsung Belanja Honorarium atau Pendamping (Honorarium Pendamping OSS/LKPM) Bulan Oktober s/d Desember 2023	Utang Belanja Jasa	7.200.000,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembayaran Langsung Belanja Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website DPMPSTP Bulan Desember Tahun 2023	Utang Belanja Jasa	3.310.000,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembayaran Langsung Belanja Honorarium Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Pramubakti) DPMPSTP Bulan Desember 2023	Utang Belanja Jasa	750.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembayaran Langsung Belanja Makan Minum Rapat Evaluasi Penyelesaian Masalah dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023 (DAK)	Utang Belanja Barang	3.024.000,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembayaran Langsung Belanja Makan Minum Rapat Evaluasi Penyelesaian Masalah dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023 (DAK)	Utang Belanja Barang	3.024.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembayaran Langsung Belanja Honorarium Satgas Peningkatan Maturitas SPIP DPMPSTP Bulan Desember 2023	Utang Belanja Jasa	2.950.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembayaran Langsung Belanja Jasa Tenaga Supir DPMPSTP Bulan Desember 2023	Utang Belanja Jasa	1.200.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembayaran Langsung Belanja Honorarium Tenaga Administrasi (Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum) DPMPSTP Bulan Desember 2023	Utang Belanja Jasa	1.750.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembayaran Langsung Belanja Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan (Petugas Kebersihan Kantor) DPMPSTP Bulan Desember 2023	Utang Belanja Jasa	3.000.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembayaran Langsung Belanja Honorarium Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Petugas Loket Pelayanan OSS) DPMPSTP Bulan Desember 2023	Utang Belanja Jasa	4.225.000,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembayaran Langsung Belanja Biaya Jasa Pemeliharaan Komputer, Peralatan Komputer, Peralatan Jaringan (Pemeliharaan Website) Bulan Agustus s/d Desember Tahun 2023	Utang Belanja Pemeliharaan	6.250.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembayaran Langsung Belanja Biaya Jasa Pemeliharaan Komputer, Peralatan Komputer, Peralatan Jaringan (Pemeliharaan Jaringan Internet) Bulan Agustus s/d Desember Tahun 2023	Utang Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembayaran Langsung Belanja Biaya Jasa Pemeliharaan Komputer, Peralatan Komputer, Peralatan Jaringan (Pemeliharaan Aplikasi/Perbaikan dan Penyempurnaan Aplikasi) Bulan Agustus s/d Desember Tahun 2023	Utang Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember 2023 Bagi 30 Pegawai ASN DPMPSTP	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	104.064.757,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembayaran Langsung Belanja Jasa Pengelola BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan (Honorarium Pengurus Barang) DPMPSTP Bulan Desember 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>160.247.757,00</b>
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Langsung Perlengkapan Pendukung Olahraga (Matras) Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Utang Belanja Barang	12.960.000,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Langsung Pengadaan Pakaian Olahraga Fasilitas Cabang-cabang Olahraga sesuai SP : 800/198/Dispors-KT/2023 tgl 26 Oktober 2023 dan BAP : 900/198/BAP/DISPORA-KT/2023 tgl. 20 November 2023	Utang Belanja Barang	120.750.000,00
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pengadaan Perlengkapan Pendukung Olahraga sesuai SP : 800/197/Dispors-KT/2023 tgl. 26 Oktober dan BAP : 900/197/BAP/DISPORA-KT/2023 tgl. 20 November 2023	Utang Belanja Barang	179.187.500,00
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	HIBAH HMI	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Langsung Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Sewa Sekretariat Organisasi Kepemudaan Komunitas LXSECOND ) Keg. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota Tahun 2023	Utang Belanja Jasa	20.000.000,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Media Online Rakyatmu.com) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023	Utang Belanja Jasa	10.000.000,00
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pembayaran Lansung 100% Rehabilitasi Kantor sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Sesuai SPK 027/D.KT/SPK/PB.07/VII/2023 tgl. 3 Juli 2023 dan BAP 900/BAP/324/DIPO-KT/2023 tgl. 3 Oktober 2023	Utang Belanja Pemeliharaan	72.363.000,00
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (DISPORA) Bulan Desember Tahun 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	107.102.471,00
<b>JUMLAH</b>				<b>572.362.971,00</b>
1	Dinas Kebudayaan	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada Dinas Kebudayaan Kota Ternate Bulan DESEMBER 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	110.375.500,00
<b>JUMLAH</b>				<b>110.375.500,00</b>
1	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Pembayaran langsung belanja alat komputer dan rumah tangga (belanja servis komputer)	Utang Belanja Pemeliharaan	5.520.000,00
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Pembayaran Langsung (LS) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember Tahun 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	84.875.517,00
3	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Pembayaran Langsung Belanja Tambah Daya Listrik	Utang Belanja Jasa	29.000.415,00
<b>JUMLAH</b>				<b>119.395.932,00</b>

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pembayaran Sekaligus 100% Pekerjaan Pengawasan Jalan Produksi sesuai SPK Nomor : 523/DKP-KT/1082/VII/2023 Tanggal, 20Juli 2023 dan BAP Nomor : 523/DKP-KT/2148/2023 Tanggal 22 Desember 2023	Utang Belanja Barang	74.858.400,00
2	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	138.059.948,00
<b>JUMLAH</b>				<b>212.918.348,00</b>
1	Dinas Pariwisata	Pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja Pegawai Berdasarkan Beban Kerja (TPP) Bulan Desember pada Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	123.000.028,00
2	Dinas Pariwisata	Belanja Rehabilitasi Gedung Dive Center pada Kegiatan Pengadaan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Sesuai BAP No 556/229/BAP.RHB-DIVE.CT/DISPAR-KT/2023	Utang Belanja Pemeliharaan	49.742.289,00
<b>JUMLAH</b>				<b>172.742.317,00</b>
1	Dinas Pertanian	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Dinas Pertanian Kota Ternate Untuk Bulan Desember 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	268.266.385,00
<b>JUMLAH</b>				<b>268.266.385,00</b>
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pembayaran Langsung 100% atas Belanja Pengadaan Tenda Pelaku UMKM Kuliner sesuai Kontrak No.027/DPP-KT/SP.E/PB.19/VIII/2023. Tgl 24 Agustus 2023 dan BAP No. 900/12/BAP/PERINDAG/XII/2023. Tgl 01 Desember 2023	Utang Belanja Barang	358.610.000,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pembayaran Langsung 100% Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Pengadaan Jaringan Listrik dan Lampu Dekorasi Jalan sesuai SPK No. 027/DPP-KT/SPK/PB.43/XI/2023 Tgl.23-11-2023 dan BAP No. 900/15/BAP/PERINDAG/XII/2023 Tgl.19-12-2023	Utang Belanja Barang	99.487.080,00
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	179.856.862,00
<b>JUMLAH</b>				<b>637.953.942,00</b>
1	Sekretariat Daerah	Pembayaran Langsung Belanja BBM Walikota Dan Sekretariat Daerah Bulan November 2023, Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Utang Belanja Barang	38.638.000,00
2	Sekretariat Daerah	Pembayaran Langsung Belanja Hibah Kepada Masjid Al-Asry. Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.000.000,00
3	Sekretariat Daerah	Pembayaran Langsung Belanja Hibah Kepada Masjid Awwaluddin Kel. Faudu, Kec. Pulau Hiri. Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	40.000.000,00
4	Sekretariat Daerah	Pembayaran Langsung Belanja Embarkasi / Debarkasi, Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.000.000,00
5	Sekretariat Daerah	Pembayaran Langsung Belanja Hibah Kepada Gereja Protestan Maluku (GPM - Mayau ), Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.000.000,00
6	Sekretariat Daerah	Pembayaran Langsung Belanja Langganan Surat Kabar Majalah, Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Utang Belanja Jasa	14.700.000,00
7	Sekretariat Daerah	Pembayaran Langsung Belanja Tagihan Listrik Taman Nukila Dan Tagihan Listrik Area Kantor Walikota, Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Utang Belanja Jasa	16.557.752,00
8	Sekretariat Daerah	Pembayaran Langsung Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Untuk Belanja TTP Bulan Desember 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	432.711.473,00
<b>JUMLAH</b>				<b>627.607.225,00</b>
1	Sekretariat DPRD	Pembayaran Langsung Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pada Sekretariat DPRD Kota Ternate, Sesuai Nota Pesan No. 027/S-DPRD.KT/SP.E/PB.71/XI/2023 Tgl. 10 November 2023	Utang Belanja Barang	55.912.000,00
2	Sekretariat DPRD	Pembayaran Langsung Atas Belanja Tunjangan Reses Masa Persidangan III Anggota DPRD Kota Ternate Bulan Desember 2023	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	315.000.000,00
3	Sekretariat DPRD	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember Tahun 2023 Bagi ASN Sekertariat DPRD Kota Ternate.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	115.807.378,00
<b>JUMLAH</b>				<b>486.719.378,00</b>
1	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pembayaran TPP Bulan Desember 2023 pada Unit Bappelitbangda Kota Ternate	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	108.676.069,00
<b>JUMLAH</b>				<b>108.676.069,00</b>
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rekonstruksi/Bangunan Talud Pengaman Pantai/Penahan Ombak Kel. Rua (Pantai Ake Rica)	Utang Belanja Tidak Terduga	137.239.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pembangunan Talud Pengaman Kali/Penahan Banjir Kel. Kampung Makasar Barat (Link. Pekuburan Islam)	Utang Belanja Tidak Terduga	220.165.300,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rehabilitasi/Perbaikan Talud Pengaman Pantai/Penahan Ombak Kel. Tafamutu	Utang Belanja Tidak Terduga	214.230.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pembangunan Talud Pengaman Kali/Penahan Banjir Kel. Salahuddin (Bak Air Pdam)	Utang Belanja Tidak Terduga	148.263.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Retensi Atas Rekonstruksi/Bangun Kembali Talud Pengaman Tebing Kel. Marikuru	Utang Belanja Tidak Terduga	20.250.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanganan Darurat Kejadian Luar Biasa Campak	Utang Belanja Tidak Terduga	80.000.000,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pembayaran Langsung Belanja Honorarium Tambahan Penghasilan Pegawai BPKAD Bulan Desember Tahun Anggaran 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	165.208.037,00
<b>JUMLAH</b>				<b>985.355.337,00</b>
1	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Pembayaran Langsung (LS) Bayar Biaya Belanja Jasa Penerima Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Triwulan IV. T.A 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.009.848.164,00
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Pembayaran Langsung (LS) Bayar Biaya Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember Pada Badan Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	188.259.477,00
<b>JUMLAH</b>				<b>1.198.107.641,00</b>
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember Tahun 2023 BKPSDMD Kota Ternate an. Samin Marsaoly, S.STP Dan Staf Bagi 53 Pegawai	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	154.525.935,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Pembayaran Langsung Tagihan Internet Bulan Desember Tahun 2023 Kegiatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Kota Ternate	Utang Belanja Jasa	32.978.988,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Pembayaran Langsung Belanja Konversi Aplikasi ke Sistem Android Sesuai SPK Nomor: 800/2996.a/BKPSDMD-KT/IV/2023 Tanggal 13 Juni 2023 dan BAP Nomor: 900/5710/BKPSDMD-KT/2023 tanggal 18 Desember 2023 (CV. Netsoft IT Solution)	Utang Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>232.504.923,00</b>
1	Inspektorat	Pembayaran langsung Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2023 An. Sarwa Ibrahim, S.E - dkk	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	174.467.217,00
<b>JUMLAH</b>				<b>174.467.217,00</b>



No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Kecamatan Ternate Utara	Pembayaran Atas Pekerjaan Lanjutan Lantai 2 Kantor Lurah Sangaji Sesuai SPK Nomor :027/16/KCTU/2023 Tanggal 21 November 2023 dan BAP Nomor : 981/28/KCTU/2023 Tanggal 12 Desember 2023	Utang Belanja Pemeliharaan	52.248.014,00
2	Kecamatan Ternate Utara	Pembayaran Retensi 5% Atas Pekerjaan Lanjutan Lantai 2 Kantor Lurah Sangaji Sesuai SPK Nomor :027/16/KCTU/2023 Tanggal 21 November 2023 dan BAP Nomor : 981/32/KCTU/2023 Tanggal 15 Desember 2023	Utang Belanja Pemeliharaan	2.749.895,00
3	Kecamatan Ternate Utara	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kecamatan Kota Ternate Utara Bulan Desember Tahun 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	285.128.891,00
<b>JUMLAH</b>				<b>340.126.800,00</b>
1	Kecamatan Ternate Tengah	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	Utang Belanja Barang	8.214.748,00
2	Kecamatan Ternate Tengah	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas atas Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Utang Belanja Barang	4.221.600,00
3	Kecamatan Ternate Tengah	Tagihan Belanja Langsung Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Utang Belanja Barang	5.379.770,00
4	Kecamatan Ternate Tengah	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Pada Kantor Triw. IV Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2023	Utang Belanja Barang	75.315.320,00
5	Kecamatan Ternate Tengah	Tagihan Belanja langsung Pembayaran Pajak,Bea dan Perizinan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Utang Belanja Jasa	5.000.000,00
6	Kecamatan Ternate Tengah	Tagihan Belanja Langsung Pembayaran Honorarium Petugas dan Koordinator Kebersihan/Satgas Sampah Bulan Desember 2023	Utang Belanja Jasa	88.500.000,00
7	Kecamatan Ternate Tengah	Belanja Langsung 100% Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	Utang Belanja Pemeliharaan	119.670.625,00
8	Kecamatan Ternate Tengah	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember Tahun 2023 Bagi ASN Kec Ternate Tengah Kota Ternate	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	329.956.926,00
<b>JUMLAH</b>				<b>636.258.989,00</b>
1	Kecamatan Ternate Selatan	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2023, Bagi 150 ASN Kecamatan Ternate Selatan	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	346.320.240,00
<b>JUMLAH</b>				<b>346.320.240,00</b>
1	Kecamatan Pulau Ternate	Pembayaran Langsung Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP ) Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	124.048.688,00
<b>JUMLAH</b>				<b>124.048.688,00</b>
1	Kecamatan Ternate Barat	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Pegawai TPP Bulan Desember 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	123.921.966,00
<b>JUMLAH</b>				<b>123.921.966,00</b>
1	Kecamatan Pulau Hiri	Pembayaran Langsung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember untuk Pegawai Kecamatan Pulau Hiri Tahun Anggaran 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	72.877.170,00
<b>JUMLAH</b>				<b>72.877.170,00</b>
1	Kecamatan Moti	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember Th. 2023 Kecamatan Pulau Moti	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	102.573.424,00
<b>JUMLAH</b>				<b>102.573.424,00</b>
1	Kecamatan Pulau Batang Dua	Pembayaran Langsung Tunjangan Tambahan Penghasilan ( TPP ) ASN Bulan Desember Pada Kantor Kec Pulau Batang Dua T.A 2023	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	92.494.703,00
<b>JUMLAH</b>				<b>92.494.703,00</b>
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembayaran Langsung Belanja Dana Hiba PILKADA Tahun 2024, Tahun Anggaran 2023	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.000.000.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembayaran Langsung Dana Hiba FKUB (FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA)	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	75.000.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembayaran Langsung Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (TPP) Bulan Desember Tahun 2023 untuk, 33 Pegawai Badan Kesbangpol Kota Ternate	Hukum Indonesia	111.305.255,00
<b>JUMLAH</b>				<b>1.186.305.255,00</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN UTANG BELANJA</b>				<b>33.328.879.407,71</b>

**DAFTAR RINCIAN HUTANG PENGADAAN ASET TETAP PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA TERNATE  
PER 31 DESEMBER TAHUN 2023**

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengadaan Mebel SD Negeri 2, sesuai SP No: 05/DAU/SP-EP/PENG-MBL/SDN.2/DP-KT/2023 Tgl 2 Agustus 2023 dan Berita Acara Pembayaran No: 602.1/77a/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	199.700.000,00
2	Dinas Pendidikan	Pembayaran Langsung Pembangunan Pagar SMP 12, sesuai SPK No: 15/SPK/PEMB-PGR/SMP.12/DP-KT/2023 Tgl 1 Agst 2023 dan Berita Acara Pembayaran No: 602.1/102a/DISDIK-KT/2023 Tgl 4 Desember 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	134.909.900,00
3	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Teknik Rehabilitasi Gedung Kantor Diknas, sesuai SPK No:01/SPK/DAU/PWS--KANTOR.DISDIK/DP-KT/2023 tgl 7 November 2023 dan Berita acara pembayaran No 602.1/016a/Pws/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.509.213,00
4	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Rehab Sedang/Berat SDN 67, sesuai SPK No: 28/SPK/REHAB-SDN.67/DP-KT/2023 tgl 25 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/146a/DISDIK-KT/2023 tgl 27 Desember 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.117.570,00
5	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Teknik Pembangunan Pagar SDN 64 dan SDN 83, sesuai SPK No: 06/SPK/DAU/PWS.PGR.SD/DP-KT/2023 tgl 20 Sept 2023 dan Berita Acara Pembayaran No: 602.1/023a/Pws/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.400.000,00
6	Dinas Pendidikan	Pembayaran Pembangunan AREA Bermain dan UKS PAUD Pembina 1, sesuai SPK No: 01/SPK/DAK/PWS.APE.UKS.PEMBINA1/DP-KT/2023 tgl 19 Juli 2023 dan Berita acara pembayaran No: 602.1/07a/Pws/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.505.943,00
7	Dinas Pendidikan	TAGIHAN Pembayaran 100% Pengawasan Teknik Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 2, sesuai SPK No: 03/SPK/DAU/SWS-RKB.SD2/DP-KT/2023 tgl 7 September 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	27.626.210,00
8	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 73, sesuai SPK No:03/SP/TENDER/PEMB-R.Labkom/SDN-73/DP-KT/2023 tgl 24 Juli 2023 dan Berita acara pembayaran No: 602.1/144a/DISDIK-KT/2023 tgl 27 Des 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	15.949.799,00
9	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Perpustakaan SDN 71, sesuai SP No: 10/SP/TENDER/PEMB-PERPUS/SDN-71/DP-KT/2023 tgl 7 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/138a/DISDIK-KT/2023 Tgl 21 Desember 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	12.730.641,00
10	Dinas Pendidikan	Pembayaran Langsung 100% Pekerjaan Rehab Jamban SD Negeri 73 Beserta Sanitasinya, sesuai Kontrak No.12/SPK/REHAB-JMB/SDN-73/DP-KT/2023 tanggal 18 Juli dan BAP no 602.1/126a/Disdik KT/2023 tanggal 18 Desember 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	61.460.639,00
11	Dinas Pendidikan	TAGIHAN Pembayaran 100% Pengadaan Perabot Ruang Lab Komputer SDN 71, sesuai NP No: 003/NP/PENG-MOB/LAB-KOM/DP-KT/2023 tgl 18 Juli 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	21.584.000,00
12	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Belanja Modal Peralatan Studio Audio, Cetak dan Komputer sesuai NP No:06.A/DAU/SP-EP/PRLT-SACK/DP-KT/2023 tgl 8 September 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.440.000,00
13	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Rehab Ruang Perpustakaan SDN 73, sesuai SPK No: 11/SPK/REHAB-PERPUS/SDN-73/DP-KT/2023 tgl 18 Juli 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/134a/DISDIK-KT/2023 Tgl 18 Desember 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.203.317,00
14	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan Pagar PAUD Togafo, sesuai SPK No: 14/SPK/DAU/PWS-PGR.PAUD.TOGAFO/DP-KT/2023 tgl 27 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/31a/PWS/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.000.000,00
15	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 73, sesuai SPK No: 10/SPK/DAK/PWS-RKB.SD73/DP-KT/2023 tgl 8 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No:06a/PWS/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.216.771,00
16	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pembangunan Pagar PAUD Pembina 8, sesuai SPK No: 23/SPK/PMB-PGR/PAUD.PEMBINA-8/DP-KT/2023 tgl 22 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/133a/DIDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	40.860.487,00
17	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Teknik Rehab Sedang/Berat SDN 37 dan SDN 64 (DAU), sesuai SPK No:07/SPK/DAU/PWS-REHAB.RKB.SD/DP-KT/2023 tgl 19 Juli 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/10a/Pws/DISDIK-KT/2023 tgl 28 Desember 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.400.000,00
18	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pembangunan Pagar SD Negeri 64, sesuai SPK No: 20/SPK/PMB-PGR/SDN-64/DP-KT/2023 tgl 22 Agustus 2023 dan Berita acara pembayaran No: 602.1/123a/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	74.566.007,00
19	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD Pulau Temate, sesuai SP No: 17/SP/TENDER/REHABKTR/UPTD.PULAU/DP-KT/2023 tgl 18 september 2023 Berita acara pembayaran No: 602.1/148a/DISDIK-KT/2023 tgl 27 Des 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	12.965.627,00
20	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pembangunan Pagar PAUD Pembina 7, sesuai SPK No: 22/SPK/PEMB-PGR/PAUD.PEMBINA.7/DP-KT/2023 tgl 22 Agustus 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/128a/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	32.363.299,00
21	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Ruang UKS SDN 71, sesuai SPK No: 09/SPK/PEMB-R.UKS/SDN-71/DP-KT/2023 tgl 17 Juli 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/156/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.896.450,00
22	Dinas Pendidikan	Pembayaran Langsung 100% Pembangunan Pagar SMP Negeri 15, sesuai SPK No:16/SPK/PEMB-PGR/SMP.15/DP-KT/2023 Tgl 1 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No 602.1/103a/DISDIK-KT/2023 Tgl 4 Desember 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	178.456.216,00
23	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Teknik Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 24, sesuai SPK No: 04/SPK/DAU/SWS-RKB.SDN24/DP-KT/2023 tgl 7 september 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/a20a/Pws/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	27.626.210,00
24	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Rehab Ruang Kepala Sekolah SDN 73, sesuai SPK No: 06/SPK/REHAB-R.KEPSEK/SDN-73/2023 Tgl 17 Juli 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/113a/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	26.319.980,00
25	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan Pagar PAUD Pembina 7 dan PAUD Pembina 8, sesuai SPK No:13/SPK/DAU/PWS-PGR.PAUD/DP-KT/2023 tgl 27 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/30a/PWS/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.897.815,00
26	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 10, sesuai SPK No:08/SP/TENDER/REHAB-R.KLS/SMP.10/DP-KT/2023 tgl 7 Agustus 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/132a/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	216.268.729,00

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
27	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pekerjaan E-Purchasing: Pengadaan Mebel SD Negeri 24, sesuai, SP No: 04/DAU/SP-EP/PENG-MBL/SDN.24/2023 Tgl 2 Agustus 2023 dan Berita Acara Pembayaran No: 602.1/79a/DISDIK-KT/2023 Tgl 6 November 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	199.700.000,00
28	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SDN 73, sesuai SPK No: 09/SPK/DAK/PWS-PERPUS.SD73/DP-KT/2023 tgl 19 Juli 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/12a/PWS/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.832.700,00
29	Dinas Pendidikan	Pembayaran Langsung 100% Pembangunan Pagar SD Negeri 83, sesuai SPK No: 29/SPK/PMB-PGR-SDN.83/DP-KT/2023 tgl 19 September 2023 dan Berita acara pembayaran No: 602.1/124a/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	74.774.364,00
30	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan Ruang UKS SDN 66, SDN 71 dan SDN 73, sesuai SPK No: 16/SPK/DAK/PWS-UKS.SD/DP-KT/2023 tgl 19 Juli 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/13a/PWS/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.000.000,00
31	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Jamban SMPN 2 beserta sanitasinya, sesuai SP No: 09/SP/TENDER/PEMB-JAMBAN SAN/SMP.2/DP-KT/2023 tgl 7 Agst 2023 dan Berita Acara Pembayaran No:602.1/154/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	35.386.825,00
32	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 81, sesuai SPK No: 25/SPK/REHAB-SDN-81/DP-KT/2023 tgl 25 Agst 2023 dan Berita Acara Pembayaran No: 602.1/139a/DISDIK-KT/2023 Tgl 27 Des 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.305.255,00
33	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pembangunan Jamban SMP Negeri 2, sesuai SP No: 09/SP/TENDER/PEMB-JAMBAN SAN/SMP.2/DP-KT/2023 Tgl 7 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/119a/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	247.707.775,00
34	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Gedung Kantor UPTD Pulau, sesuai SPK No:02/SPK/DAU/PWS-KANTOR.UPTD/DP-KT/2023 tgl 19 sep 2023 dan Berita Acara Pembayaran No: 602.1/18a/Pws/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.001.572,00
35	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Teknik Pembangunan Lab Komputer SDN 63, SDN 73, sesuai SPK No: 11/SPK/DAK/PWS-LABKOM.SD66.SD73/DP-KT/2023 tgl 8 Agustus 2023 dan Berita Acara Pembayaran No: 602.1/05a/Pws/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	12.000.000,00
36	Dinas Pendidikan	Pembayaran 60% Penambahan RKB SDN 2, sesuai SP No: 14/SP/TENDER/PENAMB-RKB/SDN.2/DP-KT/2023 tgl 6 Sept 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/151a/DISDIK-KT/2023 Tgl 28 Desember 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	417.979.723,00
37	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer SDN 63, SDN 71, sesuai SPK No: 12/SPK/PWS--LABKOM.SD63.SD71/DP-KT/2023 tgl 8 agustus 2023 dan Berita acara pembayaran No: 602.1/028a/Pws/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	12.000.000,00
38	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Teknik Pemb. Jamban SMPN 2 Beserta sanitasinya, sesuai SPK No: 06/SPK/DAK/PWS-JAMBAN.SMP2/DP-KT/2023 tgl 8 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 06/SPK/DAK/PWS-JAMBAN.SMP2/DP-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	12.333.644,00
39	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Teknik Rehab Sedang/Berat SDN 67 dan SDN 75, sesuai SPK No: 08/SPK/DAU/PWS-REHAB.RKB.SD/DP-KT/2023 tgl 27 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/025a/PWS/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.700.000,00
40	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Belanja Modal Peralatan Studio, Cetak, Komputer, sesuai SP No: 06.C/DAU/SP-EP/PRLT-SACK/DP-KT/2023 tgl 8 September 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	137.070.000,00
41	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan Perpustakaan SDN 71, sesuai SPK No:17/SPK/DAK/PWS-PERPUS.SD71/DP-KT/2023 tgl 8 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/08a/PWS/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.719.914,00
42	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Rehab Jamban SD Negeri 16, sesuai SPK No: 19/SPK/REHAB-JAMBAN/SDN-16/DP-KT/2023 tgl 22 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/150a/DISDIK-KT/2023 Tgl 27 Des 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	84.606.407,00
43	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Rehab Sedang/Berat SDN 67, sesuai SPK No: 28/SPK/REHAB-SDN.67/DP-KT/2023 tgl 25 Agst 2023 dan Berita acara pembayaran No: 602.1/121a/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	73.058.132,00
44	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Ruang UKS SDN 73, sesuai SPK No: 01/SPK/PEMB-R.UKS/SDN-73/DP-KT/2023 tgl 7 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/156/DISDIK-KT/2023 tgl 28 Desember 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.906.376,00
45	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Teknik Pembangunan Pagar SMPN 12 dan SMPN 15, sesuai SPK No: 11/SPK/DAU/PWS-PGR.SMP/DP-KT/2023 tgl 02 Agst 2023 dan Berita Acara Pembayaran No: 602.1/27a/Pws/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.890.000,00
46	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 80, sesuai SPK No:24/SPK/REHAB-SDN.80/DP-KT/2023 tgl 25 Agst 2023 dan Berita Acara Pembayaran No: 602.1/140a/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.301.448,00
47	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Rehab Sedang/Berat SDN 75 Kota Ternate, sesuai SPK No:14/SPK/REHAB-SDN.75/DP-KT/2023 tgl 25 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/130a/DISDI-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	178.749.237,00
48	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Rehabilitasi Jamban SDN 73 beserta sanitasinya, sesuai SPK No: 07/SPK/DAK/PWS-JAMBAN.SDN.73/DP-KT/2023 tgl 19 Juli 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/11a/PWS/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.446.521,00
49	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Rehab Ruang Kelas SMPN 5 dan SMPN 13, sesuai SPK No:12/SPK/DAU/PWS-REHAB.RKB.SMP/DP-KT/2023 27 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/29a/PWS/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.999.998,00
50	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Rehabilitasi Kantor Diknas, sesuai SP No: 20/SP/TENDER/REHAB-KTR.DIKNAS/DP-KT/2023 tgl 6 November 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/135a/DISDIK-KT/2023 tgl 21 Desember 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	233.946.427,00
51	Dinas Pendidikan	TAGIHAN Pembayaran 100% Pengawasan Teknik Rehab Ruang Kelas dan Rehab Lab IPA Rusak Sedang/Berat SMPN 10, sesuai SPK No: 03/SPK/DAK/PWS-RKB.LABIPA.SMP10/DP-KT/2023 tgl 8 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/09b/Pws/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	22.097.348,00
52	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pengawasan Teknik Rehab Sedang/Berat SDN 80, SDN 81 dan SDN 82, sesuai SPK No: 09/SPK/DAU/PWS-REHAB.RKB.SD/DP-KT/2023 tgl 26 Agst 2023 dan berita acara pembayaran No: 602.1/014a/Pws/DISDIK-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	11.100.000,00
53	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan PEMBANGUNAN LAB.KOMPUTER SDN 66	Utang Jangka Pendek Lainnya	17.258.771,00
54	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan PENAMBAHAN RKB MTS BABULL JANNAH MOYA	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.797.138,00
55	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan PEMBANGUNAN RUANG UKS PAUD PEMBINA 1	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.456.178,00
56	Dinas Pendidikan	Pembayaran 80% Pekerjaan PENAMBAHAN RKB SD NEGERI 24	Utang Jangka Pendek Lainnya	290.266.338,00

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
57	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan PENAMBAHAN RKB SD ALKHAIRAT FALAJAWA II	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.279.866,00
58	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan PENAMBAHAN RKB MI BABULLAH KEL. LOTO	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.514.306,00
59	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan REHABILITASI KANTOR DIKNAS	Utang Jangka Pendek Lainnya	53.473.467,00
60	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan REHAB RUANG KEPALA SEKOLAH SDN 73	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.884.442,00
61	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan REHAB JAMBAN SD NEGERI 73 BESERTA SANITASINYA	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.596.436,00
62	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan PEMBANGUNAN RUANG UKS SD AL IRSYAD	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.855.434,00
63	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan REHAB SEDANG SDN 75	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.073.555,00
64	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 12	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.100.521,00
65	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 15	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.392.433,00
66	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan REHABILITASI JAMBAN SDN 16	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.400.701,00
67	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan PEMBANGUNAN PAGAR SDN 64	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.285.113,00
68	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan PEMBANGUNAN PAGAR PAUD PEMBINA 7	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.595.921,00
69	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan PEMBANGUNAN PAGAR PAUD PEMBINA 8	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.540.054,00
70	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan REHAB RUANG KELAS SMP 13	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.671.345,00
71	Dinas Pendidikan	Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan PEMBANGUNAN PAGAR SDN 83	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.308.245,00
72	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pekerjaan BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO , CETAK KOMPUTER	Utang Jangka Pendek Lainnya	26.530.850,00
73	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pekerjaan BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO , CETAK KOMPUTER	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.924.300,00
74	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pekerjaan BELANJA MODAL PENGADAAN KANTOR DIKNAS	Utang Jangka Pendek Lainnya	198.525.000,00
75	Dinas Pendidikan	Pembayaran 100% Pekerjaan REHAB LAB. IPA SMPN 10	Utang Jangka Pendek Lainnya	120.262.008,00
<b>JUMLAH</b>				<b>3.842.580.911,00</b>
1	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pagar Puskesmas Bahari Berkesan Dan Puskesmas Mayau Sesuai SPK Nomor:440/2850.a/SPK/DINKES/DAU/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 Dan BAP Nomor:440/4064/BAP/2023 Tanggal 29 Desember 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	62.424.180,00
2	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Kegiatan Pengadaan Kendaraan Mobil Jenazah Sesuai Kontrak Nomor: 440/3171.A/SPK-AMB.JENAZAH/DINKES/APBDP/2023, Tanggal 15 November 2023 dan BAP Nomor: 440/3850/BAP/APBDP/2023, Tanggal 18 Desember 2023 (DAU)	Utang Jangka Pendek Lainnya	300.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	Belanja Pembayaran Langsung 100% Pembangunan Pagar Mayau Sesuai SPK Nomor: 440/2809/SP-PAGAR PKM/DINKES/DAU/2023, Tanggal 12 Oktober Tahun 2023 dan BAP Nomor: 440/4052/BAP/DINKES/DAU/2023 Tanggal 28 Desember Tahun 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	626.706.770,00
4	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Pembangunan Pagar Puskesmas Bahari Berkesan Sesuai SPK Nomor:440/2535/SPK/DINKES/IX/2023 Tanggal 25 September 2023 Dan BAP Nomor:440/4063/2023 Tanggal 29 Desember 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	128.699.087,00
5	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung Pembangunan Rumah Singgah Peduli Bahim Sesuai SPK Nomor:440/3032/SPK-JK/RUMAH BAHIM/DAU/2023 Tanggal 01 November 2023 Dan BAP Nomor:440/4077/BAP/DINKES/DAU/2023 Tanggal 29 Desember 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	672.662.618,00
6	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung 100% Kegiatan Pengadaan Kendaraan Mobil Ambulance Sesuai Kontrak Nomor: 440/3170.A/SPK-AMULANCE/DINKES/APBDP/2023, Tanggal 15 November 2023 dan BAP Nomor: 440/3842/BAP/APBDP/2023, Tanggal 18 Desember 2023 (DAU)	Utang Jangka Pendek Lainnya	296.500.000,00
7	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangua Rumah Singgah Peduli Bahim Sesuai SPK Nomor:440/2754.A/SPK/DINKES/DAU/2023 Tanggal 10 November 2023 Dan BAP Nomor:440/4078/BAP/DINKES/DAU/2023 Tanggal 29 Desember 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	48.368.400,00
8	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Pagar Puskesmas Mayau	Utang Jangka Pendek Lainnya	48.208.213,00
9	Dinas Kesehatan	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Pagar Puskesmas Bahari Berkesan	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.899.932,00
<b>JUMLAH</b>				<b>2.193.469.200,00</b>
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung termin I + retensi pekerjaan pembangunan gedung workshop peralatan dinas PUPR sesuai kontrak No: 600/3805/DPUPR/KT/2023 TGL. 29-11-2023 ADD No: 600/3950/DPUPR/KT/2023 TGL. 07-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	199.464.003,62
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Rehabilitasi Drainase Rt 02 Rw 01 Kelurahan Kota Baru sesuai Kontrak No: 614/204/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 08-06-2023 dan BAP No: 614/956a/CK/DPUPRR/KT/2023 TGL. 23-11-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.394.300,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + Retensi Pekerjaan Pembangunan talud penahan ombak belakang madrasah kel. tafamutu sesuai kontrak No: 650/0079/SP/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 20-09-2023 dan BAP No: 650/00307/BA/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	149.880.741,69
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I + Retensi Pekerjaan Pembuatan Drainase Lokasi RT 6,7,8,10,11 di Kel. Kota Baru sesuai Kontrak No: 614/782/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 27-09-2023 dan BAP No: 614/1066/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 20-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	74.645.003,97
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Togafa sesuai Kontrak No: 600/2746/DPUPR/KT/2023 TGL. 18-08-2023 dan BAP No: 600/3928/BM/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 06-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	193.882.432,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembuatan Saluran Kel. Kalumata Samping Jembatan sesuai Kontrak No: 614/551.a/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 18-08-2023 dan BAP No: 614/1072.A/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 21-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.914.900,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Falasoa Taduma sesuai Kontrak No: 640/575/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 03-08-2023 dan BAP No: 640/870/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 06-11-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	49.581.480,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + retensi Pekerjaan Lanjutan Penataan Pedestrian Kawasan Kuliner Belakang Jatiland Mall sesuai Kontrak No: 650/0076/SP/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 20-09-2023 dan BAP No: 650/00309/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.149.033.597,63

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I + Retensi Pekerjaan Pembangunan Pagar TPQ RT 11 Kelurahan Perumnas sesuai Kontrak No: 640/666/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 31-08-2023 ADD No: 640/688.a/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 08-09-2023 dan BAP No: 640/1089/BG/DPUPR/KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	62.074.758,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 100%) Pekerjaan Pembuatan Deker Rt 007 Rw 004 Kel. Soa Sio sesuai Kontrak No: 614/532/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 16-08-2023 ADD No: 614/614.A/ADD-K/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 30-08-2023 dan BAP No: 614/026/CK/DPUPR	Utang Jangka Pendek Lainnya	44.509.950,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung termin terakhir (retensi) pekerjaan pembuatan pagar perkuburan RT 03 RW 04 Kelurahan Soa sesuai Kontrak No: 640/626/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 21-08-2023 dan BAP No: 640/1052/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 18-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.653.690,79
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Kegiatan Data Base Bangunan Gedung (SWAKELOLA)	Utang Jangka Pendek Lainnya	100.000.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + retensi pekerjaan pembangunan paving block halaman DIR narkoba kel. kayu merah sesuai Kontrak No: 600/3986/DPUPR/KT/2023 TGL. 11-12-2023 ADD No: 600/4050A/DPUPR/KT/2023 TGL. 15-12-2023 dan BAP No: 60	Utang Jangka Pendek Lainnya	199.232.779,74
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus (100%) Pekerjaan Pengadaan Mobil Operasional Patroli Sampah sesuai Kontrak No: 600/1311/DPUPR/KT/2023 TGL. 17-04-2023 dan BAP No: 600/3892/BA/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 04-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	538.000.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembuatan Jalan Lapen Rt 004 Kel. Ngade sesuai Kontrak No: 600/1454/DPUPR/KT/2023 TGL. 05-05-2023 dan BAP No: 600/4075A/BM/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 18-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.913.250,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + Retensi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Kasturian sesuai Kontrak No: 600/2619/DPUPR/KT/2023 TGL 18-09-2023 dan BAP No: 600/4215/BM/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	339.139.408,89
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke II (100%) + Retensi Pekerjaan Rehabilitas Jembatan Kel.Makassar Timur-Kel.Soa-Sio sesuai Kontrak No: 600/2441/DPUPR/KT/2023 TGL. 25-07-2023 ADD No: 630/577/ADD/BM/DPUPR/KT/2023 TGL. 11-10-2023 ADD No: 630/692/ADD	Utang Jangka Pendek Lainnya	276.690.201,55
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke II (31,00% + 69,00% = 100%) Pemeliharaan Rutin Jembatan (SWAKELOLA) Kota Ternate Tahun Anggaran 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	137.615.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke i (100%) + Retensi Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanah ke Lapen Kelurahan Tubo sesuai Kontrak No: 600/2869/DPUPR/KT/2023 TGL. 31-08-2023 ADD No: 620/350/ADD/BM/DPUPR/KT/2023 TGL. 04-09-2023 dan BAP No: 600/4165/	Utang Jangka Pendek Lainnya	262.561.132,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Sekaligus (100%) Pekerjaan Pengawasan Teknis Talud Penahan Ombak Pulau Batang Dua sesuai Kontrak No: 650/0052/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 11-08-2023 dan BAP No: 650/00291/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 18-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.229.005,00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 50,89%) Pekerjaan Pembangunan Trans Depo sesuai Kontrak No: 658/864/CK/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 17-10-2023 ADD No: 600/1080/ADD-K/DPUPR/KT/2023 TGL. 22-12-2023 dan BAP No: 614/1087/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 27	Utang Jangka Pendek Lainnya	131.246.763,86
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung sekaligus (100%) pekerjaan pengadaan fasilitas penunjang kawasan kuliner belakang jatiland mall sesuai kontrak No: 600/3931/DPUPR/KT/2023 TGL. 06-12-2023 dan BAP No: 600/4217A/BA/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	74.765.151,00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran langsung angsuran ke I (100%) + retensi pekerjaan lanjutan talud Rt 05 Rw 03 Kel. Ngade sesuai Kontrak No: 650/0074/SP/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 04-10-2023 dan BAP No: 650/00314/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	325.877.759,59
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung angsuran ke I (100%) + retens pekerjaan rehab jaina menuju PAUD Alkhairat skep sesuai Kontrak No: 600/3069A/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 06-11-2023 ADD No: 600/3561A/DPUPR/KT/2023 TGL. 14-11-2023 dan BAP 600/4219A/	Utang Jangka Pendek Lainnya	62.071.793,85
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 100%) Pekerjaan Rehab Saluran Sekunder RT 03/RW 01 Kel. Salero sesuai Kontrak No: 614/711/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 13-09-2023 ADD No: 614/515.c/ADD-K/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 28-09-2023 dan BAP No: 614/935/CK/D	Utang Jangka Pendek Lainnya	88.650.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus Pekerjaan Pengawasan Teknik Pembangunan Saluran sesuai Kontrak No: 614/716/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 14-09-2023 dan BAP No: 614/1085/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.162.960,00
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) Pekerjaan Pemasangan Paving Blok di RT 1,5,6,7 Kelurahan Jambula sesuai Kontrak No: 650/0081/SP/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 21-09-2023 dan BAP No: 650/00260/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 06-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	185.190.554,00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Penutup Saluran Air Rt 006 dan Rt 010 Kel. Mangga Dua Utara sesuai Kontrak No: 614/760/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 22-09-2023 dan BAP No: 614/1084/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 22	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.963.433,86
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembuatan Jalan Paving Rt 001 Rw 001 Kel. Sasa sesuai Kontrak No: 650/0020/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 26-06-2023 dan BAP No: 650/00243/BA/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 28-11-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.221.800,00
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (RETENSI 5%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Hotmix RT.06, 08 Kel. Tubo, sesuai Kontrak No: 600/2737/DPUPR/KT/2023, Tgl. 18-08-2023 dan BAP No: 600/4096/BM/DPUPR/Kota Tte/2023, Tgl. 19-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.945.965,00
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak RT 13 RW 05 Kel. Sangaji sesuai Kontrak No: 600/2711A/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 15-08-2023 dan BAP No: 600/3780/BA/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 27-11-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.961.570,39
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Renovasi Musholah RT 07 di Kelurahan Stadion sesuai Kontrak No: 640/393/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 06-06-2023 dan BAP No: 640/1020.a/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 12-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.943.413,00
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembuatan Drainase RT 007 RW 004 Kel. Soa Sio sesuai Kontrak No: 614/248/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 16-06-2023 dan BAP No: 614/944/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 03-11-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.644.850,00

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung sekaligus (100%) Pekerjaan pengawasan lanjutan penataan pedestrian kawasan kuliner belakang jatiland mall sesuai kontrak No: 650/0091/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 07-11-2023 dan BAP No: 650/00311/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TG	Utang Jangka Pendek Lainnya	89.549.250,00
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembangunan Rehab Jalan Lingkungan RT 003 Kel. Dorpedu sesuai Kontrak No: 600/2673/DPUPR/KT/2023 TGL. 11-08-2023 ADD No: 620/296/ADD/BM/DPUPR/KT/2023 TGL. 24-08-2023 dan BAP No: 600/40	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.951.627,00
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (retensi) Pekerjaan Perbaikan Drainase di Lingk. Falajawa Dua RT 03/RW 010 (Gang Alkassas) Kel. Bastiong Karance sesuai Kontrak No: 614/757/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 22-09-2023 dan BAP No: 614/1071.C/CK/DPUPR/	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.968.548,19
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (Termin V 100%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanah Ke Lapen Kelurahan Tongole dan Kelurahan Maliaro Rt 06 sesuai Kontrak No: 600/2493/DPUPR/KT/2023 TGL. 04-09-2023 ADD No: 620/422/ADD/BM/DPUPR/KT/2023 TGL. 19-	Utang Jangka Pendek Lainnya	362.006.159,00
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + Retensi Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah ke Aspal Lingk. Toboleu-Barito sesuai Kontrak No: 600/2679/DPUPR/KT/2023 TGL. 25-09-2023 ADD No: 620/463/ADD/BM/DPUPR/KT/2023 TGL. 05-10-2023 dan BAP No: 600	Utang Jangka Pendek Lainnya	338.800.995,97
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Rabat Beton ke Paving Blok RT 001 RW 002 Kel. Bastiong Karance sesuai Kontrak No: 650/0015/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 16-06-2023 dan BAP No: 650/00282/BA/TR/DPUPR/K	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.475.000,00
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + retensi pekerjaan pembuatan talud penahan tanah kuburan di rt 04 rw 02 di kel. tongole sesuai kontrak No: 650/0055/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 23-08-2023 dan BAP No: 650/00306/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	258.745.449,00
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus (100%) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Dalam Kota Ternate) sesuai Kontrak No: 600/2796/DPUPR/KT/2023 TGL. 24-08-2023 dan BAP No: 600/4025/BM/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 13-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	59.496.000,00
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Talud Rt 04 Kel. Ngade sesuai Kontrak No: 650/0025/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 04-07-2023 dan BAP No: 650/00264/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 08-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.950.698,82
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin (Progres 100%) Pekerjaan Rehab Saluran Air Sekunder dan Plat Beton Jl. Sulatan Nuku RT 001 dan RT 002 Kel. Tanah Raja sesua Kontrak No: 614/421/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 28-07-2023 ADD No: 614/515.B/ADD-K/CK/DPUPR-KT/2	Utang Jangka Pendek Lainnya	83.447.775,00
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus Termasuk Retensi Pekerjaan Rehab Rumah Istirahat Sultan Ternate Kel. Bula sesuai Kontrak No: 600/3911/DPUPR/KT/2023 TGL. 05-12-2023 dan BAP No: 600/1079/DPUPR/KT/2023 TGL. 22-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.666.730,24
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Ombak Kel. Moti Kota sesuai Kontrak No: 650/0035/SP/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 31-07-2023 dan BAP No: 650/00284/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 21-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.322.998,68
46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 100%) Pekerjaan Pembuatan Penutup Saluran dari Plat Beton Bertulang Tebal 8 cm Lebar 80 cm di Lingk. Ngade Sone RW 03 Kel. Toboleu sesuai Kontrak No: 614/410/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 27-07-2023 ADD No: 614	Utang Jangka Pendek Lainnya	65.959.200,00
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Ombak Rt 005 RT 007 Kel. Tafure sesuai Kontrak No: 650/0028/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 06-07-2023 dan BAP No: 650/00253/BA/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 30-11-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.964.250,00
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I + retensi Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Kel. Toboleu sesuai Kontrak No: 600/3847/DPUPR-KT/2023 TGL. 30-11-2023 dan BAP No: 600/4215A/DPUPR-KT/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.716.448,78
49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Rehab Bangunan TPQ Rt 04 Kel. Takofi sesuai Kontrak No: 640/500/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 06-07-2023 dan BAP No: 640/1048/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 18-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.438.305,00
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembuatan Saluran Air Dilokasi Pekuburan RT 10 Kelurahan Jambula sesuai Kontrak No: 614/295/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 05-07-2023 dan BAP No: 614/983/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 30-11-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.943.250,00
51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Residen sesuai Kontrak No: 640/422/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 14-06-2023 dan BAP No: 640/979A/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 04-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	29.033.906,93
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembuatan Saluran Air Menuju Kuburan RT 06 Kel. Moya sesuai Kontrak No: 614/81/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 03-04-2023 dan BAP No: 614/1034C/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 12-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.716.850,00
53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Uang Muka (30%) Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder RT 01 RW 01 Kel. Tarau sesuai Kontrak No: 600/3862/DPUPR-KT/2023 TGL. 01-12-2023 dan BAP No: 600/3899/DPUPR-KT/2023 TGL. 04-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	87.119.970,16
54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembangunan Drainase Kel. Lotto sesuai Kontrak No: 614/470/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 03-08-2023 dan BAP No: 614/1071.A/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 20-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.445.050,00
55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembuatan Pagar Kuburan Lingkungan Jan Kelurahan Tabona sesuai Kontrak No: 640/274/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 14-04-2023 dan BAP No: 640/1050/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 18-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.886.900,00
56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pembuatan Pemecah Ombak Rt 05 Kel. Tabam sesuai Kontrak No: 650/0082/SP/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 21-09-2023 dan BAP No: 650/00278/BA/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 14-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	12.347.424,78
57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Rehab Saluran Air Sekunder dan Plat Beton Jl. Sulatan Nuku RT 001 dan RT 002 Kel. Tanah Raja sesuai Kontrak No: 614/421/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 28-07-2023 dan BAP No: 614/1070A/CK/DPUPR/KT	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.271.975,00
58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Rehab TPQ/Mushollah di RT 12 Kel. Kota Baru sesuai Kontrak No: 640/497/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 06-07-2023 dan BAP No: 640/927/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 21-11-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.942.028,06

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Sekaligus (100%) Pekerjaan Perencanaan Penataan Kawasan Pesisir Mangga Dua Utara sesuai Kontrak No: 650/0070/SP/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 04-09-2023 dan BAP No: 650/00293/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 18-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	198.980.820,00
60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung angsuran ke I (100%) Pekerjaan pembuatan jalan setapak beton rt 04 dan rt 06 kel. moya sesuai kontrak No: 600/3827/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 29-11-2023 dan BAP No: 600/4180b/BA/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	44.724.611,00
61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Tempat Parkir Fakultas Hukum Unkhair Ternate sesuai Kontrak No: 640/584/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 04-08-2023 dan BAP No: 640/1039/BG/DPUPR/KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	74.089.447,50
62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran :Langsung Angsuran Ke I (100%) + Retensi Peningkatan Jalan Tanah Ke Aspal / Lapen di Rt 05 Rw 03 Kel. Gambesi sesuai Kontrak No: 600/3813/DPUPR/KT/2023 TGL. 29-11-2023 dan BAP No: 600/4157/BM/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 22-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	148.068.680,16
63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran langsung angsuran ke I (100%) + retensi pekerjaan pembangunan lanjutan pemasangan batu/kosong bronjong dan breakwater rt 01 s/d rt 04 kel. tafrika sesuai kontrak No: 650/0075/SP/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 14-09-2023 dan BAP No: 650/0031	Utang Jangka Pendek Lainnya	203.301.484,00
64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (retensi) Pekerjaan Pembangunan Pagar Kuburan Kel. Bastiong Talangame dan Bastiong Karance sesuai Kontrak No: 640/621/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 18-08-2023 dan BAP No: 640/1076/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 21-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.969.510,16
65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I + Retensi Pekerjaan Pembuatan Penutup Parit RT 003/001 Kelurahan Mangga Dua sesuai Kontrak No: 614/746/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 20-09-2023 dan BAP No: 614/1064/A/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 20-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	73.977.000,00
66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (retensi) Pekerjaan pembangunan jalan akesako - facey sesuai kontrak No: 600/2872/DPUPR/KT/2023 TGL. 31-08-2023 dan BAP No: 600/4129/BM/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 21-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	33.056.901,92
67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembuatan Saluran Air (Drainase) Rt 15 Rw 06 di Kel. Kalumata sesuai Kontrak No: 614/763/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 22-09-2023 dan BAP No: 614/1066.C/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 20-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.459.667,89
68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I + Retensi Pekerjaan Pembuatan Saluran Air Sekunder RT 002 Kel. Takoma sesuai Kontrak No: 614/826/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 06-10-2023 ADD No: 614/837.b/ADD-K/CK/DPUPR-KT/2023 24-10-2023 dan BAP No: 614/1066.a/CK/DPUPR	Utang Jangka Pendek Lainnya	42.260.277,44
69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + Retensi Pekerjaan Talud Penahan Tanah Kuburan Kelurahan Kayu Merah sesuai Kontrak No: 650/0090/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 06-10-2023 dan BAP No: 650/00286/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 04-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.255.427,25
70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembuatan Saluran Air RT 05 RW 02 Taduma sesuai Kontrak No: 614/751/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 20-09-2023 dan BAP No: 614/1012.a/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 08-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.957.250,00
71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) Pekerjaan Pembuatan Sarana Jalur Evakuasi (Jalan Aspal) Rt 01,02/Rw 01 Kel. Dufa-dufa sesuai Kontrak No: 600/1464/DPUPR/KT/2023 TGL. 05-05-2023 ADD No: 620/02.d/ADD/BM/DPUPR/KT/2023 TGL. 23-05-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	187.976.500,00
72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembuatan Jalan Paving Blok RT 005 Kelurahan Gambesi sesuai Kontrak No: 650/0023/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 04-07-2023 dan BAP No: 650/00265/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 08-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.939.946,00
73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Rehabilitasi Jalan Setapak Beton ke Paving Blok di RW 001 Kel. Sangaji Utara sesuai Kontrak No: 650/0040/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 27-07-2023 dan BAP No: 650/00263/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.693.100,00
74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + Retensi Pekerjaan Pembuatan Talud Penahan Tanah Jalan Setapak Paving Blok RT 04 Kel. Moya sesuai Kontrak No: 650/0022/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 26-06-2023 dan ADD No: 650/00389/ADD-K/TR/DPUPR-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.336.000,00
75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus (100%) Pekerjaan Perencanaan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan sesuai Kontrak No: 600/1564/DPUPR/KT/2023 TGL. 12-05-2023 dan BAP No: 600/3031A/BM/DPUPR/Kota Tte/2023 tgl. 30-10-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	78.999.255,00
76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT 03 Kel. Tadenas sesuai Kontrak No: 600/3782/BA/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 27-11-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.955.525,00
77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung MC 01 + Retensi Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Kel. Tanah Tinggi Barat sesuai Kontrak No: 600/3979/DPUPR-KT/2023 TGL. 11-12-2023 dan BAP No: 600/4211/DPUPR-KT/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	199.360.310,17
78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I + Retensi Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Bastiong Karance RT 002/RW 001 sesuai kontrak no: 614/882/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 20-10-2023 ADD No: 614/929/ADD-K/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 01-11-2023 dan BAP	Utang Jangka Pendek Lainnya	74.617.315,96
79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pagar sesuai Kontrak No: 640/729/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 21-09-2023 dan BAP No: 640/1069/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 21-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.108.570,00
80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi) Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanah ke Paving Blok Menuju Kebun Kangkung arah ke pantai Rt 07 Rw 04 Kel. Gambesi sesuai Kontrak No: 650/0063/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 23-08-2023 dan BAP No: 650/00	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.207.443,00
81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + Retensi Pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak RT 03 Kel. Bula sesuai Kontrak No: 600/4187A/BA/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	50.833.406,60
82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus I Set Microphone Wireless sesuai Surat Pesanan No: 600/2765/DPUPR-Kota-Tte/2023 TGL. 26-09-2023 dan Berita Acara Serah Terima Barang No: 600/2808/DPUPR/KT/2023 TGL. 02-10-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.902.252,00
83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah RT 02 (Depan Sekolah MTS Moti Verbond) sesuai Kontrak No: 650/0045/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 03-08-2023 dan BAP No: 650/00122/BA/TR/DPUPR/KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.954.128,00

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I + Retensi Pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling TPQ Kelurahan Tarau Termasuk Rehab Gedung TPQ sesuai Kontrak No: 640/629/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 21-08-2023 ADD No: 640/677.a/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 06-09-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	74.640.852,82
85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + Retensi Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanah ke Jalan Paving Blok Kel. Tanah Tinggi Barat sesuai Kontrak No: 650/0092/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 06-12-2023 dan BAP No: 650/00296/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	179.506.600,90
86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I + Retensi Pekerjaan Pembuatan Saluran RT 04 Kelurahan Moya sesuai Kontrak No: 614/307/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 06-07-2023 ADD No: 614/384.A/ADD-K/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 21-07-2023 dan BAP No: 614/1089/CK/DPUPR/KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.410.500,00
87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus 39 Buah Helm Proyek (Merk JCK) sesuai Surat Pesanan No: 600/2766/DPU-PR/Kota-Tte/2023 TGL. 26-09-2023 dan Berita Acara Serah Terima Barang No: 600/2809/DPUPR/KT/2023 TGL 02-10-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.782.300,00
88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 65,32%) Pekerjaan Perbaikan Drainase Kawasan Ternate Selatan sesuai Kontrak No: 614/595/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 25-08-2023 ADD No: 614/758.a/ADD-K/DPUPR-KT/2023 TGL. 22-12-2023 dan BAP No: 614/1093/CK/DPUP	Utang Jangka Pendek Lainnya	702.030.216,00
89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 100%) Pekerjaan Rehab Saluran Air Jalan A.M Kamarudin RT 04 RW 03 Kelurahan Kasturian sesuai Kontrak No: 614/708/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 13-09-2023 ADD No: 614/894.A/ADD-K/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 24-10-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	70.924.500,00
90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Normalisasi Saluran / Drainase Kel. Salero sesuai Kontrak No: 614/528/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 16-08-2023 dan BAP No: 614/1056/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 18-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.943.350,00
91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembuatan Jalan Paving Blok RT 05 RW 03 dan RT 06 RW 03 Kelurahan Kasturian sesuai Kontrak No: 650/0066/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 30-08-2023 dan BAP No: 650/00271/BA/TR/DPUPR/KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.225.962,94
92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembuatan Penutup Saluran Rt 004.005.006.007.008 Kel. Toboko sesuai Kontrak No: 614/473/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 03-08-2023 dan BAP No: 614/967/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 27-11-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.897.100,00
93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembuatan Drainase RT 003 RW 002 Kel. Soa Sio sesuai Kontrak No: 614/452/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 02-08-2023 dan BAP No: 614/1034A/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 12-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.720.300,00
94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (RETENSI 5%) Pekerjaan Pembangunan Talud Pinggir Berangka RT.17 Kel. Maliaro, sesuai Kontrak No : 650/0054/SP/TR/DPUPR/KT/2023, Tgl. 18-08-2023 dan BAP No: 650/00301/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023, Tgl. 18-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.671.622,66
95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I + Retensi Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Air RT 02, 04 RW 01 RW 02 Kelurahan Kampung Pisang sesuai Kontrak No: 614/820/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 06-10-2023 ADD No: 614/892.a/ADD-K/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 24-10-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	79.464.330,17
96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 82,47%) Pekerjaan Pembuatan Pagar Kuburan Jalan Baru Kelurahan Gambesi sesuai Kontrak No: 640/741/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 26-09-2023 ADD No: 640/779.A/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 10-10-2023 dan BAP No: 640/1090/B	Utang Jangka Pendek Lainnya	138.313.072,25
97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin II (Progres 100%) Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas dan Mes Pegawai Kejaksaan 2 sesuai Kontrak No: 640/248/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 10-04-2023 dan BAP No: 640/986/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 07-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.509.140.993,00
98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Sekaligus (100%) Pekerjaan Pengawasan Teknis Talud Penahan Ombak Pulau Moti sesuai Kontrak No: 650/0051/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 11-08-2023 dan BAP No: 650/00288/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 tgl. 18-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.328.905,00
99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran langsung angsuran terakhir (retensi) pembangunan talud penahan ombak dan tanah RT 01 s/d RT 04 Kel. Tomajiko sesuai kontrak No: 650/0083/SP/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 05-10-2023 dan BAP No: 650/00315/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.759.816,00
100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembuatan Pagar Kuburan Kel. Soa sesuai Kontrak No: 640/581/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 04-08-2023 dan BAP No: 640/1076.D/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 21-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.681.364,00
101	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 100%) Pekerjaan Pembangunan TPQ Rausan Fiqir di RT 012 RW 05 Kelurahan Sasa (Sasa Belakang) sesuai Kontrak No: 640/555/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 27-07-2023 ADD No: 640/586/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 07-08-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	89.555.273,00
102	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + RETENSI Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Ombak Kel. Takofi sesuai Kontrak No: 650/0080/SP/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 20-09-2023 dan BAP No: 650/00294/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	198.722.898,00
103	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembangunan Talud Kel. Kota Baru sesuai Kontrak No: 650/0053/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 11-08-2023 dan BAP No: 650/00272/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 15-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.964.373,95
104	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I + Retensi Pekerjaan Optimalisasi Jaringan Perpipaan Kawasan Ternate Selatan sesuai Kontrak No: 600/3822/DPUPR-KT/2023 TGL. 29-11-2023 dan BAP No: 600/4213/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.697.359,44
105	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I + Retensi Pekerjaan Optimalisasi Jaringan Perpipaan Kawasan Ternate Utara sesuai Kontrak No: 600/3819/DPUPR-KT/2023 TGL. 29-11-2023 dan BAP No: 600/4180/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.534.462,46
106	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Mesjid sesuai Kontrak No: 640/614/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 16-08-2023 dan BAP No: 640/875.a/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 07-11-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	49.448.280,00
107	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus Termasuk Retensi Pekerjaan Rehabilitasi Tahap 2 Gedung Melati sesuai Kontrak No: 600/3808/DPUPR/KT/2023 TGL. 29-11-2023 dan BAP No: 600/4082/DPUPR/KT/2023 TGL. 18-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	199.786.047,89
108	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi) Peningkatan Jalan Rabat Beton ke Paving Rt 15 Rw 04 (Belakang TK Barunawati) Kel. Tanah Tinggi sesuai Kontrak No: 650/0005/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 26-05-2023 dan BAP No: 650/00310/BA/TR/DPUPR/	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.441.700,00



No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
109	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + Retensi Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanah ke Lape RT 15 RW 05 Kelurahan Sangaji sesuai Kontrak No: 600/2496/DPUPR/KT/2023 TGL. 04-09-2023 ADD No: 620/451.b/ADD/BM/DPUPR/KT/2023 TGL. 02-10-2023 dan	Utang Jangka Pendek Lainnya	169.282.770,00
110	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) Pekerjaan Pembuatan Jalan Paving RT 001 RW 001 Kel. Tarau sesuai Kontrak No: 650/0078/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 18-09-2023 dan BAP No: 650/00275/BA/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 13-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	46.928.703,00
111	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus I Unit Lemari Es dan I Unit Smart TV 75 Inc. sesuai Surat Pesanan No: 600/2764/DPUPR-PR/Kota-Tte/2023 tgl. 26-09-2023 dan Berita Acara Serah Terima Barang No: 600/2807/DPUPR/KT/2023 TGL. 02-10-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	45.505.856,00
112	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembangunan Falasoa Taduma sesuai Kontrak No: 640/428/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 15-06-2023 dan BAP No: 640/1076.C/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 21-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	31.530.100,00
113	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Paving Block Menuju Kuburan Lingk. Tabanga Kel. Sulamadaha sesuai Kontrak No: 650/0016/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 16-06-2023 dan BAP No: 650/00244/BA/TR/DPUPR/Kota	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.426.780,00
114	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanah ke Aspal Menuju Pekuburan Kelurahan Sango sesuai Kontrak No: 600/2740/DPUPR/KT/2023 TGL. 18-08-2023 dan BAP No: 600/4092/BM/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 19-12-20	Utang Jangka Pendek Lainnya	11.938.084,52
115	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Rehab Mushollah RT 10 RW 04 Kelurahan Sangaji sesuai Kontrak No: 640/503/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 06-07-2023 dan BAP No: 640/878/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 08-11-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.456.768,95
116	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Paving Blok di Rt 04 Rw 02 Kelurahan Moya sesuai Kontrak No: 650/0043/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 03-07-2023 dan BAP No: 650/00285/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 22-12-2	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.773.798,00
117	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Rehabilitasi Ringan Masjid Fathil Huda Kel. Toboleu Termasuk Pengecatan sesuai Kontrak No: 640/396/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 06-06-2023 dan BAP No: 640/997/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 08-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.838.086,81
118	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin II (Progres 100%) Pekerjaan Pembangunan Falasoa Taduma sesuai Kontrak No: 640/428/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 15-06-2023 ADD No: 640/658.c/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 29-08-2023 dan BAP No: 640/976.c/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 01-12	Utang Jangka Pendek Lainnya	163.956.520,00
119	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 100%) Pekerjaan Pembuatan Saluran Kel. Kalumata Samping Jembatan Sesuai Kontrak No: 614/551.a/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 18-08-2023 ADD No: 614/639.A/ADD-K/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 01-09-2023 dan BAP No:614/993.a	Utang Jangka Pendek Lainnya	188.383.100,00
120	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk Tanah Ke Aspal untuk Lingkungan Kel. Tarau sesuai Kontrak No: 600/2445/DPUPR/KT/2023 TGL. 25-07-2023 dan BAP No: 600/3794/BM/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 28-11-20	Utang Jangka Pendek Lainnya	11.941.914,89
121	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung sekaligus pekerjaan pengawasan teknis pembangunan TPS 3R/Trans Depo sesuai kontrak No: 658/886/CK/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 20-10-2023 dan BAP No: 658/1065.d/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 20-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	59.274.000,00
122	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (RETENSI) atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Kel. Makassar Timur, sesuai Kontrak No: 614/660/CK/DPUPR-KT/2023, Tgl. 06-09-2023 dan BAP No: 614/1053/CK/DPUPR/KT/2023 Tgl. 18-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.965.810,38
123	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi) Pembuatan Jalan Paving Rt 07 Rw 04 Kelurahan Kasturian sesuai Kontrak No: 650/0088/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 20-09-2023 dan BAP No: 650/00312/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.061.228,00
124	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 100%) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Musholla Assalam RT 03 RW 04 di Kel. Tongole sesuai Kontrak No: 640/633/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 21-08-2023 ADD No: 640/661.a/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 30-08-2023 dan BAP No:	Utang Jangka Pendek Lainnya	192.989.841,00
125	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (retensi) Pekerjaan Pembuatan Drainase/Got RT 001-003 Kel. Toboleu sesuai Kontrak No: 614/298/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 05-07-2023 dan BAP No: 614/1064.C/DPUPR/KT/2023 TGL. 20-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.937.250,00
126	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + Retensi Pekerjaan Pembangunan Jalan Kelling Pulau Moti sesuai Kontrak No: 600/2863/DPUPR/KT/2023 TGL. 31-08-2023 dan BAP No: 600/4015A/BM/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 13-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	552.676.273,00
127	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pengadaan Penutup Saluran di Lingk. Kedaton Tidore Rt. 01 Rw. 01 Kel. Muhajirin sesuai Kontrak No: 614/598/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 25-08-2023 dan BAP No: 614/1057.a/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 18	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.966.350,00
128	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + Retensi Pekerjaan Pembangunan Jalan Menuju Puskesmas Kalumpang Kota Ternate sesuai Kontrak No: 600/3863A/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 01-12-2023 dan BAP No: 600/4190A/BA/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	199.367.507,66
129	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus 23 Pasang Sepatu Boot (Merek TOYOBO) sesuai Surat Pesanan NO: 600/2767/DPU-PR/Kota Tte/2023 TGL. 26-09-2023 dan Berita Acara Serah Terima Barang No: 600/2801A/DPUPR/KT/2023 TGL. 02-10-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.600.000,00
130	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Rt 008 Kel. Kayu Merah sesuai Kontrak No: 650/0065/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 25-08-2023 dan BAP No: 650/00256/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 04-12-20	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.964.152,82
131	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 100%) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan TPQ Rt 004, Rw 002 Kel. Makassar Timur sesuai Kontrak No: 640/277/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 14-04-2023 ADD No: 640/316/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 03-05-2023 dan BAP No:640/979B	Utang Jangka Pendek Lainnya	66.357.000,00
132	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + retensi Pekerjaan Pembuatan Paving Blok RT 03 dan RT 06 Kelurahan Moya sesuai Kontrak No: 650/0021/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 26-06-2023 dan BAP No: 650/00308/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 28-12-202	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.245.000,00

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
133	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Toboleu RT 14 RW 005 sesuai Kontrak No: 614/538/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 16-08-2023 dan BAP No: 614/1041/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 14-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.924.250,00
134	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + Retensi Pekerjaan Peningkatan Jalan Setapak ke Jalan Aspal Rt 08/Rw 04 Kelurahan Sango sesuai Kontrak No: 600/2798/DPUPR-KT/2023 TGL. 24-08-2023 dan BAP No: 600/4163/BM/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 22-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	62.188.204,00
135	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + Retensi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Loto sesuai Kontrak No: 600/2749/DPUPR-KT/2023 TGL. 18-08-2023 dan BAP No: 600/4219/BM/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	186.619.265,96
136	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) Pekerjaan Pembuatan Talud Penahan Tanah RT 11/RW 04 Lingkungan Jan Kel. Tabona Kec. Kota Ternate Selatan P=60 T=2 M sesuai Kontrak No: 650/0058/SPK/TR/DPUPR-KT/2023 TGL. 18-08-2023 ADD No: 650/00309/AD	Utang Jangka Pendek Lainnya	73.892.374,00
137	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) Pekerjaan Jalan Paving Block Kel. Jati Rt 10/Rw 005 Gang TPQ Laduna Lima Kel. Jati Kec. Kota Ternate Selatan sesuai Kontrak No: 650/0059/SPK/TR/DPUPR-KT/2023 TGL. 21-08-2023 ADD No: 650/00313/ADD-K/TR/	Utang Jangka Pendek Lainnya	60.295.478,00
138	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus 2 Unit Bracket TV Stand Dorong Roda TV, 2 Unit Infocus dan 2 Unit Speaker Active Sedang sesuai Surat Pesanan No: 600/2763A/DPU-PR/Kota Tte/2023 tgl. 26-09-2023 Dan Berita Acara Serah Terima Barang No: 600/2805A/D	Utang Jangka Pendek Lainnya	24.210.450,00
139	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Sekaligus (100%) Pekerjaan Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan Talud Penahan Ombak Beton Tetrapod Pelabuhan Hiri ke Sulamadaha sesuai Kontrak No: 650/0069/SPK/TR/DPUPR-KT/2023 TGL. 31-08-2023 dan BAP No: 650/002	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.234.000,00
140	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembuatan Menara Masjid Al-Qud Kel. Jati Perumnas sesuai Kontrak No: 640/362/BG/DPUPR-KT/2023 TGL. 24-05-2023 dan BAP No: 640/894/BG/DPUPR-KT/2023 TGL. 14-11-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.977.400,00
141	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 100%) Pekerjaan Normalisasi Saluran / Drainase Kel. Salero sesuai Kontrak No: 614/528/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 16-08-2023 ADD No: 614/892.a/ADDK/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 05-09-2023 dan BAP No: 614/991.a/CK	Utang Jangka Pendek Lainnya	89.490.150,00
142	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 100%) Pekerjaan Rehabilitasi Sedang Mushallah Nurul Iman Termasuk Pengecatan dan Rehab Tempat Wudhu Lingk. Koloncucu Pantai RW 01 Kel. Toboleu sesuai Kontrak No: 640/552/BG/DPUPR-KT/2023 TGL. 27-07-2023 A	Utang Jangka Pendek Lainnya	85.114.746,00
143	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (retensi) Pekerjaan Pembangunan Masjid Al-Ikhlis RT 02 RW 01 Kel. Jambula sesuai Kontrak No: 640/484/BG/DPUPR-KT/2023 TGL. 03-07-2023 dan BAP No: 640/1094/BG/DPUPR-KT/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	24.448.627,76
144	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) Pekerjaan Pembuatan Pemecah Ombak Rt 05 Kel. Tabam sesuai Kontrak No: 650/0082/SP/TR/DPUPR-KT/2023 TGL. 21-09-2023 ADD No: 650/00305/ADD-K/TR/DPUPR-KT/2023 TGL. 05-10-2023 dan BAP No: 650/00247/BA/TR/	Utang Jangka Pendek Lainnya	160.516.521,00
145	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi) Pembangunan Talud Penahan Tanah Kawasan Perkuburan Kel. Moti Kota sesuai Kontrak No: 650/0060/SPK/TR/DPUPR-KT/2023 TGL. 18-08-2023 dan BAP No: 650/00305/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.925.630,00
146	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung MC 01 + Retensi Pekerjaan Rehab Bangunan Falasoa Kel. Dorariisa Kec. Pulau Hiri sesuai Kontrak No: 600/4053/DPUPR-KT/2023 TGL. 15-12-2023 dan BAP No: 600/4177/DPUPR-KT/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	149.512.991,49
147	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I + Retensi Pekerjaan Pembangunan Saluran Sekunder + Deker Beton RT 13 Kel. Kalumata sesuai Kontrak No: 614/801/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 03-10-2023 ADD No: 614/874.A/ADD-K/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 18-10-2023 dan BAP No: 6	Utang Jangka Pendek Lainnya	84.747.163,69
148	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tanah Ke Aspal Ruas Jl. Stasiun Pantai Sabia (Madrasah) sesuai Kontrak No: 600/2743/DPUPR-KT/2023 TGL. 18-08-2023 ADD No: 620/403/ADD/BM/DPUPR-KT/2023 TGL. 14-09-2023 dan BA	Utang Jangka Pendek Lainnya	226.939.676,00
149	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Sekaligus (100%) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan (Dalam Kota Ternate) sesuai Kontrak No: 650/0087/SPK/TR/DPUPR-KT/2023 TGL. 15-09-2023 dan BAP No: 650/00292/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 18-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.135.210,00
150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke II (100%) + Retensi Pekerjaan Pembuatan Jembatan RT 013 Kelurahan Kalumata sesuai Kontrak No: 600/2439/DPUPR-KT/2023 TGL. 25-07-2023 ADD No: 630/572/ADD/BM/DPUPR-KT/2023 TGL. 25-09-2023 dan BAP No: 600/4140/BM/	Utang Jangka Pendek Lainnya	146.049.008,00
151	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Sekaligus (100%) Pekerjaan Pengawasan Teknis Talud Penahan Ombak Pulau Ternate sesuai Kontrak No: 650/0050/SPK/TR/DPUPR-KT/2023 TGL. 11-08-2023 dan BAP No: 650/00290/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 18-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	78.985.380,00
152	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 100%) Pekerjaan Pembuatan Saluran Air (Drainase) RT 15 RW 06 di Kel. Kalumata sesuai Kontrak No: 614/763/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 22-09-2023 ADD No: 614/827.A/ADD-K/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 06-10-2023 dan BAP N	Utang Jangka Pendek Lainnya	85.137.010,99
153	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan TPQ/Rumah Ibadah sesuai Kontrak No: 640/716/BG/DPUPR-KT/2023 TGL. 18-09-2023 dan BAP No: 640/1074/BG/DPUPR-KT/2023 TGL. 21-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	98.287.170,00
154	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) Pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak Rt 03 Kelurahan Tanah Tinggi sesuai Kontrak No: 600/2826A/DPUPR-KT-TTE/2023 TGL. 28-08-2023 ADD No: 600/2586/DPUPR-KT/2023 TGL. 13-09-2023 dan BAP No: 600/3678/BA/DPUP	Utang Jangka Pendek Lainnya	78.503.200,65
155	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 100%) Pekerjaan Pembangunan TPQ di Kel. BTN sesuai Kontrak No: 640/684/BG/DPUPR-KT/2023 TGL. 07-09-2023 ADD No: 640/733/BG/DPUPR-KT/2023 TGL. 22-09-2023 dan BAP No: 640/983.a/BG/DPUPR-KT/2023 TGL. 05-12-	Utang Jangka Pendek Lainnya	177.098.167,00

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
156	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin II (Progres 100%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Tempat Parkir Fakultas Hukum Unkhair Ternate sesuai Kontrak No: 640/469/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 26-06-2023 ADD No: 640/904/ADD-K/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 17	Utang Jangka Pendek Lainnya	351.167.440,00
157	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PEMBAYARAN LANGSUNG ANGSURAN TERAKHIR (RETENSI 5%) PEKERJAAN REHABILITASI/PERBAIKAN JALAN SETAPAK DI LINGK. RT.016 RW.06 KEL. TOBOLEU (P=91M, L=40CM, P=40,60CM, L=40CM, DAN P=43,60CM, L=40CM) SESUAI KONTRAK NO: 650/0044/SPK/TR/DPUPR/KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.036.186,00
158	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung termin I + retensi pekerjaan pembuatan saluran air di RT 09 kel. moya sesuai kontrak No: 614/671/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 07-09-2023 ADD No: 614/756A/ADD-K/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 22-09-2023 dan BAP No: 614/1064F/CK	Utang Jangka Pendek Lainnya	59.500.000,00
159	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin II + RETENSI atas Pekerjaan : Pembangunan Kantor Pengelola Rusunawa Kejaksanaan sesuai Kontrak No. 640/523/BG/DPUPR/KT/2023, Tgl. 17-07-2023, ADD Kontrak No. 640/577.a/BG/DPUPR/KT/2023, Tgl. 04-08-2023 dan BAP No	Utang Jangka Pendek Lainnya	574.421.114,00
160	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Sekaligus (100%) Pekerjaan Pengawasan Teknis Talud Penahan Ombak Pulau Hiri sesuai Kontrak No: 650/0049/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 11-08-2023 dan BAP No: 650/00289/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 18-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.192.930,00
161	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus Pekerjaan Pengawasan Teknis SPAM sesuai Kontrak No: 690/823/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 06-10-2023 dan BAP No: 690/1096/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	98.230.560,00
162	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 100%) Pekerjaan Pembangunan Saluran Air di RT 08 RW 04 Kel. Moya sesuai Kontrak No: 614/407/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 27-07-2023 ADD No: 614/516.a/ADD-K/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 10-08-2023 dan BAP No: 614/965/CK/	Utang Jangka Pendek Lainnya	89.482.500,00
163	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembuatan Drainase RT 011 Kelurahan Kayu Merah sesuai Kontrak No: 614/546/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 18-08-2023 dan BAP No: 614/1028A/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 11-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.900.000,00
164	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus (100%) Pekerjaan Pengadaan Meubelair Dinas PUPR sesuai Kontrak No: 600/1540/DPUPR/KT/2023 TGL. 11-05-2023 dan BAP No: 600/2572/BA/DPUPR-KT-TTE/2023 TGL. 12-09-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	196.520.000,00
165	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Hotmix Kel. Jambula sesuai Kontrak No: 600/2502/DPUPR/KT/2023 TGL. 04-09-2023 dan BAP No: 600/3853/BM/DPUPR/Kota Tte/2023 tgl. 30-11-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	280.457.298,37
166	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Ombak Kel. Lelewi sesuai Kontrak No: 650/0073/SP/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 11-09-2023 dan BAP No: 650/00276/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 15-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	180.564.715,00
167	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I + Retensi Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder dan Pembuatan Bak Kolakan Air Lingkungan Ngade Sone RW 03 Kel. Toboleu sesuai Kontrak No: 614/587/CKDPUPR-KT/2023 TGL. 24-08-2023 ADD NO: 614/692.a/ADD-K/CK/DPUPR	Utang Jangka Pendek Lainnya	49.183.500,00
168	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Penambahan Tinggi Talud Penahan Ombak RT 004 Kel. Togolobe sesuai Kontrak: 650/0071/SP/DPUPR/KT/2023 TGL. 11-09-2023 dan BAP No: 650/00302/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.819.912,00
169	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Rehab Jalan Paving Akibat Bencana Air Pasang Rt 10 Rw 04 Kelurahan Sangaji sesuai Kontrak No: 650/0047/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 15-08-2023 dan BAP No: 650/00258/BA/TR/DPUPR/Kota T	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.974.037,00
170	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung MC 01 + Retensi Pekerjaan Rehabilitasi Saluran RT 09 Kel. Akehuda sesuai Kontrak No: 600/3901/DPUPR-KT/2023 TGL. 05-12-2023 dan BAP No: 600/4185/DPUPR-KT/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.152.931,26
171	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung termin terakhir (retensi) pekerjaan lanjutan pembuatan saluran air sekunder r 11/rw 04 lingkungan jan kel. tabona kec. kota ternate selatan sesuai kontrak No: 614/603/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 25-08-2023 dan BAP No: 614/1033H	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.460.811,60
172	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Perbaikan Saluran Air Kel. Gamalama sesuai Kontrak No: 614/424/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 28-07-2023 dan BAP No: 614/995/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 05-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.935.000,00
173	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin II + Retensi Pekerjaan Pembangunan Pagar Rusunawa Kejaksanaan sesuai Kontrak No: 640/653/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 28-08-2023 ADD No: 640/458/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 11-09-2023 dan BAP No: 640/1087/BG/DPUPR/KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	420.222.384,43
174	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Lanjutan II Pembangunan Masjid Sabili Mutathahirin Rt 10 Kel. Maliaro sesuai Kontrak No: 640/212/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 30-03-2023 dan BAP No: 640/912/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 20-11-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.939.250,00
175	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus Pekerjaan Pegawai Teknik Rehabilitasi Saluran sesuai Kontrak No: 614/719/DPUPR-KT-TTE/2023 TGL. 14-09-2023 dan BAP No: 614/1091/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.150.750,00
176	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + Retensi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pesantren Hidayatullah Kalumata sesuai Kontrak No: 600/2801/DPUPR/KT/2023 TGL. 02-10-2023 ADD No: 620/520/ADD/BM/DPUPR/KT/2023 TGL. 17-10-2023 dan BAP No: 600/415	Utang Jangka Pendek Lainnya	333.459.340,00
177	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 100%) Pekerjaan Pembangunan Saluran Depan SMAN 2 Kota Ternate (RT 015) Kel. Ubo-ubo sesuai Kontrak No: 614/789/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 27-09-2023 ADD No: 614/831.a/ADD-K/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 09-10-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	70.350.551,21
178	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I + Retensi Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Penunjang Kedaton Kesultanan Ternate sesuai Kontrak No: 640/525/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 17-07-2023 ADD No: 640/570.a/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 01-08-2023 dan BAP No: 640/1093.B	Utang Jangka Pendek Lainnya	182.398.792,00
179	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Rehab Drainase Kelurahan Kayu Merah sesuai Kontrak No: 614/292/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 05-07-2023 dan BAP No: 614/1033.d/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 12-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.941.000,00

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
180	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Sekaligus (100%) Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan (Dalam Kota Ternate) sesuai Kontrak No: 600/2606/DPUPR/KT/2023 TGL. 15-09-2023 dan BAP No: 600/4027/BM/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 13-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	58.386.000,00
181	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (RETENSI) Pekerjaan Pembuatan Penutup Saluran dari Plat Beton Bertulang Tebal 8 cm Lebar 80 cm di Lingk. Ngade Sone RW 03 Kel. Toboleu sesuai Kontrak No: 614/410/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 27-07-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.328.800,00
182	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + Retensi Pekerjaan Pembuatan Jalan Paving Blok RT 04 dan RW 06 Menuju Kuburan Kel. Moya sesuai Kontrak No: 650/0077/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 11-09-2023 dan BAP No: 650/00299/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	129.463.409,52
183	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Sekaligus (100%) Pekerjaan Pengawasan Teknis Bangunan Perkuatan Tebing sesuai kontrak No: 650/0048/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 11-08-2023 dan BAP No: 650/00287/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 18-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.081.930,00
184	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + Retensi Pekerjaan Pembuatan Jalan Lapen Ke Hotmix Menuju Perkuburan di RT 08 RW 04 Kelurahan Gambesi sesuai Kontrak No: 600/3815/DPUPR/KT/2023 TGL. 29-11-2023 ADD No: 620/764/ADD/DPUPR/KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	198.336.988,92
185	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung termin terakhir (retensi) pekerjaan pembuatan saluran air/got volume kel. tanah tinggi (dari tikungan todingan depan rumah maryam) sesuai kontrak No: 614/304/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 06-07-2023 dan BAP No: 614/1099/CK/DPUPR/K	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.282.850,00
186	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 100%) Pekerjaan Pembuatan Drainase Termasuk Penutup Plat Beton Drainase yang Berfungsi sebagai Jalan Lingk. RT 007 RW 01 Kel. Bastiong Karance sesuai Kontrak No: 614/543/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 18-08-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	66.919.950,00
187	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung MC 01 + Retensi Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Kel. Santiong sesuai Kontrak No: 600/3994/DPUPR-KT/2023 TGL. 12-12-2023 dan BAP No:600/4183/DPUPR-KT/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	98.353.332,33
188	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi) Pek. Rehab./ Pembuatan Jembatan P = 10 m, L =1,2 m RT. 006, RW. 03 Kel. Toboleu, dan Rehabilitasi/Pembuatan Jalan Setapak beton ke paving blok kualitas baik di Lingk. RT. 006, RW. 03 Kel. Toboleu	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.960.143,00
189	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Perbaikan Drainase Kawasan Temate Utara sesuai Kontrak No: 614/593/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 25-08-2023 dan BAP No: 614/1034/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 12-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	33.949.999,99
190	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak (Paving Blok) Rt 2 Kel. Tanah Tinggi Barat sesuai Kontrak No: 650/0067/SPK/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 31-08-2023 dan BAP No: 650/00124/BA/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL.	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.718.276,80
191	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Pagar Keliling IPLT Buku Deru-deru sesuai Kontrak No: 600/2711/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 15-08-2023 dan BAP No: 600/4069A/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 18-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.960.852,70
192	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung termin terakhir (retensi) pekerjaan pembangunan saluran air/drainase rt 09 kel. foramadiahi sesuai kontrak No: 614/674/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 07-09-2023 dan BAP No: 614/1032F/CK/DPUPR/KT/2023 TGL. 12-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.973.239,39
193	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Ke I (100%) + Retensi Pekerjaan Pembuatan Setapak Rt 03 Rw 02 Kel. Marikuru sesuai Kontrak No: 600/1971a/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 13-06-2023 dan BAP No: 600/4223/BA/DPUPR/KT-TTE/2023 TGL. 28-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	37.278.500,00
194	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi) Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Ombak Dermaga Tanjung Pura Kel. Takofi sesuai Kontrak No: 650/0036/SP/TR/DPUPR/KT/2023 TGL. 31-07-2023 dan BAP No: 650/00273/BA/TR/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 15	Utang Jangka Pendek Lainnya	12.091.001,00
195	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 100%) Pekerjaan Pengadaan Penutup Saluran di Lingk. Kadaton Tidore RT 01 RW 01 Kel. Muhajirin sesuai Kontrak No: 614/598/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 25-08-2023 ADD No: 614/688.A/ADD-K/CK/DPUPR-KT/2023 TGL.08-09	Utang Jangka Pendek Lainnya	44.697.152,00
196	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Rt 08 Kel. Maliaro sesuai Kontrak No: 600/2443/DPUPR/KT/2023 TGL. 25-07-2023 dan BAP No: 600/4056/BM/DPUPR/Kota Tte/2023 TGL. 15-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.907.629,64
197	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung termin I (Progres 100%) Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Penutup Saluran Air RT 006 dan RT 010 Kel. Mangga Dua Utara sesuai Kontrak No: 614/760/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 22-09-2023 ADD No: 614/892.a/ADD-K/CK/DPUPR-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	44.670.904,76
198	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pembayaran langsung termin I + retensi pekerjaan pembangunan saluran sekunder rt 01 rw 01 kel. tarau sesuai kontrak No: 600/3862/DPUPR-KT/2023 TGL. 01-12-2023 dan BAP No: 600/4201/DPUPR-KT/2023 TGL. 27-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	87.119.970,15
199	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I (Progres 100%) Pekerjaan Pembangunan Masjid Al-Ikhlas RT 02 RW 01 Kel. Jambula sesuai Kontrak No: 640/484/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 03-07-2023 ADD No: 640/540.C/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 25-07-2023 dan BAP No: 640/976.A/	Utang Jangka Pendek Lainnya	317.832.168,00
200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin I + Retensi Pekerjaan Pembuatan Saluran Air RT 13 Menuju RT 01 Kel. Tabona sesuai Kontrak No: 614/666/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 07-09-2023 ADD No: 614/743/ADD-K/CK/DPUPR-KT/2023 TGL. 20-09-2023 dan BAP No: 614/1071.B/CK	Utang Jangka Pendek Lainnya	303.800.257,25
201	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Termin Terakhir (Retensi) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Musholla Assalam RT 03 RW 04 di Kel. Tongole sesuai Kontrak No: 640/633/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 21-08-2023 dan BAP No: 640/1067.A/BG/DPUPR/KT/2023 TGL. 21-12-2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.845.372,00
202	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Jalan paving blok kel. Jati RT.10/RW.005 Gang TPQ Laduna Lima Kel. Jati	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.699.497,95
203	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembuatan Jalan Paving RT.001 RW.001 Kel. Tarau	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.214.300,00
204	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Peningkatan jalan tanah ke lapen kel. Tongole dan Kel. Maliaro RT.06	Utang Jangka Pendek Lainnya	19.052.956,00
205	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Toafo	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.914.033,00
206	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembuatan sarana jalur evakuasi (jalan aspal) RT.01, 02/RW. 01 Kel. Dufa-dufa	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.893.500,00
207	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan jalan hotmix kel. Jambula	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.760.910,00

No	Nama SKPD	Uraian	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
208	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembuatan jalan tanah ke aspal rua Jl. Stasiun Pantai Sabia (Madrasah)	Utang Jangka Pendek Lainnya	17.456.898,00
209	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Rt.11/Rw.04 Lingkungan Jan Kel. Tabona Kec. Kota Ternate Selatan P=60, T=2M	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.210.263,30
210	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Ombak Kel. Lelewi	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.889.593,00
211	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembuatan Deker RT.007 RW.004 Kel. Soa sio	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.945.550,00
212	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembuatan Drainase termasuk penutup plat beton drainase yang berfungsi sebagai jalan ling. RT.007 RW. 01 Kel. Bastiong Karcane	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.435.550,00
213	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Saluran Air di RT.08 RW.04 Kel. Moya	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.942.500,00
214	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Rehab saluran sekunder RT.03/RW.01 Kel. Salero	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.850.000,00
215	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Rehab saluran air Jalan A.M Kamarudin RT.04 RW.03 Kel. Kasturian	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.880.500,00
216	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan saluran depan SMAN 2 Kota Ternate (RT.015) Kel. Ubo-Ubo	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.702.660,59
217	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembuatan jalan setapak RT.03 Kel. Tanah Tinggi	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.131.747,00
218	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pemasangan Paving Blok di RT. 1,5,6,7 Kel. Jambula	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.245.426,80
219	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Gedung perpustakaan dan tempat parkir Fakultas Hukum Unkhair Ternate	Utang Jangka Pendek Lainnya	67.532.200,00
220	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Rehab sedang Musholla Nurul Iman termasuk pengecatan dan Rehab Tempat wudhu Ling. Koloncucu Pantai RW.01 Kel. Toboleu	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.457.194,00
221	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan TPQ RAUSAN FIQIR di RT.012 RW.05 Kel. Sasa (Sasa Belakang)	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.950.586,00
222	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembangunan Rumas Dinas dan MES Pegawai Kejkasaan 2	Utang Jangka Pendek Lainnya	290.219.420,63
223	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembayaran Langsung Angsuran Terakhir (Retensi 5%) Pekerjaan Pembanguna TPQ Kel. BTN	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.622.936,00
<b>JUMLAH</b>				<b>21.626.832.371,73</b>
1	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil Lainnya atas Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota untuk Lokasi Lahan Kantor Lurah Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah sesuai BAP Nomor : 593.83/516/B	Utang Jangka Pendek Lainnya	374.000.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran 100% Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya #Penerangan Jalan atas Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Pemukiman Kumuh sesuai SURAT PERJANJIAN Nomor : 653/010/SP/TENDER/P	Utang Jangka Pendek Lainnya	667.498.500,00
3	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanian	Pembayaran Belanja Modal Tanah Persil Lainnya atas Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota untuk Lokasi Lahan Kantor Camat Pulau Ternate di Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate Tahap I	Utang Jangka Pendek Lainnya	180.000.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>1.221.498.500,00</b>
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembayaran Angsuran Terakhir 100% Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor (UPTD)/Sekretariat PUSPAGA & Forum Anak. sesuai SPK No : 027/SPK/184/DPPPA-KT/VIII/2023 Tanggal, 24 Agustus 2023 dan BAP No : 027/271/BAP-AT/DPPPA-KT/XII/2023. tanggal, 14 Des 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	205.800.279,92
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Gedung Kantor (UPTD)/Sekretariat Puspaga dan Forum Anak. Sesuai SPK No. 700/240/SPK/DPPPA-KT/X/2023. tanggal 09 Okto 2023. & BAP No. 027/270/BAP/DPPPA-KT/XII/2023. tanggal 14 Des 2023.	Utang Jangka Pendek Lainnya	49.515.990,00
<b>JUMLAH</b>				<b>255.316.269,92</b>
1	Dinas Lingkungan Hidup	Pembayaran Retensi 5% Atas Pekerjaan Ornamen City Branding Kota (Belanja Modal Bangunan Gedung dan Gedung Kantor) sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) No:027/194/RTH/DLH-KT/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan BAP No: 981/154/RTH/DLH-KT/2023 tanggal 15 Dese	Utang Jangka Pendek Lainnya	23.681.572,50
2	Dinas Lingkungan Hidup	Pembayaran Retensi 5% Atas Pekerjaan Belanja Penataan Pantai Falajawa 1 (satu) paket (Bij Modal Bangunan Gedung Kantor) sesuai Surat perintah Kerja (SPK) Nomor:027/196/RTH/DLH-KT/2023 tgl 24 Agustus 2023 dan BAP Nomor: 981/138/RTH/DLH-KT/2023 tgl 13	Utang Jangka Pendek Lainnya	114.479.712,02
3	Dinas Lingkungan Hidup	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Belanja Penataan Pantai Falajawa (Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor) sesuai Surat Perjanjian (Kontak) No:027/186/RTH/DLH-KT/2023 dan BAP No:981/123/RTH/DLH-KT/2023 tanggal 6 Desember 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	572.398.560,11
<b>JUMLAH</b>				<b>710.559.844,63</b>
1	Dinas Perhubungan	Pembayaran Langsung Sekaligus 100% Pengadaan Lampu Jalan Sesuai Surat Pesanan Nomor : 550/1036/Dishub-KT/2023, Tanggal 20 November 2023 Dan BAP Nomor : 551/327/BAP/DISHUB-KT/2023 Tanggal 11 Desember 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	165.000.000,00
2	Dinas Perhubungan	Pembayaran Langsung Sekaligus 100% Rehabilitasi Ruang Tunggu Pelabuhan Al-Munawar Sesuai SPK Nomor : 027/Dishub.KT/SPK/PB.25/X/2023, Tanggal 23 Oktober 2023 Dan BAP Nomor : 550/326/BAP/DISHUB-KT/2023 Tanggal 11 Desember 2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	59.694.500,00
<b>JUMLAH</b>				<b>224.694.500,00</b>
1	Dinas Pariwisata	Belanja Modal 100% Pembangunan Gazebo Faudu Kecamatan Hiri Sesuai Kontrak No.15/SPK/PMB.GZB.FAUDU/DISPAR-KT/2023 dan BAP No. 556/279/BAP.PMB.GZB.HIRI/DISPAR-KT/2023 pada Kegiatan Pengebangan Daya Tarik Wisata	Utang Jangka Pendek Lainnya	99.864.984,00
2	Dinas Pariwisata	Belanja Modal 100% Pembuatan Tandon Air dan Pemasangan Jaringan Air Kampung Tua Foramadiahi pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategi Kawasan Sesuai No. 09/SPK/PEMB.TAJ-FORA/DISPAR-KT/2023 dan BAP 556/259/BAP.PMB.TAJ-FORA/DISPAR-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	29.882.493,00
3	Dinas Pariwisata	Belanja Modal Pembangunan Gazebo Batu Angus Pantai Kulaba Sesuai Kontrak No. 02/SP/TENDER/PMB.GZB-BAPK/DISPAR-KT/2023 dan BAP No. 556/289/BAP.PMB.GZB-BAPK/DISPAR-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	91.103.477,00
4	Dinas Pariwisata	Belanja Modal 100% Pengawasan Batu Angus pada Kegiatan Pengebangan Daya Tarik Wisata Sesuai Kontrak No. 01.PWS/SPK/PENG-BATU.ANGUS/DISPAR-KT/2023 dan BAP No. 556/314/BAP.WAS-BATU.ANGUS/DISPAR-KT/2023	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.778.000,00